

TEORI AKUNTANSI



Hamonangan Siallagan, SE., M.Si

Lahir di Ambarita tahun 1979 adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen (FE-UHN) Program Studi Akuntansi (2002 s.d. sekarang). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen tahun 2000.

Pada tahun 2006 menyelesaikan Studi Pendidikan Strata 2 Program Magister Sains (M.Si) Ilmu Akuntansi pada sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2007 - 2009 menjabat sekretaris kelas Eksekutif Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Menjabat Sekretaris Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Tahun 2008-2011. Pada Tahun 2011 - 2013 menjabat pelaksana Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Tahun 2019 s/d sekarang menjabat pelaksana Ketua Penjamin Mutu Universitas HKBP Nommensen.



EDISI PERTAMA

TEORI AKUNTANSI

TEORI AKUNTANSI

EDISI PERTAMA



Hamonangan Siallagan, SE., M.Si



Diterbitkan Oleh :

LPPM UHN Press

Gedung Rektorat Universitas HKBP Nommensen

Jl. Sutomo No. 4-A Medan 20234
Sumatera Utara - Indonesia

TEORI AKUNTANSI

EDISI PERTAMA

Hamonangan Siallagan, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dan dipersiapkan sebagai materi perkuliahan dalam pembelajaran dalam mata kuliah Teori Akuntansi pada program studi akuntansi jenjang strata satu (S-1). Secara khusus, buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan dan Bagi Para Praktisi Akuntansi di berberbagai bidang.

Penyusunan buku ini terutama didasarkan atas pertimbangan bahwa pembahasan dalam buku-buku teori akuntansi yang ada saat ini terutama difokuskan pada teori akuntansi tertentu sesuai dengan aliran pemikiran dari penulis buku. Hal ini dapat dipahami memperhatikan bahwa pengembangan teori akuntansi terutama disusun berdasarkan fungsi teori yang diyakini para penulis, dan lebih lanjut sampai saat ini masih terdapat kontroversi tentang teori dan cakupan matakuliah teori akuntansi di antara para pakar.

Buku ini menyajikan diskusi yang seimbang dari teori-teori akuntansi keuangan yang ada. Diskusi yang seimbang di antara aliran pemikiran teori akuntansi diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada mahasiswa dan Praktisi sehingga mereka dapat memahami latar belakang dan tujuan dari masing-masing teori akuntansi yang ada.

Buku ini membahas perkembangan teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Pada teori akuntansi normatif pembahasan meliputi regulasi akuntansi keuangan, pendekatan yang dikembangkan untuk akuntansi perubahan harga, kerangka konseptual pelaporan keuangan, konsep tentang elemen laporan keuangan. Pembahasan pada teori akuntansi positif meliputi agensi teori, efisiensi pasar modal, dan manajemen laba. Juga dibahas isu-isu pelaporan keuangan dengan mengintegrasikan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam pelaporan keuangan.

Berbagai pihak berkontribusi dalam penyusunan dan penulisan buku ini. Pada kesempatan ini kami menghaturkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Program Studi Akuntansi, dan kepada Bapak/Ibu dosen serta Mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini, dan oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dengan keberadaan buku ini, mahasiswa dapat terbantu dalam mengikuti kuliah teori akuntansi, dan memberikan sumbangan terhadap literatur teori akuntansi yang ada. Sedangkan bagi para praktisi, dengan adanya buku ini dapat menambah teori dalam menerapkan dan memperlakukan praktik-praktik akuntansi.

Medan, Juni 2020

Penulis,

Hamonangan Siallagan, SE., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB 1 PENGENALAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN	1
1. BERBAGAI PANDANGAN TERHADAP AKUNTANSI	2
2. PENGERTIAN TEORI	9
3. TEORI DAN PRAKTIK AKUNTANSI.....	12
4. METODE PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI.....	20
5. KLASIFIKASI TEORI AKUNTANSI	30
6. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PENELITIAN AKUNTANSI DENGAN PENGAJARAN, DAN PRAKTIK AKUNTANSI.....	39
7. AKUNTANSI DENGAN ILMU MULTI PARADIGMA.....	43

BAB 2 LINGKUNGAN PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN SRANDAR AKUNTANSI	47
1. SEJARAH AKUNTANSI	48
2. PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM DAN STANDAR AKUNTANSI.....	66
3. PENDEKATAN PENENTUAN STANDAR AKUNTANSI.....	70
4. PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI AMERIKA.....	81
5. PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA	84

BAB 3 TEORI AKUNTANSI NORMATIF: AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA.....	91
1. AKUNTANSI <i>COST</i> HISTORIS	92
2. KONSEP LABA EKONOMIS	95
3. KONSEP PEMELIHARAAN MODAL	96
4. AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN HARGA	99

BAB 4 TEORI AKUNTANSI NORMATIF:	
KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN	107
1. PEGERTIAN.....	108
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN KERANGKA KONSEPTUAL	111
3. PERUMUSAN KERANGKA KONSEPTUAL	112
4. KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA	133
BAB 5 AKUNTANSI INTERNASIONAL DAN DAMPAK PERBEDAAN KULTUR DAN UPAYA HARMONISASI	143
1. PEGERTIAN AKUNTANSI INTERNASIONAL	144
2. FAKTOR PENDORONG AKUNTANSI INTERNASIONAL.....	145
3. PERBEDAAN PRAKTIK AKUNTANSI DI BERBAGAI NEGARA.....	147
4. USAHA PENYERAGAMAN (HARMONISASI).....	149
5. HAMBATAN PENYERAGAMAN (HARMONISASI).....	153
BAB 6 AKTIVA	157
1. PEGERTIAN, KARAKTERISTIK, DAN KLASIFIKASI AKTIVA	158
2. PENGUKURAN AKTIVA.....	164
3. PENGAKUAN AKTIVA.....	172
4. MASALAH KHUSUS	174
BAB 7 KONSEP HUTANG (KEWAJIBAN) DAN EKUITAS	177
1. PEGERTIAN HUTANG	178
2. KARAKTERISTIK HUTANG	180
3. KLASIFIKASI HUTANG.....	182
4. HUTANG KONTIGENSI (<i>CONTINGENCY LIABILITIES</i>).....	185
5. KONSEP EKUITAS.....	187
BAB 8 PENDAPATAN (<i>REVENUE</i>).....	195
1. PEGERTIAN PENDAPATAN.....	196
2. PEMBENTUKAN DAN REALISASI PENDAPATAN	203
3. PENGAKUAN PENDAPATAN.....	204

BAB 9 BIAYA (COST).....	213
1. PEGERTIAN DAN KLASIFIKASI BIAYA	214
2. PRINSIP BIAYA.....	219
3. PENGUKURAN DAN PENGAKUAN BIAYA	220
4. KONSEP PENANDINGAN BIAYA.....	222
5. LOSSES.....	224
6. DEPRESIASI DAN AMORTISASI.....	225
BAB 10 KONSEP LABA	227
1. PEGERTIAN, TUJUAN, DAN KARAKTERISTIK LABA.....	228
2. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN LABA AKUNTANSI.....	233
3. PENGUKURAN DAN PENGAKUAN LABA	238
4. ELEMEN LABA.....	243
5. KONSEP LABA.....	246
BAB 11 TEORI AKUNTANSI POSITIF	247
1. PENGERTIAN	248
2. PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI POSITIF.....	251
3. TEORI KEAGENAN	254
BAB 12 REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN (EFISIENSI PASAR)	259
1. TINJAUAN RISET PASAR MODAL	259
2. KANDUNGAN INFORMASI LABA.....	263
3. EFISIENSI PASAR.....	264
4. ALASAN PASAR YANG EFISIEN DAN YANG TIDAK EFISIEN	268
BAB 13 MANAJEMEN LABA (EARNINGS MANAGEMENT)	271
1. PENGERTIAN MANAJEMEN LABA	272
2. PELUANG DAN TEKNIK MANAJEMEN LABA	273
3. PEMICU MANAJEMEN LABA	275
4. DAMPAK MANAJEMEN LABA TERHADAP ALOKASI SUMBER DAYA	279
5. TANGGUNG JAWAB MANAJER, AUDITOR, DAN REGULATOR TERHADAP MANAJEMEN LABA	281
6. CARA MELAKUKAN MANAJEMEN LABA	283

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGENALAN TEORI

AKUNTANSI KEUANGAN

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Berbagai Pandangan Terhadap Akuntansi**
- 2) Apa yang dimaksud dengan teori**
- 3) Teori dan Praktik Akuntansi**
- 4) Metode Perumusan Teori Akuntansi**
- 5) Klasifikasi Teori Akuntansi**
 - a) Berdasarkan Penalaran**
 - b) Berdasarkan Tujuan**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- 1) Memahami berbagai pandangan tentang akuntansi**
 - 2) Menjelaskan pengertian teori**
 - 3) Menjelaskan metode perumusan teori akuntansi**
 - 4) Memahami klasifikasi teori akuntansi berdasarkan penalaran**
- Memahami klasifikasi teori akuntansi berdasarkan tujuan**

1. BERBAGAI PANDANGAN TERHADAP AKUNTANSI

Seperti halnya sejarah perkembangan akuntansi, tampaknya pengertian akuntansi juga mengalami evolusi. Pengertian akuntansi berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, atau antara satu literatur dengan literatur lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pendekatan yang digunakan berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa akuntansi adalah seni, ada juga yang berpendapat bahwa akuntansi sebagai bahasa bisnis, ada lagi yang berpendapat akuntansi sebagai catatan historis. Ada pula berpendapat bahwa akuntansi sebagai ilmu, akuntansi sebagai informasi yang dikomunikasikan sebagai bahan pengambil keputusan, akuntansi sebagai benda ekonomi dan seterusnya (Godrey et al, 1994). Banyaknya pengertian mengenai akuntansi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang yang berbeda akuntansi mempunyai pengertian yang berbeda pula.

Akuntansi yang kita pelajari sampai dengan saat ini, diklasifikasikan sebagai bagian dari ilmu sosial. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, apakah sebenarnya ilmu tersebut, ada berapa klasifikasi ilmu, apakah akuntansi cocok dikatakan sebagai ilmu dalam artian ilmu pengetahuan murni, tetapi mengapa pula disebut dengan sebutan teori akuntansi. Sebelum kita membahas apa itu ilmu, terlebih dahulu kita menelaah beberapa defenisi dari akuntansi. Untuk menambah wawasan mengenai pengertian akuntansi berikut ini diberikan beberapap defenisi akuntansi dari beberapa literatur dan penulis.

Accounting Principle Board (APB) dalam statement No. 4 menyatakan, Akuntansi adalah sebuah **kegiatan jasa** (*service activity*) yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial tentang entitas bisnis yang dianggap berguna dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis di antara tindakan-tindakan alternatif.

1. Menurut Committee on Terminology dari AICPA

Pada tahun 1941 AICPA melalui komite di atas mendefinisikan akuntansi sebagai seni, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan dalam suatu cara yang signifikan dan dalam ukuran uang, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan, dan penginterpretasian hasil-hasilnya” (Accounting Terminology Bulletin No. 1, AICPA, 1953, par.9).

Dalam definisi tersebut, dimulai bahwa akuntansi sebagai seni. Definisi seperti ini mungkin karena pada waktu itu akuntansi belum dapat diidentifikasi sebagai seni karena pada waktu itu karakteristik pengetahuan ilmiah (Suwarjono, 1992). Apa yang dikerjakan dalam akuntansi bersifat sangat individual sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga tidak ada struktur dan konsep yang cukup mapan untuk dapat disebut sebagai seperangkat ilmu pengetahuan. Unsur seni dalam definisi tersebut sebenarnya seni sebagai *counterpart* ilmu pengetahuan (*science*). Seni diidentifikasi dengan unsur judgement yang banyak mewarnai bidang praktik akuntansi. Unsur judgement atau pertimbangan juga mewarnai praktik dalam bidang pekerjaan lain. Dengan demikian kata seni pada awal definisi di atas tidak berarti bahwa produk akuntansi sama dengan produk seni. Produk akuntansi adalah informasi akuntansi yang sebagian besar bersifat keuangan yang sama sekali tidak mengutamakan estetika (keindahan). Sedangkan produk seni adalah benda seni atau sesuatu yang lain yang mengutamakan estetika.

Definisi yang sejalan dengan definisi AICPA di atas adalah definisi dari Pyle dan White sebagaimana dikutip dalam Bambang Sudibyo (1987, h.36) sebagai berikut:

“Accounting is the art of recording and of summarizing business transactions and interpreting their effects on affairs and activities of an economic unit.”

2. Menurut Paul Grady

Paul Grady mendefenisikan akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is the body of knowledge and functions concerned with systematic originating, authenticating recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant information covering transactions and events which are, in operation of an entity and for reports that have to be submitted there on to meet fiduciary and other responsibilities.” (1965, p.2)

Defenisi menurut Paul Grady di atas dikategorikan dalam defenisi akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) yang fungsi utamanya ditunjukkan secara tegas yaitu menghasilkan informasi terutama yang bersifat keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan suatu kesatuan usaha. Pada waktu itu akuntansi dapat disebut *body of knowlwdge* karena sudah terdapat adanya struktur dan konsep-konsep yang membentuk akuntansi. Akuntansi merupakan suatu *body of knowledge* serta fungsi organisasi yang sistematis, orisinal, datau autentik, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi dalam rangka menyediakan informasi yang berarti yang dibutuhkan oleh manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya.

Defenisi lain yang mengemukakan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan (*science*) dikemukakan oleh Brian Maggee (1971, h.3) seperti berikut:

“Accounting is sciece of recording and interpreting financial transaction.”

3. Menurut American Accounting Association (AAA)

AAA mengemukakan definisi akuntansi sebagai “Proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar dapat memberikan bahan pertimbangan yang relevan bagi para pengambil keputusan.” (AAA, 1996, p.1)

Defenisi menurut AAA tersebut dikatakan bahwa akuntansi dalam pengertian sebagai bidang kegiatan yang menghasilkan informasi yang kemudian dikomunikasikan. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam pengertian ini disebut dengan pendekatan proses komunikasi. Defenisi seperti ini mirip dengan menurut APB Statement No. 4.

4. Menurut APB Statement Nomor 4

AICPA dalam Accounting Principles Board Statement No. 4 memberikan definisi akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is a service activity. Its function is to provide information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative courses of action.” (APB, 1970, par. 40)

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi yang pada dasarnya bersifat keuangan, tentang kesatuan-kesatuan ekonomi yang dimaksudkan informasi tersebut bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi dengan cara memilih di antara beberapa alternative yang mengarah pada tindakan.

Defenisi semacam ini merupakan definisi akuntansi dari sisi bidang kegiatan. Bidang kegiatan tersebut merupakan hal-hal yang dilakukan dalam praktik akuntansi sehari-hari. Sebagai bidang kegiatan akuntansi mencakup sekumpulan teknik dan metode yang dianggap bermanfaat untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

5. Menurut Suwardjono

Selain dilihat dari sisi bidang kegiatan, defenisi seperti menurut AAA di atas oleh Suwardjono diartikan sebagai defenisi akuntansi dalam arti sempit. Secara khusus Suwardjono dalam kumpulan artikael yang diberi judul Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi (1992) memberikan defenisi akuntansi secara sempit dan defenisi dari sudut proses atau kegiatan sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.” (hal. 137)

Di samping itu Suwardjono (1992) juga memberikan defenisi akuntansi dari sudut bidang studi. Akuntansi dapat defenisikan sebagai: “Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.” (hal. 137).

6. Menurut Harold Q. Langenderier

Harold Langenderier (1973) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem pengukuran dan pengkomunikasian untuk menyediakan informasi ekonomik dan social suatu unit organisasi (kesatuan) untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam membuat pertimbangan (judgement) dan keputusan yang beralasan (informed) untuk mengendalikan alokasi sumber ekonomik yang optimal dan pencapaian unit organisasi.”

7. Kieso and Weygandt

Menyatakan, Akuntansi adalah suatu **sistem informasi** yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Dari defenisi-definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa defenisi yang pertama menekankan pada akuntansi sebagai **tools (alat)** dalam penyajian informasi. Definisi yang kedua menekankan pada akuntansi sebagai **seni** untuk mencatat, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan, sampai pada seni menasirkan hasil transaksi-transaksi keuangan. Sementara defenisi akuntansi yang ketiga menekankan bahwa akuntansi sebagai **body of knowledge** atau **seperangkat pengetahuan** yang dihasilkan dari suatu proses pemikiran yang menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, teknik dalam rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pera pemilik. Sedangkan definisi yang terakhir menekankan akuntansi sebagai sebuah **sistem** yang mengolah input dalam bentuk transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi (bisnis) dari suatu kesatuan usaha, serta mengkomunikasikan hasilnya (output) berupa informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Apabila dilihat dari defenisi tersebut diatas, sebenarnya akuntansi dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*).

Melihat beberapa pengertian di atas, pengertian akuntansi mengalami perkembangan, berubah secara perlahan-lahan bermula akuntansi diartikan sebagai catatan sederhana atau seni pencatatan, berubah ke pengertian akuntansi sebagai ilmu pengetahuan kemudian ke arah penyedia informasi ekonomik dan non ekonomik untuk menjalankan fungsi manajemen; dan akhirnya ada yang mengartikan bahwa akuntansi sebagai sebuah rekayasa informasi.

Dari defenisi tersebut terlihat bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil keputusan ekonomik untuk bertindak dalam merencanakan, mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Secara mikro dalam sebuah perusahaan pengambil

keputusan baik manajemen maupun pihak ekstern secara rasional akan mendasarkan keputusannya pada informasi yang rasional pula. Salah satu sumber informasi yang didasarkan pada data faktual baik informasi ekonomik maupun non ekonomik adalah akuntansi. Akuntansi dalam kenyataannya telah membantu manajemen dan pihak lainnya dalam organisasi untuk melihat secara jelas fenomenal konseptual dan abstrak yang belum pernah diperkirakan sebelumnya, seperti beban (*cost*) dan laba (*profit*) yang dalam praktik akuntansi sekarang dikenal sebagai symbol yang telah diterima secara umum. Akhirnya “akuntansi dapat mempengaruhi cara-cara di mana prioritas, perhatian dan kekhawatiran serta kemungkinan untuk melakukan suatu aksi diekspresikan”. Dengan demikian akuntansi merupakan konstruksi atau bangunan rekayasa sosial ekonomik yang sekaligus juga dapat mengonstruksi perilaku ekonomik sosial. Sehingga akuntansi akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomik.

Demikian pula secara makro akuntansi juga dapat mempengaruhi para pengambil keputusan ekonomik dalam suatu Negara dalam mengalokasikan sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Pengambil keputusan dapat mengendalikan alokasi sumber daya ekonomik tersebut secara baik apabila didukung oleh informasi-informasi yang handal yang disediakan oleh akuntansi.

Namun harus juga disadari bahwa akuntansi hanyalah merupakan salah satu alat untuk pengendalian alokasi sumber daya ekonomik tersebut. Secara makro peran kebijakan pemerintah dalam pengendalian alokasi sumber daya ekonomik tetap relevan, akan tetapi kebijakan tersebut menjadi lebih baik apabila didukung dengan dasar informasi yang relevan dan handal.

Akuntansi juga dapat di artikan sebagai teknologi. Indikasi bahwa akuntansi masuk dalam bidang teknologi telah dikemukakan sebelumnya oleh Littleton (1974) sebagai berikut:

"Accounting as a technology, after a slow start, has finally become a much improved instrument for managerial control in the interest of efficiency and profit" (p.7)

Selanjutnya dia mengatakan:

"Accounting is a technology, a modified statistical technology. The details of a technical methodology are prescribed by and at the same time are limited by its objectives, major or minor. There are those who use accounting intimately and those who teach its intricacies develop a keen awareness of the service this technology can be made to render, and experience an increasing appreciation of the interrelation of objective and methods" (p.77)

Sebagai teknologi atau rekayasa, akuntansi bertujuan mengendalikan perilaku variabel-variabel yang ada guna mencapai tujuan sosial tertentu. Tujuan yang perlu dikembangkan adalah untuk mensejahterakan manusia atau meningkatkan kesejahteraan manusia atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam disiplin akuntansi manajemen (*managerial accounting*), perlakuan bahwa akuntansi manajemen sebagai suatu rekayasa untuk mensejahterakan manusia sudah banyak disetujui oleh para akuntan. Sehingga akuntansi manajemen menyerap berbagai disiplin ilmu murni maupun ilmu terapan untuk lebih memperkaya peran akuntansi manajemen sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan.

Sebagai rekayasa, menurut Sudibyo (1987) akuntansi (baik akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan) dapat memanfaatkan teori-teori dan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh disiplin ilmu lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa harus mengembangkan teori sendiri. Di samping itu rekayasa akuntansi harus mempertimbangkan tata nilai sosial masyarakat di mana akuntansi harus mempertimbangkan tata nilai sosial masyarakat di mana akuntansi tersebut ingin dikembangkan.

2. PENGERTIAN TEORI

Teori mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung konteks dan persepsi dari masing-masing orang yang mengartikannya.

Teori dapat dirumuskan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Dalam istilah metode ilmiah (*scientific method*) teori berisi sekumpulan premis yang juga disebut *assumptions* atau *postulates*. Seringkali premis bias terbukti dengan sendirinya atau mungkin bisa dibuktikan dengan alat analisis statistik. Dalam kasus yang disebut terakhir ini premis dinamakan hipotesis atau proposisi. Proposisi menunjukkan tahap pertama mengenai bagaimana ide-ide disampaikan untuk merumuskan suatu teori. **Proposisi** merupakan pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena.

Oleh karena teori mempunyai pengertian yang bermacam-macam, dalam mata kuliah teori akuntansi istilah teori seringkali merupakan istilah yang sering didebatkan atau kontroversial. Sebagai bahan pengayaan dan tambahan wawasan Suwardjono (1989) mengemukakan 5 (lima macam pengertian teori sebagai berikut:

1. Teori Sebagai Lawan Praktik

Dalam pengertian yang paling sederhana teori adalah sesuatu yang tidak operasional atau sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi teori adalah sesuatu yang ideal sebagai lawan dari sesuatu yang nyata yang dikerjakan dalam dunia yang nyata. Teori sering dianggap sebagai *Das Sein*, apa yang senyatanya. Teori di sini berisi ketentuan atau aturan yang seharusnya bagaimana seseorang bertindak. Jadi teori bersifat normative. Misalnya dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan ujian teori (yang biasanya merupakan ujian tertulis) dan juga ada ujian praktik (yang biasanya dilakukan di lapangan dengan uji praktik keterampilan dan pemahaman peraturan mengemudi). Jadi teori diperlawankan dengan praktik.

2. Teori Sebagai Pembeneran (*Justification*)

Dalam konteks ini teori ini diartikan sebagai suatu penjelasan atau penalaran tentang fakta atau tindakan atau perbuatan yang

merupakan praktik dalam kehidupan nyata. Teori berusaha untuk memberikan pembenaran (justifikasi) terhadap praktik. Justifikasi di sini umumnya didasarkan pada *reasonableness* (kelogisan atau rasionalitas), *sensibility* (perasaan) dan *obviousness* (kejelasan). Dengan demikian pihak yang menerima penjelasan dapat menilai apakah praktik tersebut benar atau salah.

3. Teori Sebagai Penjelasan Ilmiah (*Scientific Explanations*)

Dalam konteks ini teori merupakan pernyataan-pernyataan tentang hubungan antara perilaku variabel-variabel alam atau variabel sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala alam atau sosial. Teori diwujudkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis hubungan antara variabel atau perilaku tiap variabel tersebut. Fungsi teori hanyalah menjelaskan hubungan variabel dengan gejala-gejala tersebut.

4. Teori Sebagai Model

Pengertian teori sebagai model artinya bahwa teori merupakan representasi atau abstraksi sesuatu yang terdapat dalam dunia nyata. Faktor penting yang diperlukan dalam merancang model adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam dunia nyata sehingga model yang dibuat akan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya model tersebut diwujudkan dalam praktik.

5. Teori Sebagai Penalaran Yang Logis

Dalam konteks ini berarti suatu proses pemikiran atau penalaran dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik tertentu yang sudah berjalan atau untuk mendukung dan mengembangkan prinsip atau praktik yang baru atau yang diharapkan. Dalam hal ini teori berisi konsep-konsep maupun pemikiran logis hasil penelaahan yang mendalam.

Sejalan dengan pengertian teori yang terakhir disebutkan di atas, yaitu **“teori sebagai penalaran logis”** Hendriksen mengemukakan pengertian teori dengan mengutip dari Webster Dictionary seperti berikut: **“Teori adalah seperangkat prinsip yang berkaitan, yang bersifat hipotikal, konseptual dan pragmatic yang membuat rerangka referensi umum sebagai pegangan dalam suatu bidang tertentu yang diselidiki”** (1982, p.1)

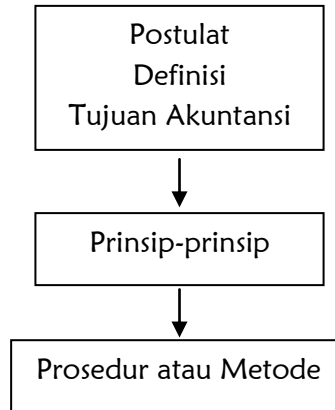
Kembali ke istilah proposisi, istilah ini dibagi dalam dua jenis, yaitu: proposisi a priori dan proposisi a poster. *Proposisi a Priori* adalah sebuah pernyataan tentang konsep yang nilai kebenarannya ditentukan dengan penalaran murni atau dengan menganalisis dari kata-kata yang digunakan. Misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Proposisi a priori disebut juga proposisi analitik yang sering kali digunakan dalam matematika. *Proposisi a poster* adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya realitas di alam nyata. Misalnya balon yang dipanasi sampai tingkatan tertentu akhirnya meletus. Proposisi ini disebut juga proposisi empiris yang sering digunakan sebagai dasar dalam penyusunan teori fisika.

Dalam akuntansi, pernyataan-pernyataan yang dihasilkan adalah tidak diturunkan dari pernyataan sebelumnya. Hal ini bukan berarti bahwa prinsip diturunkan dari postulat dan teknik diturunkan dari prinsip, karena hal ini sulit untuk dibuktikan secara logika. Oleh karena itu FASB lebih menyukai istilah *conceptual framework* dari pada teori.

3. TEORI DAN PRAKTIK AKUNTANSI

Dalam akuntansi sering kita membedakan antara teori dan praktik. Namun apa yang sebenarnya yang dikatakan dengan teori?. Kadang kala teori dikatakan sebagai konstruk atau abstraksi yang dioperasionalisasikan ke dalam dunia nyata. Vernon Kam, *The theory of accounting envisioned here in an elaborate deductive system consisting of three distinct levels of statement of decreasing generality.*

Ketiga level tersebut adalah: pertama, terdiri dari postulat, definisi, dan tujuan akuntansi; kedua, prinsip-prinsip dan standar; ketiga, prosedur atau metode. Ketiga level tersebut digambarkan pada gambar berikut:



Istilah teori akuntansi seringkali untuk menunjuk seperangkat konsep-konsep akuntansi yang relevan, terpadu dan saling berkaitan. Sejalan dengan pengertian teori yang terakhir menurut Suwarjono di sub bab sebelumnya "*teori sebagai penalaran yang logis*" dan pengertian teori dari Webster Dictionary, Hendriksen (1982) mengemukakan pengertian teori akuntansi sebagai:

"Pemikiran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas (a set of broad principles) yang: (1) menyediakan suatu kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi, dan (2) merupakan pedoman dalam mengembangkan praktik-praktik dan prosedur-prosedur akuntansi yang baru" (p.1).

Berarti bahwa teori akuntansi tidak terlepas dari praktik akuntansi. Oleh karenanya teori akuntansi dapat juga digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang ada untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik terhadap praktik-praktik tersebut. Akan tetapi tujuan yang lebih penting dari akuntansi seharusnya adalah untuk

menyediakan seperangkat prinsip-prinsip luas (*broad principles*) dan logis yang saling berkaitan yang membentuk rerangka acuan umum untuk pengevaluasian dan pengembangan praktik-praktik akuntansi yang sehat. Dalam konteks ini prinsip berarti konsep, jadi *broad principle* sama dengan konsep luas.

Prinsip-prinsip yang luas tersebut menurut istilah Paton dan Littleton disebut *body of doctrine*. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya istilah-istilah tersebut tidak digunakan lagi karena telah berubah menjadi apa yang dikenal dengan *conceptual framework* atau rerangka konseptual (Suwardjono, 1987).

Teori akuntansi bertujuan untuk menyajikan suatu fondasi dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Teori didefenisikan sebagai sekumpulan gagasan, konsep, definisi, dan dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang suatu gejala (fenomena) dengan cara menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut.

Sementara itu, Hendriksen mendefinisikan Teori akuntansi sebagai sekumpulan prinsip-prinsip luas yang (1) menyajikan suatu kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dinilai, (2) mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru.

Financial Accounting Standard Board (FASB) menyatakan bahwa teori dalam akuntansi diperlukan untuk:

- a. Mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi
- b. Memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu apabila belum ada standar yang mengaturnya.
- c. Memberikan batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan
- d. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan
- e. Meningkatkan daya banding laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat teori akuntansi yaitu lebih bersifat deskriptif (positif) yaitu menjelaskan dan meramalkan variabel-variabel yang diteorikan apa adanya. Teori akuntansi juga bersifat perspektif (normatif) yaitu menjelaskan apa yang seharusnya atau menggambarkan variabel yang sesuai dengan aturan tertentu dan bagaimana seharusnya.

Akuntansi bekepentingan dalam menyediakan informasi kepada para penggunanya. Dalam hal ini akuntansi sebagai sarana komunikasi bisnis, sehingga akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis. Teori harus dinyatakan dalam bahasa, yang bisa bersifat verbal dan matematika. Teori harus dimulai dari abstraksi yang ada dalam pikiran manusia, supaya berguna, teori harus dikaitkan dengan dunia nyata.

Standar akuntansi memberikan pedoman perlakuan akuntansi terhadap suatu kejadian. Pedoman tersebut terrefleksi dalam pendefinisian, pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen-elemen atau pos-pos laporan keuangan. Akuntansi yang dipraktekkan dalam suatu wilayah sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah tetapi dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

Praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan (sosial, ekonomik, dan politis) tempat akuntansi dijalankan. Untuk dapat mengembangkan suatu struktur dan praktik akuntansi dalam suatu negara pelajar praktik saja tidak cukup. Dibalalik praktik akuntansi sebenarnya terdapat seperangkat gagasan-gagasan yang melandasi praktik tersebut berupa asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep, penjelasan, deskripsi dan penalaran yang keseluruhannya membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi. Teori akuntansi menjelaskan mengapa praktik akuntansi berjalan seperti yang diamati sekarang. Praktik akuntansi yang nyatanya berjalan di suatu negara belum tentu merefleksikan pilihan terbaik ditinjau secara konseptual dan ideal serta

dari tujuan yang ingin dicapai. Teori akuntansi membahas perlakuan-perlakuan dan model-model alternatif yang dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik. Pemecahan masalah akuntansi atas dasar pengalaman saja dapat disamakan dengan pemecahan masalah dengan coba-coba atau coba dan ralat (*trial and error*).

Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan tentang teori akan mengimbangi keterbatasan pengalaman dan kepentingan praktis. Dengan teori, orang akan melihat masalah dengan prespektif yang lebih luas dan bebas dari hal-hal yang teknis dan rinci.

Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Dari argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa teori merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa teori merupakan pelita yang menerangi praktik dengan prinsip-prinsip yang masuk akal.

Dalam kenyataannya, praktisi disibukkan dengan masalah aktual dan mendesak yang segera harus diselesaikan sehingga tidak sempat lagi merenungkan teori-teori dibalik tindakannya. Praktisi harus bersedia untuk mengapkilasi hasil pemikiran dan gagasan orang lain. Orang lain yang dimaksud disini adalah akademisi akuntansi dan pemikir yang memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang bersifat fundamental dan teoritis.

Selanjutnya Hendriksen membagi tingkatan teori dalam tiga tingkatan, yaitu: teori sintatik, teori semantic dan teori pragmatic atau behavioral theory.

Pengertian teori dalam teori akuntansi seperti dikemukakan Hendriksen (1982) maupun Belkoui (1981) tidak seperti pengertian teori dari ilmu pengetahuan yang murni yang sudah mapan seperti teori ekonomi (misalnya teori tentang hukum permintaan dan hukum penawaran), psychology (misalnya teori tentang perilaku terhadap informasi) ataupun statistika (misalnya teori tentang hubungan harga dengan informasi). Jadi teori semacam ini bukan teori sebagai penjelasan ilmiah seperti pendapat Belkouli sebagaimana yang dikutip oleh Suwardjono (1989), yang mengatakan bahwa teori akuntansi hanyalah suatu kemungkinan dan itupun bukan didasarkan pada adanya penelitian ilmiah akan tetapi didasarkan oleh keyakinan semata-mata (*as an article of faith*). Oleh karena itu Belkouli (1981) berpendapat bahwa metodologi yang digunakan dalam mengembangkan teori akuntansi tidak harus metodologi ilmiah. Kerangka teoritis yang dibangun teori akuntansi disebut sebagai '*theoretical framework for the discipline*' yang berguna untuk membenarkan (justify) praktik-praktik akuntansi yang dipandang bermanfaat dan untuk membenarkan praktik yang dianut tersebut.

Teori dan praktik akuntansi yang dimaksud dengan pengertian di atas lebih menekankan pada disiplin akuntansi keuangan. Oleh karena itu dari sisi pengertian akuntansi sesuai dengan pengertian menurut Hendriksen maka sebenarnya 'pengetahuan tentang akuntansi keuangan' oleh Suwardjono (1989) dapat digolongkan menjadi dua bidang yaitu:

- a. Pengetahuan yang bersangkutan dengan proses pemikiran dan pemilihan konsep-konsep yang dipilih.
- b. Praktik akuntansi yang berupa standar atau prinsip beserta pelaksanaannya sebagai produk model akuntansi tersebut.

Contoh dari proses pemikiran dari proses pemikiran pada butir (1) misalnya adalah Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) di USA, sedangkan standar atau prinsip pada butir (2) misalnya Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) di USA atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

Menurut Kerlinger (1964) tujuan utama teori akuntansi adalah menyediakan dasar peramalan dan penjelasan tingkah laku akuntansi dan peristiwa-peristiwa. Teori adalah seperangkat konsep-konsep atau gagasan-gagasan, definisi-definisi dan dalil-dalil yang menyajikan pandangan sistematis atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dengan mengkhhususkan hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi kejadian-kejadian tersebut. Sedangkan Matthew dan Parera (1993) mengatakan bahwa tujuan utama teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan menjadi referensi dalam proses pemilihan metode pengembangan akuntansi. Menurut mereka teori akuntansi memiliki karakteristik seperti berikut:

- a. Mempunyai body of knowledge.
- b. Konsisten secara internal.
- c. Menjelaskan dan memprediksi.
- d. Menyajikan hal-hal yang ideal.
- e. Acuan ideal untuk mengarahkan praktik.
- f. Membahas masalah dan memberikan solusi.

Dengan enam karakteristik tersebut pengertian teori di sini lebih mendekati pengertian teori sebagai penjelasan ilmiah (pengertian pada butir 3 menurut Suwardjono).

Berdasarkan uraian di atas berarti masih ada kesimpangsiuran para ahli dan akuntan dalam mengartikan teori akuntansi. Pengertian kedua istilah tersebut masih tidak baku. Dengan adanya kesimpangsiuran dan pengertian yang tidak baku tersebut, Bambang Sudiby (1987) berpendapat bahwa kalau para akuntan ingin konsekuen bahwa akuntansi mengacu ke pengertian teori yang baku yang dikembangkan berdasarkan metodologi baku sebagaimana metodologi menurut Karl Popper. Teori yang dikembangkan berdasarkan metodologi semacam itu adalah teori dari sebuah ilmu (ilmu murni).

Pernyataan, *apakah akuntansi termasuk ilmu?* Kalau akuntansi sebagai ilmu (murni) maka menurut Bambang Sudiby (1987) seharusnya teori akuntansi dikembangkan berdasarkan metodologi

baku dari Karl Popper. Metodologi baku dari Popper tersebut seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan ilmu murni (*pure science*).

Adapun karakteristik metodologi baku menurut Popper adalah sebagai berikut:

- a. Teori adalah pernyataan hipotesis mengenai perilaku variabel yang diteorikan.
- b. Suatu teori tetap statusnya sebagai teori sepanjang tes-tes atau penyangkalan-penyangkalan baik logis maupun empiris tidak berhasil membuktikan salah.
- c. Teori tidak mungkin bias dibuktikan kebenarannya, sebaliknya teori memungkinkan untuk dibuktikan salah. Ilmu bukan koleksi pernyataan-pernyataan tentang kebenaran melainkan hanya koleksi pernyataan-pernyataan yang belum terbukti salah.
- d. Tujuan teori ada dua, yaitu (1) untuk menerangkan perilaku variabel-variabel yang diteorikan (2) untuk meramalkan variabel-variabel tersebut di masa yang akan datang.
- e. Teori bersifat deskriptif dan explanatif tidak normatif. Teori menjawab pertanyaan “what” dan “why” bukan “what should be” dan “how to do”.

Pendekatan Popper (1959) disebut juga dengan pendekatan falsifikasi. Alirannya disebut falsifikasionisme (*falsificationism*). Pendekatan ini muncul karena Popper tidak puas dengan pendekatan induktif. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan (*falsify*) hipotesis. Teori atau hipotesis yang tidak bias dibuktikan kesalahannya (atau tahan uji dari falsifikasi) dikatakan bahwa teori itu kuat dan diterima sementara sebagai teori yang benar. Tetapi “teori akuntansi” bukanlah sebuah hipotesis atau teori yang akan diuji salah benarnya.

Karena istilah “teori akuntansi” yang kita pelajari selama ini tidak memenuhi sifat teori menurut Popper di atas maka Bambang Sudibyo berkesimpulan bahwa akuntansi bukan sebuah ilmu tetapi sebuah teknologi atau rekayasa. “Teori Akuntansi” yang selama yang

selama ini kita pelajari tidak menjawab pertanyaan *what* (apa) dan *why* (mengapa) tetapi lebih banyak menjawab pertanyaan *what should be* (apa yang seharusnya) dan *how to do* (bagaimana melakukannya).

Dengan terlihat realita yang ada maka sebenarnya akuntansi tidak memerlukan seperangkat teori tersendiri. Akuntansi bisa mengadopsi berbagai teori ilmu pengetahuan yang telah ada baik ilmu murni maupun ilmu terapan serta menyesuaikan dengan nilai dan tata sosial masyarakat di mana akuntansi itu diberlakukan.

4. METODE PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI

Teori akuntansi masih merupakan sesuatu yang kontroversial: ada yang menginginkan teori akuntansi hanyalah sebagai justifikasi, ada pula yang menginginkan teori akuntansi sebagai penalaran yang logis, ada pula yang menginginkan teori akuntansi sebagai penjelasan ilmiah. Hal ini menyebabkan pendekatan dalam pengembangan teori akuntansi berbeda-beda.

Walaupun banyak penulis buku teori akuntansi yang menginginkan teori akuntansi yang tunggal dan konphersip namun harus diakui bahwa sampai saat ini belum ada teori akuntansi yang bersifat komphersip (Belkouli, 1993). Banyak literatur-literatur teori akuntansi yang menggunakan pendekatan berbeda untuk menyusun suatu teori sehingga tidak ada bangunan teori akuntansi yang tunggal. Sebagaimana dikemukakan American Accounting Association seperti berikut:

“Tidak ada teori akuntansi tunggal yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan pemakai..., yang ada dalam kepustakaan akuntansi keuangan bukanlah teori akuntansi keuangan bukanlah teori akuntansi, tetapi koleksi teori yang digambarkan dengan perbedaan pemakainya.” (AAA, 1997, p.1-2)

Pengembangan teori akuntansi di tahun tujuh puluhan mulai menonjolkan bahwa teori sebagai penjelasan ilmiah. Oleh karena itu

sebagai penjelasan ilmiah, menurut Bambang Sudibyo (1987), seharusnya teori akuntansi dikembangkan berdasarkan metodologi menurut Karl Popper.

Namun demikian nampaknya teori akuntansi dalam pengertian sebagai penjelasan ilmiah (*scientific explanations*) masih tidak dapat dikembangkan secara baik, atau ada yang berpendapat tidak perlu dikembangkan sebagaimana pengembangan teori pada ilmu murni. Dengan alasan terakhir tersebut maka beberapa akuntan berpendapat bahwa ilmu terapan atau mungkin sebagai ilmu terapan atau mungkin sebagai rekayasa atau teknologi.

Sejalan dengan uraian pada paragraph sebelumnya, karena teori akuntansi belum dapat atau tidak perlu dikembangkan sebagai penjelasan ilmiah maka sebagian penulis buku akuntansi yang dituliskannya mereka menempatkan diri sebagai kelompok "*middle range*" dan buku teori akuntansi yang dituliskannya, mereka menempatkan teori akuntansi pada pengertian sebagai suatu anomaly tetapi sampai sekarang istilah teori akuntansi tetap ada, misalnya teori akuntansi tetap menjadi salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada perguruan tinggi pada jurusan atau program akuntansi di sebagian besar Negara di dunia. Teori akuntansi (*accounting theory*) tetap menjadi judul buku literatur atau text book sampai sekarang. Di Indonesia mata kuliah teori akuntansi masuk dalam kurikulum nasional (kurnas) program strata satu (S1) maupun strata dua (2) jurusan akuntansi.

Akuntansi bekepentingan dalam menyediakan informasi kepada para penggunanya. Dalam hal ini akuntansi sebagai sarana komunikasi bisnis, sehingga akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis. Teori harus dinyatakan dalam bahasa, yang bisa bersifat verbal dan matematika. Teori harus dimulai dari abstraksi yang ada dalam pikiran manusia, supaya berguna, teori harus dikaitkan dengan dunia nyata.

Metodologi yang digunakan dalam perumusan teori akuntansi menggunakan berbagai pendekatan. Belkaoui mengkategorikan teori dalam arti *middle range*, yang berarti bukan teori sebagai penjelasan ilmiah (*scientific explanation*) dan metodologinya pun tidak harus

maggunakan metodologi ilmiah, dapat menggunakan berbagai pendekatan.

Berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam perumusan teori akuntansi (Belkaoui) adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan nonteoritis, yang terdiri dari:
 - a. Pendekatan pragmatik
 - b. Pendekatan otoritas
2. Pendekatan teoritis, yang terdiri dari:
 - a. Pendekatan deduktif
 - b. Pendekatan induktif
 - c. Pendekatan etik
 - d. Pendekatan sosiologis
 - e. Pendekatan ekonomi
 - f. Pendekatan elektik
3. Pendekatan lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Pendekatan peristiwa
 - b. Pendekatan perilaku
 - c. Pendekatan prediktif dan positif
4. Pendekatan regulatori

1. Pendekatan Nonteoritis

a. Pendekatan pragmatik

Pendekatan ini menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai dengan kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik

Dalam teori pragmatis ini, suatu pertanyaan akan dianggap benar apabila diukur dari kriteria apakah pertanyaan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalkan, ditemukan teori X dalam akuntansi keuangan, dan dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y yang dapat digunakan dalam perataan laba, dan apabila secara ilmiah

dapat dibuktikan bahwa teknik Y tersebut dapat digunakan dalam rangka perataan laba, maka teori X tersebut adalah berguna.

b. Pendekatan Otoritas

Pendekatan ini biasanya digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Seperti organisasi profesi di Amerika, karena wewenangnya, organisasi tersebut dapat menetapkan standar akuntansi yang paling sesuai dan berguna dalam memecahkan masalah praktik.

Keunggulan praktik ini adalah apabila standar yang dihasilkannya dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah teruji validitasnya. Tetapi apabila dilihat dari segi kelemahannya, pendekatan pragmatis tersebut belum memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, standar tersebut dianut karena sederhana, mudah diterapkan dan berguna serta cenderung tidak universal karena disusun berdasarkan kondisi tertentu dan kepentingan praktik semata.

2. Pendekatan Teoritis

1. Pendekatan Deduktif

Pendekatan yang menggunakan logika (*Abstract World*) bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya.

Menurut Belkaoui, pendekatan deduktif dalam akuntansi dimulai dari:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan pelaporan keuangan
- b. Memilih dan menetapkan postulat-postulat atau konsep-konsep teoritis akuntansi.
- c. Menetapkan prinsip-prinsip logis akuntansi
- d. Menurunkan dan mengembangkan teknik-teknik akuntansi.

Dengan mengacu pada penalaran deduktif, maka harus menunjukkan bahwa perumusan tujuan-tujuan yang ditetapkan adalah benar, sehingga prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang diturunkannya pun adalah benar, demikian pula sebaliknya.

Hendriksen (1986) menyatakan bahwa ada tujuh langkah penalaran deduktif yang dapat dalam penetapan standar akuntansi:

1. Perumusan tujuan umum atau khusus dari laporan keuangan
2. Pernyataan tentang postulat akuntansi yang berkaitan dengan faktor lingkungan akuntansi berupa faktor sosial, politik, ekonomi, dan hukum di mana akuntansi akan beroperasi
3. Mengidentifikasi seperangkat kendala-kendala yang digunakan sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam proses penalaran
4. Menetapkan simbol-simbol atau framework untuk mengekspresikan ide-ide
5. Menetapkan definisi simbol-simbol yang menginterpretasikan ide-ide tersebut
6. Perumusan prinsip-prinsip.
7. Penerapan prinsip, standar, dan teknik pada situasi tertentu dan menciptakan aturan tentang prinsip akuntansi dan metode akuntansi yang sesuai.

2. Pendekatan Induktif

Pendekatan ini dimulai dengan pengamatan terhadap objek yang memiliki ciri spesifik, untuk kemudian ditarik generalisasi atau penalaran yang dimulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

Apabila diberikan ilustrasi dalam akuntansi, maka contoh pernyataan-pernyataan ini merupakan simpulan kesimpulan umum (hasil generalisasi) yang dihasilkan dari pendekatan induktif:

Pada keadaan harga-harga naik (kondisi inflasi), maka perusahaan yang menerapkan metode LIFO dalam penilaian persediaannya akan menghasilkan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan metode FIFO.

Tingkat profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) suatu perusahaan.

Penganggaran partisipatif akan memunculkan kelonggaran anggaran, apabila manajer mempunyai perilaku *rational utility maximizers*.

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pendekatan induktif menurut Belkaoui adalah:

1. Melakukan pengamatan dan pencatatan atas hasil amatan
2. Menganalisis dan mengklasifikasi hasil amatan untuk mendeteksi hubungan peristiwa yang telah terjadi secara berulang-ulang
3. Menarik kesimpulan yang menunjukkan adanya hubungan peristiwa yang berulang tersebut.
4. Melakukan pengujian atas kesimpulan yang dibuat tersebut untuk mencari kebenarannya.

3. Pendekatan Etik

Etik atau disebut juga etika, berkaitan dengan moral dan perilaku buruk dan baik. Pendekatan etik dalam perumusan teori akuntansi harus ditekankan pada konsep kewajaran (*fairness*), kejujuran (*representation faithfulness*), keadilan (*justice*), dan kebenaran (*truth*).

Indikator kewajaran dalam akuntansi menekankan bahwa hendaknya informasi akuntansi yang disajikan harus benar (objektif, tidak bias, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum (*generally accepted accounting principle*), serta adil dilihat dari pendistribusian dan pengungkapannya.

4. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Perumusan teori akuntansi, penetapan prinsip dan standar-standar akuntansi yang dipilih harus dapat mengungkapkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat harus memperoleh manfaat atas pengungkapan laporan keuangan ditinjau dari aspek-aspek sosialnya. Akuntansi harus dapat mengungkapkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan sebagai suatu kesatuan usaha yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya.

Dalam perkembangan akuntansi saat ini, telah muncul akuntansi sosial sebagai wujud pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan terhadap lingkungannya. Akuntansi sosial ini merupakan salah satu bidang akuntansi keuangan.

5. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ini menekankan bahwa dalam perumusan teori akuntansi, indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi harus dipertimbangkan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi secara umum. Prinsip, standar, dan teknik akuntansi yang disusun dikaitkan dengan tujuan ekonomi. Sebagai contoh dalam akuntansi, kita mengenal akuntansi perubahan tingkat harga yang merupakan prosedur dan teknik yang diciptakan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang menggunakan pendekatan makro ekonomi, yaitu tingkat inflasi atau yang dikenal dengan akuntansi inflasi.

6. Pendekatan Elektik

Elektik artinya memilih di antara berbagai macam kombinasi pendekatan yang cocok dan sesuai dengan standar yang bersangkutan,

dimana pendekatan yang terbaik dan yang paling relevan dengan kegunaannya yang akan dipakai.

Munurut Rosyidi, pendekatan ini pada hakikatnya adalah hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan profesi dan pemerintah sebagai bentuk partisipasinya terhadap perkembangan prinsip akuntansi. Hendriksen menyatakan, bahwa tidak ada satu pun dari berbagai pendekatan yang ada, adalah berdiri sendiri dan memiliki landasan yang kuat dalam pembentukan teori. Teori akuntansi yang dikembangkan berusaha meletakkan semua pendekatan yang ada dalam kerangka dan perspektif yang layak dengan penekanan pada proses deduktif dan penelitian empiris yang sesuai.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan *behavioral science* setidaknya mempengaruhi perkembangan terhadap disiplin akuntansi, khususnya akuntansi keuangan. Menghadapi perkembangan lingkungan empiris tersebut, maka dilakukan upaya-upaya riset akuntansi seperti yang dilakukan oleh Watt dan Zimmerman (1986) dengan melakukan review teori-teori akuntansi yang selanjutnya menghasilkan teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Salah satu teori yang dihasilkannya adalah teori-teori penilaian investasi yang berkaitan dengan pasar modal, dan hipotesis pasar yang efisien (*efficient market hypothesis*).

3. Pendekatan Lainnya

1. Pendekatan Persitiwa

Pendekatan ini menekankan agar akuntansi dapat menyediakan informasi tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang berguna untuk berbagai kepentingan. Akuntansi harus menyajikan data tentang peristiwa akuntansi secara terperinci untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam membantu model proses pengambilan keputusan.

Sebagai akibatnya, maka neraca dipandang sebagai peristiwa-peristiwa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dari

sejak saat didirikan. Laporan laba rugi menunjukkan peristiwa-peristiwa perusahaan selama suatu periode tertentu yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau menderita kerugian selama suatu periode tertentu.

2. Pendekatan Perilaku

Pendekatan ini menekankan pada perilaku atau kriteria ilmu perilaku. Sasaran pendekatan ini sama dengan sasaran yang ingin dicapai dalam ilmu perilaku. Sasaran ilmu perilaku adalah menjelaskan, memahami dan meramalkan tentang perilaku manusia untuk dijadikan sebagai acuan umum bagi observasi selanjutnya. Standar akuntansi yang disusun harus dievaluasi terlebih dahulu dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan tujuan dan perilaku para pengguna laporan keuangan. Saat ini sesuai dengan perkembangannya telah dikenal bidang akuntansi yang baru yang disebut dengan akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*).

Telaahan dan penelitian ini telah banyak diminati dalam bidang akuntansi perilaku. Misalnya, bagaimana pengaruh informasi akuntansi keuangan terhadap perilaku para investor di pasar modal.

3. Pendekatan Prediktif dan Positif

Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk meramalkan dan memproyeksikan fakta-fakta akuntansi terhadap peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan metode yang sesuai dan berguna bagi pemakai informasi. Kriteria kemampuan meramalkan hendaknya dipakai sebagai alat pengukuran akuntansi agar menghasilkan keputusan yang terbaik. Data atau informasi akuntansi dapat menjelaskan dan meramalkan peristiwa-peristiwa ekonomi dan investasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli tentang kemampuan untuk meramalkan dilakukan oleh J.K. Simmons pada tahun 1979 dengan judul "*An Investigation of the Effect of Differing Accounting on the Prediction of Net Income*". Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa informasi *current cost* lebih memiliki daya ramal yang lebih baik apabila dibandingkan dengan informasi *historical cost*. Penelitian lain dilakukan oleh Altman pada tahun 1973, dengan judul "*Predicting Railroad Bankruptcies in America*" dengan analisis *multiple discriminant* untuk memprediksi kegagalan perusahaan.

4. Pendekatan Regulatori

Regulasi adalah sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan terutama untuk kepentingan operasi atau kegiatan industri tertentu. Ada dua kelompok kepentingan yang berkaitan dengan regulasi yaitu,

1. *A Public Interest Theories*

Teori kepentingan sektor publik yang memiliki tujuan utama yaitu melindungi kepentingan sektor publik.

2. *Interest Group (Teori Kelompok)*

Teori yang menekankan pada perkembangan dan mempertahankan regulasi yang mendukung kelompok tertentu. Teori kepentingan kelompok dibagi dalam dua versi teori, yaitu:

1. *The political ruling elite theory of regulation*

Teori yang memfokuskan pada kekuatan politik yang berusaha untuk menguasai pusat-pusat pengambilan keputusan politik yang menguntungkan kepentingannya.

2. *The economic theory of regulator*

Teori yang menekankan pada kekuasaan ekonomi, artinya kepada penguasaan atas sumber-sumber ekonomi sehingga dapat mengendalikan keputusan-keputusan di bidang ekonomi.

5. KLASIFIKASI TEORI AKUNTANSI

1. Berdasarkan Penalaran

Teori dapat diartikan sebagai penalaran logis yang melandasi praktik (berupa tindakan, kebijakan, atau peraturan) dalam kehidupan nyata. Teori berupaya untuk memberikan pembenaran (*justification*) terhadap praktik agar praktik mempunyai kekuatan untuk dapat dipertahankan atau dipertanggungjawabkan kelayakannya. Penalaran logis berisi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu kerangka pikir yang logis. Hasil penalaran logis dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi prinsip-prinsip umum (semacam konstitusi) yang menjadi landasan umum untuk menentukan tindakan atau praktik yang terbaik dalam mencapai tujuan.

Bila diterapkan dalam akuntansi, teori akuntansi sering dimaksudkan sebagai penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu (baik menurut standar akuntansi ataupun menurut tradisi) dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi tertentu yang sudah berjalan atau untuk memberikan landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Hendriksen:

Accounting theory may be defined as logical reasoning in the form of a set of board principles that (1) provide a general frame of reference by which accounting practice can be evaluated and (2) guide the development of new practice and procedures.

Paton dan Littleton mengemukakan bahwa tujuan teori akuntansi adalah menyediakan gagasan-gagasan mendasar yang menjadi dasar dalam proses perekayasaan pelaporan keuangan. Hasil perekayasaan tersebut berupa seperangkat doktrin yang berkaitan secara logis, terkoordinasi, dan konsisten yang mempunyai fungsi sebagai landasan dalam peneurunan standar akuntansi.

Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi, teori akuntansi dapat dipandang sebagai penjelasan atau pemikiran untuk menentukan apa dan bagaimana cara terbaik untuk memperlakukan suatu transaksi (objek) akuntansi. Penjelasan atau pemikiran seperti itu sangat diperlukan karena terdapat banyak cara yang tersedia baik secara teoritis atau secara praktis untuk mencapai tujuan akuntansi. Hasil pemikiran tersebut dituangkan dalam suatu dokumen yang berisi konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang berkaitan secara logis.

Teori akuntansi merupakan penalaran logis, gagasan-gagasan mendasar, atau gagasan-gagasan yang saling berkaitan dan konsisten yang semuanya disebut sebagai penalaran logis saja. Karena akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, proses penalaran logis tersebut dapat disebut sebagai perekayasaan. Hasil perekayasaan dalam hal ini dapat berupa seperangkat prinsip umum, seperangkat doktrin, atau suatu rerangka konsep-konsep yang terpadu. Prinsip umum, doktrin, atau rerangka tersebut berfungsi untuk:

1. sebagai acuan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berjalan.
2. sebagai pengarah untuk mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru
3. sebagai dasar dalam penurunan standar akuntansi
4. sebagai titik tolak untuk pengujian dan perbaikan praktik yang sedang berjalan

5. sebagai pedoman untuk memecahkan masalah potensial.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa teori akuntansi sebagai penalaran logis. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perikayasaan pelaporan keuangan. Perikayasaan akuntansi menghasilkan suatu kerangka konseptual. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk mengevaluasi atau membenarkan dan untuk mempengaruhi atau mengembangkan praktik akuntansi.

2. Berdasarkan Tujuan

Tujuan utama akuntansi adalah memberikan dasar bagi prediksi dan penjelasan atas perilaku dan peristiwa akuntansi. Suatu teori didefinisikan sebagai “seperangkat gagasan (konsep) definisi, dan usulan yang saling berkaitan yang menyajikan suatu pandangan sistematis atas fenomena dengan merinci hubungan diantara variabel-variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut.

Pada awalnya tujuan akuntansi adalah menghasilkan laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola perusahaan (*accountor*) kepada pihak pemilik (*accountee*). Dalam hal ini *accountor* adalah manajemen perusahaan dan pemilik (*accountee*) adalah diperlakukan sebagai pihak luar. Tujuan tersebut selanjutnya dikenal dengan *stewardship function (accountability function)*. Sesuai dengan tujuan awal tersebut tugas akuntan (*accountant*) adalah membantu *accountor* dalam melaksanakan tujuan tersebut. Tujuan ini baik secara eksplisit maupun implisit banyak kita jumpai pada tulisan-tulisan klasik seperti karya Sanders, Hatfields, dan Moore (1940) dan juga tulisan Ijiri (1970).

Untuk memenuhi fungsi pertanggungjawaban atau tujuan *accountability* tersebut maka dari sisi pengukuran, akuntansi menggunakan dasar biaya historis (*historical cost*). Ijiri (1970) menyatakan bahwa praktik akuntansi dewasa ini akan dapat dimengerti dengan lebih baik kalau kita menyadari bahwa *accountability* merupakan tujuan yang mendasar (*underlying goal*). Menurut Ijiri,

dengan pendekatan accountability kita harus menekankan secara implisit penjaminan bahwa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan (*accounted*) oleh adanya catatan-catatan dan dokumen-dokumen sumber dari transaksi-transaksi secara terinci.

Pendapat Ijiri diatas menunjukkan bahwa bila tujuan akuntansi adalah untuk pemenuhan pertanggungjawaban maka historical cost adalah menjadi tulang punggungnya. Di samping itu juga dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi tidak hanya satu, accountability bukan tujuan satu-satunya, tetapi masih ada tujuan-tujuan yang lain. Bisa dikatakan bahwa tujuan-tujuan lain tersebut muncul secara evolutif mengikuti perkembangan ekonomi dan dunia usaha.

Dari tujuan accountability kemudian berkembang kearah tujuan berdasarkan *decision usefulness* atau *decition making*. American Accounting Association (AAA) melalui A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) merupakan lembaga formal pertama yang menunjukkan adanya pergeseran tujuan akuntansi dari stewardship menjadi *decition usefulness*. Perkembangan ke arah tujuan ini tidak dapat dipisahkan dari keinginan dunia akuntansi untuk memiliki satu teori yang bersifat universal.

Tujuan yang dikemukakan ASOBAT tentang perlunya menghasilkan informasi akuntansi adalah untuk :

1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk identifikasi dari lingkup keputusan kritis, dan penentuan objectives dan goals.
2. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan dalam suatu organisasi secara efektif.
3. Melakukan dan melaporkan tugas penyimpanan (*custodianship*) dari sumber daya.
4. Memperlancar fungsi sosial.

Akuntansi adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi tentang kondisi suatu perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dalam bentuknya yang standar adalah berupa laporan keuangan. Dari

laporan keuangan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan tertentu.

Tujuan akuntansi sebagaimana menurut ASOBAT tersebut sejalan dengan tujuan yang dinyatakan dalam APB Statement Nomor 4. Secara garis besar APB Statement No. 4 membagi tujuan akuntansi keuangan menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan pokok akuntansi keuangan dan laporan keuangan
2. Tujuan khusus akuntansi keuangan

Tujuan pokok akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan mengenai perusahaan tertentu kepada para pemakai laporan, khususnya kepada pemilik dan kreditur untuk pembuatan keputusan ekonomi tertentu. Tujuan tersebut meliputi pula penyediaan informasi untuk menilai efektivitas manajemen dalam memenuhi pekerjaan pengurusan perusahaan (stewardship) dan tanggungjawab managerial lainnya.

Tujuan khusus akuntansi keuangan adalah menyajikan secara wajar sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted accounting Principles*) tentang:

1. Posisi keuangan (*financial position*)
2. Hasil Usaha (*results of operations*)
3. Perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan

Tujuan umum laporan keuangan diperlukan untuk memberikan arah perkembangan prinsip akuntansi. Tujuan umum tersebut bebas atau tidak dipengaruhi oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi ini tidak digunakan langsung dalam kaitannya dengan kepentingan pemakai. Pemakai laporan keuangan hendaknya melakukan analisis terlebih dahulu sebelum menggunakannya sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi. Analisis laporan keuangan yang dilakukan sesudah laporan keuangan tersebut diterbitkan oleh perusahaan merupakan bagian yang paling penting dari pemanfaatan laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas masih belum bisa memberikan kegunaan

maksimal bagi para pemakainya sebelum pemakai mengolah lebih lanjut dalam bentuk analisis laporan keuangan seperti analisis rasio keuangan. Jenis analisis rasio tersebut bisa menyangkut analisis aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, leverage, dan produktivitas atau aktivitas. Analisis rasio merupakan analisis yang banyak digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, baik untuk pemberian kredit, pembelian saham, investasi maupun untuk kepentingan penentuan kelayakan jumlah pajak yang terutang.

KDPPLK (1999) menyatakan bahwa “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi” Laporan tentang posisi keuangan adalah berupa neraca, kinerja berupa laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan dapat berupa laporan arus kas.

Sementara itu secara ringkas FASB (1978) melalui SFAC Nomor 1 menetapkan tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor (sekarang maupun yang potensial) dan pemakai lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan lainnya secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk mempelajari dengan cara yang rasional.
2. Menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dan lainnya dalam mengevaluasi jumlah, saat dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan penerimaan dari penjualan, penebusan, atau pelunasan surat berharga atau pinjaman (*loan*). Karena aliran kas bagi investor dan kreditor berkaitan dengan aliran kas perusahaan, pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor dan lainnya dalam mengevaluasi jumlah, saat dan ketidakpastian aliran kas perusahaan yang bersangkutan di masa yang akan datang.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomik suatu perusahaan, klaim terhadap sumber ekonomik (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber ekonomik kepada pihak lain yang berhak dan pemilik ekutas), dan pengaruh transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi komposisi dan jumlah sumber-sumber ekonomik perusahaan tersebut serta klaim atas sumber-sumber ekonomik tersebut.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha (performance keuangan) suatu perusahaan selama satu periode.
5. Menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal, termasuk dividen kas dan distribusi lainnya dari sumber ekonomik perusahaan kepada pemilik, serta faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan.
6. Menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemegang saham dan pemakai sumber-sumber ekonomik yang dipercayakan kepadanya.
7. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik.

Menurut APB Statement No. 4 tujuan umum laporan keuangan tidak jauh berbeda dengan tujuan umum menurut PAI tahun 1984, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Sedangkan tujuan kualitatif menurut APB Statement No. 4 juga sesuai dengan tujuan kualitatif menurut PAI, yaitu bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut:

1. Relevan (*relevance*)
2. Dapat dimengerti (*Understandability*)
3. Daya uji (*Verifiability*)
4. Netral (*Neutrality*)
5. Tepat waktu (*Timeliness*)
6. Daya banding (*Comparability*)
7. Lengkap (*completeness*)

SFAC Nomor 5 dan SFAC No. 1 menyiratkan akan pentingnya penyajian informasi keuangan tambahan yang disertakan pada saat laporan sebuah perusahaan dipublikasikan. Laporan tambahan tersebut dapat berupa rasio-rasio keuangan dan laporan lengkap lainnya. Tentu saja jenis laporan tambahan tersebut dapat bertambah banyak, yang mungkin menyangkut aspek mikro maupun makro perekonomian. Informasi ini akan lebih bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan apabila disajikan juga dalam bentuk analisis.

Dalam SFAC Nomor 1 disebutkan bahwa pelaporan keuangan (*financial reporting*) lebih luas dibanding laporan keuangan (*financial statement*). Laporan keuangan hanyalah bagian dari pelaporan keuangan tersebut. Dalam pelaporan keuangan tidak hanya terdiri dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan) tetapi juga memasukkan informasi-informasi yang berhubungan secara langsung maupun informasi yang tidak langsung

yang dapat disediakan oleh sistem akuntansi. Informasi di luar laporan keuangan seperti yang disebutkan oleh FASB antara lain meliputi:

“..... news releases management's forecasts of other descriptions of its plans or expectations, and description of an enterprise's social or environmental impact are examples of reports giving financial information other financial statements”

Untuk menetapkan tujuan pelaporan keuangan hendaknya kita mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi sebagai lingkungan pengembangan akuntansi. Dalam SFAC Nomor 1 paragraf 10 sampai 16 disebutkan berbagai pertimbangan dalam menetapkan tujuan pelaporan keuangan untuk kondisi negara dimana konsep tersebut dikembangkan. Pertimbangan tersebut merupakan gambaran kondisi sosial ekonomi di Amerika Serikat pada waktu itu serta prediksi untuk tahun-tahun yang akan datang, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2. Produksi dan pemasaran produk dan jasa melibatkan proses yang panjang, terus-menerus dan rumit sehingga membutuhkan modal yang banyak.
3. Sebagian besar aktivitas produktif di Amerika Serikat dilaksanakan melalui investor sebagai pemilik perusahaan baik melalui pasar nasional maupun multinasional.
4. Perusahaan memperoleh modal untuk aktivitasnya tidak hanya melalui perbankan atau kelompok kecil dan individu tetapi juga melalui pasar modal yang tumbuh dan berkembang pesat.
5. Sumber-sumber produksi umumnya didominasi sektor swasta.
6. Pemerintah merupakan pihak utama dalam penyediaan data statistik perekonomian yang banyak digunakan oleh para manajer, investor dan para pemakai lain karena mempengaruhi persepsi dan analisis bisnis dan ekonomi.
7. Efektivitas individu, Perusahaan, pasar dan pemerintah dalam pengalokasian sumber-sumber yang terbatas sangat tergantung pada informasi yang dapat mencerminkan posisi

dan kinerja perusahaan untuk membantu dalam mengevaluasi alternatif tindakan dan berguna dalam memprediksi pendapatan, biaya dan resiko. Dalam hal ini fungsi pelaporan keuangan adalah sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi mengenai suatu entitas usaha.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak boleh terlepas dari masyarakat maupun negara. Karena masyarakat dan negara mempunyai tujuan sosial-ekonomi maka tujuan pelaporan keuangan hendaknya mengacu pada tujuan sosial ekonomi. Hubungan ini terlihat lebih jelas pada struktur akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi mempunyai tujuan utama untuk menghasilkan informasi yang berguna sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai contoh berdasarkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan informasi tambahan dari beberapa perusahaan atau industri dapat memberikan petunjuk kepada investor atau calon investor atau calon investor pilihan perusahaan atau industri mana sebaiknya modalnya akan ditanamkan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus menahan atau menjual investasi saham. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Tentu saja informasi keuangan yang disajikan harus memenuhi kualitas tertentu.

6. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PENELITIAN AKUNTANSI DENGAN PENGAJARAN DAN PRAKTIK

Penempatan akuntansi sebagai sains membawa konsekuensi bahwa teori akuntansi harus babas dari pertimbangan nilai dan bersifat deskriptif. Atas dasar ini bahasan akuntansi di tingkat akademik cenderung bergeser dari apa dan bagaimana suatu kejadian harus dilaporkan dalam mencapai tujuan ekonomik sosial tertentu ke arah apa

yang nyata dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan mengapa mereka berbuat demikian (teori positif). Hal ini terlihat dari banyaknya penelitian-penelitian di bidang akuntansi yang tidak berkaitan secara langsung dengan praktik atau standar akuntansi yang nyata dipraktikkan.

Dalam penelitian inilah teori akuntansi dikembangkan agar pengetahuan akuntansi sejajar dengan pengetahuan ilmiah yang lain. Teori akuntansi disini menyajikan hipotesis-hipotesis tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan pelaku ekonomi dan perilaku pasar modal yang diteorikan. Kecenderungan penelitian yang dilakukan makin menjauhkan dunia praktik dengan pendidikan karena peneliti tidak berminat lagi untuk membahas masalah bagaimana memperlakukan suatu transaksi dan mengapa demikian. Sementara itu, praktisi selalu dihadapkan pada masalah aktual yang memerlukan keputusan mendesak sehingga praktisi tidak lagi memikirkan teori dibalik keputusannya.

Ada tiga aspek yang penting dan yang saling berkaitan yang melandasi pengembangan akuntansi yaitu: riset; pengajaran; dan praktik. Praktik akuntansi akan mengalami perkembangan yang pesat dan memuaskan apabila terjadi interaksi yang baik antara ketiga aspek diatas.

William R. Kinney (1989) mengembangkan sebuah model yang menghubungkan antara penelitian akuntansi dengan pengajaran dan praktik yang saling terkait. Untuk melihat keterkaitan di antara ketiga variabel tersebut dalam sebuah segitiga hubungan sebab akibat (kuualitas) dapat digambarkan, sebagai berikut:

Hubungan Kausal Dalam Segitiga Antara Penelitian, Pengajaran dan Praktik Akuntansi



Sumber: Kinney, William, Jr. hal. 119

Model segitiga tersebut menggambarkan enam hubungan kausal yang ditunjukkan oleh arah anak panah untuk tiap-tiap bagian dalam model. Keenam hubungan tersebut adalah:

Pertama, kita telah mengetahui bahwa proses pengajaran akuntansi yang diselenggarakan pada akhirnya akan mempengaruhi praktik akuntansi yang sesungguhnya. Masiswa belajar berbagai teori, konsep dan metode akuntansi tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang benar saat ini dan menerapkannya nanti pada saat menjadi praktisi.

Kedua, perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam berbagai bidang akuntansi, sehingga terjadi praktik-praktik akuntansi yang muncul dan ternyata belum ada standar yang mengaturnya. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap penelitian akuntansi untuk mengatur masalah baru tersebut. Jadi terdapat hubungan antara praktik dan penelitian.

Ketiga, ketika para dosen akuntansi yang sekaligus sebagai praktisi bisnis belajar tentang praktik akuntansi yang sesungguhnya

dan mencoba memahami keterkaitan berbagai konsep, metode dan standar akuntansi yang ada dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku para pengambil keputusan (investor, kreditor, para pemegang saham, manajer, dan lain-lain). Karena mereka mengetahui hubungan di antara keduanya, selanjutnya mereka membawa pengetahuan tersebut ke dalam proses pengajaran kepada mahasiswa.

Keempat, mahasiswa yang semula dididik sesuai dengan kebutuhan dan berhasil mempunyai kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang baku (teoritis), perlu mengetahui tentang penerapan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam praktik yang sesungguhnya, sehingga ada hubungan antara kebutuhan pengajaran dengan praktik. Di sisi lain praktik yang sesungguhnya bicara tentang munculnya konflik kepentingan, pembagian resiko, kontrak dan perjanjian bisnis lain di antara para pelaku bisnis terhadap penerapan berbagai teknik dan metode akuntansi tertentu, misalnya antara metode capital lease dengan operating lease, antara tujuan pajak dengan tujuan perusahaan, dan lain-lain.

Kelima, kemajuan teknologi dapat pula menyebabkan perubahan dalam hubungan antara proses pengajaran dan penelitian. Mahasiswa yang semula dididik sesuai dengan kebutuhan dan berhasil mempunyai keterampilan seperti yang diinginkan, dengan adanya perubahan teknologi dan cara kerja dapat menyebabkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh tidak memadai lagi. Oleh sebab itu pendidikan dan pengajaran perlu direncanakan untuk menghasilkan lulusan yang tidak saja mempunyai kemampuan ilmu dan keterampilan baku, namun dapat pula melakukan adaptasi dan pengembangan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Adaptasi dan pengembangan kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman praktik dan pengembangan kemampuan penelitian untuk mengurangi terjadinya gap antara teori dan praktik.

Keenam, pada akhirnya marilah kita melihat arah hubungan antara penelitian dan praktik. Dari gambar di muka terlihat bahwa arah hubungan tersebut menunjukkan kata solusi. Penelitian berguna untuk memperoleh jawaban atas masalah pertanyaan atau memecahkan

masalah yang dihadapi dalam praktik. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian dapat memperkaya informasi yang berguna bagi para praktisi, lembaga penyusun kebijakan dan lembaga penyelenggara pendidikan. Penelitian perlu dikembangkan untuk investigasi terhadap berbagai masalah, baik yang bersifat teorikal maupun yang bersifat pragmatis.

7. AKUNTANSI DENGAN ILMU MULTIPARADIGMA

Beberapa literatur menyatakan bahwa teori dalam akuntansi merupakan lawan dari praktik, teori sebagai pembenaran, teori sebagai penjelasan, dan penalaran ilmiah dan juga sebagai model. Kontroversi mengenai akuntansi sebagai apakah sebagai ilmu, teknologi, seni atau sebagai jasa masih terus berlangsung.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan murni, akuntansi masih diragukan. Teori akuntansi harus mengacu kepada pengertian teori yang baku yang disusun berdasarkan metodologi yang baku pula dan bukan yang dihasilkan dari definisi yang secara khusus yang sesuai dengan kebutuhan. Teori akuntansi lebih menggambarkan suatu teknologi akuntansi keuangan dari pada suatu teori akuntansi. Disamping itu, dalam akuntansi terdapat unsur *judgement*, di lain pihak teori harus bebas dari pertimbangan dan tidak bersifat normatif.

Lebih lanjut, Belkaoui memaparkan bahwa akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu multiparadigma. Hal ini didasarkan pada pemikiran dalam akuntansi mengikuti pola proses revolusi. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn (1970) yakni, perkembangan ilmu pengetahuan pada suatu saat didominasi oleh suatu paradigma tertentu. Selanjutnya situasi ini berkembang ketahapan krisis yang ditandai dengan timbulnya anomali. Tahapan krisis ini akan berakhir dengan terjadinya pergantian paradigma, dominasi paradigma lama tergeser dan diganti oleh paradigma yang baru.

American Accounting Association (AAA) dalam publikasi *Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance (SOATATA)*

menggambarkan perkembangan pemikiran akuntansi dalam perspektif filsafat ilmu yang didasarkan pada tahapan perkembangan ilmu pengetahuan. SOATATA mengidentifikasi ada tiga pendekatan teoritis yang dominan yaitu:

1. Pendekatan Klasik, digunakan oleh para peneliti normatif-deduktif dan positif-induktif.
2. Pendekatan pengambilan keputusan, pendekatan ini digunakan oleh para peneliti yang menekankan pada 0 model pengambilan keputusan dan perilaku para pengambil keputusan.
3. Pendekatan informasi ekonomis

Argumentasi SOATATA yang relevan adalah pandangan beragamanya teori dan pendekatan dalam akuntansi menunjukkan perbedaan paradigma. Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang terpenting adalah revolusi ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam akuntansi, maka akuntansi telah berada dalam tahap perkembangan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai ilmu pengetahuan dan akuntansi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang multiparadigma.

Akuntansi tidak bisa berpijak pada satu paradigma tunggal yang komprehensif, akuntansi merupakan ilmu pengetahuan multiparadigma. Menurut SOATATA, akuntansi terdiri dari berbagai paradigma, antara lain:

1. Paradigma Induktif

Paradigma ini dilandasi oleh pemikiran bahwa teori-teori dapat dihasilkan dari pengamatan empiris atas dasar bagaimana praktik-praktik yang berkaitan dengan teori tersebut di lapangan. Praktik akuntansi yang berlaku pada akhirnya dapat menghasilkan teori yang berkaitan dengan praktek tersebut. Teori yang menggunakan paradigma ini adalah teori akuntansi positif (income smoothing, earnings management)

2. Paradigma Deduktif

Teori yang menggunakan paradigma ini adalah *theory price level adjusted accounting, replacement cost accounting, present value accounting*.

3. Paradigma Decision Usefulness

Berdasarkan asumsi bahwa manajemen bersifat rasional, maka akan diperoleh informasi yang dihasilkan dari suatu sistem. Sistem tersebut diperlukan sebagai landasan pembuatan keputusan dan sebagai landasan untuk mengevaluasi konsekuensi yang timbul akibat keputusan yang diambil.

4. Paradigma Decision Usefulness/ Agregat-market-behaviour

Teori yang menggunakan teori ini adalah: *the efficient market model, the efficient market hypothesis, the capital asset pricing model, the arbitrage pricing theory*.

5. Paradigma Decision Usefulness/ Individual -users

Teori yang digunakan dalam paradigma ini pada umumnya merupakan teori akuntansi keperilakuan, antara lain: relativisme kognitif dalam akuntansi; relativisme budaya dalam akuntansi; pengaruh keperilakuan dari informasi akuntansi; hipotesis *slack* organisasi dan penganggaran.

6. Paradigma Information Economics

Paradigma ini didasarkan pada komponen individual yang diperlukan untuk menghitung *expected payoff* untuk sistem informasi tertentu. Perkembangan teori akuntansi bertujuan untuk memungkinkan penyusunan dan penilaian sistem informasi untuk memaksimalkan utility untuk setiap pengguna. Teori yang menggunakan paradigma ini adalah *Theory of Teams*.

BAB 2

LINGKUNGAN PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Sejarah Akuntansi**
- 2) Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan Standar Akuntansi Keuangan**
- 3) Pendekatan Dalam Penentuan Standar Akuntansi**
- 4) Perkembangan Standar Akuntansi di Amerika**
- 5) Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Memahami sejarah profesi akuntansi dan regulasi akuntansi.**
- Menjelaskan perbedaan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan Standar Akuntansi Keuangan.**
- Memahami pendekatan dalam penentuan standar akuntansi keuangan.**
- Memahami peran dari berbagai kelompok masyarakat dalam mempengaruhi proses penetapan-standar akuntansi.**

Memahami perkembangan standar akuntansi yang berlaku di Amerika dan di Indonesia.

I. SEJARAH AKUNTANSI

Mempelajari sejarah akuntansi dapat diartikan sebagai studi tentang evolusi pemikiran dan praktik akuntansi serta institusi akuntansi yang terlibat sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Sejarah akuntansi juga membahas pengaruh evolusi tersebut terhadap lingkungan akuntansi.

Mengapa kita perlu mempelajari sejarah akuntansi? Pertanyaan semacam itu bias dijawab dengan mengemukakan alasan sebagai berikut: melalui sejarah kita dapat mengetahui evolusi perkembangan dan pemikiran akuntansi dari periode ke periode, dari masa ke masa sampai akhirnya pada keadaan yang sekarang ini. Melalui sejarah kita bisa mengetahui para tokoh, buku-buku, negara, organisasi atau badan-badan yang berperan dalam perkembangan akuntansi. Melalui sejarah pula kita bisa mengetahui apresiasi pengembangan akuntansi dan hubungan akuntansi dengan lingkungannya di masa yang lalu serta kecenderungan dan apresiasinya di masa yang akan datang. Dengan demikian sejarah akuntansi penting bagi pendidikan, pemahaman kebijakan dan praktik serta pengembangan akuntansi itu sendiri.

Periodisasi sejarah akuntansi dimulai sejak masa pra sejarah, disusul akuntansi di zaman kenabian, kemudian periode zaman evolusi pembukuan, periode seribu sembilan ratusan (1900-an) dan periode seribu sembilan ratus empat puluhan (1940-an) sampai sekarang. Periodisasi semacam ini hanya memudahkan dalam memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri yang menonjol pada periode yang bersangkutan. Tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan urutan waktu secara tegas sebab kadang kala pada ciri tersebut bukan dipengaruhi waktu tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial pada daerah tertentu.

Periode prasejarah merupakan periode sebelum masehi sampai munculnya pembukuan berpasangan sekitar tahun 1400-an. Zaman prasejarah ditandai dengan adanya catatan pembukuan tetapi belum ada

pemikiran yang signifikan dalam pengembangan akuntansi baru ada pada zaman evolusi pembukuan.

Periode evolusi pembukuan adalah periode lahirnya *double entry bookkeeping* dan disusul perkembangannya sampai tahun 1900. Setelah periode evolusi dalam tulisan ini selanjutnya akan diuraikan tentang periode terakhir, yaitu periode setelah tahun 1900. Perkembangan terakhir dalam tulisan ini dititikberatkan pada perkembangan akuntansi di Amerika Serikat sebagai negara utama yang menjadi acuan perkembangan akuntansi di dunia sekarang ini.

1. Zaman Prasejarah

Boleh dikatakan bahwa sejarah akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang dan pencatatan. Berarti sejak awal akuntansi selalu dikaitkan dengan uang. Sarana mencatat waktu itu dapat berwujud batu, tanah liat, daun, kayu dan lain-lain. Dengan demikian sejarah akuntansi dengan cara mencatat semacam itu sudah dikenal orang sejak lama. Akuntansi sederhana yang prinsipnya adalah adanya catatan yang menyangkut hitungan uang seperti tersebut di atas dimasukkan dalam periode prasejarah. Vernon Kam (1986) berpendapat bahwa zaman pra sejarah dimulai peradaban kuno yang menunjuk kepada Mesir, Babilonia-Sumeria, Yunani dan Romawi Kuno.

Akuntansi dimulai dengan penentuan catatan keberadaan gudang di Mesir kuno sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Masa kini disebut dengan *Egyption Period* atau periode Mesir kuno. Di Mesir pada masa itu ditemukan *store house* atau gudang yang berisi emas, persediaan kebutuhan pokok, biji-bijian, ternak, tekstil dan kekayaan lainnya. Otoritas pemerintahan (raja) saat itu memberikan keharusan bagi bendaharawan Negara sebagai administratornya untuk membuat laporan harian kepada wazir (perdana menteri) dan selanjutnya perdana menteri melaporkannya secara bulanan kepada raja. Hal yang sama juga berlaku di daerah yang berada dalam kekuasaan penguasa wilayah atau gubernur. Beberapa penulis mengidentifikasi bahwa zaman Mesir kuno sebagai poros tempat berputarnya perdagangan dan keuangan.

a. Zaman Mesopotamia

Mesopotamia adalah daerah di sekitar Baghdad, negeri Irak, termasuk Babilonia, Asiria dan Sumeria. Zaman Mesopotamia disebut juga zaman Babilonia (*Babylonia Period*) yang periodenya dimulai hampir bersamaan dengan peradaban Mesir kuno 3000 tahun SM (Kam, 1986) sampai 1000 SM. Peradaban Babilonia kemudian dikenal sebagai pembentuk sistem bahasa tulisan tertua dan pembuat catatan tertua (Brown dalam Belkaoui, 2000).

Pada waktu itu sudah ada perdagangan dan sudah ada pencatatan sederhana dalam bentuk tablet dari tanah liat yang diberi tanda berupa titik-titik sebagai tanda dari angkayang disebut *clay*. Kumpulan dari tablet-tablet tersebut disebut "*clay envelops*" yang berfungsi untuk mengungkapkan secara simbolis nilai asset dan transaksi ekonomis. Pencatatan di sini bertujuan untuk mencatat pemilikan atas suatu kekayaan. Sehingga perubahan jumlah kekayaan setiap periode bisa diketahui. Pencatatan semacam ini juga sudah dilakukan di Mesir dalam sejarah Mesir kuno.

Menurut Orville Keister sebagaimana dikutip Kam (1986) disebutkan bahwa untuk mencatat transaksi terdapat 2 macam 2 tablet, yaitu tablet penerimaan dan tablet pengeluaran. Dalam tablet penerimaan dicatat informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah dan jenis uang atau barang yang diterima.
- b. Nama yang menyerahkan atau memberikan item tersebut.
- c. Nama yang menerima.
- d. Tanggal penerimaan.

Sedangkan dalam tablet pengeluaran dicatat aliran keluar dari entitas tersebut yang terdiri atas daftar uang/kekayaan yang digunakan.

b. Zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno

Pada masa Yunani dan Romawi kuno kegiatan pencatatan terkait pada kegiatan rumah ibadah dan rumah tangga entitas (perusahaan), tetapi belum banyak dilakukan yang terkait pada tingkat negara.

Sekitar 1000 tahun SM di Yunani ditemukan koin sebagai alat pertukaran. Penggunaan koin sebagai alat pertukaran ini memberikan dampak positif bagi akuntansi walaupun belum begitu berarti. Pada saat itu pemerintah membagi secara adil pendapatan yang diterimanya ke para bendaharawan. Secara spesifik catatan bendaharawan berisi saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir. Kemudian menyusul penemuan bahwa pada masa kerajaan Athena sekitar tahun kelima masehi di Mesir (yang pada waktu itu merupakan sebuah propinsi bagian kerajaan) sudah terdapat sekumpulan catatan yang disebut Zenon Papyri. Zenon Papyri adalah seorang manajer dari perusahaan estat Appoloneus. Catatan yang ditemukan tersebut merupakan koleksi system pertanggungjawaban yang sekaligus sudah mulai terlihat upaya mendeteksi adanya kecurangan dari inefisiensi.

Menyusul zaman Yunani kuno adalah zaman Romawi Kuno. Dalam perdaban Romawi kuno ditemukan bahwa secara hukum pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut terlihat adanya hak sipil. Hak sipil tergantung pada tingkat kekayaan yang dinyatakan oleh warga Negara (pembayar pajak) dalam posisi keuangan tersebut (Berkoui, 2000). Pada zaman Romawi kuno juga ditmukan bahwa seorang arsitek pada awal era Kristiani menilai gedung tidak hanya sebesar *cost* (harga perolehan) gedung saja tetapi harus dikurangi dengan seperdelapannya setiap tahun. Berarti pada masa ini sudah dikenal dengan adanya proses depresiasi dan selanjutnya terakumulasi sebagai pengurang *cost* gedung dalam penilaian yang bersangkutan.

c. Zaman Cina

Di Cina, negara sudah melaukan praktik akuntansi sejak lama. Pada zaman Dinasti Chou (1122 SM - 256 SM) akuntansi sudah

digunakan sebagai alat untuk membantu perencanaan, untuk pertimbangan dalam ekspansi wilayah negara, untuk mengatur negara dan sebagainya. Pada waktu itu Cina dikenal sebagiannya. Pada waktu itu Cina dikenal sebagai negara *feodal expansionist* sehingga diperlukan penggunaan akuntansi sistem dana, sistem pajak yang didapat dari daerah jajahan dan asset di berbagai daerah. Setiap catatan dikontrol secara periodic: 10 hari, lalu 30 hari dan kemudian di-review setiap tahun. Selanjutnya dilakukan penelitian oleh staf yang ditunjuk sekaligus untuk mengetahui mereka yang tidak patuh. Pencatatan dimaksudkan untuk tujuan pengelolaan fiskal dan moneter dalam rangka pertanggungjawabannya (*stewardship*). Dalam peradaban Cina tersebut dikembangkan akuntansi yang berguna dalam mengelola negara, yang kemudian terkenal dengan pengembangan akuntansi pemerintahan.

d. Zaman Manorial di Inggris

Zaman Manorial dikenal pula sebagai zaman feodalisme. Zaman Manorial adalah berjayanya para tuan tanah di daratan Eropa umumnya dan Inggris khususnya para tuan tanah mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat. Ada tuan tanah kecil, tuan tanah sedang sampai ke tuan tanah besar dan tuan tanah yang tertinggi ada di tingkat kerajaan. Tuan tanah kecil bertanggung jawab ke tuan tanah yang lebih tinggi sehingga muncul *stewardship system* (sistem pertanggungjawaban kepada atasan). *Stewardship system* dikenal juga dengan metode *metode charge and discharge*. Pada waktu itu akuntansi digunakan oleh tuan tanah (sebagai penguasa) hanya untuk mencatat pendapatan yang diperolehnya dari pajak rakyat dan mencatat pengeluaran kebutuhan pribadinya. Pelaporan semacam ini sebagai pertanggungjawaban tuan tanah kecil kepada atasannya. Pencatatan ini menyangkut dua aspek, yaitu aspek fiskal-fiskal dan moneter dengan menggunakan *single entry system*. Saat tuan tanah melapor ke tingkatan yang lebih tinggi diadakan *hearing* untuk mendekati dengan peserta pertemuan (*audience*). Berarti pada saat *hearing* tersebut ada control dari audience. Di sini merupakan awal mula muncul istilah audit. Tekanan orientasi sistem

audience ini adalah pada pengecekan beberapa steward (pengelola atau pengurus) di berbagai tingkat. Masa Manorial ini berlangsung pada abad 11 dan 12.

Di belahan lain pada masa itu, pada abad 11 dan 12, di Italia akuntansi berfungsi sebagai catatan atas pengeluaran dari kapal-kapal dagang yang pergi melakukan perdagangan serta catatan atas pendapatan yang diterimanya dalam perdagangan serta catatan atas pendapatan yang diterimanya dalam perdagangan. Dalam hal ini belum ada asumsi yang dicatat terbatas pada pengeluaran dan penerimaan selama pelayaran yang kemudian dianggap kegiatan tersebut selesai, tidak berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya atau sesudahnya. Selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut disebut keuntungan (bila lebih besar penerimaannya) atau kerugian (bila lebih besar pengeluarannya) dari kegiatan perdagangan atau usaha. Berarti pada waktu itu terlihat sudah ada konsep kesatuan usaha dan terlihat bahwa laporan laba rugi lebih dipentingkan daripada mengetahui posisi keuangan. Laporan laba rugi merupakan laporan untuk mengetahui kinerja. Walaupun dalam hal ini pengakuan laba atau rugi masih mendasarkan pada asumsi dasar kas (*cash basis*).

2. Zaman Evolusi Pembukuan

Seperti setelah disebutkan di atas bahwa bersamaan dengan zaman Manorial di Inggris, akuntansi di Italia sampai abad ke-11 dan 12 hanya berfungsi sebagai catatan atas biaya yang dikeluarkan oleh kapal-kapal Italia yang pergi melakukan perdagangan dan biaya perjalanan tersebut merupakan dasar perhitungan keuntungan dan kerugian dari suatu kegiatan usaha. Pada masa ini pencatatan masih dilakukan secara *single entry* atau tata buku tunggal.

Akuntansi di Italia mulai berkembang cukup pesat pada abad 12. Perkembangan ini berlanjut sampai akhirnya ditemukan tata buku berpasangan (*double entry bookkeeping*) pada abad 14. Perkembangan akuntansi tersebut sejalan dengan sejarah perekonomian saat itu di mana Italia berkembang menjadi pusat perdagangan dunia sampai abad 16.

a. Lahirnya Tatabuku Berpasangan

Tatabuku berpasangan (*double entry bookkeeping*) sebagai titik tolak perkembangan akuntansi dan teori dari akuntansi telah ditemukan dalam catatan seorang pedagang di Genoa, Italia sekitar tahun 1340. Meskipun beberapa konsep akuntansi dapat dilihat pada zaman sebelumnya namun kurang berpengaruh terhadap akuntansi masa kini. Penemuan terakhir menunjukkan bahwa sesungguhnya sebelum tahun tersebut telah ada catatan tentang tatabuku berpasangan. Kadang-kadang orang menyebut *double entry bookkeeping* dengan *double entry accounting*. Dalam tatabuku berpasangan pada masa ini mulai dikenal istilah *debere* (debit) dan *creed* (kredit).

Beberapa konsep yang menjadi ciri tatabuku berpasangan pada waktu itu adalah:

1. Sudah ada konsep kesatuan usaha yang terpisah dari pemilikinya. Umumnya usaha yang dilakukan berbentuk *partnership*.
2. Transaksi dicatat dengan satuan moneter. Demikian juga barang yang diperdagangkan dinyatakan dalam satuan moneter.
3. Digunakan perkiraan *expenses* (biaya) dan *equity* (ekuitas) menunjukkan bahwa pada masa itu telah dikenal adanya perbedaaan antara *capital* (modal) dan *income* (laba).

Pada tahun 1494 publikasi buku pertama yang memuat dasar akuntansi berpasangan yang dikarang Lucas Pacioli diterbitkan di Venecia, sebuah kota di Italia. Buku tersebut berjudul "**Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et proportionalita**", yang dalam bahasa Inggris berubah menjadi *Review of Arithmetic, Geometry and Proportions*. Buku tersebut membahas tentang akuntansi yang diberi judul "*Particulariesbde Computis et Scripturis*" berisi tentang tatabuku berpasangan. Pada bab tersebut antara lain dikatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang mengenai aktiva dan kewajibannya. Debit (*Adabeo*) dan

kredit (*Credito*) digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan.

Prinsip-prinsip berpasangan tersebut pada dasarnya masih dipergunakan sampai sekarang. Oleh Karena itu walaupun Pacioli bukan penemu pertama tatabuku berpasangan tetapi karena buku tersebut dipublikasikan pertama kali maka Pacioli disebut sebagai penemu tatabuku dan oleh pengikutnya diberi julukan "*the father of accounting*". Buku tersebut sangat berpengaruh dalam pengembangan tatabuku berpasangan di masa berikutnya ketika akuntansi berkembang ke bagian Eropa lainnya pada abad 16 dan 17. Mula-mula ke Jerman dan Perancis kemudian ke Inggris dan Belanda sebagai Negara tetangga Jerman.

Pengembangan akuntansi di Italia pada masa itu dikenal sebagai Metode Italia atau Metode Venesia. Metode Italia mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi kepada pemilik mengenai aktiva dan kewajiban secara cepat. Tujuan ini dikenal sebagai *stewardship objective*.
2. Tidak ada konsep kontinuitas usaha, karena pada dasarnya usaha tersebut hanya merupakan kerja sama selama periode tertentu yang saat mulai dan berakhirnya ditentukan.
3. Beberapa usaha sudah memisahkan perusahaan sebagai entitas, tetapi sebagian melaporkan usaha dan pribadi secara bersama-sama.
4. Kurang atau belum adanya unit moneter tunggal yang stabil, sehingga memerlukan banyak penjelasan deskriptif. Persediaan dijelaskan secara terperinci.

Dalam metode Italia terlihat bahwa tujuan pertanggungjawaban atau *stewardship objective* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh akuntansi sebagai konsekuensi atas kontrak antara pemilik modal dengan pedagang yang menjalankan modal tersebut.

Dari Italia *double bookkeeping* menyebar luas ke Eropa Barat, selanjutnya disebarkan oleh Inggris melalui pengaruhnya sebagai negara kolonialis ke Amerika Utara dan negara-negara yang kemudian

disebut sebagai "*British Commonwealth*". Bersamaan itu pula Perancis menyebar ke negara-negara Afrika dan Polinesia, Jerman menyebarkan ke Rusia, Jepang dan Swedia. Sementara itu Belanda memperkenalkan "*boek houding*" tersebut dikembangkan dalam Bond A, Bond B dan MBA. Oleh karena itu sampai awal tahun tujuh puluhan akuntansi di Indonesia sangat didominasi pengaruh negeri Belanda.

Sebenarnya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa orang yang pertama menulis buku tentang tatabuku berpasangan adalah Benedetto Cotrugly. Dia menulis buku tentang tatabuku berpasangan pada tahun 1458 atau 36 tahun sebelumterbitnya buku "*Summa de Arithmatica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*", namun buku ini tidak langsung diterbitkan. Karangan Benedetto Cotrugly tersebut baru diterbitkan tahun 1573. Oleh karena itu selanjutnya dalam sejarah akuntansi nama Benedetto Cotrugly tidak sepopuler Lucas Pacioli.

b. Masa Revolusi Industri

Pada awal abad 15 kekuatan ekonomi bergeser dari Italia ke Inggris dan daratan di Eropa Barat lainnya. Demikian juga akuntansi berkembang dari Italia ke Eropa Barat. Sehingga pusat perkembangan akuntansi berpindah dari Italia ke Inggris.

Di Italia setelah zaman Luca Pacioli penemuan baru dalam pengembangan akuntansi tergolong minim. Periode ini (1494-1775) disebut masa stagnasi (*age of stagnation*). Walaupun demikian ada juga perkembangan melalui perdagangan, pengaruh tatabuku berpasangan berkembang dari Venesia ke Jerman, Belanda, Inggris, Skotlandia, Portugal dan Spanyol selama periode tersebut. Perkembangan yang perlu dicatat pada masa stagnasi adalah adanya perluasan aplikasi tatabuku berpasangan untuk jenis perusahaan yang berbeda-beda, dibuatnya laporan laba rugi akhir tahun dan penekanan istilah debit dan kredit untuk semua perkiraan. Masa Stagnasi ini berlangsung sampai awal Revolusi Industri sekitar tahun 1775. Pada masa itu perekonomian di Eropa dipengaruhi aliran yang disebut kapitalisme. Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Kapitalisme menulis buku tentang ekonomi yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul *An*

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations atau lebih singkat "*Wealth of Nations*". Sejak terbitnya buku ini kapitalisme berkembang pesat dan revolusi bergerak secara cepat.

Revolusi industri yang terjadi di Inggris membutuhkan dana yang sangat banyak untuk berekspansi seperti untuk peningkatan kapasitas produksi, pendirian perusahaan baru, pembangunan pabrik di daerah baru dan lain-lain. Dana tersebut didapatkan dari mana saja termasuk dari masyarakat dengan cara menjual saham kepada masyarakat. Penjualan saham kepada masyarakat berpengaruh terhadap pemilikan saham perusahaan oleh orang banyak. Saat itu mulai disadari betul pentingnya konsep *business entity* (kesatuan usaha). Harus jelas pemisahan antara perusahaan dengan pihak lain terutama dengan pemilik modal. Di samping itu perusahaan dari industri berupa kerajinan tangan (*handy craft*) menjadi industri mesin dan mekanisasi. Pengaruh perubahan tersebut adalah munculnya kesadaran akan perlunya *cost accounting* (akuntansi biaya), munculnya akuntansi untuk depresiasi dan pengaruh *income tax* (pajak penghasilan) terhadap akuntansi.

c. Akuntansi di Inggris dan Amerika Serikat

Pada tahun 1853 di kota Edinburgh, Skotlandia berdiri sebuah organisasi akuntansi yang diberi nama Society of Accountants in Edinburgh. Organisasi ini merupakan organisasi akuntansi pertama di Inggris Raya dan bahkan mungkin pertama di dunia. Kemudian disusul berdirinya organisasi serupa di Glasgow tahun 1855, di Aberdeen 1876, di Liverpool dan London tahun 1870 dan di Manchester tahun 1875. Pada tahun 1880 lima organisasi yang telah ada bekerja sama dalam sebuah organisasi yang diberi nama the Institute of Chartered Accountant in England and Wales.

Pada tahun 1844 pemerintah Inggris mengeluarkan **Companies Act** di mana undang-undang ini mewajibkan setiap direktur perusahaan untuk menyajikan neraca yang sudah diaudit (*audited balance sheet*) kepada para pemegang saham. Kemudian pada undang-undang yang sama tahun 1865 ditentukan model formulir neraca yang sama

untuk tujuan tersebut. Formulir ini sebagai upaya untuk menstandarisasi bentuk pelaporan neraca. Adanya ketentuan perundang-undangan ini sangat mendorong perkembangan praktik akuntansi yang terstandarisir.

Perkembangan akuntansi berjalan cepat seiring dengan peran dan posisi kolonialisme Inggris yang mempunyai kantor dagang di mana-mana di seluruh dunia. Karena kantor-kantor dagang tersebut melakukan perdagangan Internasional, akibatnya akuntansi sebagai teknologi lunak menyebar ke penjuru dunia. Sejarah mencatat bahwa pada pergantian abad 19 ke abad 20 akuntansi Inggris beroperasi di seluruh jajahan Inggris yang tersebar di seluruh dunia.

Pada tahun 1873 kantor akuntan (*firm*) Inggris yaitu Price Waterhouse & Co, pertama memulai usaha jasa bidang akuntansi di USA yang kemudian membuka kantor di New York tahun 1890, walaupun saat itu hampir semua partnernya adalah orang Inggris. Regenerasi angkatan pertama staf kantor akuntan yang didirikan Inggris di Amerika Utara membuka peluang bagi para akuntan Amerika untuk lebih berperan dalam praktik dan pengembangan akuntansi di Amerika Serikat.

Pada tahun 1886 berdiri American Association of Public Accountants (AAPA) yang diperkuat dengan lahirnya undang-undang tahun 1896 tentang gelar Certified Public Accountants (CPA) untuk Akuntan di Amerika Serikat. Dalam undang-undang itu diatur bahwa gelar akuntan didapat setelah seseorang lulus ujian CPA dan selanjutnya harus terdaftar di organisasi. AAPA berubah menjadi American Institute of Accountants (AIA) tahun 1971, yang kemudian sejak 1975 dikenal sebagai American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

d. Periode Setelah 1900 di USA

Literatur dari para pelopor pengembangan akuntansi setelah tahun 1900 di USA antara lain: W.A. Paton (1922), Stander, Hatfield dan

Moore (1938), Gilman (1939), W.A. Paton dan A.C. Littleton (1940) dan Grady (1965).

W.A. Paton (1922) menguji beberapa premis dan postulate dasar yang tersirat dalam pemikiran akuntansi pada saat itu. Dia mengidentifikasi 11 postulates yang diyakini menjadi dasar pemikiran akuntansi, yaitu:

1. Going concern, yaitu anggapan bahwa perusahaan ada selamanya.
2. Assets equal equity.
3. Neraca adalah representasi financial dari kondisi usaha.
4. Uang adalah satuan pengukur yang dianggap konstan.
5. Cost merupakan nilai dasar.
6. Cost yang dibelanjakan melekat pada nilai produksi.
7. Prinsip actual harus diikuti.
8. Kerugian pertama kali harus dikurangi dengan akumulasi laba.
9. Pembayaran kepada pemegang saham harus berasal dari pendapatan.
10. Prinsip FIFO harus diterapkan.
11. Kesatuan usaha.

Pada tahun 1938 Standers, Hatfield dan Moore menulis monograph berjudul *A Statement of Accounting Concepts of Profit*. Buku ini cukup lengkap membahas perubahan penekanan akuntansi yang semula lebih menekankan pada neraca ke arah lebih menekankan kepada laporan laba rugi. Gilman memberikan doktrin dan konvensi. Doktrin yang dikemukakan seperti berikut: *conservatism, consistency, disclosure, materiality*. Sedang konvensinya adalah sebagai berikut: *entity theory, valuation and accounting period*.

Kemudian W.A. Paton dan A.C. Littleton (1940) menerbitkan tulisan dengan judul "*An Introduction to Corporate Accounting Standards*" yang menjadi Monograph No. 3 dari American Accounting Assosiation (AAA). Monograph ini dalam bahasa Indonesia telah disadur dan

dibahas oleh Suwardjono (1985) dengan judul Seri Teori Akuntansi No. 1: *Pokok-Pokok Pikiran Paton dan Littleton Tentang Prinsip Akuntansi Untuk Perseroan*. Tulisan W.A. Paton dan A.C. Littleton tersebut mencoba memberikan rerangka acuan teori akuntansi yang berisi konsep-konsep yang logis (*logic*), terkordinasi (*coordinated*) dan konsisten (*consistent*) sebagai acuan dalam membentuk standar akuntansi berdasarkan praktik yang sedang berjalan.

Perkembangan selanjutnya yang dianggap cukup menonjol terjadi di tahun 1965 saat Paul Grady berdasarkan dari hasil penelitiannya membuat tulisan yang diberi judul "*Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Bussinnes Enterprises*." Tulisan Paul Grady tersebut diterbitkan dalam bentuk Accounting Research Studies (ARS) No.7 dan dijadikan acuan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum di Amerika Serikat sampai awal tahun tujuh puluhan. Walaupun tetap ada kontroversi, ARS No. 7 ini dianggap berhasil.

Di Indonesia tulisan Paul Grady tersebut merupakan sumber utama dalam penulisan Prinsip Akuntansi Indonesia pertama kali, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia 1974 (PAI 1974). Penerbitan PAI 1974 tersebut mengandung keterpaksaan secara umum untuk menunjang akan dibuka kembali Bursa Efek Jakarta pada tahun tersebut.

Di USA perkembangan akuntansinya yang berjalan lebih pesat di tahun 1930-an dimulai dengan dibentuknya panitia-panitia khusus dalam organisasi profesi. Walaupun hasil kerja dari panitia-panitia tersebut bersifat pemecahan masalah akuntansi secara umum tetapi karena selalu adanya *problem solving* maka praktik akuntansi mengalami kemajuan yang cukup berarti.

Pada tahun 1936, tahun 1941 dan 1949 AAA menerbitkan pernyataan dalam Tentative Statement of Accounting Principles yang berusaha menetapkan beberapa dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian dalam revisi tahun 1957 AAA mencoba membahas konsep dasar yang mendasari kebiasaan akuntansi (*Accounting Convention*).

Dalam tahun 1937 AIA (sekarang AICPA) membentuk Committee on Accounting Procedure (CAP) dengan tujuan melakukan pengembangan seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang diterima

umum. Maka agar dapat mempersempit ruang perbedaan di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan dengan cara mengeliminasi praktik-praktik yang tidak dikehendaki.

Selama 20 tahun yaitu 1938-1958 Committee on Accounting Procedures (CAP) telah mengeluarkan 51 buah Accounting Research Bulletins (ARB) yang menyajikan berbagai saran perlakuan akuntansi untuk berbagai transaksi dan rekeningnya. Pada waktu itu penerbitan ARB sebagai satu-satunya sumber Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum di USA. Penerbitan ARB juga didukung oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Bursa Saham di USA, yang dalam hal ini adalah New York Stock Exchange (NYSE).

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) merupakan organisasi profesi yang mengkoordinasi para akuntan bersertifikat (CPA) di USA. Badan ini mempunyai dua komite teknis yang mempunyai peran penting, yaitu:

1. Accounting Standards Executive Committee (AcSec) dan,
2. Auditing Standar Committee (AuSec).

Dua komite ini diberi wewenang untuk mewakili AICPA dalam menanggapi masalah-masalah akuntansi keuangan dan biaya serta masalah pemeriksaan akuntan (peng-audit-an). AcSec mengeluarkan dua jenis Procurements yaitu: Statement of Position (SOP) dan Industry Accounting Guides. Umumnya procurement lebih sempit dan subjeknya lebih spesifik FASB Statement.

Tahun 1958 Special Committee on Research Program dari AICPA memberikan rekomendasi agar melalui penelitiannya AICPA menetapkan postulate dan prinsip-prinsip akuntansi.

Pada tahun 1959 AICPA mendirikan Accounting Principles Board (APB) untuk menggantikan Committee on Accounting Procedures (CAP). APB berperansebagai lembaga penyusun standar atau prinsip akuntansi (standard setting body). Lahirnya APB didorong adanya tekanan-tekanan pemerintah terhadap profesi dan banyaknya skandal keuangan yang dikaitkan dengan profesi akuntan menurun. APB didirikan dengan tujuan untuk memajukan penulisan yang

mencerminkan apa yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. APB bekerja dari tahun 1959 sampai dengan 1973 saat APB dibubarkan. Selama periode tersebut APB telah menerbitkan opinion sebanyak 31 buah dan mengeluarkan 4 statements serta seri-seri Accounting Interpretations.

Keempat statements yang diterbitkan APB adalah:

1. APB Statement Nomor 1 adalah suatu laporan atas penerimaan Accounting Research Studies (ARS) Nomor 1 dan ARS Nomor 3. ARS Nomor 1 tentang *The Basic Postulates of Accounting* by Maurice Moonitz, yang terbit tahun 1961. Sedang ARS Nomor 3 tentang *A Tentative Set of Board Accounting for Business Enterprises* by Robert Sprouse and Moonitz, yang dikeluarkan tahun 1962.
2. APB Statement Nomor 2 tentang *Disclosure of Supplementary Financial Information* by Diversified Companies, yang dikeluarkan pada bulan September, 1967.
3. APB Statement Nomor 3 tentang *Financial Statements Restated for General Price Level Changes*, yang dikeluarkan pada bulan Juni 1969.
4. APB Statement Nomor 4 tentang *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises*, yang diterbitkan bulan Oktober 1970.

Keanggotaan APB sebagian besar adalah tenaga paruh waktu (*part timer*) sehingga hasil kerja dan publikasinya dinilai tidak efektif. APB dinilai gagal untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Hal inilah kemudian menyebabkan pada tahun 1973 APB dibubarkan dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Masih berlangsungnya eksistensi perlakuan alternatif akuntansi yang mengizinkan perusahaan untuk menyajikan laba per lembar saham terlalu tinggi, khususnya para merger dan akuisisi perusahaan.
2. Kurangnya perlakuan akuntansi yang mencukupi untuk masalah-masalah akuntansi yang baru misalnya untuk: *investment tax credit*, akuntansi untuk industri-industri

monopoli (*franchising industries*), usaha pengembangan tanah dan lease jangka panjang.

3. Pengungkapan sejumlah kasus penyelewengan (*fraud*) dari tuntutan hukum yang diakibatkan pilihan metode-metode akuntansi. Metode-metode tersebut telah gagal untuk mengungkapkan informasi dalam sejumlah kasus.
4. Kegagalan APB untuk mengembangkan rerangka kerja akuntansi yang konseptual (*conceptual framework*).

Kritik terhadap APB berlangsung terus-menerus, sehingga dalam bulan April 1971 AICPA membentuk dua grup studi, yaitu; "*The Study Group on Establishment of Accounting Principles*" atau dikenal dengan Komite Wheat, karena grup ini diketuai oleh Francis M. Wheat mantan komisioner SEC yang merupakan salah seorang pengkritik terdepan profesi akuntansi. Grup lainnya adalah "*The Study Group on the Objectives of Financial Statement*" yang dipimpin oleh Robert M. Trueblood, seorang CPA terkenal dan managing partner pada kantor akuntan Touch Ross & Co.

Komite Wheat menyelesaikan laporannya pada bulan Maret 1972 yang menghendaki adanya perubahan signifikan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. Rekomendasi Komite Wheat antara lain:

- Pembentukan Financial Accounting Foundation (FAF) badan yang memiliki 9 trustee ini, mempunyai tugas utama mengangkat anggota Financial Accounting Standard Board (FASB) dan mencari dana untuk menjalankan operasinya.
- Pembentukan FASB. Badan yang memiliki 7 orang anggota full time ini mempunyai tugas utama menetapkan standar pelaporan keuangan atau dikenal dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (SFAS). Peran FASB secara lebih lengkap diuraikan di belakang.
- Pembentukan Financial Accounting Standard Advisory Council (FASAC) dengan jumlah anggota 20 orang dan akan berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan *task forces* sebagai reaksi terhadap standar yang disusul.

AICPA menerima rekomendasi di atas pada bulan Juli 1972, kemudian APB dibubarkan. Dan pada tanggal 1 Juli 1973 didirikan badan baru pengganti APB yang diberi nama: *The Financial Accounting Standard Board* (FASB). Sementara the Trueblood Study Group tidak menyelesaikan laporannya sampai akhir Oktober 1973. Trueblood Study Group hanya membuat laporan yang berisi identifikasi beberapa tujuan laporan keuangan tetapi tidak dilengkapi dengan rekomendasi implementasinya.

e. Peran FASB Dalam Pengembangan Akuntansi

Financial Accounting Standard Board (FASB) adalah badan yang bersifat otoritatif, independen terhadap AICPA (di USA) yang ditugasi dalam mengembangkan dan memajukan akuntansi keuangan dan dalam menetapkan standar-standar pelaporan. Dengan demikian badan ini di samping berperan sebagai *standard setting body* sebagai pengganti APB, juga berfungsi sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengembangan akuntansi. Di samping FASB di USA ada beberapa badan yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menerbitkan standar profesional, yaitu: *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) and *Auditing Standards Board* (ASB). GASB bertanggung jawab menerbitkan standar profesional untuk sektor publik (organisasi pemerintah) sedang ASB bertanggung jawab untuk penerbitan standar profesional walaupun mungkin tidak langsung antara lain *Securities Exchange Commission* (SEC), *The American Accounting Association of Accountants* (AAA), *National Association of Accountants* (NAA), *Financial Executives Institute* (FEI) dan Kongres USA.

Mulai tahun 1977 struktur FASB mengalami perubahan sebagai hasil rekomendasi *Structure Committee of the Financial Accounting Foundation* (FAF). The FAF terdiri atas 6 organisasi sponsor yaitu: AAA, AICPA, Financial Analysts Federation, Financial Executives Institute (FEI), National Association of Accountants (NAA) dan Security Industry Association (SIA). Keanggotaan the FAF terdiri dari pemerintah, dengan komposisi seperti berikut:

- Wakil AAA 1 orang.

- Wakil AICPA 4 orang.
- Wakil FinancialAnalysts Federation 1 orang.
- Wakil Financial Executives Institute 2 orang.
- Wakil NAA 1 orang.
- Wakil SIA 1 orang.
- Wakil kelompok akuntan pemerintah 3 orang.

Tugas FAF adalah mengangkat Board of Trustees. Dewan (Board of Trustee) ini mempunyai wewenang mengangkat anggota FASB juga juga berperan sebagai pengawas dan bertugas menyediakan atau mencari dana untuk mendanai kegiatan Dewan. Anggota board adalah representasi dari 6 organisasi sponsor ditambah 2 anggota dari anggota dari organisasi besar yang tidak termasuk 6 organisasi sponsor, satu diantaranya yaitu berasal dari industri perbankan.

Keanggotaan FASB adalah tenaga penuh waktu (full timer) berjumlah 7 (tujuh) orang masing-masing diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal selama 2 (dua) periode. Anggota FASB mewakili banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, empat wakil dari kantor akuntan publik, tiga anggota berasal dari badan-badan yang berhubungan dengan akuntansi, misalnya: pemerintah, industri dan lembaga pendidikan. Tidak boleh ada konflik kepentingan antara anggota secara pribadi dengan *public interest*. Latar belakang disiplin harus dimiliki oleh seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, manajemen keuangan (*finance*) dan bisnis serta memiliki perhatian terhadap kepentingan publik secara serius. Dengan keanggotaan semacam itu dan independensinya, FASB diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang netral dan tidak memihak kelompok atau pihak tertentu.

FASB mempunyai wewenang menerbitkan standar profesional yang berkaitan dengan penyajian informasi keuangan organisasi bisnis. Penerbitan resmi dari FASB adalah berupa:

- Statement of Financial Accounting Standards (SFAS).
- Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC).
- Interpretation.

- Technical Bulletin.

Keempat penerbitan resmi tersebut masing-masing diberi nomor urut yang menggambarkan kronologi masing-masing penerbitannya. Dalam perjalanannya FASB lebih produktif dibanding dengan badan-badan sebelumnya dalam menghasilkan SFAS, interpretasi dan *technical bulletines*. Sebagai tambahan selama periode mulai tahun 1978 sampai tahun 1985 fASB telah mengeluarkan 6 (enam) Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC).

Dalam menjalankan tugasnya FASB memperoleh saran-saran dari the Financial Accounting Standard Advisory Council (FASAC) yang memberikan saran atau usulan-usulan yang berkaitan dengan rencana proyek dan operasi, agenda dan prioritas, pertunjukan satuan tugas serta isu-isu teknis pada umumnya.

Dengan adanya badan-badan penerbitan yang diuraikan di atas akuntansi di Amerika harus mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut berjalan semakin cepat baik secara teori, konsep maupun praktiknya, karena penerbitan-penerbitan tersebut selanjutnya digunakan secara acuan pengembangan praktik dan praktik merupakan proyek studi dan badan-badan yang ada.

2. PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM dan STANDAR AKUNTANSI

Rerangka konseptual yang berfungsi sebagai konstitusi hanya memuat konsep-konsep umum yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai “konstitusi akuntansi” di suatu negara. Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau dapat juga pedoman-pedoman yang baik dan telah banyak dipraktikkan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autiritatif. Kedua pedoman tersebut secara keseluruhan membentuk rerangka pedoman operasional yang disebut

generally accepted accounting principles/ GAAP (prinsip akuntansi berterima umum).

Sebagai pedoman operasional, PABU akhirnya akan menjadi kriteria untuk menentukan apakah statemen keuangan sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan yang baik, benar, dan jujur yang secara teknis disebut menyajikan secara wajar. Standar akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kewajaran. *Auditing Standard Board (ASB)* memberi pendapat dalam laporan audit standar sebagai berikut:

In our opinion, the financial statement referred to above present fairly, in all material respect, the financial position of X company as of (at) December 31, 19XX, and the result of its operations and its cash flow for the year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles.

Mengapa kriteria kewajaran penyajian laporan keuangan adalah PABU bukan standar akuntansi keuangan (di Indonesia) atau *Financial Accounting Standard* (di Amerika)? Alasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah:

1. Tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi dapat atau dituangkan dalam bentuk standar akuntansi. Kewajaran penyajian juga harus dievaluasi secara luas atas dasar ketentuan-ketentuan lain yang mengikat. Termasuk dalam ketentuan lain adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan oleh badan selain penyusun standar (misal BAPEPAM).
2. Bila standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, dikhawatirkan terjadi bahwa kewajaran hanyalah bersifat formal, bukan bersifat substantif. Artinya, standar akuntansi akan dijadikan standar minimal dan ada kemungkinan evaluator atau auditor hanya memenuhi standar minimal tersebut untuk menentukan kewajaran. Dapat terjadi hal-

hal penting yang tidak diatur dalam standar akuntansi tidak dipertimbangkan secara seksama atau bahkan diabaikan.

3. Untuk mencapai kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran harus merupakan suatu rerangka pedoman yang cukup komprehensif meliputi aspek teknis dan konseptual. Pedoman semacam itu mirip dengan apa yang terjadi dalam penentuan kriteria perbuatan etis. Apakah suatu perbuatan dikatakan etis secara profesional harus dinilai atas dasar rerangka pedoman (di Amerika dikenal sebagai kode etik profesional) yang komprehensif. Rerangka pedoman ini terdiri dari standar ideal, kaidah atau aturan perbuatan, penjelasan resmi, dan petunjuk teknis yang keseluruhannya membentuk hirarki. Kaidah perbuatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi agar secara profesional suatu perbuatan akuntan dapat dikatakan etis atau tidak. Kaidah ini dapat dipaksakan penegakannya oleh profesi dan pelanggaran terhadapnya dikenai sanksi etis.

Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metoda, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Tersedia secara teoritis maksudnya prinsip tersebut masih dalam bentuk gagasan akademik yang belum dipraktikkan tetapi memiliki manfaat dan potensi yang besar untuk diterapkan. Tersedia secara praktis artinya prinsip tersebut telah dipraktikkan dan dianggap praktik yang baik dan bermanfaat. Praktik ini dapat terjadi dalam negeri atau negara lain.

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan/ negara dan dituangkan dalam suatu bentuk dokumen yang resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan dalam negara tersebut. Standar

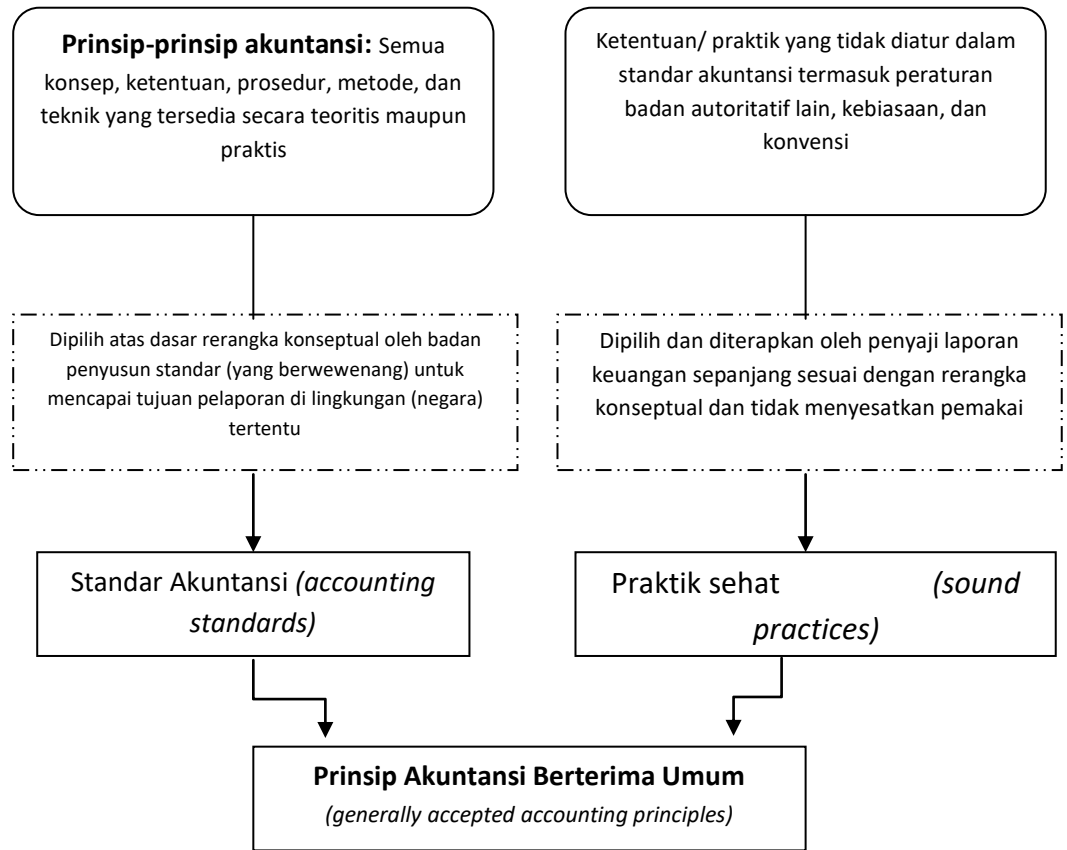
akuntansi ditetapkan untuk menjadi pedoman utama dalam memperlakukan suatu objek (transaksi).

Prinsip akuntansi berterima umum adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoritis, dan praktis. *Accounting Principles Board (APB)* menyatakan:

Generally accepted accounting principles encompass the conventions, rules, and procedures necessary to define accounting practice at a particular time. The standard of "generally accepted accounting principles" includes not only board guidelines of general application, but also detailed practices and procedures.

Makna "standar" dalam definisi APB tersebut sebenarnya adalah apa yang dalam pembahasan ini disebut rerangka pedoman. Rubin (1984) menyebutkannya sebagai "*The House of GAAP*". Dapat disimpulkan bahwa PABU tidak sama dengan standar akuntansi dan keduanya juga harus dibedakan dengan pengertian prinsip akuntansi. Ketiga pengertian tersebut saling berkaitan dan membentuk pengertian PABU sebagai suatu rerangka pedoman. Berikut gambar hubungan antara ketiga hal tersebut:

Hubungan Prinsip Akuntansi, Standar Akuntansi dan PABU



3. PENDEKATAN PENENTUAN STANDAR AKUNTANSI

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktik yang sudah diterima umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar tersebut disebut standar akuntansi yang di Indonesia disebut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), yang kemudian diganti menjadi standar akuntansi keuangan (SAK). Sekarang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus/ kesepakatan bersama pada tentang pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya kedalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus diukur, dinilai dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar akuntansi ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi dan umum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menyusun ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) melalui diskusi dan dengar pendapat dengan kalangan profesi, akademisi, dan hasil akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI. Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga yang berwenang untuk mengesahkan Standar Akuntansi (*Standard Setting Body*) adalah *Financial Accounting Standard Board* (FASB) yang bebas dari pengaruh profesi secara langsung.

Standar Akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus menerus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat/ lingkungan.

Setiap akuntan di dalam menjalankan profesinya tidak bisa lepas dari standar akuntansi. Standar-standar tersebut akan terus berubah, dihapus (diamandemen) dan/ atau ditambahkan baik itu di Amerika Serikat maupun di negara-negara lainnya. Standar menyajikan petunjuk yang praktis dan mudah, yang terkait dengan tugas-tugas akuntan. Standar secara umum diterima sebagai aturan perusahaan, yang diikuti sanksi terhadap ketidakpatuhan terhadapnya. Standar akuntansi biasanya terdiri dari tiga bagian, yang terdiri dari:

1. Uraian masalah yang harus diatasi
2. Pembahasan dengan penalaran (kemungkinan dengan menggali teori dasar) atau cara-cara pemecahan masalah
3. Selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori, dan solusi yang ditetapkan

Ada sejumlah pertimbangan dalam penetapan standar yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Standar menyajikan kumpulan data bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya.

Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, penyebarluasan standar akan menghasilkan banyak kontroversi dan perdebatan, baik dalam lingkungan praktik maupun akademik yang merupakan sebuah keadaan yang lebih baik daripada apatis.

Standar akuntansi ini pada umumnya disusun oleh sebuah lembaga yang resmi dan yang telah diakui oleh pemerintah, profesi, dan umum. Di Indonesia, badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang saat ini berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam penyusunan Standar Akuntansi ada beberapa lembaga atau badan yang berkaitan dengan penyusunan standar tersebut. Berikut ini merupakan lembaga atau badan-badan yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi.

1. Kantor-kantor Akuntan Publik dan Individu

Kantor-kantor akuntan publik (KAP) dan individu bertanggungjawab untuk secara independen menyatakan bahwa

laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan secara wajar dan akurat atas seluruh aktivitasnya. Kriteria wajarnya adalah laporan keuangan yang diperiksanya sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum.

2. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) merupakan organisasi profesi yang mengkoordinasi para akuntan publik bersertifikat (CPA) yang ada di Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki dua komite teknis senior yang memiliki peranan dan pengaruh penting, yaitu: (1) *Accounting Standards Executive Committee (AcSec)*, and (2) *Auditing Standard Committee (AuSec)*. Kedua komite ini diberikan wewenang untuk mewakili AICPA dalam menanggapi masalah-masalah akuntansi keuangan dan biaya serta masalah pengauditan. Komite ini menerbitkan laporan berupa *Statement of Position (SOPs)* untuk menanggapi setiap isu akuntansi. SOPs ini mengklarifikasi dan menguraikan kontroversi dalam isu-isu akuntansi dan harus diikuti sebagai petunjuk apabila tidak bertentangan dengan pernyataan FASB. Melalui publikasi bulannya, (*Journal of Accountancy*), AICPA mengkomunikasikan masalah-masalah dan solusi akuntansi kepada para anggotanya sejak kehadirannya pada tahun 1937.

Committee on Accounting Procedure (CAP) telah berusaha keras untuk “mengatasi berbagai bidang yang menyebabkan perbedaan dalam laporan organisasi dan mengeliminasi praktek-praktek yang tidak dikehendaki”. Dari pada mengembangkan sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, CAP ternyata lebih memilih pendekatan pragmatis dan khusus dalam menghadapi setiap masalah. Dalam periode tahun dua puluhan sampai dengan 1958, CAP telah mengeluarkan 51 *Accounting Research Bulletins (ARBs)* yang menyajikan berbagai saran perlakuan akuntansi untuk berbagai item dan transaksi. Pada saat bersamaan, ARBs didukung oleh *Securities and Exchange Commission (SEC)* dan pasar saham sebagai satu-satunya sumber prinsip-prinsip akuntansi berterima umum di Amerika Serikat.

Pada tahun 1959, AICPA membentuk lembaga baru, yaitu *Accounting Principle Board* (APB) untuk mempercepat penyajian secara tertulis tentang apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam perkembangannya, AICPA menunjuk pemimpin penelitian akuntansi dan pegawai tetap. Antara tahun 1959 dan 1973, APB menyajikan opini yang bertujuan agar dapat digunakan sebagai petunjuk praktik-praktik akuntansi, kecuali apabila digantikan oleh pernyataan FASB.

Disamping opini, APB juga mempublikasikan empat pernyataan dan serangkaian interpretasi akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan opini atau untuk mengkomunikasikan setiap rekomendasi yang terkait dengan masalah akuntansi. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah:

- APB statement No. 1 : Laporan penerimaan ARS No. 1 dan No. 3
- APB statement No. 2 : *Disclosure of Supplementary Financial Information by Diversified Companies*, dikeluarkan September 1967.
- APB statement No. 3 : *Financial Statement Restated for General Prince Level Change*, dikeluarkan juni 1969
- APB statement No. 4 : *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises*, dikeluarkan oktober 1970

Untuk mendorong diskusi tentang topik-topik kontroversial sebelum adanya APB, divisi penelitian AICPA membentuk komisi penelitian yang beranggotakan peneliti-peneliti independen atau staf peneliti yang dipimpin oleh direktur komite penelitian dan konsultan. *Accounting Research Study* (ARS) No. 1 yang berjudul "*A Tentative Set of Board Accounting Principles for Business Enterprise*" yang dipublikasikan berturut-turut pada tahun 1961 dan 1962. Pada penelitian pertama, peneliti mendukung *exit value accounting*, dan pada penelitian kedua, mereka menyarankan perlunya perhitungan perubahan nilai tukar secara umum maupun secara khusus.

Sebagai sebuah kekuatan pada saat itu, AICPA menolak kedua penelitian tersebut dan berpendapat bahwa kedua penelitian tersebut secara radikal berbeda dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum sehingga hasil penelitian tersebut tidak dapat diterima. Sebuah penelitian baru kemudian ditugasi untuk melihat kembali praktik-praktik akuntansi yang ada. Akibatnya, diterbitkan ARS No. 7 yang dilakukan oleh Paul Grady dengan judul "*Inventory of a Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise*". Penelitian tersebut tidak lebih dari sekedar inventarisasi prinsip-prinsip, praktek-praktek, dan metode akuntansi dari APB dan CAP yang berlaku saat itu.

Setelah penolakan AICPA tersebut (ARS No. 1 dan No. 3) penelitian selanjutnya dilakukan dengan asumsi dan pemikiran yang tergantung kepada individu peneliti. Opini APB secara umum tidak mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh ARS No. 2 dan No. 3. kedua belas ARS yang lain adalah:

- ARS No. 2 : *Cash Flow analysis and the Funds Statement*, oleh Perry Mason (1961).
- ARS No. 4 : *Reporting of Leases in Financial Statements*, oleh John H. Myers (1962).
- ARS No. 5 : *A Critical Study of Accounting for Business Combination*, oleh Arthur B. Watt (1963).
- ARS No. 6 : *Reporting the Financial Effects of Price-Level Changes*, oleh Staf divisi penelitian (1963).
- ARS No. 8 : *Accounting for the Cost of Pension Plans*, oleh Ernest L. Hicks (1966).
- ARS No. 9 : *Inperiod allocation of Corporate Income Taxes*, oleh Howard A. Black (1966).
- ARS No. 10 : *Accounting for Godwill*, oleh George R. Carlett dan Norman O. Oslon (1968).
- ARS No. 11 : *Financial Reporting in the Extractive Industries*, oleh Robert R. Field (1968).
- ARS No. 12 : *Reporting Foreign Operations of US Companies in US Dollars*, oleh Leonard Lorenson (1972).

- ARS No. 13 : *The Accounting Basis of Inventories*, oleh Horace G. Barden (1973).
- ARS No. 14 : *Accounting for R & D Expenditure*, oleh Oscar S. Gellein dan Maurice S. Newman (1973).
- ARS No. 15 : *Stockholders' Equity*, oleh Beatrices Melcher (1973).

3. The American Accounting Accosiation

The American Accounting Accosiation (AAA) merupakan organisasi untuk para akuntan dari bidang akademik dan individu yang tertatik dengan perbaikan terhadap praktik dan teori akuntansi. Organisasi ini memiliki jurnal triwulan "*Accountuing Review*" yaitu jurnal yang dijadikan sarana pertukaran ide dan hasil-hasil akuntansi di antara para peneliti akuntansi. AAA berfungsi sebagai suatu forum akademik yang mengungkapkan berbagai pandangan isu dan topik akuntansi, baik secara individu maupun organisasi-organisasi khusus seperti komite-komite khusus yang bertugas untuk menyajikan kerangka laporan keuangan perusahaan.

4. The Finanacial Accounting Standard Board

The Finanacial Accounting Standard Board (FASB) menggantikan APB pada tahun 1973 sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menetapkan standar-standar akuntansi. APB bubar disebabkan beberapa faktor berikut ini:

- a. Kemunculan berkesinambungan dari perlakuan akuntansi alternatif yang memungkinkan perusahaan menunjukkan earning per share yang lebih tinggi terutama hasil proses merger dan akuisisi.
- b. Kurangnya perlakuan akuntansi yang memadai untuk seluruh persoalan baru dalam akuntansi seperti kredit pajak akuntansi, akuntansi untuk industri wara laba atau *fenchise (accounting for franchise industries)*, bisnis pengembangan lahan (*the land development business*), sewa beli jangka panjang (*long term lease*)

- c. Sejumlah kasus kejahatan dan tuntutan hukum akibat metode-metode akuntansi yang gagal untuk menyajikan informasi yang relevan dalam banyak kasus.
- d. Kegagalan APB dalam mengembangkan kerangka konseptual

FASB merupakan badan yang bersifat otoritatif, independen, dengan tugas menetapkan dan meningkatkan standar laporan dan akuntansi keuangan, sehingga standar-standar tersebut menaruh perhatian utama pada pencatatan informasi tentang kejadian ekonomi dan transaksi melalui cara yang berarti dalam laporan keuangan. Keanggotaan FASB diasumsikan mewakili sebagian besar pihak yang berkepentingan dengan akuntansi keuangan. Lebih spesifik, empat anggotanya berasal dari praktisi akuntan publik, dan tiga berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi (pemerintah, industri, dan pendidikan).

Walaupun anggota FASB diizinkan untuk menduduki posisinya dalam perusahaan, organisasi, maupun institusi, anggota FASB harus menghindari setiap bentuk percekocokan.

- Masalah yang dilaporkan, akan diidentifikasi dan dimasukkan dalam agenda.
- Kelompok tugas terdiri dari sebuah kelompok yang beranggotakan individu dengan pengetahuan akuntansi yang memadai dan dari komunitas usaha yang ditunjuk. Staf teknis FASB yang berkonsultasi dengan kelompok tersebut menyiapkan sebuah catatan diskusi (*Discussion Memorandum-MD*). Dalam sebuah laporan MD mengungkapkan persoalan utama dan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan oleh dewan.
- MD dipersiapkan bagi publik agar dapat diuji dalam periode paling tidak selama 60 hari
- Dilakukan dengar pendapat (*public hearing*), dimana sudut pandang yang berisi keunggulan dan keterbatasan dari alternatif-alternatif yang ada, disampaikan kepada dewan.
- Atas dasar pendapat lisan maupun tulisan yang diterima, dewan menyajikan konsep (*exposure draft*) tentang pernyataan standar

akuntansi keuangan yang diajukan. Tidak seperti MD, ED mengedepankan posisi dewan sesungguhnya dalam masalah laporan.

- Exposure draft disiapkan untuk publik agar dapat diuji dalam periode paling tidak 30 hari
- Dengar pendapat lainnya dilakukan untuk mengumpulkan pandangan tentang keunggulan dan kelemahan posisi yang dikemukakan dalam ED oleh dewan
- Berdasarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang diterima, dewan selanjutnya dapat melakukan kemungkinan-kemungkinan hal berikut ini:
 - Mengadopsi standar yang diajukan sebagai *Official Statement of Financial Accounting Standards (SFAS)*
 - Mengajukan revisi atas standar yang diajukan, terkait dengan prosedur yang seharusnya dilakukan.
 - Menangguhkan pengeluaran standar yang baru dan menyimpannya dalam agenda
 - Tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu tersebut dari agenda
 - Partisipasi publik telah mengubah kenyataan bahwa keputusan akhir tentang standar akuntansi tetap ditangan anggota FASB

5. Securities and Exchange Commission (SEC)

Securities and Exchange Commission dibentuk oleh kongres pada tahun 1934. Komisi ini memiliki tanggung jawab utama untuk menangani administrasi berbagai ketentuan yang meregulasi pasar saham dan menjamin laporan serta pengungkapan yang memadai setiap perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Secara ringkas, berbagai tindakan dan berbagai registrasi umum adalah:

- Securities Act of 1933 : Mensyaratkan tentang pendaftaran setiap saham baru yang ditawarkan kepada publik

- Securities Exchange Act of 1935 : Mensyaratkan laporan berkeseimbangan dari perusahaan publik tentang saham yang tercatat, saham yang diperdagangkan, serta broker dan dealer yang terlibat
- Public Unity Holding Act of 1935: Mensyaratkan pendaftaran trust indenture document dan data pendukung
- Trust Indenture Act of 1939 : Mensyaratkan pendaftaran trust indenture document dan data pendukung
- Investment Company Act of 1940: Mensyaratkan pendaftaran setiap perusahaan investasi
- Investment Advisers Act of 1940: Mensyaratkan pendaftaran setiap konsultan investasi

Setelah kegagalan APB dan pembentukan FASB, SEC mengeluarkan sebuah dokumen yang berisi kebijakan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa prinsip, standar, dan praktik yang umum oleh FASB akan dipertimbangkan untuk didukung. Akan tetapi, dokumen tersebut juga menyatakan bahwa komisi akan terus mengidentifikasi bidang-bidang yang memunculkan kebutuhan informasi bagi investor dan akan menetapkan metode pengungkapan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain itu, SEC juga tetap mengizinkan penetapan standar akuntansi oleh sektor swasta, intervensi komisi seperti keterlibatan negara bagian dalam proses penyusunan standar akuntansi dengan cara kerja sama, konsultasi, dan masukan yang beralasan, dari pada dalam bentuk intervensi pengendalian yang baku. Dengan kata lain, SEC mendukung FASB dengan sejumlah syarat bahwa SEC tidak mendelegasikan setiap wewenang atau mengabaikan hak untuk menolak, mengubah, atau menunda pengumuman FASB melalui prosedur yang telah diregulasi.

6. Pengguna Laporan Keuangan

Kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang berorientasi pada laba juga akan mempengaruhi penyusunan standar akuntansi. Kelompok pengguna ini dapat diklasifikasikan dalam dua klasifikasi yaitu sebagai pengguna langsung (*direct users*) dan pengguna tidak langsung (*indirect users*)

Pengguna langsung terdiri dari:

- Pemilik dan pemegang saham perusahaan
- Pemberi pinjaman (kreditor) dan pemasok
- Manajemen perusahaan
- Dinas perpajakan
- Organisasi pekerja
- Pelanggan

Pengguna tidak langsung terdiri dari:

- Analis dan konsultan keuangan
- Pasar saham
- Pengacara
- Otoritas yang terkait dengan regulasi
- Kalangan berita keuangan dan agen-agen penyaji laporan keuangan
- Asosiasi dagang
- Serikat pekerja
- Kompetitor
- Masyarakat umum
- Departemen pemerintah lainnya

Pengguna langsung maupun tidak langsung masing-masing memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karenanya, kedua kelompok tersebut memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, ada tiga bentuk laporan keuangan yang mungkin dapat dipersiapkan, antara lain:

1. Laporan keuangan yang bertujuan umum (*general purpose financial statement*) yang memenuhi kebutuhan umum seperti pengguna. Dalam desain laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan, akuntan berasumsi bahwa laporan keuangan tersebut memenuhi tujuan dan kebutuhan yang bersifat umum.
2. Laporan keuangan yang bertujuan khusus, yang memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok tertentu

Bentuk pengungkapan berbeda yang disajikan untuk masing-masing kelompok yang berbeda. Adapun bentuk laporan keuangan yang digunakan, sebagian besar pengguna yang melakukan tekanan yang mempengaruhi pengembangan prinsip-prinsip akuntansi dengan berbagai cara agar tujuan mereka terpenuhi.

4. PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI AMERIKA

Perkembangan prinsip-prinsip akuntansi berjalan searah dengan proses perkembangan akuntansi. Menurut Belkoui (2000), proses pengembangan akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi di USA sesudah tahun 1900 diidentifikasi dalam 4 tahap atau fase sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Fase ini merupakan periode 1900-1933 yang disebut sebagai kurun waktu **kontribusi manajemen**. Pada fase ini pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi timbul karena meningkatnya jumlah pemegang saham peranan ekonomik yang dominan yang dimainkan oleh perusahaan industri setelah tahun 1900. Pada kurun ini manajemen mengendalikan secara lengkap atas pemilihan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tahunan baik bentuk, isi maupun pengungkapannya. Sehingga pengembangan akuntansi tergantung pada inisiatif manajemen. Karakteristik pengembangan akuntansi pada tahap ini seperti berikut:

- a. Penyelesaian suatu masalah cenderung pragmatis yang dikenal dengan prinsip *expediency* atau kemudahan, sehingga kurang didukung konsep atau teori yang memadai.
- b. Penyajian informasi keuangan lebih ditujukan untuk perhitungan laba kena pajak (*taxable income*) dalam rangka meminimisir pajak penghasilan.
- c. Ada kecenderungan penggunaan teknik dan metode akuntansi untuk pemerataan laba (*income smoothing*).
- d. Adanya kecenderungan menghindarimasalah-masalah akuntansi yang kompleks, sehingga banyak menggunakan *judgement*.
- e. Ada kecenderungan bahwa perusahaan yang berbeda menggunakan metode yang berbeda walaupun untuk persoalan yang sama.

Pada tahap ini ada kecenderungan yang menjadi ciri tahap kontribusi manajemen yaitu: apabila timbul masalah akuntansi yang mendesak dan kontroversial maka penyelesaiannya bersifat *ad hoc* dan lebih mengutamakan pertimbangan jangka pendek. Kondisi dan situasi di atas menimbulkan ketidakpuasan pada tahun 1920-an karena pada umumnya investor dirugikan. Sehingga muncul tuntutan untuk peningkatan standar pelaporan keuangan.

2. Tahap Kedua

Tahap ini berlangsung 1933 sampai 1959 dan disebut tahap kontribusi institusi. Dalam tahap ini ditandai oleh penciptaan dan peningkatan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Peran besar institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Peran besar institusi dalam tahap ini secara lain adalah pembentukan *Securities and Exchange Commission (SEC)*, persetujuan prinsip-prinsip umum oleh AIA (*The American Institute of Accountant*), dan peran baru *Committee on Accounting Procedure (CAP)*. Dalam tahap ini institusi-institusi tersebut juga berperan mempengaruhi penetapan standar akuntansi.

Dalam tahun 1934 Kongres Amerika membentuk *Securities and Exchange Commission (SEC)* untuk melaksanakan sebagai peraturan

federal. Contoh peraturan yang diterbitkan termasuk securities act 1933 dan securities act 1934. Securities act 1933 mengatur tentang penerbitan sekuritas di pasar antar Negara bagian sedangkan securities act 1934 mengatur tentang perdagangan sekuritas.

Pada tahap ini apabila terdapat masalah controversial karena belum ada aturannya SEC mencoba merumuskan dan menetapkan aturannya sehingga pada tahap ini peran SEC sangat besar di dalam mendorong pengembangan prinsip-prinsip akuntansi di USA.

3. Tahap Ketiga

Tahap ini merupakan periode 1959-1973 yang disebut juga kurun waktu kontribusi profesional. Selama periode ini timbul berbagai organisasi profesional maupun pemerintah yang mengatur praktik-praktik akuntansi. Seperti diterangkan di atas pada tahap kedua dominasi campur tangan pemerintah cukup besar antara lain adalah dengan disahkannya undang-undang yang diberi nama: "*securitas act*" tahun 1933 dan 1934. Pada tahap berikutnya atau tahap ketiga peranan pemerintah berkurang diganti peran institusi profesional. Misalnya, AICPA melalui penerbitan Accounting Research Bulletins (ARB) yang dipublikasikan Committee on Accounting Procedures (CAP) sampai tahun 1959. Selanjutnya penerbitan melalui APB Opinions yang dipublikasikan APB sampai tahun 1973.

Demikian juga AAA melalui berbagai penelitian telah berusaha untuk mengembangkan teori akuntansi oleh pemerintah dan organisasi profesional membawa konsekuensi:

- A. Organisasi profesi dan pemerintah tidak percaya pada kerangka kerja teoritis yang telah dikembangkan sebelumnya.
- B. Adanya ketidakjelasan teori akuntansi yang dirumuskan pengusaha dan perumusan masalah akuntansi antara organisasi atau dengan lainnya dapat berbeda dan bahkan berlawanan.
- C. Adanya banyak perlakuan alternative yang menganjurkan keluwesan dalam memilih teknik-teknik akuntansi.

Adanya konsekuensi seperti di atas menimbulkan ketidakpuasan di antara para akuntan sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorong berdirinya FASB di tahun 1973 sebagaimana disebutkan di atas.

4. Tahap Keempat

Tahap ini merupakan periode mulai tahun 1973, yang juga disebutkan kurun waktu politisasi akuntansi. Dalam tahap ini pihak-pihak yang secara politis kuat mendapatkan keuntungan atas peraturan yang dikeluarkan. Mungkin saja peraturan diterbitkan karena desakan pihak-pihak tertentu. Pada periode ini pendekatan pengembangan teori akuntansi sebagian besar menggunakan pendekatan deduktif dan dalam penyusunan standar dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politis. Politisasi ini ditimbulkan oleh pandangan bahwa akuntansi mempengaruhi perilaku ekonomi sehingga akibatnya peraturan-peraturan akuntansi harus dibuat tidak lepas dari ruang lingkup politis.

SFAC yang telah diterbitkan oleh FASB digunakan sebagai landasan dalam menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). Jumlah SFAS yang diterbitkan akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis serta perkembangan praktik akuntansi itu sendiri. Karena perkembangan bisnis dan lingkungannya menyebabkan perlu ditetapkan sebagai standar baru sebagai landasan penyusunan laporan keuangan.

5. PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA

Di Indonesia versi *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) telah dikodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pada saat pertama kali dikeluarkan pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan sebanyak 35 PSAK. Sebagian besar isi dari SAK yang diterbitkan tahun 1994 diadaptasi dari ISAC

(*International Standard Accounting Committee*) dengan maksud mengikuti program harmonisasi standar akuntansi internasional. Standar Akuntansi Keuangan yang tercermin dalam PSAK telah sejalan dengan *International Accounting Standard*. Bahkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*) diadopsi sepenuhnya dari IASC.

Kemudian pada terbitan buku SAK berikutnya pada tahun 1992, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas ditambah dengan 22 PSAK baru, 3 revisi PSAK, 4 interpretasi SAK dan review atas 35 PSAK IAI dalam bahasa Inggris. Begitu seterusnya setiap penerbitan buku SAK edisi baru selalu ada penambahan dan revisi PSAK sebagai penyesuaian terhadap perkembangan praktik akuntansi dan perkembangan ekonomi dan dunia bisnis.

Di Indonesia, *standard setting body* (badan penyusun standar) adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tanggung jawab perumusannya dideliasikan kepada Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (KPAI). Komite ini pada awalnya berbentuk panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS tahun 1973. Kemudian pada tahun 1994 Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (KPAI) diubah namanya menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK). Anggota-anggota komite ini dari periode ke periode secara lengkap dan kronologis dicantumkan dalam buku SAK.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan badan akuntansi professional di Indonesia. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 oleh beberapa orang akuntan. Tujuan didirikan IAI antara lain adalah untuk mempromosikan profesi akuntan, mendorong pertumbuhan profesi akuntan dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggota-anggotanya. Pemegang kedaulatan tertinggi dalam IAI adalah kongres. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAI, kongres diselenggarakan paling tidak sekali dalam 4 (empat) tahun.

Pada tahun 1973 IAI berhasil mengesahkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) dan Kode Etik Akuntan Indonesia. Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang disahkan

pada tahun 1973 merupakan standar akuntansi keuangan yang mulai diberlakukan tahun 1974. PAI 1974 merupakan prinsip akuntansi berterima umum pertama kali yang disahkan menjelang diaktifkan kembali pasar modal di Indonesia oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Selanjutnya PAI tahun 1974 direvisi pada tahun 1984, dan kemudian direvisi lagi tahun 1994. Sejak tahun 1994 istilah Prinsip Akuntansi Indonesia tidak digunakan lagi karena diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengesahan SAK pertama kali sebagai pengganti PAI dilakukan tepatnya pada 7 September 1994.

Proses penyusunan sebuah standar akuntansi sejak mulai timbulnya topik tertentu untuk diagendakan sampai pengesahannya umumnya dilakukan dengan *due process procedure* (proses yang bersifat terbuka). *Due process procedure* dalam penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK. Topik dapat berasal dari usulan anggota berkaitan dengan kebutuhan pelaporan keuangan tertentu, atau dari kerjasama dengan organisasi perusahaan tertentu, atau kerjasama dengan Bank Dunia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Topik yang telah disepakati menjadi agenda untuk dibahas menjadi *exposure draft*. Pembahasan menjadi *exposure draft* dapat dilakukan dengan mengundang beberapa ahli di luar anggota komite untuk memberikan masukan atau dibentuk tim kecil yang beranggotakan sebagian anggota komite dan ditambah pakar dari luar komite, kemudian diperbanyak dan disebarakan kepada publik selama jangka waktu tertentu (misalnya 6 bulan) sebelum dilakukan public hearing. Dalam periode ini publik diharapkan dapat memberikan komentar secara tertulis. Kemudian dalam public hearing komite mengadakan beberapa kali pertemuan dengan mengundang publik yang telah memberikan komentar secara tertulis untuk membahas dan akhirnya dengan rapat komite yang memenuhi kuorum menyetujui draft SAK final. Draft SAK final kemudian dikirim dan diusulkan ke pengurus pusat IAI untuk disahkan. Atas dasar usulan ini kemudian pengurus pusat mengadakan rapat pengesahan SAK.

Organisasi profesi yang berperan dalam penyusunan atau pembentukan dan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ikatan Akuntan Indonesia merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apa pun. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957, dengan pemerakarsa dan pengurus pertama sekali adalah: Soemardjono (ketua); Go Tie Siem (sekretaris); Basuki T. Siddharta (bendahara); Hendra Darmawan, dan Tang Tong Joe (komisaris).

Menurut anggaran dasarnya, Ikatan Akuntan Indonesia bertujuan untuk:

1. Mengembangkan dan menjaga peranan profesi akuntan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman;
2. Memelihara martabat dan kehormatan profesi akuntan;
3. Meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional setiap anggota;
4. Mengembangkan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta pemyarakatan teori dan praktik profesi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan akuntansi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungannya
5. Meningkatkan peranan profesi akuntan dalam pembangunan nasional.

Sejak didirikan pada tahun 1959, IAI telah mengubah, menghimpun, menyusun dan merevisi prinsip atau standar akuntansi keuangan. Perubahan tersebut antara lain:

1. Prinsip Akuntansi Indonesia 1973

Prinsip akuntansi indonesia 1973 adalah hasil kerja Panitia Penghimpunan bahan-bahan dan Struktur daripada *generally accepted accounting principles* dan *generally accepted auditing standards*. Himpunan tersebut, dengan beberapa perubahannya telah disahkan oleh kongres III pada tanggal 2 Desember 1973. PAI ini merupakan salah satu

prasarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal pada waktu itu, di mana laporan keuangan perusahaan yang akan mengeluarkan surat-surat berharga kepada masyarakat, harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut.

PAI ini telah menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak luar perusahaan selama sepuluh tahun. Kemudian, komite PAI melakukan penyempurnaan dan diganti dengan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984.

2. Prinsip Akuntansi Indonesia 1984

Prinsip Akuntansi Indonesia 1984, merupakan pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia 1973. Sama halnya dengan Prinsip Akuntansi Indonesia 1973, perumusan prinsip, prosedur, metode dan teknik-teknik dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan dan diungkapkan secara garis besar atau bersifat umum, tidak mencakup praktik akuntansi untuk industri tertentu. Prinsip-prinsip yang memerlukan penjabaran lebih lanjut diatur dengan "pernyataan" tersendiri.

Sehubungan dengan itu komite IAI-PAI mulai tahun 1986 menerbitkan beberapa pernyataan untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setelah berlangsung selama sepuluh tahun, PAI diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan 1994.

3. Standar Akuntansi Keuangan 1994

Sehubungan dengan adanya program harmonisasi standar akuntansi internasional, IAI memutuskan untuk mengadaptasi *statements* atau pernyataan IASC sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang kemudian menerbitkan dua buku yang berisi: (1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dan (2) Seperangkat standar akuntansi keuangan,

yang terdiri dari 35 pernyataan yang setaraf dengan standar internasional.

Standar akuntansi yang diterbitkan IAI sekarang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Demikian juga halnya dengan badan perumus standar akuntansi yang dulu disebut Komite Standar Akuntansi Keuangan, sekarang namanya diganti menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (1998-2006).

BAB 3

TEORI AKUNTANSI NORMATIF: AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Akuntansi Cost Historis**
- 2) Konsep laba Ekonomis**
- 3) Konsep Pemeliharaan Modal**
- 4) Akuntansi Untuk Perubahan Harga**
 - a) Akuntansi Berdasarkan Daya Beli Konstan**
 - b) Akuntansi Berdasarkan Biaya Sekarang**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Memahami beberapa keterbatasan laporan keuangan.**
- Memahami konsep laba ekonomis**
- Memahami konsep laba fisik dan laba finansial**
- Memahami beberapa metode akuntansi alternatif yang dikembangkan untuk mengatasi masalah perubahan harga.**
- Mengidentifikasi beberapa keunggulan dan kelemahan metode akuntansi alternatif.**

Memahami kalkulasi laba dalam berbagai metode akuntansi alternatif.

1. AKUNTANSI COST HISTORIS

(*Historical cost*) yaitu merupakan semua barang dan jasa yang dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai pada saat perolehannya. Yaitu merupakan jumlah kas atau setara kas yang harus dikorbankan pada saat memperoleh barang atau jasa tersebut. Misalnya, perolehan aktiva tetap. *Historical cost* dalam hal ini dijadikan sebagai basis dalam struktur pelaporan keuangan.

Historical costs diukur dengan pembayaran yang dilakukan di masa lalu atau yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk memperoleh barang-barang atau jasa. Jadi *historical costs* diartikan sebagai pembayaran yang harus dilakukan untuk memperoleh atau memproduksi suatu barang termasuk didalamnya semua jasa yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva sampai dalam kondisi siap digunakan. *Historical costs* menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya. Sehingga dikatakan bahwa metode *historical costs* merupakan pengukuran potensi jasa yang paling obyektif untuk aktiva atau obyek jasa yang baru diperoleh. Disamping itu ada beberapa kelebihan lain dari penggunaan *historical costs* seperti berikut:

- 1) Paling banyak digunakan dalam akuntansi konvensional kerana muda (praktis) yaitu berdasarkan harga atas transaksi yang telah terjadi.
- 2) Umumnya merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat perolehan, sehingga merupakan realisasi.
- 3) Keuntungan utama HC adalah sifatnya verifiable atau dapat diuji kerana sudah terjadi.

Kelebihan *historical costs* secara lebih rinci telah diuraikan pada bab sebelumnya, walaupun demikian *historical costs* juga mempunyai beberapa kelemahan.

Berikut ini dikemukakan beberapa kelemahan *historical costs*, yang antara lain:

- 1) Bahwa *historical costs* akan kehilangan maknanya apabila nilai aktiva berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setelah waktu yang panjang mungkin jasa angka *historical costs* tidak mempunyai makna sebagai manfaat masa depan.
- 2) Tidak memungkinkan pengakuan gains (laba) atau losses (rugi) dalam periode terjadinya, karena umumnya pengakuan laba atau rugi dilakukan pada saat ada penjualan.
- 3) Ditinjau dari relevansi informasi untuk pengambilan keputusan, *historical costs* menjadi kurang keandalannya.

Penggunaan *historical costs* untuk mengukur elemen-elemen laporan keuangan diyakini oleh para pendukungnya mempunyai beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan sebagai alasan penggunaan *historical costs* adalah:

- a. *Historical costs* relevan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini tercermin bahwa manajemen dalam pengambilan keputusan tentang masa yang akan datang seharusnya dilakukan dengan melihat data pada masa yang lalu atau historis.
- b. *Historical costs* berdasarkan pada sesuatu yang nyata, bukan pada sesuatu yang semata-mata diperkirakan.
- c. Dalam perjalanan waktu *historical costs* terbukti telah bermanfaat baik untuk tujuan accountability maupun tujuan pengambilan keputusan.
- d. Selama ini pengertian terbaik tentang laba adalah selisih kelebihan harga jual (penghasilan) di atas biaya historis. Pengertian tersebut menjadi terbaik karena memenuhi sisi konsep dan aplikasinya dalam praktik.
- e. Penggunaan *historical costs* mendukung terciptanya integritas penyedia informasi (akuntan) karena penggunaan *historical costs* dapat menghindari terjadinya manipulasi internal.
- f. Sejauhmana manfaat informasi laba yang didasarkan pada dasar pengukuran selain *historical costs* masih menjadi pertanyaan.
- g. Bila dikehendaki perubahan-perubahan dalam harga pasar dapat diungkapkan sebagai data pelengkap *historical costs*.
- h. Belum cukup bukti yang membenarkan penolakan terhadap penggunaan *Historical costs*.

Dengan berbagai alasan tersebut di atas penggunaan secara dominan *historical costs* dalam praktik akuntansi masih tetap dipertahankan walaupun para akuntan menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan *historical costs* juga mengandung beberapa kelemahan. Misalnya saja *historical costs* menganggap bahwa nilai mata uang dianggap stabil meskipun pada kenyataannya nilai mata uang selalu mengalami perubahan akibat inflasi atau deflasi. Sehingga dalam banyak hal nilai historis tidak lagi relevan dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada *historical costs* sejalan dengan kecenderungan manusia untuk bertindak rasional maka diperlukan informasi pelengkap atas dasar penilaian yang lain, misalnya: nilai tunai (*present value*), nilai pengganti (*replacement costs*), nilai pasar (*market value*), nilai likuidasi (*liquidation value*) dan sebagainya. Interaksi antara *historical costs* dan nilai tunai, nilai pengganti, nilai likuidasi sangat penting di dalam proses pengambilan keputusan.

Informasi pelengkap semacam itu merupakan landasan cara berpikir yang implementatif rasional tanpa keharusan bahwa segala jenis nilai atau dasar pengukuran harus ditampung secara intra sistem. Dengan kata lain proses pencatatan dalam menghasilkan laporan keuangan tetap didasarkan pada *historical costs* tetapi *output*-nya (yaitu laporan yang dihasilkannya) selain berdasarkan *historical costs* (sebagai *output* utama) dapat dilengkapi dengan dasar penilaian yang lain sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Misalnya untuk kepentingan penyelesaian likuidasi dilengkapi dengan informasi mengenai nilai likuidasi, untuk kepentingan analisis kredit untuk aktiva yang dijaminan perlu dilengkapi dengan informasi nilai pasar dan seterusnya.

2. KONSEP LABA EKONOMIS

Laba merupakan suatu kenaikan dalam kekayaan yang dimiliki oleh organisasi. Para ekonom selalu memberikan perhatian yang utama terhadap konsep laba. Awal abad ke 20, pemahaman bahwa laba lebih sekedar uang kas mulai bergeser. Fisher et.al. memberikan pandangan yang lain terhadap sifat dan konsep laba ekonomis. Mereka mendefinisikan laba ekonomis sebagai deretan peristiwa yang dihubungkan dengan tahapan-tahapan yang berbeda: penikmatan laba psikis, laba nyata, dan laba uang.

Laba psikis adalah konsumsi pribadi aktual atas barang dan jasa yang menghasilkan kenikmatan psikis dan pemuasan kebutuhan-kebutuhan. Laba psikis adalah konsep psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat diperkirakan oleh laba nyata.

Laba nyata adalah suatu pernyataan mengenai peristiwa-peristiwa yang meningkatkan kenikmatan psikis. Laba nyata paling banyak diukur oleh biaya hidup, dengan kata lain pemuasan yang diciptakan oleh kenikmatan psikis dari laba diukur oleh pembayaran uang yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa sebelum atau sesudah konsumsi.

Laba uang mencerminkan semua uang yang diterima dan dimaksudkan akan digunakan untuk konsumsi guna menutup biaya hidup. Fisher mengatakan bahwa laba nyata adalah laba yang paling praktis bagi para akuntan.

Menurut Hicks laba ekonomi sebagai laba pribadi seseorang sebagai "jumlah maksimum yang dapat ia konsumsi selama seminggu dan pada akhir minggu diharapkan ia masih sekaya seperti pada awal minggu". Definisi ini sering digunakan sebagai dasar dalam pembahasan konsep laba.

Edward dan Bell memperkenalkan konsep laba bisnis, yang komponennya terdiri dari *current operating profit* dan *realizable cost saving*. *Current operating profit* merupakan kelebihan nilai kini produk (*current value of output*) yang terjual di atas biaya kini yang berhubungan dengan masukan (*current cost of input*). *Realizable cost saving* disebut *holding gains* kalau ada kenaikan dan biaya kini aktiva dan disebut *holding losses* bila terjadi penurunan nilai aktiva kini.

Menurut Edward dan Bell laba bisnis terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a. *Current operating profit* (COP) atau laba operasi.
- b. Laba (rugi) penimbunan yang dapat terealisasi.
- c. Laba (rugi) penimbunan yang belum terealisasi.

Berikut ini adalah contoh untuk menggambarkan laba penimbunan yang belum terealisasi. Misalnya apabila pada awal periode pos persediaan barang dibeli dengan harga perolehan saat beli Rp 16.000.000,- (dapat dimisalkan jumlah unitnya 8 unit), dan kemudian pada akhir periode persediaan barang tersebut belum terjual 25% (atau 2 unit) dan bila dinilai dengan harga sekarang harga perolehan (untuk 8 unit) semula sebesar Rp. 16.000.000,- menjadi Rp 20.000.000,-. Sedang persediaan akhir tersebut atas dasar konsep biaya kini dengan nilai historis Rp 4.000.000,-. Jadi ada selisih lebih nilai persediaan akhir atas dasar biaya kini sebesar Rp 1.000.000,-. Dengan demikian timbul laba penimbunan yang belum terealisasi Rp 1.000.000,-.

3. KONSEP PEMELIHARAAN MODAL

Konsep pemeliharaan modal menyiratkan bahwa laba diakui sesudah modal dipertahankan atau biaya telah dipuluhkan. Dua konsep utama pemeliharaan modal dapat dinyatakan baik dalam satuan unit uang (modal keuangan) ataupun dalam satuan unit daya beli umum (modal fisis).

Terdapat empat konsep pemeliharaan modal yaitu:

1. Pemeliharaan uang.

Pada konsep ini modal keuangan diukur dengan jumlah unit uang. Modal keuangan yang diinvestasikan atau diinvestasikan kembali oleh pemilik dipelihara. Laba sama dengan perubahan dalam aktiva netto yang disesuaikan untuk transaksi modal yang dinyatakan dalam satuan mata uang.

2. Pemeliharaan uang terhadap daya beli umum

Pada konsep ini modal keuangan yang diukur dalam jumlah unit daya beli yang sama. Laba sama dengan perubahan dalam aktiva netto yang disesuaikan untuk transaksi modal yang dinyatakan dalam jumlah unit daya beli yang sama.

3. Pemeliharaan kapasitas-produktif

Pada konsep ini modal fisis yang diukur dalam jumlah unit uang. Konsep ini menyiratkan bahwa kapasitas produktif fisis yang dipelihara. Konsep ini digunakan dalam akuntansi nilai berjalan yang mengungkapkan aktiva dan utang dalam ikhtisar keuangan sebesar nilai berjalannya.

4. Pemeliharaan kapasitas produktif terhadap daya beli umum.

Pada konsep ini modal fisis yang diukur dalam jumlah unit daya beli yang sama. Konsep ini menyiratkan pemeliharaan kapasitas produktif fisis dari perusahaan yang diukur dalam daya beli unit yang sama. Konsep ini digunakan dalam akuntansi nilai berjalan yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum.

Pemahaman konsep modal sangat penting untuk dipahami dalam pengukuran dan penjelasan tentang konsep laba. Dalam kauntansi istilah modal disebut juga dengan aktiva bersih (net asset), yang secara umum adalah selisih antara aktiva dan hutang. Oleh karena itu dengan pendekatan artikulasi aktiva, hutang dan modal maka laba

adalah selisih modal awal dan modal akhir dengan catatan tidak ada transaksi modal yang terjadi. Tidak ada laba apabila jumlah modal di awal periode tidak terelihara. Dalam konsep pemeliharaan modal kita tidak dapat mengetahui jumlah laba maka pemahaman tentang konsep modal dan pemeliharaan, modal dan pemeliharaan modal dalam hubungan dengan pengukuran laba tersebut uraian di bawah ini menjelaskan tentang pengertian konsep modal.

Ada dua konsep modal menurut KDPPLK-SAK (1999), yaitu:

1. Konsep modal keuangan, dan
2. Konsep modal fisik.

Menurut konsep modal keuangan, modal adalah sinonim dengan aktiva bersih perusahaan. Konsep modal keuangan menekankan pada nilai moneter dari aktiva dikurangi dengan nilai moneter dari hutang). Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada dasar tertentu misalnya unit out put per hari. Dengan kata lain konsep modal fisik menekankan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa.

Pemilihan konsep modal yang sesuai bagi perusahaan harus didasarkan pada kebutuhan para pemakailaporan keuangan. Sebagian besar orang dan pemakai laporan keuangan yang mengadopsi konsep modal keuangan sebagaimana yang dianut akuntansi konvensional, mereka berkepentingan dengan pemeliharaan modal yang "*well offness*" berhubungan dengan kemampuan untuk menginvestasikan jumlah uang yang sama pada awal dan akhir periode.

Dalam konsep pemeliharaan modal keuangan, "laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial (atau hutang) dari aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial (atau hutang) dari aktiva bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan".

Para pendukung konsep modal finansial mempunyai alasan bahwa yang dikatakan laba pada akhirnya adalah jumlah kas yang diterima oleh perusahaan yang melebihi kas (setara kas) yang diinvestasikan oleh pemilik ke dalam perusahaan.

Bagi mereka yang mengadopsi konsep pemeliharaan modal fisik, *“well offness”* berarti kemampuan untuk mencapai tingkatan sama secara fisik dalam produksi pada akhir periode sebagaimana awal periode melebihi kapasitas produktif fisik (atau kemampuan usaha) pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama suatu periode”.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa konsep modal berkaitan erat dengan konsep pengukuran laba atas dasar pendekatan *“capital maintenance concept”*. Konsep modal akan menjadi rujukan dalam pengukuran laba. Dengan konsep modal yang berbeda menyebabkan pilihan dasar pengukuran yang akan digunakan dalam pengukuran laba berbeda pula. Pada umumnya pilihan dasar pengukuran untuk penggunaan konsep modal finansial adalah biaya historis yang menganggap nilai unit moneter stabil, sedang pasar pengukuran untuk penggunaan konsep modal fisik adalah biaya kini atau biaya pengganti.

4. AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN HARGA

Perubahan harga mencakup perubahan nilai dan perubahan daya beli uang sebagai satuan pengukur sumber ekonomik. Harga merepresentasi nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkungan ekonomik. Secara umum perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama (masukan atau keluaran). Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan

antara kos tercatat pada suatu objek dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu. Dari sudut perusahaan, perbedaan harga masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga tetapi lebih merupakan laba yaitu kenaikan nilai ekonomik yang diharapkan karena proses produksi. Harga berubah apabila kenaikan atau penurunan harga terjadi di pasar masukan atau pasar keluaran dan terdapat dimensi waktu yang terlibat didalamnya.

Ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada tiga jenis perubahan harga yaitu; (1) Perubahan harga Umum, (2) Perubahan harga spesifik, dan (3) perubahan harga relatif.

Pertama, Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecapatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara.

Kedua, Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar masukan maupun pasar keluaran. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena: perubahan selera konsumen, perubahan teknologi dibidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat.

Ketiga, Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa.

1. Akuntansi Daya Beli Konstan.

Akuntansi daya beli konstan bertujuan untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan dasar ini diharapkan perusahaan dapat mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu.

Untuk dapat menyajikan laporan keuangan dengan dasar daya beli, data (harga) historis harus dikonversi menjadi biaya daya beli pada saat pelaporan. Semua pos (neraca dan laba rugi) harus dikonversi. FASB menyarankan agar penentuan indeks harga didasarkan pada periode dasar yang digunakan oleh biro statistik tenaga kerja dalam menghitung indeks harga konsumen untuk semua konsumen.

Keunggulan:

1. Akuntansi daya beli konstan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna
2. Akuntansi daya beli konstan menjadikan perbandingan antar periode memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah nominal.
3. Perbandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif
4. Akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan modal.
5. Pejabat pemerintah telah terbiasa dengan analisa laporan keuangan atas dasar nilai real sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah nominal kemungkinan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan.
6. Akuntansi daya beli konstan merupakan sarana untuk mengeluarkan pengaruh perubahan harga umum tanpa harus

mengubah struktur akuntansi yang sedang berjalan. Artinya akuntansi pokok basis historis dapat tetap berjalan.

7. Akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi metode akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara pos per pos (seperti metode MTKP, metode penyusutan akselerasian)

Kelemahan:

1. Akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis, sehingga kelemahan yang melekat pada kos historis tidak semuanya dapat dihilangkan.
2. Manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan biaya yang dikorbankan untuk menyusun laporan keuangan daya beli konstan.
3. Laporan keuangan daya beli konstan sering diinterpretasi secara keliru sebagai informasi nilai sekarang.
4. Laba atau rugi daya beli konstan tidak memiliki makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif.
5. Indeks yang digunakan untuk menghomogenuskan unit pengukur sering tidak mewakili perubahan daya beli yang terkandung dalam aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga hasil perhitungannya diragukan keandalannya.

2. Akuntansi Berdasarkan Biaya Kini (Sekarang).

Konsep biaya kini (*current cost*) juga disebut sebagai biaya penggantian (*replacement cost*). Pertama kali konsep ini dikenal oleh Edward Bell 1961, yang sebenarnya merupakan analisis lebih lanjut atau koreksi dari angka laba menurut konsep biaya historis (*historical cost*).

Ada beberapa konsep tentang nilai kini, yaitu:

- 1). Kapitalisasi,
- 2). Current entry price,

- 3). Current exit price, dan
- 4). Kombinasi ketiga metode sebelumnya.

Current cost yang dimaksud di sini adalah *current entry price* bukan *current exit price*. *Current entry price* menunjukkan jumlah kas atau aktiva lain yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva yang sama atau ekuivalennya. *Current entry price* diartikan pula sebagai harga pokok pengganti (*replacement cost*) dan biaya reproduksi (*reproduction cost*).

Replacement cost adalah jumlah kas atau aktiva lain yang dibutuhkan untuk memperoleh ekuivalen aktiva di pasar aktiva bekas yang masih mempunyai umur ekonomis. Sedangkan *reproduction cost* adalah jumlah kas atau aktiva lain yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva lain yang sejenis (aktiva pengganti) yang mempunyai kapasitas yang sama dengan aktiva yang ada.

Akuntansi Biaya sekarang bertujuan untuk mengukur laba periode tertentu dengan mempertahankan modal semula. Modal diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan modal sebelumnya. Akuntansi biaya sekarang mengharuskan semua sumber ekonomik yang dikonsumsi atau dikeluarkan dari unit usaha diganti dengan sumber ekonomik yang memiliki fungsi dan kemampuan yang sama atau lebih besar. Untuk mempertahankan modal, bagaimana modal diukur pada akhir periode untuk dibandingkan dengan modal pada awal periode.

Terdapat tiga dasar pengukur biaya sekarang dalam kaitannya dengan perubahan harga, yaitu:

1. Biaya Pengganti
2. Nilai jual sekarang

Penggunaan akuntansi biaya kini dikaitkan dengan tujuan utama akuntansi, yaitu: untuk menyediakan informasi agar keputusan-keputusan masa lalu dapat dievaluasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama bagi manajemen. Namun demikian tetap disadari bahwa informasi-informasi aktual pada periode tertentu juga berguna bagi kreditor dan investor yaitu dalam rangka mengevaluasi kinerja manajemen.

Edward dan Bell (1961) mengemukakan bahwa kebutuhan akan informasi terkini sebagai bahan untuk pengambilan keputusan menyebabkan akuntansi biaya kini menjadi sebuah keharusan. Edward dan Bell mengemukakan hal tersebut karena terdapat tiga asumsi biaya historis yang sekaligus merupakan kelemahan pada akuntansi biaya historis.

1. Uang sebagai skala pengukuran dianggap mempunyai nilai stabil, yang berarti nilainya tidak berubah. Padahal kenyataannya nilai uang selalu berubah tidak pernah stabil dalam suatu periode.
2. Realisasi atau kenaikan aktiva bersih dari hasil operasi sebagai kondisi pengakuan pendapatan. Pada hal pendapatan tersebut diperoleh (*earned*) pada setiap mata rantai kegiatan perusahaan, tidak hanya pada saat realisasi.
3. "*The unitary income statement*" tidak memisahkan laba akibat operasi dengan laba rugi dan penimbunan (*holding gains and losses*). Pada hal pendapatan maupun laba yang dihitung berdasarkan biaya historis sebenarnya mengandung dua unsur kenaikan, yaitu kenaikan nilai aktiva yang berasal dari kenaikan harga dan kenaikan aktiva yang berasal dari kegiatan operasi.

Dasar harga perolehan atau biaya historis memang berguna, tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan manajemen karena biaya historis tidak berkaitan lagi dengan peristiwa sekarang. Pada saat perolehan dasar biaya historis penting karena masih merupakan biaya berlaku, tetapi menjadi tidak penting pada waktu yang lain. Sebab nilai uang saat perolehan aktiva sudah berbeda dengan nilai uang pada saat pengakuan pendapatan periode berlaku. Penggunaan biaya historis

pada saat harga-harga cenderung naik mengakibatkan pendapatan pengurangan modal secara tidak disadari. Hal ini juga dapat terjadi oleh pembayaran deviden yang melebihi laba yang dihitung berdasarkan konsep biaya kini sehingga terjadi divestasi.

Perubahan arti ekonomik fasilitas fisik yang dimiliki perusahaan sebagaimana yang ditunjukkan biaya kini (harga perolehan kini) menjadikan harga perolehan historis tidak memadai lagi untuk kepentingan manajemen, pemilik maupun pihak berkepentingan lainnya. Khususnya untuk kepentingan penentuan beban pendapatan periodik dan laba bersih periodik.

Biaya kini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan penggunaan biaya historis. Beberapa keunggulan dari biaya kini merupakan alasan mendukung penggunaan pendekatan biaya kini. Keunggulan penggunaan biaya kini adalah:

1. Harga perolehan sekarang (kini) dapat menyediakan ukuran efisiensi yang lebih baik. Misalnya biaya depresiasi yang ditentukan atas dasar biaya kini dan bukan biaya historis akan memberikan ukuran efisiensi operasi yang lebih baik. Seorang manajer yang menggunakan aktiva lebih baru dengan biaya lebih besar berarti prestasinya kurang baik dibanding dengan manajer perusahaan sejenis yang lebih tua dan lebih rendah harga perolehannya, sebab manajer ini mempunyai beban depresiasi yang lebih rendah.
2. Harga perolehan kini merupakan ukuran yang paling wajar untuk menaksir kemampuan potensial aktiva potensial yang ada di perusahaan.
3. Harga perolehan kini dapat menyatakan adanya 'pemeliharaan modal fisik' yaitu perubahan modal karena kenaikan nilai aktiva fisik, tidak dari transaksi.
4. Harga perolehan kini menyediakan informasi yang lebih baik bagi penaksiran aliran kas sepanjang harga jual erat kaitannya dengan biaya.

Kritik terhadap konsep biaya kini datang dari dua pihak yaitu dari pendukung *historical cost* dan dari pendukung *exit price*. Pendukung *historical cost* menolak konsep biaya kini terutama karena melanggar kebiasaan pengakuan laba dan pendapatan. Pengakuan menurut biaya kini menimbulkan masalah yaitu subjektivitas dalam penentuan biaya atau nilai, sedang pendukung *exit price* menyatakan bahwa dalam konsep biaya kini termasuk di dalamnya *opportunity cost* atau pengorbanan alternative terbaik. Padahal pendukung *exit price*, *opportunity cost* terbaik sebenarnya adalah nilai pasar. Karena nilai pasar menunjukkan *opportunity* apabila aktiva yang bersangkutan dijual.

Secara lebih terperinci beberapa argumentasi yang menentang pendekatan biaya kini adalah:

1. Penggunaan biaya kini adalah subyektif karena sangat sulit menentukan harga perolehan kini secara pasti setiap saat.
2. Pemeliharaan modal fisik bukan ukuran akuntan tetapi merupakan fungsi manajemen untuk menjamin bahwa modal tidak berubah.
3. Harga perolehan kini belum pasti merupakan harga pasar yang wajar dan belum pasti mencerminkan manfaat aktiva potensial.

Di samping kelemahan di atas, pendapat yang mengatakan bahwa depresiasi harus didasarkan nilai ganti untuk menjamin pengumpulan dana yang cukup untuk mengganti aktiva tetap pada saat umurnya habis mengandung kelemahan atau pertanyaan yang serius. Bukanlah tujuan utama dilakukan depresiasi adalah untuk mengalokasikan harga perolehan ke produksi atau pendapatan secara wajar? Depresiasi dan akumulasi depresiasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan pengumpulan data untuk pembelian aktiva tetap baru. Dengan penjelasan ini pengkritik konsep biaya kini mengatakan bahwa dalam penerapannya pengguna konsep biaya kini dengan pendekatan revisi secara terus-menerus menimbulkan banyak persoalan dalam praktik. Persoalan-persoalan tersebut mungkin sekali menimbulkan biaya yang lebih besar dari manfaatnya.

BAB 4

TEORI AKUNTANSI NORMATIF: KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Pengertian Kerangka Konseptual**
- 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Kerangka Konseptual**
- 3) Perumusan Kerangka Konseptual**
 - a) Level Pertama: Tujuan Pelaporan Keuangan**
 - b) Level Kedua: Karakteristik Kualitatif dan Elemen Laporan Keuangan**
 - c) Level Ketiga: Postulat, Prinsip, dan Kendala (Constraint)**
- 4) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan di Indonesia**
 - a) Tujuan dan Ruang Lingkup**
 - b) Tujuan dan Pemakai Laporan Keuangan**
 - c) Asumsi Dasar**
 - d) Karakteristik Kualitatif dan Kendala Informasi**
 - e) Elemen-Elemen Laporan Keuangan**
 - f) Pengakuan dan Pengukuran**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- **Memahami peranan kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan**
- **Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kerangka konseptual.**
- **Mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai *building block* yang dibangun dengan kerangka konseptual.**
- **Mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari kerangka konseptual yang dibangun.**
- **Mengidentifikasi berbagai faktor termasuk faktor politik yang mempermudah atau menghalangi pengembangan kerangka konseptual.**

Menjelaskan kerangka konseptual pelaporan keuangan di Indonesia.

1. PENGERTIAN

Kerangka konseptual merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan dan konsep yang melandasi akuntansi yang bisa menurunkan standar-standar yang konsisten dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporannya. Kerangka konseptual ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai kerangka kerja yang akan dijadikan dasar untuk pembentukan standar dan aturan akuntansi yang koheren.
2. Sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik pelaporan keuangan yang muncul.

Di USA dikenal adanya *Conceptual Framework* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kerangka acuan konseptual atau rerangka konseptual yang dapat dijadikan pengarah dalam penyusunan standar akuntansi. Suwardjono (1989)

menganjurkan terjemahan *framework* dengan rerangka bukan kerangka. Rerangka konseptual diperlukan keberadaannya dengan fungsi utama adanya adalah sebagai acuan bagi pihak penyusun standar akuntansi (*accounting standard committee*) dalam menyusun Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard).

Dari team Conceptual Framework Project yang dibentuk Financial Accounting Standards Board (FASB) tahun 1973 dengan tugas utama menyusun rerangka acuan maka baru bulan Desember 1985, USA mempunyai Rerangka Acuan Konseptual. Rerangka Acuan Konseptual tersebut terkumpul dalam bentuk lima pernyataan yang saling berkaitan yaitu: Statement of Financial Accounting Concepts yang saling berkaitan yaitu: Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1 sampai Nomor 6 (SFAC Nomor 6 sebagai pengganti SFA Nomor 3).

Secara pengertian Rerangka Acuan Konseptual adalah hasil suatu proses penalaran dan pemikiran akuntansi yang diharapkan berlaku dalam lingkungan dan kondisi tertentu yang merupakan hasil pemilihan faktor-faktor dan konsep-konsep yang dianggap relevan, terpadu dan saling berkaitan.

Sedangkan FASB (1987) mendefinisikan Rerangka Acuan Konseptual seperti berikut: "... suatu system yang koheren tentang tujuan dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan member pedoman tentang jenis, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan."

Belkaouli (1973) memandang rerangka konseptual sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini disebabkan bahwa struktur rerangka konseptual sama dengan struktur akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran yang logis (*logical reasoning*). Jadi dalam konteks ini Rerangka Acuan Konseptual mendasari dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Di Indonesia prinsip akuntansi atau standar akuntansi atau standar akuntansi sampai dengan tahun 1994 dikenal dengan sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Standar akuntansi atau PAI tersebut

disusun dengan tidak mendasarkan pada Rerangka Acuan Konseptual. PAI yang disusun tanpa mendasarkan pada rerangka Acuan Konseptual tersebut adalah PAI 1974 yang kemudian diganti dengan PAI 1984. Bahan untuk penyusunan PAI 1974 berasal dari tulisan Paul Grady (1965) sedang PAI 1984 berasal dari Accounting Principles Board, Statement Nomor 4.

Selanjutnya pada tahun 1994 Indonesia mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan (sebagai pengganti PAI sebelumnya) dari International Accounting Standard Committee (IASC). Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1995 terkodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan terbit pertama kali tahun 1994 dan telah beberapa kali mengalami cetak ulang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini standar akuntansi keuangan maupun rerangka acuan konseptual yang berlaku di Indonesia tidak murni mendasarkan pada kondisi lingkungan Indonesia tetapi merupakan adopsi dari standar akuntansi keuangan maupun rerangka acuan yang telah ada, yaitu dari IASC.

Pada penerbitan tahun 1999, SAK terjadi menjadi 2 buku yaitu Buku Satu dan Buku Dua. Di bagian awal buku Buku Satu sebelum dicantumkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dikemukakan **Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan** (*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*) yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat **KDPPLK**. Dalam hal ini pada dasarnya fungsi utama KDPPLK adalah sebagaimana *Conceptual Framework* di negara-negara lain, yaitu berfungsi sebagai acuan bagi penyusun standar dalam menyusun Standar Akuntansi Keuangan.

KDPPLK disajikan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sesuai aslinya menurut *International Accounting Standards Committee*. Berdasarkan tujuan dan isi atau ruang lingkupnya KDPPLK tersebut tidak jauh berbeda dengan tujuan dan isi Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) versi (FASB).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PENYUSUNAN KERANGKA KONSEPTUAL

Broad principles (Hendriksen, 1982) atau body of doctrine (Paton dan Littleton, 1940) yang kemudian dikenal sebagai rerangka konseptual hendaknya terefleksi dalam kenyataan praktik akuntansi secara efektif. Oleh karena itu rerangka tersebut harus dijabarkan dalam peraturan-peraturan yang lebih prespektif secara lebih rinci dalam bentuk standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi.

Langkah-langkah dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rerangka konseptual dan pengaruhnya terhadap praktik akuntansi menurut Hendriksen (1982) adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan tentang karakteristik lingkungan ekonomi, politik, budaya dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Misalnya saja pernyataan tentang sistem ekonomi, iklim usaha, bentuk-bentuk badan usaha yang umum dan cara pemenuhan modalnya.
- b. Pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan.
- c. Penetapan kendala-kendala yang mempengaruhi proses penalaran. Misalnya identifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan pemakai akan informasi keuangan dan kendala pemakai akan informasi keuangan yang disajikan kepada mereka. Juga identifikasi karakteristik kealitatif informasi keuangan sebagai kendala pemilihan informasi yang dianggap relevan untuk dimasukkan dalam pelaporan keuangan.
- d. Pengidentifikasian dan pemilihan informasi apa yang harus disajikan dan simbol atau elemen laporan keuangan apa yang dapat merepresentasikan makna informasi tersebut.
- e. Pengembangan dan pendefenisian elemen atau simbol yang menjadi sarana untuk mengkomunikasikan informasi tentang operasi unit usaha dan lingkungannya.
- f. Pengidentifikasian dan pengevaluasian terhadap kendala-kendala mengenai pengukuran, penilaian, pengakuan dan pengungkapan informasi ke dalam elemen laporan keuangan.

- g. Pengembangan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran, penilaian, pengakuan dan penyajian elemen laporan keuangan yang relevan.
- h. Perancangan struktur dan format sistem akuntansi untuk mengumpulkan dan mengolah data serta untuk meringkas dan melaporkan informasi yang relevan.
- i. Penerapan standar dalam situasi yang sesungguhnya berdasarkan prosedur dan metode yang dipilih.

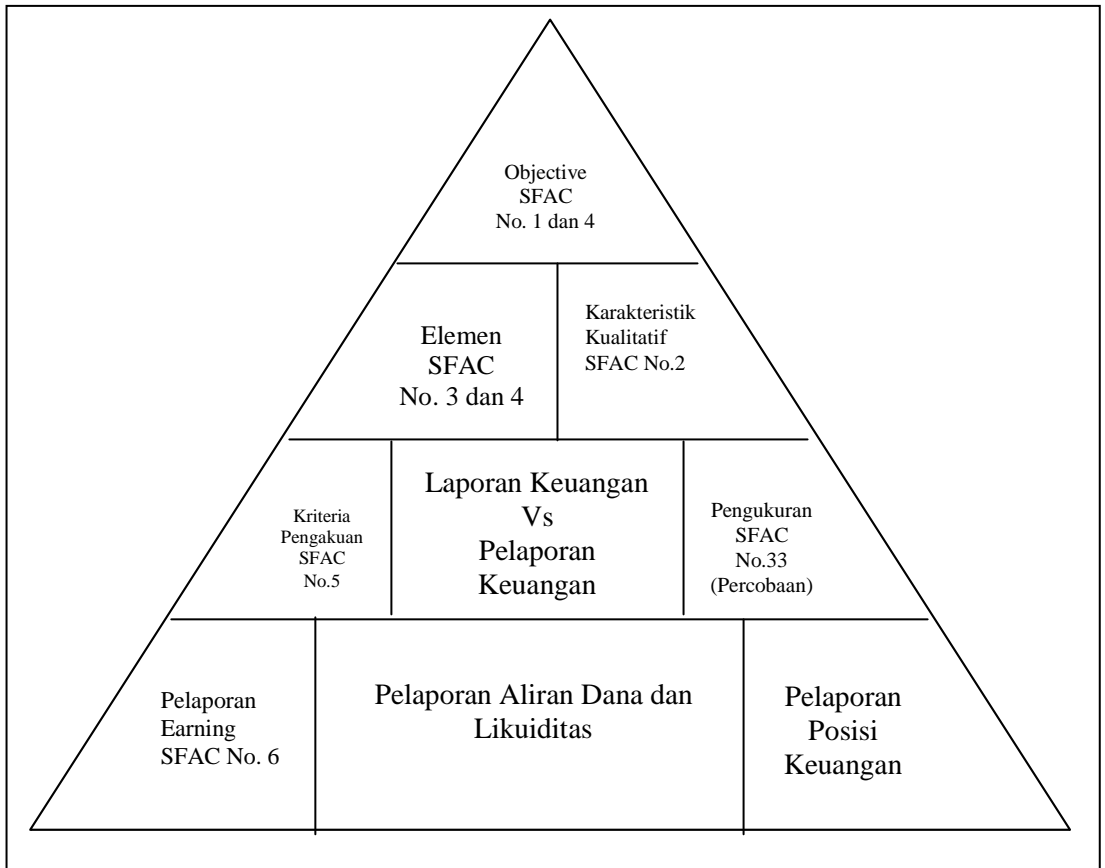
Faktor-faktor di atas harus dipertimbangkan secara matang oleh para penyusun rerangka acuan konseptual karena ia akan berlaku dalam jangka waktu yang relatif panjang atau boleh dikatakan bahwa rerangka konseptual mempunyai sikap cukup permanen. Oleh karena itu rerangka acuan harus disusun secara hati-hati, memerlukan pemikiran mendalam oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari para ahli maupun praktisi akuntansi. Sebelum diterbitkan sudah seharusnya konsep rerangka acuan memerlukan diskusi dalam beberapa tahap secara mendalam.

3. PERUMUSAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam perkembangannya FASB telah menerbitkan memorandum diskusi, yakni *conceptual framework of accounting and reporting consideration of the report of the study group on the objective of financial statements* pada tahun 1974. Selanjutnya FASB menerbitkan suatu Pronouncement yang disebut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC No. 1 s.d. 6) antara lain:

SFAC	JUDUL	TAHUN
1	Objective of Financial Reporting by Business Enterprise	1978
2	Qualitative Characteristic of Accounting Information	1980
3	Elements of Financial Statements of Business Enterprise	1980
4	Objectives of Financial Reporting by Non-Business Organization	1980
5	Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise	1984
6	Elements of Financial Statement (mengganti SFAC No. 3)	1985
7	Using Cash Flow	1985

Apabila digambarkan, kerangka konseptual tersebut akan terlihat seperti gambar berikut (Belkaoui)



Tingkat pertama : Pernyataan konsep akuntansi keuangan mengenai rumusan tujuan pelaporan keuangan suatu kesatuan bisnis (organisasi bisnis) SFAC No.1. SFAC No. 4 tujuan pelaporan keuangan non bisnis organisasi nir laba.

Tingkat ke dua : Pernyataan tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi SFAC No. 2. Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan bisnis SFAC No. 3, kemudian diganti dengan SFAC No. 6, yang mengatur tentang unsur-unsur laporan keuangan baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nir laba (sektor publik)

Tingkat ketiga : Rumusan tentang pengakuan dan pengukuran laporan dan pelaporan keuangan SFAC N0. 5. SFAC No. 33, mengatur pelaporan keuangan dengan penyesuaian tingkat harga (tingkat inflasi). Karena struktur akuntansi sekarang, pelaporan keuangannya didasarkan pada *historical costn-nya* dan SFAC ini mengatur bagaimana penyajian kembali (*restated*) laporan keuangan historical yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga (inflasi) yang di proxi-kan dengan indeks harganya. Tetapi laporan keuangan dengan penyesuaian tingkat harga ini sifatnya belum menjadi keharusan (*mandatory*) sifatnya hanya sebagai informasi tambahan saja.

Tingkat Keempat : Pelaporan posisis keuangan, pelaporan arus kas dan likuiditas, pelaporan *earnings* (dalam hal ini adalah laporan laba rugi).

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan mempunyai tujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi:

1. Komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi. (1999, par. 01)

Sementara itu Vernon Kam (1986) dengan mengacu pada FASB, menjelaskan bahwa fungsi rerangka konseptual kurang lebih sama dengan tujuan KDPPLK di atas. Menurutnya rerangka konseptual berfungsi untuk:

1. Mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi.
2. Memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu bila ada standar yang mengaturnya.
3. Memberikan batas keleluasaan (*bounds for judgement*) dalam menyusun laporan keuangan.
4. Meningkatkan keterbandingan atau *comparability* dari laporan keuangan. (p.37)

Rerangka acuan konseptual bukanlah suatu standar akuntansi atau prinsip akuntansi oleh karena itu rerangka acuan konseptual tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran (*measurement*) dan pengungkapan (*disclousure*). Tuanakotta (1992) menyebutkan paling tidak rerangka acuan konseptual berguna bagi 3 golongan: kelompok akademis, kalangan bisnis dan profesi dan para pembuat standar. Bagi akademis rerangka konseptual menyediakan dasar pemikiran dan analisis darimana mereka dapat mereduksi kesimpulan atas masalah praktis. Penyimpangan yang terjadi dan alasannya dapat dipelajari, dianalisis dan dievaluasi. Dengan demikian oleh akademis mereka yang mempelajari akuntansi lebih mengerti dinamika proses pembuatan standar dan pengaruh berbagai kekuatan politis dalam penyelesaian masalah akuntansi.

Bagi kalangan bisnis dan profesi adanya rerangka konseptual dapat mengetahui secara lebih baik dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh pembuat standar, dengan demikian kemampuan melakukan prediksi akan bertambah baik. Selain itu partisipasi profesi dan bisnis meningkat karena masing-masing pihak menggunakan aturan main dan acuan yang sama.

Kelompok penerima manfaat paling besar dengan adanya rerangka konseptual adalah pembuat standar. Mereka dapat menganalisis masalah dengan efisien, karena mungkin banyak masalah yang mempunyai sifat atau variabel yang sama sehingga mereka tidak perlu dipirjan lebih awal lagi setiap kali ditemukan suatu permasalahan. Berbagai masalah dapat diselesaikan lebih konsisten karena standar akuntansinya bertitik tolak dari rerangka yang sama.

Sebelum membahas tujuan pelaporan keuangan terlebih dahulu apa pengertian laporan keuangan (*financial statement*) dan pelaporan keuangan (*financial reporting*)

Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan formal (*full set*) yang terdiri dari:

- Neraca (*balance sheet*) yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu.
- Laporan laba-rugi (*income statement*) merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu.
- Laporan Perubahan Ekuitas (*statement of changes of equity*) adalah laporan perubahan modal dari suatu kesatuan usaha selama suatu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif,

investasi, dan distribusi dari dan kepada pemilik (*investment by and distribution to owners*).

- Laporan arus kas (*cash flow statement*) berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan dari suatu kesatuan usaha selama suatu periode tertentu.
- Catatan atas laporan Keuangan (*notes to financial statement*) berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan diatas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, (langsung/ tidak langsung) dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yang disediakan seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, *earning, current cost*, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup.

Tujuan laporan keuangan harus menyajikan informasi yang faktual, akurat, objektif, dan informatif yang cukup untuk melakukan penafsiran tentang transaksi-transaksi bisnis yang berguna untuk memprediksi, membandingkan *earnings power* tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang diperlukan untuk penafsiran dan prediksi tersebut kadang kala bersifat subjektif, oleh karena itu, asumsi-asumsi yang digunakan yang mendasari evaluasi dan prediksi tersebut harus diungkapkan.

1. Level Pertama: Tujuan Pelaporan Keuangan

Sebagai suatu “konstitusi”, tujuan pelaporan keuangan merupakan landasan penting dalam suatu rerangka konseptual. Perekayasa pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan. Sama dengan tujuan Komite Trueblood, FASB menyatakan

secara umum tujuan pelaporan yaitu *"To provide information that is useful in making business and economic decision."* Dengan tujuan ini tersirat bahwa sasaran pelaporan adalah para pelaku dalam dunia bisnis dan perekonomian suatu Negara. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada tiga aspek landasan pikiran yaitu, bahwa:

1. Tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hokum, politis, dan sosian tempat akuntansi diterapkan.
2. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan.
3. Tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhannya.

FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa tujuan laporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomik Negara. Oleh karena itu, tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat kegiatan dan keputusan ekonomik yang para pemakai informasi terlibat didalamnya. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomik, hokum, politis, dan social di Amerika. Lingkungan penerapan akuntansi di Amerika diberi ciri sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi pasar yang maju (*highly developed exchange economy*).
2. Sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih.
3. Pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Kegiatan perusahaan dijalankan melalui perusahaan / badan usaha milik investor (*investor-owned business enterprises*).
4. Pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan.
5. Pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah (*private ownership is honored*), sumber daya produktif

- lebih banyak dikelola swasta / pribadi daripada oleh pemerintah dan pemerintah bertindak sebagai regulator.
6. Pemerintah membantu kegiatan ekonomik dan bisnis dengan menyediakan informasi publik yang sebagian berasal dari informasi pelaporan keuangan yang disediakan oleh tiap badan usaha.
 7. Reliabilitas atau kredibilitas informasi dan pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan oleh auditor independen.

Menurut SFAC No.1 tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis.
2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir aliran kas masuk pada perusahaan;
3. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya.

Rumusan tujuan pelaporan keuangan tersebut, berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Informasi yang berguna untuk keputusan kredit dan investasi.
- b. Informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas.
- c. Informasi tentang alokasi sumber daya ekonomi, klaim, dan perubahannya.

Dalam paragraf berikutnya SFAC mengemukakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan tentang kinerja dan earnings dari suatu kesatuan usaha tersebut yaitu:

- a. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.
- b. Pelaporan kinerja keuangan tersebut berguna untuk mengukur earnings power dengan seluruh komponennya, karena para pengguna sangat berkepentingan atas prospek penerimaan kas bersih dari perusahaan.
- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi, bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan kepada para *stakeholders*-nya atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan kepada manajemen.

Sementara itu, bagi organisasi nir laba (non bisnis) tujuan pelaporan keuangan akan berbeda dengan pelaporan keuangan untuk perusahaan bisnis. Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan karakteristik organisasi yang berbeda. Berikut ini adalah karakteristik dari organisasi non bisnis antara lain:

- a. Tidak terdapatnya indikator kinerja seperti pada perusahaan bisnis
- b. Tujuannya tidak untuk mencari keuntungan
- c. Jumlah sumber daya yang diterima dari penyedia sumber daya, maka penyedia sumber daya tersebut tidak berharap menerima pembayaran atau manfaat ekonomi dari sumber daya yang diberikannya.
- d. Hak kepemilikan tidak dapat dijual, ditransfer, atau ditebus, atau tidak terdapat hak untuk memperoleh bagian distribusi sumber daya residual ketika organisasi tersebut dilikuidasi.

SFAC mengemukakan bahwa tujuan pelaporan keuangan organisasi non bisnis sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna dalam mengambil keputusan rasional tentang alokasi sumber daya dalam organisasi.
- b. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dalam menilai jasa yang diberikan dalam oleh organisasi non bisnis dan kemampuannya untuk meneruskan penyediaan jasa tersebut.

- c. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai pekerjaan manajemen dan kinerja manajer organisasi non bisnis dalam melaksanakan tugasnya seperti akuntabilitasnya.
- d. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, penggunaan sumber daya, aktivitas organisasi, atau sumber daya bersih dari organisasi non bisnis tersebut.

2. Level Kedua: Karakteristik Kualitatif dan Elemen Laporan Keuangan

2.1. Karakteristik Kualitatif Pelaporan Keuangan

Secara eksplisit KDPPLK hanya menyebutkan 4 (empat) karakteristik kualitatif, sementara SFAC menyebutkan 12 (dua belas) karakteristik kualitatif termasuk di dalamnya dua pembatas: pembatas atas ($\text{benefit} > \text{cost}$) dan pembatas bawah (materiality). Rincian masing-masing karakteristik kualitatif tersebut tampak pada tabel berikut ini:

Karakteristik kualitatif informasi akuntansi

Menurut SFAC N0. 2	
1	Understandability
2	Relevance
3	Reliability
4	Comparability
5	Predictive Value
6	Feedback Value
7	Timeliness
8	Verifiability
9	Neutrality
10	Representational Faithfulness
11	Materiality
12	Benefits > Costs

Menurut KDPPLK	
1	Dapat Dipahami
2	Relevan
3	Keandalan
4	Dapat Dipertimbangkan

Walaupun KDPPLK hanya menyebutkan 4 karakteristik kualitatif pokok seperti terlihat pada tabel tersebut namun dalam penjelasan secara individual terhadap masing-masing empat karakteristik di atas juga disertakan beberapa **karakteristik tambahan** seperti: materialitas, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk dan kelengkapan. Di samping itu KDPPLK juga mengemukakan beberapa kendala informasi untuk sampai pada kualitas relevan dan andal seperti berikut: tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik dan penyajian wajar.

Penjelasan tentang karakteristik kualitatif menurut SFAC No. 2 akan diuraikan lebih lengkap pada bab 4 nanti. Sementara di sini akan diberikan penjelasan dari 4 karakteristik kualitatif pokok dalam KDPPLK sebagai berikut:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka masa lalu.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Unsur-unsur yang ada dalam *reliable* adalah: jujur, substansi mengungguli bentuk, netral, pertimbangan sehat dan kelengkapan.

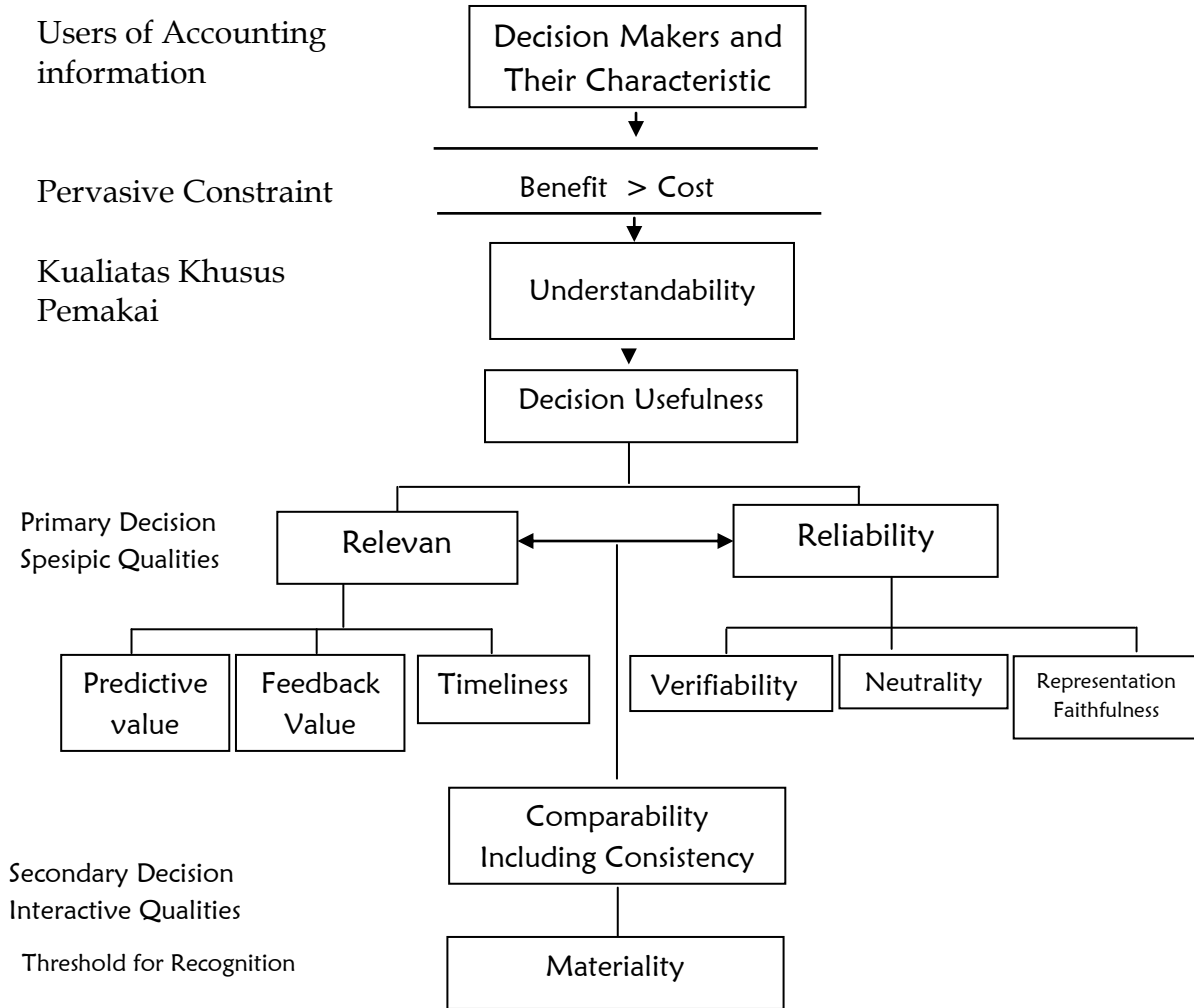
d. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Menurut KDPPLK di samping terdapat sifat informasi agar berkualitas, terdapat juga kendala informasi agar berkualitas, terdapat juga kendala informasi yang dapat mereduksikualitas relevan dan andal. Kendala tersebut adalah: tepat waktu, keseimbangan (*trade off*) antara biaya dan manfaat dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Keseimbangan karakteristik kualitatif tersebut dipengaruhi kepentingan relatif yang sarat dengan pertimbangan profesional.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan singkat tentang isi, ruang lingkup dan karakteristik kualitatif di atas sebuah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang ada di Buku SAK merupakan rerangka konseptual yang mempunyai arti penting bagi beberapa pihak untuk dijadikan acuan. Karena hal-hal yang lebih rinci tidak diuraikan pada buku ini maka pembaca yang ingin mendalaminya dapat membaca langsung ke Buku SAK. Pendalaman tersebut menjadi lebih baik apabila dibandingkan dengan SFAC.

Gambar Karakteristik Kalitatif Informasi Akuntansi



Sumber: SFAC No. 2

SFAC No. 2 mengemukakan karakteristik kualitatif sebanyak 12 kualitas termasuk 2 pembatas (*constraints*) yang tergambar secara hierarchis (lihat gambar 3 di bawah). Dua pembatas tersebut adalah pembatas atas yaitu $\text{benefit} > \text{costs}$ dan pembatas bawah yaitu materialitas (*materiality*). Dari 10 kualitas tersebut (tidak termasuk 2 constraints). SFAC mengemukakan kualitas usefulness (kegunaan

dalam pengambilan keputusan) yang dianggap merupakan karakteristik paling penting, sedangkan relevance (relevansi) dan reliability (keadaan) merupakan 2 (dua) kualitas primer yang berkaitan dengan tiga kualitas lainnya: tepat waktu, nilai prediksi dan nilai umpan balik dan dapat diuji sebenarnya, netral dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan daya banding (comparability), dan konsistensi adalah kualitas sekunder.

Uraian dari sepuluh karakteristik kualitatif tersebut dilakukan berikut ini:

1. *Understandability* (Dapat Dimengerti)

Understandability (mudah dipahami) adalah kualitas suatu informasi yang menyebabkan para pemakai memahami artinya. Dengan demikian pemakai informasi dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi yang diperolehnya. Walaupun demikian karakteristik ini juga menghendaki bahwa *understandability* ini dilihat dari dua sudut. Dari sisi para pemakai informasi akuntansi atau pengambil keputusan disyaratkan mempunyai pengetahuan atau pengertian mengenai akuntansi, sehingga mereka bisa memahami informasi tersebut. Jadi menurut karakteristik ini informasi tidak akan berguna apabila sipemakai tidak mempunyai kemampuan untuk memahami informasi tersebut.

2. *Relevance* (Relevan)

Relevan artinya informasi tersebut dapat membantu dan mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan. *Relevance* adalah suatu kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil dengan membantu pemakai untuk membuat prediksi mengenai hasil kejadian di masa lalu, kini, dan yang akan datang, atau yang mengkonfirmasi atau mengkoreksi pengharapan sebelumnya. Dalam hubungannya dengan laporan keuangan informasi dikatakan relevan apabila data yang diolah dan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan tersebut hanya ada kaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Relevansi mempunyai tingkatan tertentu. Tingkatan itu akan berbeda diantara para pemakai dan sangat tergantung pada kebutuhan mereka dan kondisi tertentu yang dihadapi para pengambil keputusan. Informasi yang relevan tersebut, harus memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), nilai peramalan (*predictive value*) dan tepat waktu (*time liness*). Berikut penjelasan ketiga ciri informasi yang relevan tersebut yaitu:

- ***Feedback Value (Nilai Umpan Balik)***

Artinya informasi yang dihasilkan harus dapat digunakan untuk mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Informasi dari hasil keputusan seringkali merupakan input dalam pembuatan keputusan berikutnya. *Feedback value* (berdaya korektif) adalah kualitas informasi yang menyebabkan para pemakai dapat mengkonfirmasi atau mengoreksi pengharapan yang telah dibuat sebelumnya (*prior expectations*).

- ***Predictive Value (Nilai Prediksi)***

Artinya informasi yang dihasilkan harus dapat membantu pemakai dalam meningkatkan kemungkinan peramalan dengan benar hasil dari kejadian masa lalu atau sekarang. Informasi harus dapat menyediakan prediksi objek atau kejadian masa yang akan datang. *Predictive value* (berdaya Prediktif) adalah kualitas dari informasi yang membantu pemakai meningkatkan kemungkinan meningkatkan perkiraan (*forecasting*) secara tepat mengenai hasil kejadian di masa lalu atau yang sedang terjadi.

- ***Timeliness (Tepat Waktu)***

Artinya informasi harus disajikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pada saat pembuatan keputusan. Informasi

tersebut harus siap digunakan oleh para pemakainya sebelum kehilangan makna dalam mempengaruhi berbagai keputusan yang akan dibuat. Dengan lain perkataan agar informasi menjadi relevan salah satu syaratnya adalah informasi tersebut harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

Kualitas predictive value, feedback value dan timeliness adalah tiga kualitas yang mendukung tercapainya kualitas relevance.

3. *Reliability* (Keandalan)

Reliability (keandalan) adalah suatu informasi yang menjamin bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bias, dan taat merepresentasikan apa yang hendak direpresentasikan serta telah dinilai dan disajikan dengan layak sesuai dengan tujuannya. Informasi tersebut harus dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut valid dan benar. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi bisa berbeda diantara para pemakai tergantung pada tingkat pemahaman mereka atas aturan-aturan yang digunakan pijakan untuk menyajikan informasi tersebut. Dalam kaitannya dengan rerangka konseptual agar informasi memiliki keandalan maka informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya (*verifiability*), disajikan dengan jujur (*representational faithfulness*) dan netral (*neutrality*).

- ***Verifiability* (Dapat Diuji Kebenarannya)**

Informasi tersebut dapat diuji kebenarannya dan diperiksa secara independen atas kebenaran informasi tersebut. Verifiability (dapat diuji kebenarannya) adalah kemampuan,

melalui konsensus di antara para pengukur untuk menjamin bahwa suatu informasi merepresentasikan apa yang hendak direpresentasikan atau bahwa metode pengukuran yang dipilih telah dipakai tanpa kesalahan ataupun bias. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai kebukti asalnya, baik dalam bentuk dokumen dasar, formulir atau bukti fisik. Verifiability berkaitan dengan kebenaran informasi yang dihasilkan, bukannya ketepatan dari metode pengukuran atau pengujian yang dilakukan.

- ***Representational Faithfulness (Penyajian yang Jujur)***

Informasi yang disajikan harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan memiliki tingkat kewajaran yang cukup tinggi. *Representational Faithfulness* (Penyajian yang Jujur) adalah kesesuaian atau kecocokan antara satu ukuran atau penjelasan dengan gejala yang hendak diwakili (kadang-kadang disebut validasi). Informasi yang dilaporkan harus menggambarkan dengan jujur transaksi atau peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang diharapkan untuk disajikan.

- ***Neutrality***

Informasi yang disajikan tidak memihak, artinya tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perilaku pemakai tertentu, melainkan ditujukan untuk kepentingan semua pihak (*general report for general purpose*). *Neutrality* (netral) adalah tidak adanya unsur bias dalam penyajian informasi keuangan yang sengaja disajikan untuk mendapatkan suatu hasil yang telah diperhitungkan sebelumnya, atau untuk mendorong cara perilaku tertentu, dalam informasi yang dilaporkan. Unsur bias mungkin muncul karena adanya upaya untuk memperoleh hasil-hasil tertentu bagi kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Informasi yang disajikan harus diarahkan pada kebutuhan

umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

4. *Comparability* (Dapat Diperbandingkan)

Comparability (Dapat Diperbandingkan) adalah kualitas informasi yang menyebabkan para pemakai dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua set gejala. Dalam penyampaian laporan keuangan informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan. Suatu informasi dapat diperbandingkan apabila menggunakan metode pengukuran dan prosedur akuntansi yang sama, sehingga tujuan *uniformity* dapat dicapai. Ciri dapat diperbandingkan didalammnya terkandung konsistensi, karena tujuan konsistensi adalah *comparability*.

Consistency, mengandung dua makna yaitu: (1) penerapan prosedur akuntansi yang sama dari periode ke periode oleh satu entitas. (2) penerapan prosedur akuntansi yang sama oleh entitas yang berbeda.

5. *Materiality* (Materialitas)

Hanya informasi yang material saja yang disajikan dalam statement keuangan, artinya suatu informasi dianggap material apabila informasi tersebut tidak disajikan (dalam artian magnitude-nya = besar kecilnya jumlah rupiah ataupun objeknya), maka akan menimbulkan kesalahan dan menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut (*misstatement*).

6. *Conservatisme* (Konservatif)

Konservatif merupakan sikap hati-hati dalam menghadapi ketidak pastian oleh suatu bisnis tertentu dengan mencoba mengurangi resikonya.

Selain karakteristik sebagaimana telah diterangkan diatas terdapat pembatas (constraint) dibagian atas, yaitu: manfaat harus lebih besar dari pada biaya (benefit > costs) dan dibagian bawah, yaitu: materiality. Pembatas atas tersebut mengandung arti bahwa dalam penyajian informasi harus dipertimbangkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari penyajian informasi tersebut harus lebih besar daripada biaya penyajiannya. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Manfaat mungkin juga dinikmati pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan utama informasi. Oleh karena itu maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu.

Sedangkan dalam bata bawah harus dipertimbangkan meterialitas suatu informasi. Informasi dinilai material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai secara signifikan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam umum mengenai ukuran materialitas ini. Penentuan tingkat meterialitas akhirnya diserahkan pada pertimbangan profesionalitas.

2.2. Elemen Laporan Keuangan

Elemen-elemen Laporan Keuangan di KDPPLK disebut dengan unsur-unsur laporan keuangan. SFAC No. 6 menyebutkan ada 10 (sepuluh) elemen Laporan Keuangan sedang KDPPLK menyebutkan menyebutkan 5 (lima) unsur laporan keuangan. Rinciannya adalah seperti table 1 berikut:

Elemen-elemen laporan keuangan menurut SFAC NO. 6	
1	Assets
2	Liabilities
3	Equities
4	Revenues
5	Expenses
6	Gains
7	Loses
8	Investments by owners
9	Distribution to owners
10	Compherensive Income

Unsur-unsur laporan keuangan menurut KDDPLK	
1	Aktiva
2	Kewajiban
3	Ekuitas
4	Penghasilan
5	Beban

Dari tabel di atas terlihat bahwa elemen (unsur) laporan keuangan menurut KDPPLK hanya 5, yaitu: aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban. Pengertian aktiva, kewajiban dan ekuitas menurut KDPPLK boleh dikatakan tidak berbeda dengan pengertian assets, liabilities dan equities menurut SFAC.

Istilah penghasilan menurut KDPPLK meliputi pendapatan maupun keuntungan. Sedangkan istilah beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban timbul dari aktivitas yang biasa (*normal activities*) meliputi: beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.

Di bawah ini diberikan defenisi unsur-unsur laporan keuangan menurut KDPPLK:

- a. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- b. Kewajiban adalah merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
- d. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- e. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Defenisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (*normal*) dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti: penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi defenisi penghasilan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

4. KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

1.1. Tujuan

Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pengguna eksternal. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi :

- (a) komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya;
- (b) penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan;
- (c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
- (d) para pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Dalam hal ini terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan standar akuntansi keuangan, maka ketentuan standar akuntansi keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Namun demikian, berhubung kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu.

1.2. Ruang Lingkup

Kerangka dasar ini membahas :

- (a) tujuan laporan keuangan;
- (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;
- (c) defenisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan; dan
- (d) konsep modal serta pemeliharaan modal.

Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya hanya disebut "laporan keuangan," termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Beberapa di antara pengguna ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pengguna sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti *prospectus*, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

2. Tujuan dan Pemakai Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun, demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan informasi nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

3. Asumsi Dasar

1. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan

keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

4. Karakteristik Kualitatif dan Kendala Informasi

4.1. Karakteristik Kualitatif

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat

disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

4.2. Kendala Informasi

Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan yang tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi; misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk menerapkan biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pengguna laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktik, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada Umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu

5. Elemen-elemen Laporan Keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba-rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut :

- (a) *Aset* adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- (b) *Kewajiban* merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
- (c) *Ekuitas* adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangkan semua kewajiban.

Kinerja

Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (*return on investment*) atau laba per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba)

tergantung pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut :

- (a) *Penghasilan (income)* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- (b) *Beban (expenses)* adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Penyesuaian Pemeliharaan Modal

Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif, pos ini dimasukkan dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.

6. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan

kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau:

- (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
- (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (*reliable*). Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengakuan ini dapat dibenarkan kalau pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan pos perubahan posisi keuangan suatu perusahaan oleh pengguna laporan keuangan.

BAB 5

AKUNTANSI INTERNASIONAL DAN DAMPAK PERBEDAAN KULTUR DAN UPAYA HARMONISASI

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Pengertian Akuntansi Internasional**
- 2) Penjelasan tentang Perbedaan Praktik Akuntansi di Berbagai Negara**
- 3) Harmonisasi Akuntansi: Manfaat dan Hambatan**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Mengapresiasi perbedaan kebijakan dan praktik akuntansi yang diadopsi antar negara.**
- Menjelaskan alasan pemilihan praktik akuntansi tertentu oleh negara tertentu.**
- Menjelaskan pengertian harmonisasi akuntansi.**
- Mengidentifikasi dan menjelaskan keuntungan dari harmonisasi praktik akuntansi.**

Memahami beberapa hambatan dalam upaya harmonisasi akuntansi.

1.PENGETERIAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

Berkembangnya transaksi ekonomik mendorong organisasi profesional untuk menciptakan standar pencatatan dan pelaporan keuangan di setiap negara, baik dengan atau tanpa campur tangan pemerintah nasional. Dengan standar yang baru ini yang disebut standar akuntansi internasional diharapkan standar akuntansi masing-masing nasional akan dapat diperbandingkan satu sama lain. Iqbal, *et al.*, (1997) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai “akuntansi untuk transaksi-transaksi internasional, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di berbagai Negara dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dunia”.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Setiap negara mempunyai standar akuntansi sendiri, tidak sama dengan di Negara lain. Dari perspektif internasional laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai Negara dengan standar akuntansi yang berbeda-beda tersebut penuh dengan keberbedaan. Perbedaan misalnya terdapat dalam bahasa, istilah-istilah, klasifikasi dan pengukuran-pengukuran yang digunakan.

Dalam akuntansi internasional ada dua konsep yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang mencukupi, yaitu standardisasi dan harmonisasi. Standardisasi adalah penyeragaman standar yang menghasilkan pembandingan penuh informasi akuntansi sedangkan harmonisasi lebih fleksibel karena perbedaan diantara nasional dapat dipertahankan pada tingkat minimum yang dapat di rekonsiliasi. Pada hal ini diantara keduanya ada perbedaan, yaitu dalam konsep harmonisasi terkandung penyamaan standar sedangkan dalam konsep konvergensi penyamaan tujuan.

Banyak perusahaan, terutama di Jepang, di samping membuat laporan keuangannya berdasarkan standar internasional, juga

membuatnya berdasarkan *generally accepted accounting principles* (GAAP) Amerika Serikat. Indonesia mengadopsi GAAP menjadi PAI (1984) sebelum kemudian mengadopsi IAS menjadi PSAK (1994). Namun karena Negara-negara lain tidak ingin mengadopsi standar-standar internasional maupun standar Amerika Serikat maka keragaman praktik-praktik akuntansi tetap berlanjut di seluruh dunia.

Perbedaan standar tersebut berpengaruh pada pengukuran aset dan kewajiban. Konsep aset tidak sama di semua Negara. Demikian halnya dengan penentuan modal dan laba periodik. Di semua Negara yang berbahasa non-Inggris, penyesuaian modal dibukukan langsung sebagai keuntungan dan kerugian luar biasa. Di AS semua transaksi, kecuali investasi pemegang saham-donasi modal-penambahan modal dan penyesuaian fungsional atas valuta asing, mengalir melalui laporan laba-rugi. Di Swedia lama daur bisnis dianggap sebagai periodik yang terbaik untuk mengukur dan melaporkan hasil operasi bisnis.

2. FAKTOR PENDORONG AKUNTANSI INTERNASIONAL

Akuntansi internasional dibuat agar keberagaman atas praktik-praktik akuntansi yang diterapkan di berbagai negara dapat diseragamkan sehingga para pembaca laporan keuangan yang berada di berbagai Negara dapat memahami dan menginterpretasikan setiap laporan keuangan yang diterbitkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi (mendorong) penerbitan akuntansi internasional yaitu: (1) lingkungan sosial, (2) Pasar modal, (3) Pengelolaan bisnis, dan (4) Standar dan pelaporan yang beragam.

1. Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. Lingkungan kehidupan sosial antar bangsa terus berkembang. Ini telah mendorong timbulnya berbagai organisasi kerjasama. Pembentukan organisasi-organisasi kerjasama ini tidak terlepas dari peran PBB. Badan dunia ini memfasilitasi penyediaan sumber-sumber ekonomi pada negara-negara berkembang dan

perdagangan dunia. Instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan PBB itu diantaranya : Dana Moneter Internasional, Grup Bank Dunia, Kesempatan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) dan konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCT&D) karena latar belakang keinginan mengadakan kerjasama untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat maka yang paling menonjol diantara kerjasama itu adalah di bidang ekonomi. Kerjasama ini mencerminkan keadaan yang saling membutuhkan untuk memajukan kepentingan masing-masing Negara peserta. Supaya tujuan ini dapat terlaksana dengan baik maka dibentuk kesepakatan-kesepakatan ekonomi baik regional maupun global, seperti; (1) Regional terbatas, dan (2) Regional luas dan global.

2. Pasar Modal

Untuk mempertahankan keberadaannya, perusahaan-perusahaan membutuhkan adanya pasar modal global. Di pasar modal ini para investor dan peminjam di seluruh dunia dapat melakukan transaksi keuangan. Banyak emiten besar setelah terdaftar (*listed*) di bursa efek menjual sahamnya dan beredar ke seluruh dunia seperti British Telecom dan British Petroleum.

Isu-isu akuntansi sekarang timbul sebagai akibat dimensi internasionalnya. Transaksi lewat batas Negara tumbuh meledak dan jumlah perusahaan yang mencari modal dipasar internasional terus bertambah. Peristiwa ini telah menyebabkan masalah akuntansi internasional sebagai suatu fakta kehidupan manusia sehari-hari dalam bisnis diseluruh dunia.

3. Pengelolaan Bisnis

Pengelolaan bisnis adalah salah satu bagi dibutuhkannya akuntansi. Akuntansi internal dilihat dari sudut pandang internasional berfokus pada tiga bidang yang luas, yaitu: perencanaan manajerial dan

pengawasan, pengelolaan resiko multinasional dan pembahasan hubungan antara perpajakan dengan harga transfer (*transfer pricing*). Masalah harga transfer hanya terjadi di antara perusahaan afiliasi atau di antara induk dengan anak perusahaan. Oleh karena harga transfer terjadi di dalam perusahaan afiliasi, transaksi tidak berdasarkan persaingan (*not at arm's length bargaining*). Dengan demikian terbuka kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkannya meningkatkan laba perusahaan. Laba dari anak perusahaan yang berdomisili yang tarif pajaknya tinggi dipindahkan ke anak perusahaan yang berdomisili di Negara yang tarif pajaknya rendah. Harga transfer sering dilakukan untuk meminimisasi pajak dengan memperbesar beban di negara-negara yang pajaknya tinggi dan memperbesar pendapatan di negara-negara yang pajaknya rendah yang berarti memaksimalkan laba keseluruhan. Sebelum melaksanakan praktek ini, perusahaan harus hati-hati mengelola kerawanan pajaknya. Harus mengetahui adanya kemungkinan adanya bahwa langkah yang diambil untuk merendahkan pajak di suatu tempat akan menaikkan pajak di tempat lain, mungkin lebih besar dari pengurangan itu.

2. PERBEDAAN PRAKTIK AKUNTANSI DI BERBAGAI NEGARA

Perbedaan pengukuran akuntansi pada beberapa negara pendiri IASC dijelaskan berikut ini.

1. **Amerika Serikat**, untuk mencatat transaksi dalam akuntansi Amerika Serikat menggunakan metode akrual. Metode LIFO, FIFO dan *Average* diterapkan secara luas dalam menilai persediaan. Ada dua metode yang digunakan dalam penggabungan usaha, yaitu : metode *pooling of interest* dan metode pembelian. *Goodwill* dalam pembelian perusahaan perlakukan sebagai aset dan di amortisasi dalam masa paling lama 40 tahun. *Treasury stock* karena perolehan kembali saham sendiri diperbolehkan. Saham ini dapat dijual kembali atau di batalkan (*constructively retired*). Keuntungan dan kerugian yang timbul karena transaksi penyelesaian utang (*defeasance of debt*) dibukukan sebagai pos luar biasa (*extraordinary*

items). Perubahan kebijakan akuntansi (*accounting changes*) diberlakukan mundur (*retroactive*) dan pengaruh perubahan awal periode perubahan dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif pada laporan keuangan perubahan akuntansi, tepatnya di bawah bagian pos luas biasa.

2. **Inggris**, di Inggris semua aset dinilai berdasarkan biaya historis dan *current cost* ataupun campuran di keduanya. Revaluasi nilai tanah dan bangunan berdasarkan harga pasar diperbolehkan. Beban penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan dasar pengukuran yang digunakan untuk aset utama. Metode *the lower of cost or net realizable value* digunakan secara luas. LIFO dalam menilai persediaan tidak diperbolehkan. Metode *pooling of interest* jarang digunakan dan *goodwill* dihapuskan pada saat terjadi. Biaya penelitian dan pengembangan (lit bang) dihapuskan pada tahun terjadinya dan biaya pengembangan boleh ditunda dalam keadaan tertentu.
3. **Belanda**, laporan keuangan Belanda menerapkan basis biaya historis dan *current value*. Ada anggapan bahwa asumsi kontinuitas perusahaan paling baik terlaksana jika didukung dengan penggunaan konsep *current value*. Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah, nilai pasar atau nilai perolehan (*the lower of cost atau market value*). LIFO diperbolehkan dan amortisasi *goodwill* dilakukan paling lama dalam masa 10 tahun, walaupun dalam prakteknya banyak perusahaan besar yang mengamortisasi *goodwill* dalam masa 5 tahun.
4. **Jepang**, pengukuran akuntansi dan pelaporan keuangan Jepang berbeda secara substansial dengan di Negara manapun. EPS perusahaan Jepang jika dihitung berdasarkan standar AS lebih rendah 50%. Akuntansi berbasis biaya historis, beban depresiasi didasarkan pada basis pajak dan *goodwill* diamortisasi selama 5 tahun. Rasio utang Jepang yang tinggi jarang dianggap sebagai suatu tanda bahaya. Laporan keuangan Jepang tidak merefleksikan pengakuan apapun atas perubahan daya beli mata uang.

3. USAHA PENYERAGAMAN

Semangat penyeragaman standar akuntansi semakin semakin menyadarkan bahwa penerapan standar yang sama dalam membuat laporan keuangan lebih hemat dan efisien. Hemat dan efisien merupakan kebijakan yang harus dicapai perusahaan yang ingin mencapai tujuannya. Dalam kaitan pelaporan dengan standar akuntansi internasional hemat karena tidak memboroskan waktu untuk menerjemahkan dan menyatakan kembali (*restating*) laporan keuangan; juga tidak mengeluarkan biaya tambahan sehubungan dengan itu. Selanjutnya efisien bila laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang sama, disamping tidak memerlukan penyesuaian lagi, juga pengambilan keputusan yang akurat lebih cepat.

Sebagai contoh PT. Telkom Tbk. ketika listing di NYSC (dual listing) harus terlebih dahulu menyesuaikan laporan keuangannya yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi internasional (PSAK) ke standar AS. Dalam melakukan hal ini diperlukan dua tenaga pegawai ahli, yaitu : yang satu menguasai standar Indonesia dan yang lain standar AS. Selain daripada pemenuhan persyaratan *listing* ke bursa efek *global* tersebut, kepentingan investor global terlindungi dan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap laporan keuangan yang diterbitkan. Lebih dapat dipercaya lagi bila mengikuti ketentuan *Sarbanes-Oxley Act (SOA) 2002 AS* yang bertujuan melindungi kepentingan investor melalui peningkatan ketepatan (*accuracy*) dan kepercayaan terhadap keterbukaan perusahaan seperti yang diwajibkan peraturan pasar modal. Di Indonesia ketentuan seperti ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik.

Usaha penyeragaman terhadap praktik akuntansi yang berlaku telah dilakukan bertahun-tahun. Hasil survei D. De Bryjne (1980:30-39) pada lembaga-lembaga investasi, perusahaan, penjamin emisi dan regulator mengenai masalah akuntansi yang paling tidak seragam diantara berbagai negara dan sulit direkonsiliasi adalah :

- Akuntan Goodwill

- Pajak yang ditangguhkan
- Penilaian persediaan
- Metode penyusutan
- Cadangan *discretionary*
- Penilaian aset tetap
- Pensiun
- Transaksi dan transaksi valuta asing
- Leases
- Konsolidasi Laporan Keuangan
- Kebutuhan Pengungkapan keuangan

Lembaga standar yang paling aktif dalam usaha penyeragaman standar akuntansi adalah IASC. IASC menjadi satu-satunya lembaga yang terus bekerja memajukan pembentukan standar-standar akuntansi internasional. Dengan penuh tanggung jawab komite yang dikendalikan oleh sebuah dewan ini menciptakan dan menyebarkan standar-standar akuntansi internasional.

IASC didirikan pada 1973, sampai dengan tahun 1995 anggota IASC sebanyak 110 anggota. Salah satu anggota dalam keorganisasian IASC tersebut adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IASC dibentuk dengan tujuan untuk : (1) Merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi untuk penyajian laporan keuangan dan mendorong penggunaannya di seantero dunia dan (2) memperbaiki dan mengharmoniskan standar akuntansi serta prosedur yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan.

Standar IASC atau IAS diterbitkan oleh dewan, tetapi investigasi perinci masalah akuntansi dilakukan oleh *steering committee*. Tiap *steering committee* diketuai oleh suatu perwakilan dewan termasuk perwakilan dari organisasi profesional akuntansi, organisasi lain yang diwakili dalam dewan dan kelompok konsultatif.

Beberapa IAS yang dianggap relevan dengan penjelasan-penjelasan bab ini dikutip sebagai berikut :

IAS 1 : Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Standar ini berhubungan dengan pengungkapan semua kebijakan akuntansi signifikan dalam mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. *Going concern konsistensi, dan accrual adalah asumsi fundamental akuntansi.* Jika asumsi fundamental ini telah diikuti dalam laporan keuangan maka pengungkapannya tidak diperlukan. Sebaliknya bias asumsi-asumsi fundamental tidak diikuti harus dikemukakan penyebab dengan alasan-alasannya.

IAS 5 : Informasi Untuk Diungkapkan Dalam Laporan Keuangan.

Standar ini menetapkan standar minimum pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperlukan termasuk neraca, laporan penghasilan, catatan dan laporan lain serta penjelasan material disertakan sebagai bagian laporan keuangan. Adalah penting pengungkapan semua informasi material agar laporan keuangan jelas dan dapat dimengerti. Standar ini menetapkan pengungkapan rinci dalam neraca dan laporan penghasilan.

IAS 18 : Pengakuan Penghasilan.

Pernyataan disini berkenaan dengan dasar pengakuan pendapatan dalam laporan penghasilan yang timbul dari kegiatan biasa perusahaan dari: penjualan barang, penyerahan jasa, dan penggunaan sumber-sumber perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalties dan dividen.

IAS sekarang dengan kegiatan dan tujuan yang tetap telah berganti nama menjadi *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Berikut ini disebutkan contoh beberapa negara yang baru saja menyatakan kehendaknya mengadopsi IFRS.

1. *Belgia.* Perusahaan telecom terkemuka Belgia mengimplementasi IFRS dalam mengkonsolidasikan laporan keuangannya menjelang IPO tahun 2004.

2. *Cina*. Cina mengharuskan perusahaan yang telah *listed* menggunakan IFRS dalam tahun 2007.
3. *Kanada*. Kanada yang mempunyai GAAP serupa dengan GAAP AS telah menyatakan akan menggantinya dengan IFRS pada tahun 2011.
4. *Singapura*. Regulator negara Singapura telah meminta supaya terhitung mulai 1 Januari 2003 semua perusahaan di kawasan Singapura mengikuti *Singapore Reporting Standards* (SRS). SRS yang kini telah diberlakukan pada perusahaan-perusahaan di Singapura diadopsi dari IAS.
5. *Vietnam*. Demikian juga Vietnam telah mengadopsi *International Financial Accounting Standards* (IFRS). Berdasarkan *Vietnamese Accounting Law*, telah diminta supaya semua perusahaan Vietnam termasuk yang telah terdaftar di bursa Vietnam menyusun laporan keuangan berdasarkan *Vietnamese Accounting Standards* (VAS).
6. *Hong Kong*. Di Hong Kong mulai 1 Januari 2005 memberlakukan konvergensi standar akuntansinya ke IFRS. Yang menjadi ganjalan dalam penerapan *Hong Kong Accounting Standards* (HKAS) ini adalah HKAS No. 4 dari IAS No. 40. standar ini mengatur mengenai *Investment Property* yang meminta laba rugi penilaian sebagian properti disajikan sebagai bagian laba rugi ; sedang perusahaan di Hong Kong tidak terbiasa dengan perlakuan (*treatment*) seperti itu. Akan tetapi Paul Pacter, Direktur Standar untuk perusahaan menengah dan kecil di IASB, memandang standar itu sangat baik atau ditujukan bagi pengguna laporan keuangan. IASB adalah hasil reorganisasi tahun 2001 yang bertindak sebagai penerus IASB.
7. *Malaysia*. Sama dengan Hong Kong mulai 1 Januari 2005 Standar Akuntansi Malaysia yang telah diterbitkan dan telah diubah menjadi *Financial Reporting Standards* (FRS). Menurut Dato' Zainal Abidin Putih, ketua *Malaysian Accounting Standards Board* (MASB), perubahan ini merupakan langkah awal menuju standar internasional dan akan mereview standar akuntansi yang dikeluarkan *International Standards Board* (IASB).

8. *Jepang*. Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara standar akuntansi Jepang dengan IFRS maka pada tanggal 21 Januari 2005 *Accounting Standards Board of Japan (ASBC)* membuat proyek bersama dengan IASB. Diantara lima Negara yang disebutkan diatas hanya Vietnam (mungkin karena perang) yang pada tahun 1995 belum menjadi anggota IASC, lainnya sudah.
9. *European Union*. Mulai 1 Januari 2005 seluruh perusahaan Uni Eropa (EU) yang sekuritasnya terdaftar (*listed*) di *EU exchange* diharuskan membuat laporan konsolidasi sesuai dengan IFRS.

5. HAMBATAN HAMONISASI (PENYERAGAMAN)

Perbedaan Kepentingan nasional antara satu Negara dengan Negara yang lain akan dapat menghasilkan perbedaan sistem akuntansi yang disusun. Keberbedaan kepentingan inilah yang merupakan hambatan penyeragaman akuntansi nasional ke dalam standar akuntansi internasional. Oleh karena itu, usaha penyeragaman kepentingan merupakan satu-satunya pendorong kearah penyeragaman standar akuntansi internasional. Kesamaan kepentingan terdapat bila perusahaan-perusahaan dari berbagai negara dengan berbagai sistem akuntansi mencari modal di pasar modal global.

Selain perbedaan kepentingan, bahasa yang berbeda diantara negara-negara di dunia merupakan salah satu hambatan. Demikian juga halnya dengan lingkungan yang berbeda. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan timbulnya keberbagaian bentuk keputusan yang diinginkan untuk diambil yang menghasilkan sistem-sistem yang berbeda. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah bilangan sistem akuntansi di dunia menjadi sebanyak jumlah bilangan negara.

Hambatan sistem lingkungan merupakan hal yang paling luas (*pervasive*) antara hambatan-hambatan lainnya. Sistem lingkungan yang berlaku di setiap negara amat berbeda-beda. Sistem hukum, politik, sosial budaya, pendidikan dan agama di suatu negara dapat saja berbeda dengan di negara lainnya. Sistem lingkungan yang berbeda di

antara negara-negara ini merupakan sumber kesulitan penyeragaman standar akuntansi nasional ke standar akuntansi internasional.

Hukum, hukum yang berlaku di setiap negara mempunyai pengaruh langsung pada akuntansi di negara yang bersangkutan. Akuntansi dapat diatur oleh pengadilan atau badan pemerintah pusat.

Politik, sistem ini juga merupakan hambatan karena sistem akuntansi pada ekonomi terpusat berbeda dengan ekonomi pasar. Pada ekonomi terpusat tidak ada ekuitas bisnis yang dimiliki swasta, semua dikuasai negara. Ada hubungan yang paling erat diantara kestabilan politik dan kestabilan ekonomi. Disadari atau tidak, ada hubungan keengganan calon investor menanamkan modal riil dengan berita-berita keseringan demo di suatu tempat yang ingin dituju. Perkembangan akuntansi dimungkinkan hanya jika di suatu negara ada ketenangan berusaha karena kestabilan politik.

Sosial budaya, rasio utang yang tinggi pada bank di Jepang tidak dianggap sebagai tanda bahaya karena perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan terus dibantu sehingga pada akhirnya dapat mengembalikan pinjamannya. Demikian halnya ketika krisis moneter, pemerintah memberikan kredit bantuan likuiditas puluhan triliun kepada perusahaan yang mengalami kesulitan pembayaran. Berbeda halnya dengan di Jepang, kredit yang diterima kreditur tidak dimacetkan tetapi dimanfaatkan untuk pengembangan usaha yang kemudian dikembalikan kepada bank yang meminjamkannya.

Pendidikan, sistem pendidikan dan kecerdasan berpengaruh pada sistem akuntansi di suatu negara. Pengguna informasi akuntansi yang terdidik baik dapat memahami informasi yang mengenai akuntansi. Juga akuntan pada suatu negara dengan standar pendidikan tinggi umumnya terlatih dengan baik dan mempunyai kompetensi yang baik serta keahlian.

Keyakinan agama (*religion*), keyakinan agama dapat mempengaruhi konsep dasar akuntansi. Di sejumlah negara, bunga

uang tidak dibenarkan. Ini memerlukan penyajian dan pengomunikasian informasi akuntansi khusus kepada masyarakat bisnis dunia.

BAB 6

AKTIVA

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Defenisi, karakteristik, dan klasifikasi Aktiva**
- 2) Konsep Penilaian**
- 3) Pengakuan Aktiva**
- 4) Masalah-Masalah Khusus**
 - a) Beban tanggungan**
 - b) Kapitalisasi bunga**
 - c) Pengeluaran Modal**
 - d) Aktiva Donasi**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian dan karakteristik aktiva**
- Memahami metode-metode penilaian aktiva**
- Memahami pengakuan aktiva**
- Menjelaskan argumentasi-argumentasi yang mendukung dan menolak penggolongan pos tertentu sebagai aktiva.**

I. PENGERTIAN, KARAKTERISTIK, DAN KLASIFIKASI AKTIVA

Aktiva sebagai terjemahan dari asset merupakan salah satu elemen laporan keuangan, yang mempunyai karakteristik tertentu. Pembicaraan tentang tentang aktiva di bab ini ditekankan pada pengertian, pengukuran, pengakuan dan pengklasifikasiannya. Aktiva dipresentasikan dalam neraca apabila sudah memenuhi kriteria pengukuran dan pengakuan. Oleh karena itu pada bab ini agar lebih mudah memahami sifat, pengukuran dan pengakuannya, terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi aktiva.

Dalam kerangka Dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SAK (1994 par.49) dikemukakan seperti berikut:

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”.

Selanjutnya dikemukakan (1994, par 53) bahwa:

“manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif”.

Canning, J.B. (1929) dalam *The Economics of accountancy* sebagai mana dikutip Greg Whittred dan Ian Zimmer (1990) mengemukakan:

“An asset is any future service in money or any future service convertible into money (except those services arising from contracts the two sides of which are proportionately unperformed) the beneficial interest in witch is legally or equitably secured to some person or set of persons” (p.170)

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa aktiva adalah jasa kemudian (*future service*) dalam bentuk uang atau jasa kemudian yang dapat diubah dalam bentuk uang yang manfaatnya bagi seseorang atau beberapa orang dijamin secara hukum. Jasa-jasa kemudian ini hanya merupakan aktiva bagi orang atau orang-orang tersebut.

Dalam FASB Concept No. 3 (1980, par. 19) dikemukakan :

"Asset are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events"

Aktiva adalah manfaat ekonomi masa yang akan datang, yang mungkin, yang diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan usaha tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa yang lalu.

Dalam pengertian diatas terdapat tiga elemen penting dalam aktiva yang merupakan karakteristiknya, yaitu:

- (1). Manfaat ekonomi di masa yang akan datang
- (2). Pengendalian oleh suatu kesatuan usaha
- (3). Sebagai hasil transaksi masa yang lalu.

Ketiga karakteristik tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut seperti berikut:

1. Aktiva menyimpan kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang, secara sendiri-sendiri atau dalam kombinasi dengan aktiva lain untuk secara langsung atau tidak langsung memberi sumbangan pada aliran masuk kas bersih dimasa depan. Harus ada hak yang spesifik atas manfaat atau potensi jasa di masa depan. Hak yang suda daluwarsa dan/atau mempunyai manfaat negatif tidak dapat dimasukkan sebagai aktiva.
2. Unit usaha tertentu dapat memperoleh manfaat tersebut dan mengendalikan akses pihak lain atas aktiva itu. Yui Ijiri (1967) memberikan tekanan yang cukup besar pada kriteria kendali dalam pengertian aktiva. Menurut Ijiri, aktiva adalah sumberdaya di bawah kendali unit usaha.

3. Transaksi, kejadian atau peristiwa yang menimbulkan hak atau kendali atas manfaat tersebut sudah terjadi. Aktiva tidak boleh mencakup manfaat yang akan timbul di masa depan tetapi saat ini belum ada atau tidak berada dalam kendali unit usaha.

Berdasarkan pengertian dari FASB di atas, Vernon Kam (1986) memberikan modifikasi pengertian tersebut sebagai berikut:

- a. Andal secara hukum
Pengakuan terhadap aktiva sangat ditentukan oleh konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan dan reliabel.
- b. Penggunaan Prinsip Konservatif
Prinsip ini mensyaratkan bahwa perlunya mengantisipasi kerugian yang akan muncul dari pada keuntungan.
- c. Makna Ekonomi Suatu Transaksi
Apabila makna ekonomis suatu transaksi telah terjadi suatu pos dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan tidak perlu terlalu memperhatikan bentuk legalitas formalnya.
- d. Kemampuan Mengukur Nilai Aktiva
Apabila ada kesulitan dalam pengukuran aktiva yang bersangkutan maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat.

Sebagai sumber ekonomi aktiva merupakan potensi-potensi pemberian jasa di masa yang akan datang (*service potential*) atau hak atas manfaat di masa yang akan datang (*right to prospective benefits*).

Hendriksen (1982) menyatakan aktiva mempunyai sifat atau ciri sebagai berikut:

1. Harus ada hak tertentu atas manfaat dan jasa potensial di masa yang akan datang. Hak-hak ini harus mempunyai manfaat lain atau negatif, dan apabila hak-hak ini mempunyai manfaat lain atau negatif maka hak-hak tersebut tidak disebut aktiva. Ketidakpastian mengenai nilai dikemudian atas suatu aktiva janganlah digunakan untuk mengenyampingkannya dari pengertian aktiva. Ketidakpastian memang mempengaruhi penilaian akan tetapi hal ini tidak mengubah sifat dari aktiva.

2. Hak tersebut harus dapat diperoleh atau dikendalikan oleh orang atau kesatuan usaha tertentu. Hak atas manfaat yang tidak dapat dikendalikan oleh kesatuan usaha tertentu seperti lisensi atas pemakaian highway bukan termasuk aktiva.
3. Harus ada klaim yang dapat dipaksakan secara legal atas hak atau jasa atau bukti lain bahwa penetrimaan manfaat di masa yang akan datang adalah mungkin. Jasa yang dapat diambil-alih oleh perusahaan lain atau oleh pemerintah tanpa kompensasi jangan dimasukkan sebagai aktiva. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan harus mempunyai hak berdasarkan perjanjian atau kontrak yang formal.
4. Manfaat ekonomi tersebut haruslah sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang terjadi.

Manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva merupakan potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.

Dalam neraca aktiva yang telah diakui disajikan dengan klasifikasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam standar akuntansi atau prinsip akuntansi, pada umumnya aktiva diklasifikasikan secara garis besar menjadi aktiva lancar (*current assets*) dan aktiva tidak lancar (*non current assets*). Aktiva lancar terdiri atas beberapa pos sedangkan aktiva tidak lancar masih dapat dikelompokkan lagi dalam beberapa klasifikasi, antara lain: investasi atau penyertaan (*investment*), aktiva tetap (*fixed assets* atau juga sering disebut *plant and equipment*), aktiva tak berwujud (*intangible assets*) dan aktiva lain-lain (*other assets*). Penjelasan tentang pengertian dan pengelompokan aktiva tersebut secara lebih rinci dapat dikemukakan seperti dibawah ini.

Aktiva lancar dalam praktik dapat diartikan sebagai aktiva yang diharapkan dapat direlisasikan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, yang mana lebih lama. Aktiva lancar (PSAK Nomor 9) antara lain meliputi: kas dan bank, surat-surat berharga (*marketable securities*), deposito jangka pendek, wesel tagih

(*note receivables*) yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, piutang jangka pendek (*short term receivables*) yang terdiri atas piutang usaha dan piutang lain-lain yang tergolong lancar, persediaan, pembayaran aung muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak dimuka, biaya dibayar dimuka.

Investasi dalam kelompok ini adalah investasi jangka panjang saja, tidak termasuk investasi jangka pendek. Sebab investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aktiva lancar dengan nama pos "surat berharga" (*marketable securities*). Yang dimaksud investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar, yang berarti ivestasi tersebut tidak dimasukkan sebagai pemamfaatan *iddle cash* yang segera akan dijual apabila membutuhkan kas atau apabila harganya naik.

Investasi dapat berupa investasi dagang dan investasi property. **Investasi dagang** adalah investasi yang ditujukan untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Investasi dagang tidak dimaksudkan hanya memanfaatkan kelebihan dana jangka pendek guna memperoleh sumber kas tambahan dalam bentuk capital gain atau dividen. Jadi pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam jangka pendek. **Investasi property** adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan yang berinvestasi atau perusahaan lain dalam grup yang sama dengan perusahaan yang berinvestasi. Investasi ini dimaksudkan untuk dimiliki selama beberapa tahun untuk mendapatkan penghasilan atau capital gain, oleh karena itu meskipun dapat dipasarkan tetapi tetap digolongkan sebagai aktiva tidak lancar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya investasi dagang dan investasi properti merupakan investasi jangka panjang. Tetapi apabila dengan berjalannya waktu manfaat investasi tersebut menjadi tinggal satu tahun atau kurang maka klasifikasinya akan berubah menjadi investasi lancar.

Menurut PSAK No. 13, investasi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar harus dicatat dalam neraca pada nilai terendah antara

biaya perolehan (cost) dan nilai pasar. Sedangkan investasi yang diklasifikasikan sebagai aktiva tak lancar harus dicatat dalam neraca berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai dibawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Dalam hal ini penilaian dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.

Aktiva tetap (PSAK No. 16) adalah aktiva berwujud yang perolehan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Contoh aktiva tetap adalah: tanah, gedung atau bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris kantor. Pos-pos aktiva tetap selain tanah disusut selama masa manfaat atau selama umur ekonomisnya. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai residu atau nilai sisanya.

Aktiva tak berwujud adalah aktiva tidak lancar (*noncurrent asset* atau *capital asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemilikinya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Contoh aktiva tak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang dan goodwill. Salah satu karakteristik dari aktiva tak berwujud adalah tingkat ketidak pastian mengenai nilai dan manfaatnya dikemudian hari. Dalam banyak kasus nilai aktiva dan manfaatnya dikemudian hari. Dalam banyak kasus nilai aktiva tak berwujud berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar.

Aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebut sebelumnya (aktiva lancar, investasi atau penyertaan, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud). Misalnya: aktiva tetap yang tidak digunakan untuk operasi, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva jangka pendek yang tidak termasuk dalam aktiva lancar.

Disamping pengklasifikasian aktiva menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar sebagaimana diuraikan di atas, seringkali para akuntan melakukan klasifikasi aktiva menjadi aktiva moneter (*monetary assets*) dan aktiva non-moneter (*non-monetary assets*). Penggolongan aktiva semacam ini akan mempermudah dalam proses pengukurannya.

Penggolongan aktiva moneter dan non-moneter tidak boleh dikacaukan dengan klasifikasi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva moneter tidak sama dengan aktiva lancar, dan aktiva non-moneter tidak sama dengan aktiva tidak lancar. Pembagian pos neraca menjadi lancar dan tidak lancar didasarkan pada tingkat penggunaan (*rate of use*) atau tingkat perputaran pos. Sedangkan pembagian pos neraca menjadi moneter dan non-moneter didasarkan pada potensi jasa berupa aliran kas atau aliran potensi jasa fisik (non-kas).

Aktiva moneter adalah klaim untuk menerima sejumlah rupiah dimasa mendatang tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Dengan perkataan lain aktiva moneter adalah pos-pos aktiva yang besarnya ditentukan oleh kontrak sehingga besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai uang (rupiah), akan tetapi daya beli klaim tersebut yaitu nilai tukar atau kemampuan klaim tersebut untuk ditukarkan dengan potensi jasa yang lain akan berubah. Beberapa contoh aktiva moneter adalah kas, tabungan, deposito dan piutang dagang, piutang wesel dan uang muka jaminan kontrak.

Aktiva non-moneter adalah pos-pos yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang artinya aktiva non-moneter mengandung jumlah unit rupiah yang berubah-ubah dengan berjalanya waktu. Dengan perkataan lain aktiva non-moneter adalah aktiva yang mempunyai klaim untuk menerima potensi jasa yang daya belinya konstan. Beberapa contoh aktiva non-moneter adalah: surat berharga, pesediaan barang dagangan, aktiva tetap (fasilitas fisik) dan goodwill.

2. PENGUKURAN AKTIVA

Pengukuran secara umum dapat dilakukan dalam satuan fisik dan dapat pula dalam satuan moneter. Dalam konteks tulisan ini

pengukuran aktiva berarti memberi nilai-nilai numerikal (kuantifikasi) dalam satuan moneter atas aktiva, bukan pengukuran dalam satuan fisik. Oleh karena pengukuran disini dinyatakan dalam satuan moneter maka proses pengukuran tersebut juga disebut penilaian (*valuation*). Oleh karena bentuk penilaian atau pengukuran tersebut diperlukan aktiva adalah sejalan dengan tujuan akuntansi, salah satunya adalah untuk mengukur laba.

Secara lebih lengkap tujuan penilaian aktiva adalah:

- a. Sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba.
- b. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan
- c. Mempengaruhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan.
- d. Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen.

Pengukuran dalam akuntansi atas aktiva didasarkan pada nilai-nilai pertukaran (*exchange values*) dan nilai perubahan (*conversion values*) (Hendriksen, 1982).

Exchange value atau nilai pertukaran adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar kerana adanya transaksi jual beli. Conversion values atau nilai perubahan adalah nilai-nilai yang terbentuk karena faktor-faktor produksi. Karena barang dan jasa umumnya dipertukarkan dengan ukuran uang maka wajarlah jika harga pertukaran dipakai untuk pelaporan ekstern.

Pada dasarnya suatu perusahaan berada pada dua pasar yaitu:

- Pasar dimana perusahaan membeli faktor-faktor produksi atau pasar tempat aktiva diperoleh, dan
- Pasar dimana perusahaan menjual produk atau jasa atau pasar tempat aktiva tersebut dilepaskan.

Pada pasar pertama terjadi nilai-nilai masukan atau input (*entry*) value dan pada pasar kedua terjadi nilai-nilai keluaran atau out-put (*exit*) value. Ada kesepakatan umum bahwa aktiva harus dicatat pada waktu perolehan sebesar harga perolehan (*entry value*) dan dikeluarkan dengan harga pelepasan (*exit value*). Yang sulit adalah mencari kesepakatan tentang nilai apa yang harus disepakati sewaktu aktiva

tersebut berada di dalam perusahaan, yaitu berada di antara entry dan exit tersebut. Sebagian orang setuju tidak melakukan revaluasi tetapi sebagian yang lain setuju mengadakan revaluasi.

Berikut ini dikemukakan beberapa konsep pengukuran aktiva menurut 2 penulisan tersebut:

Beberapa metode pengukuran aktiva

Menurut E.S.Hendriksen		Menurut Kenneth S. Most	
A	Exchange Out Put Values <ul style="list-style-type: none"> • Discounted future cash receipt or service potentials • Current out put price • Current cash equivalents • Liquidation values 	A	Direct <ul style="list-style-type: none"> • Present value of expected future net receipts • Expected selling price or net realizable value
B	Exchange Input Values <ul style="list-style-type: none"> • Historical costs • Current input costs • Discounted future costs • Standard costs 	B	Indirect <i>INPUT</i> <ul style="list-style-type: none"> • Historical costs • Replacement costs • Replacement value (present value of expectec future costs) • Imputed costs (included standard costs) • Maginal costs (direct or variable costs) <i>OUTPUT</i> <ul style="list-style-type: none"> • Current cash equivalents • Liquidation proceeds • Marginal revenue
C	The Lower of costs or market valuation	C	Book value

Untuk pengukuran nilai aktiva akan lebih mudah apabila dipahami penggolongan aktiva menjadi aktiva moneter dan aktiva non moneter. *Aktiva moneter* adalah pos-pos aktiva yang besarnya ditentukan oleh kontrak sehingga besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai uang, misalnya kas, tabungan, dan piutang dagang.

Aktiva non moneter adalah pos-pos aktiva yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang misalnya: surat berharga, persediaan dan aktiva tetap.

Berikut ini hal-hal penting untuk menjelaskan konsep pengukuran menurut Hendriksen (1982) yang disajikan pada tabel tersebut di atas.

1. Exchange output value atau disebut juga *exit value*

Exchange output value mendasarkan pengukuran pada nilai keluaran artinya atas jumlah kas (rupiah) atau penghargaan lainnya (nonkas) yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aktiva atau potensi jasa yang keluar dari perusahaan karena penjualan atau suatu pertukaran. Penjelasan singkat dari beberapa nilai keluaran disajikan di bawah ini.

a. Discounted Future Cash Receipt or Service Potentials

Proses pengukuran dalam metode "*Discounted Future Cash Receipt or Service Potentials*" (Penerimaan Kas atau Potensi Jasa Masa Depan yang Didiskontokan) dapat digunakan apabila harapan tentang kepastian penerimaan kas atau setaranya cukup tinggi dan tenggang waktu sampai penerimaannya pasti. Pos yang dapat menggunakan dasar penilaian ini misalnya: investasi dalam obligasi, deposito berjangka dan piutang wesel jangka panjang. Dalam metode ini potensi kas di masa akan datang dari pos-pos tersebut didiskontokan. Konsep pengukuran atau penilaian semacam ini diindikasikan mempunyai manfaat untuk mengetahui nilai jasa potensial masa yang akan datang pada saat sekarang.

Beberapa kelemahan konsep *Discounted Future Cash Receipt* adalah:

- (1) Arus kas atau *service potentials* sifatnya subyektif dan sulit dibuktikan (*non verifiable*)
- (2) Sulit menentukan tingkat diskonto yang tepat.

- (3) Bila ada dua atau lebih faktor-faktor yang mempengaruhi aliran kas bagaimana alokasi yang logis dari faktor-faktor tersebut.
- (4) Jumlah present value dari masing-masing aktiva tidak sama dengan nilai perusahaan.

b. Current Output Price (COP)

Current Output Price (COP) atau harga keluaran sekarang atau harga keluaran berjalan, yang dapat digunakan apabila harga jual pada saat pelaporan mencerminkan harga dimasa mendatang bila pos yang bersangkutan keluar dari perusahaan. Dasar pengukuran ini dapat digunakan untuk bisa digunakan untuk surat-surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Menurut metode ini persediaan harus diukur dengan harga jualnya sebagai ukuran harga keluaran bukan biaya perolehannya.

Proses pengukuran dalam metode ini dilakukan dengan:

- 1) Dalam pasar yang teratur harga pasar saat ini merupakan taksiran yang layak dari harga pasar masa yang akan datang.
- 2) *Current price* merupakan pengganti *discounted expected cash receipt value* dari persediaan yang sudah siap dijual.
- 3) Bagi persediaan yang belum akan dijual dalam waktu dekat, menurut COP harga jual persediaan dimasa depan didiskontokan.
- 4) Biaya-biaya tambahan untuk produksi dan penjualan perlu dikurangkan sehingga didapatkan *net relizable value*.

Dalam hal seperti nomor 4 ini COP adalah sama dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*). Oleh karena itu nilai realisasi bersih diartikan sebagai harga keluaran masa berjalan dikurangi dengan perkiraan biaya dan beban tambahan yang berkenaan dengan penyelesaian, penjualan barang tersebut dan beban penagihan atau pengumpulan piutang dengan dasar ukuran biaya berjalan.

Beberapa kelemahan COP:

- 1) Konsep ini hanya berlaku bagi aktiva yang dimaksudkan untuk dijual

- 2) COP untuk sebagian besar aktiva menjadi harga di masa yang akan datang dengan asumsi *ceteris paribus*. Berarti bahwa nilai bersih dilaporkan sebelum semua aktiva yang berkaitan dengan penjualan diselesaikan.
- 3) Diperlukan metode pengganti apabila ada aktiva yang tidak mempunyai harga pasar/harga jual sekarang.

c. Current Cash Equivalent (CCE)

Current Cash Equivalent atau Setara Kas Masa Berjalan. CCE menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual aktiva menurut kondisi perusahaan yang wajar (dalam arti harga pasar barang sejenis dalam kondisi normal). CCE merupakan harga-harga aktiva yang benar-benar dapat diwujudkan melalui penjualan normal. Nilai Setara Kas Masa Berjalan biasanya diukur berdasarkan kutipan harga pasar barang sejenis dalam kondisi yang sama.

Kelebihan dari metode ini adalah setelah semua aktiva dinilai dengan setara kas masa berjalan maka jumlah yang tercantum mempunyai sifat *additive*. Sedangkan kesulitan utama konsep ini adalah bahwa tidak semua aktiva mempunyai harga pasar. Sehingga dalam penafsiran sempit seperti halnya metode ini membenarkan untuk mengeluarkan pos-pos yang tidak mempunyai nilai pasar dari neraca.

d. Liquidation value (LV)

Liquidation value (LV) atau Nilai Likuidasi merupakan dasar pengukuran yang serupa dengan COP dan CCE yaitu penilaian dengan menggunakan harga keluaran, yang berbeda adalah dalam hal kondisi pasarnya. LV menggunakan harga-harga penjualan dalam keadaan dilikuidasi. Metode nilai likuidasi mengasumsikan suatu penjualan yang dipaksakan sehingga umumnya harganya diturunkan atau harga keluaran lebih rendah dari harga pasar dalam kondisi normal. Penerapan nilai likuidasi biasanya menyebabkan diturunkannya

penilaian aktiva serta diakuinya kerugian. Oleh karena itu konsep LV hanya boleh diterapkan dalam keadaan sebagai berikut:

1. Aktiva yang bersangkutan telah kehilangan kegunaan yang lazim atau usang atau telah kehilangan pasar dalam kondisi normal.
2. Nilai likuidasi diterapkan bila ada maksud menghentikan perusahaan dalam waktu dekat, sehingga tidak mampu menjual dalam pasar yang normal.

2. Exchange Input Values

Metode pengukuran Exchange Input Values atau nilai masukan mendasarkan pada ukuran-ukuran masukan. Ukuran masukan menunjukkan jumlah kas atau nilai imbalan lainnya yang dibayarkan ketika aktiva atau manfaat diperoleh perusahaan dalam suatu pertukaran. Seperti harga nilai keluaran, ada beberapa dasar pengukuran nilai masukan.

Beberapa pengukuran dibawah ini.

a. Historical Costs

Uraian tentang historical costs (HC) telah disajikan di bab 5 tentang Konsep Pengukuran.

b. Current Input Costs

Current Input Costs (CIC) diterjemahkan sebagai biaya masa berjalan atau biaya kini. Dasar ini dapat digunakan kalau ada bukti pendukung yang kuat untuk diverifikasi. CIC merupakan harga pertukaran yang harus dikeluarkan saat ini untuk memperoleh aktiva yang sama atau setaranya. Jadi harga perolehan dari pasar tempat perusahaan membeli barang atau jasa (pasar input) bukan harga dari pasar tempat perusahaan menjual aktiva atau jasa (pasar output), kecuali bila kedua pasar tersebut sama. CIC seringkali juga merupakan nilai pengganti (*replacement cost*) untuk aktiva yang dibangun sendiri.

Beberapa keuntungan penggunaan CIC, adalah:

- 1) Ukuran terbaik mengenai nilai input yang di-*match*-kan terhadap pendapat
- 2) Dalam *matching* memungkinkan pemisahan holding gains dan/atau holding losses dan pengakuan laba atau rugi operasional.
- 3) Biaya masa berjalan telah menjadi dasar penilaian yang penting dalam akuntansi khususnya untuk menyajikan informasi mengenai dampak inflasi pada aktiva perusahaan.

Sedangkan kelemahan CIC antara lain:

- 1) Kadang-kadang kurang obyektif karena tidak tersedianya harga pertukaran untuk aktiva tertentu dimasa kini. Khususnya barang-barang musiman dan barang yang diproduksi dengan metode usang.
- 2) Perubahan dalam biaya kini tidak selalu mencerminkan perubahan harga penjualan masa berjalan. Nilai-nilai tidak mesti berubah karena adanya perubahan biaya.

c. Discounted Future Input Costs

Discounted Future Input Costs (DFC) atau biaya masukan masa depan yang didiskontokan menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomik di masa yang akan datang seandainya potensi jasa tersebut (aktiva) tidak diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Metode ini mengandung kelemahan seperti yang ada pada metode biaya historis ditambah pembatas yang berlaku dalam konsep potensi jasa yang didiskontokan.

d. Standard Costs

Standard Costs atau biaya diterakan pada penilaian dengan dasar berapa biaya yang seharusnya menurut asumsi-asumsi tertentu. Penilaian berdasarkan standar diterapkan dalam keadaan produksi pada tingkat efesiensi dan kapasitas tertentu. Biaya-biaya karena ketidakefisienan diabaikan sehingga sangat berguna bagi tujuan-tujuan

manajerial. Persediaan barang jadi dan fasilitas fisik merupakan pos-pos yang dapat dinilai atas dasar standard costs.

3. Lower of Costs Market Valuation

Lower of Costs Market Valuation atau *comwil (cost or market whichever is lower)* dan diterjemahkan dengan “nilai terendah antara biaya dan pasar”. Locom bukanlah konsep penilaian masukan saja dan juga bukan konsep penilaian keluaran saja tetapi bisa saja merupakan campuran kedua konsep tersebut. Istilah pasar bisa mengacu pada harga keluaran ataupun harga masukan. Market dapat berarti replacement cost (ukuran masukan) misalnya untuk persediaan barang; tetapi dalam hal-hal tertentu market dapat diartikan sebagai harga jual atau nilai realisasi bersih (ukuran keluaran) misalnya untuk pengukuran surat berharga. Pengukuran dasar penilaian locom semacam ini dipengaruhi oleh praktik akuntansi yang menganut konsep konservatisme. Penerapan metode ini pada persediaan barang akan mengakibatkan berkurangnya laba (adanya rugi) dalam laporan laba rugi akibat jumlah penurunan rupiah harga pasar sebelum rugi tersebut terealisasi melalui penjualan.

Dari uraian tentang berbagai metode pengukuran tersebut di atas masing-masing metode mempunyai kelemahan dan keunggulan sehingga metode mana yang akan dipakai oleh perusahaan dalam penyajian informasi keuangan sebenarnya tergantung pada relevansi metode tersebut bila dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian tidak ada metode pengukuran yang memberikan konsep yang tunggal dan menyeluruh.

3. PENGAKUAN AKTIVA

FASB dalam SFAC Nomor 5 (1984) menetapkan 4 (empat) kriteria dasar pengakuan, yaitu :

1. *Defenition*

Defenisi maksudnya bahwa suatu hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan kalau memenuhi defenisi elemen laporan keuangan. Intinya bahwa suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi defenisi elemen laporan keuangan.

2. *Measurability*

Measurability atau keterukuran maksudnya bahwa kejadian atau pos tersebut harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reabilitas yang cukup tinggi.

3. *Relevance*

Relevance atau relevansi maksudnya bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau pos mempunyai daya untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan pemakaian informasi.

4. *Reliability*

Realibibily atau realibilitas maksudnya bahwa informasi tersebut menggambarkan keadaan yang dipresentasikan secara tepat, teruji (verifiable) dan netral.

Bila dihubungkan dengan laporan atas transaksi atau kejadian yang telah diakui karena memenuhi keempat kriteria di atas, maka aktiva yang sudah diakui akan tampak dalam neraca, yang penyajiannya dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi tertentu dan dasar pengukuran atau penilaian yang sesuai. Mungkin dalam praktik ada beberapa pos yang memenuhi kriteria defenisi aktiva tetapi belum ada kesepakatan untuk manusia atau karyawan. Penyebabnya adalah faktor keterukurannya belum memadai.

Pengakuan aktiva dalam neraca dilakukan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa yang akan datang diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur dengan andal. Manfaat ekonomi tersebut mungkin (*probable*) diperoleh. Dikatakan mungkin bukan pasti, kerana segala sesuatu yang menyangkut masa yang akan datang sifatnya *uncertainty* (mengandung ketidakpastian). hanya saja manfaat masa mendatang tersebut secara beralasan dapat diekspektasikan dan dipercaya secara logis atau atas dasar bukti-bukti yang telah tersedia.

Aktiva tidak diakui dalam neraca kalau pengeluarannya telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif perlakuan pengeluaran semacam ini adalah dimasukkan ke dalam pengakuan beban (*expenses*) dan akan disajikan ke laporan laba rugi.

Sesuatu atau nilai yang sudah tidak mempunyai lagi manfaat di masa mendatang dikelompokkan sebagai *expired cost* atau *expense* yang selanjutnya disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan.

4. MASALAH KHUSUS

Ada beberapa masalah khusus dalam konsep dan praktik akuntansi yang berkaitan dengan aktiva yang menjadi bahan perdebatan. Beberapa masalah khusus tersebut antara lain: kapitalisasi bunga selama periode konstruksi, beban yang ditanggungkan, aktiva sumbangan dan pengeluaran modal.

1. Kapitalisasi bunga

Masalah dalam kapitalisasi bunga seringkali muncul dalam perusahaan yang sedang membangun fasilitas fisik yang didanai dengan pinjaman jangka panjang. Permasalahannya adalah apakah bunga yang dibayarkan selama periode konstruksi masuk sebagai harga perolehan aktiva tetap yang dibangun atautkah langsung diperlakukan sebagai biaya (*expenses*) atautkah ada ditanggungkan tetapi tidak dikapitalisasikan sebagai bagian aktiva tetap yang dibangun. Masalah kapitalisasi bunga selama periode konstruksi dibahas dalam praktik berpedoman kepada standar akuntansi. Di

Amerika diatur dalam FASB No. 43 "*Capitalization of Interest cost*". Sedangkan di Indonesia diatur dalam PSAK No. 26 "*Akuntansi Bunga untuk Periode Kontruksi*".

2. **Beban yang Ditangguhkan (*Deffered Charges*)**

Masalah dalam beban yang ditangguhkan adalah apakah beban yang ditangguhkan masuk sebagai aktiva atau tidak. Pengeluaran mana yang masuk beban yang ditangguhkan dan mana yang tidak masuk? Kalau masuk sebagai aktiva dimana letak klasifikasinya?

3. **Aktiva Sumbangan**

Masalah yang sering muncul dalam aktiva yang berasal dari sumbangan (donasi) adalah menyangkut berapa nilai yang harus dicantumkan dalam neraca. Hal ini muncul karena aktiva sumbangan diperoleh tanpa harus mengeluarkan kas atau aktiva lainnya yang sesuai dengan nilai aktiva yang bersangkutan. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi (yang berarti), aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajar atau nilai tunai implisit. Hal ini disebabkan bahwa pengakuan terhadap aktiva tidak didasarkan pada sumber diperolehnya tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut.

4. **Pengeluaran Modal (*Capital Expenditures*)**

Pengeluaran modal adalah pengorbanan sumber ekonomik yang berkaitan dengan obyek jasa yang biasanya memiliki umur ekonomis lebih satu tahun (jangka panjang). *Capital expenditures* selalu dilawankan pembahasannya dengan *revenue expenditures*. Masalah yang timbul di sini adalah menentukan kapan suatu pengorbanan ekonomik dianggap sebagai pengeluaran modal sehingga harus dikapitalisasi, dan kapan dianggap sebagai biaya periode sehingga tidak dikapitalisasi.

5. Transaksi Non Moneter

Mungkin timbul masalah apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva bukan berbentuk kas tetapi berbentuk aktiva non moneter. Bila terjadi transaksi demikian akan muncul masalah pengukuran. Pada umumnya pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non moneter dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum.

BAB 7

KONSEP HUTANG DAN EKUITAS

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Definisi, Karakteristik, dan Klasifikasi Hutang**
- 2) Pengukuran dan Pengakuan Hutang**
- 3) Hutang Kontingensi**
- 4) Konsep Ekuitas**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian, karakteristik, dan penggolongan hutang**
- Memahami metode pengukuran dan pengakuan hutang**
- Memahami karakteristik hutang kontingensi**
- Memahami teori atau konsep ekuitas**

I. PENGERTIAN HUTANG

Kewajiban atau hutang merupakan salah satu elemen laporan keuangan. Sebagaimana aktiva dan elemen laporan keuangan yang lain yang didefinisikan berbeda dalam literatur yang berbeda maka hutang juga mempunyai definisi yang berbeda-beda. Walaupun demikian substansi dari definisi hutang dan elemen-elemen laporan keuangan tersebut dapat dikatakan sama. Ada beberapa definisi, masing-masing menurut IAI melalui KDPPLK (1999) dan PAI (1984) dan dari FASB melalui SFAC No. 6 (1985).

IAI melalui KDPPLK (1994) "Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi."

Sebelumnya IAI melalui PAI 1984 mendefinisikan kewajiban sebagai "pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya."

FASB melalui SFAC No. 6 mendefinisikan kewajiban seperti berikut:

"Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events."

Kewajiban dan hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang, yang mungkin timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada unit transaksi atau kejadian yang telah lalu.

Dari tiga definisi kewajiban tersebut jelas bahwa hutang merupakan kewajiban yang ada pada masa kini atau sekarang sebagai

syarat pertama dan hasil transaksi masa lalu sebagai syarat kedua. Maksud kata-kata masa kini atau sekarang adalah pada tanggal neraca. Adanya hutang pada tanggal neraca berarti nantinya perusahaan harus mengorbankan aktiva atau menyerahkan jasa untuk pelunasannya kepada pihak ketiga (kreditor), umumnya sebagian dengan cara membayarkan hutang.

Hutang seringkali menunjuk pada adanya klaim atas aktiva perusahaan oleh kreditor. Perusahaan dapat mempunyai aktiva karena supply dana dari salah satu keduanya, yaitu kreditor atau pemilik men-supply dana-dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Ada dua macam klaim terhadap aktiva: klaim oleh kreditor disebut hutang dan klaim oleh pemilik adalah berbeda. Kreditor mempunyai hak terlebih dahulu (prioritas) pada aktiva dalam kasus likuidasi dan klaim kreditor hamper selalu lebih spesifik daripada klaim pemilik dalam hal jumlah dan waktu pembayaran. Sedang klaim pemilik terhadap aktiva hanya didasarkan atas sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi. Misalnya jika ada pengumuman pembagian deviden maka muncul kewajiban berupa hutang deviden yang berarti perusahaan yang mengumumkan pembagian deviden mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban sekarang timbul karena pada saat sekarang suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa dihindari untuk menyediakan aktiva atau jasa kepada pihak lain.

Pada dasarnya, kewajiban kepada pihak lain dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok:

1. Kewajiban kepada kreditor.
2. Kewajiban kepada pemilik.

Kewajiban kepada kreditor disebut hutang atau kewajiban yang dalam istilah manajemen keuangan disebut modal asing sedang kewajiban kepada pemilik disebut modal atau ekuitas yang dalam istilah manajemen keuangan disebut modal sendiri. Kedua kelompok tersebut mempunyai hak klaim atas aktiva namun keduanya memiliki klaim yang sifatnya berbeda baik dalam jumlah maupun waktu.

Syarat kedua dari hutang adalah bahwa hutang saat ini berasal dari transaksi masa yang lalu, berarti dengan syarat ini dapat dipastikan bahwa hanya kewajiban yang ada sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Pertanyaannya adalah peristiwa masa lalu yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar sehingga syarat tersebut terpenuhi?

Syarat kedua ini memerlukan adanya kriteria khusus yang menentukan apakah suatu kewajiban telah terjadi atau belum. Misalnya pembelian kredit dengan cara memesan terlebih dahulu kepada pemasok tertentu. Dalam hal semacam ini pada saat dilakukan pemesanan belum terjadi adanya kewajiban yang harus diakui sampai barang yang dibeli benar-benar diterima oleh perusahaan atau telah terjadi pemindahan hak milik atas barang tersebut. Sehingga dalam hal semacam ini yang disebut peristiwa masa lalu adalah saat barang yang dipesan diterima, bukan saat dilakukannya pemesanan.

Dengan adanya kedua syarat tersebut di atas pengertian hutang terpenuhi dan oleh karenanya hutang disajikan dalam neraca. Dalam pengertian hutang tersebut termasuk di dalamnya hutang dagang, hutang biaya, hutang bank, hutang obligasi, hutang deviden, uang muka penjualan, uang muka pendapatan jasa dan sebagainya yang mungkin masih banyak lagi, termasuk *deferred credits*.

Dari beberapa contoh tersebut sebagian besar hutang akan dilunasi dengan penyerahan aktiva berupa kas, berate dalam nantinya akan dilunasi kecil yang tidak diselesaikan dengan pembayaran kas. Pada umumnya uang muka penjualan atau uang muka pendapatan jasa akan dilunasi dengan penyerahan produk/jasa.

2. KARAKTERISTIK HUTANG

Menurut FASB dalam SFAC No. 6 (1985) kewajiban atau hutang mempunyai tiga karakteristik seperti berikut:

1. Hutang mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha, yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau penggunaan aktiva pada

tanggal tertentu, dengan terjadinya peristiwa tertentu atau dengan permintaan.

2. Tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki sama sekali atau hanya memiliki pertimbangan sedikit untuk menghindarkan diri dari pengorbanan tersebut.
3. Transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas untuk melakukan pengorbanan telah terjadi.

Di samping itu dijelaskan dalam SFAC No. 6 mengenai rincian karakteristik hutang sebagai berikut:

1. Hampir semua hutang mewajibkan perusahaan membayarnya dengan kas.
2. Hampir semua hutang merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan penyelesaiannya menurut hukum.
3. Hampir semua hutang berasal dari penemuan manusia seperti alat keuangan, kontrak dan hukum yang mempermudah berfungsinya ekonomi yang sangat maju.
4. Hampir semua hutang timbul dari persetujuan di antara kesatuan usaha.
5. Beberapa kewajiban dikenakan kepada perusahaan oleh pemerintah atau pengadilan.
6. Beberapa kewajiban timbul dari transfer tanpa timbal balik antara perusahaan dengan pemiliknya atau dengan satu atau lebih perusahaan lain.
7. Beberapa hutang didasarkan pada kewajiban yang adil (*equitable liability*) dan kewajiban konstruktif (*constructive liabilities*).

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa hutang dapat terjadi karena faktor penyebab yang berbeda. Pada dasarnya ada tiga jenis hutang yang ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab terjadinya hutang.

Pengelompokan ketiga jenis hutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Contractual Liabilities* (kewajiban kontrak atau kewajiban legal). Kewajiban atau hutang ini timbul karena ketentuan formal dalam peraturan hukum untuk mengeluarkan kas atau menyerahkan barang/jasa kepada pihak tertentu. Misalnya hutang dagang, hutang pajak, hutang gaji, atau hutang bank. Hutang legal termasuk pandangan terhadap hutang dalam arti sempit.
2. *Constructive Liabilities* (kewajiban konstruktif). Kewajiban konstruktif sengaja ditimbulkan untuk tujuan atau karena kondisi tertentu, meskipun secara formal dilakukan melalui penyajian secara tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Misalnya rencana bonus yang akan diberikan kepada karyawan dapat dipandang sebagai hutang untuk membayar di masa yang akan datang.
3. *Equitable Liabilities* (kewajiban equitabel). Kewajiban ini terjadi karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan etika dan merupakan praktik perdagangan yang baik, misalnya hutang garansi. Kewajiban equitabel bias dianggap sebagai kewajiban oleh dua pihak yang terlibat meskipun terjadinya tidak melalui proses hukum. Hutang garansi timbul biasanya demi bisnis yang baik yang mungkin tidak harus didukung aturan hukum. Apabila kewajiban equitabel tidak terpenuhi yang muncul adalah sanksi moral, sosial atau sanksi menurut praktik dagang yang baik.

Berdasarkan karakteristik hutang di atas penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya atau aktiva yang mempunyai manfaat masa depan demi untuk keuntungan atau aktiva tidak boleh segera diakui sebelum ada realisasi.

3. KLASIFIKASI HUTANG

Sebagaimana aktiva hutang dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Ada klasifikasi hutang lancar dan hutang tidak lancar. Ada juga klasifikasi hutang moneter dan hutang non moneter.

Kewajiban yang sudah diakui akan tampak penyajiannya dalam neraca. Kewajiban-kewajiban tersebut umumnya diklasifikasikan dalam kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kemudian kewajiban tidak lancar dibagi lagi menjadi kewajiban kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek antara lain meliputi: hutang bank (jangka pendek), bagian hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar, uang muka penjualan, hutang pembelian aktiva tetap atau hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam janka pendek, penyesihan kewajiban pajak, hutang deviden, pendapatan atau kredit yang ditangguhkan.(deferred credit) dan juga hutang kontigensi.

Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal neraca masuk sebagai bagian dari hutang lancar, kecuali jika perusahaan bermaksud melunasi dengan cara menimbulkan hutang jangka panjang baru.

Pembagian aktiva dan hutang dalam klasifikasi lancar dan tidak lancar umumnya dianggap mempunyai banyak manfaat bagi para pemakai laporan keuangan, walupun klasifikasi semacam ini juga mengandung kelemahan. Pengklasifikasian menjadi aktiva dan hutang dalam kelompok lancar dan tidak lancar dianggap berguna untuk membantu laporan keuangan dalam menganalisis posisi keuangan perusahaan. Perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar dimaksudkan untuk mengukur tingkat likuiditas, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kesulitan keuangan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa selisih lebih aktiva lancar di atas hutang lancar merupakan indikasi adanya masalah keuangan. Namun demikian kesimpulan semacam itu harus tetap mempertimbangkan jenis dan karakteristik usaha perusahaan dan komponen dari aktiva lancar maupun hutang lancar. Klasifikasi lancar dan tidak lancar untuk aktiva dan hutang dipandang tidak tepat untuk perusahaan yang periode siklus normalnya sangat panjang atau tidak bias ditentukan.

Klasifikasi lainnya yang sering dilakukan terhadap aktiva dan hutang adalah klasifikasi pos-pos moneter dan pos-pos non moneter. **Hutang moneter** adalah kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal dan dalam penyelesaiannya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai hutang karena jumlah hutang tersebut ditentukan oleh nilai kontrak. Karena berdasarkan kontrak nilai tersebut jumlahnya sudah pasti. Sebagian besar hutang yang tercantum dalam neraca adalah hutang moneter. Apabila harga-harga cenderung naik maka pemilik hutang bersifat moneter mengalami laba.

Hutang non moneter adalah kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu atau potensi jasa yang daya belinya tetap meskipun yang diserahkan dapat berupa kas. Hutang non moneter nilainya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Misalnya hutang dengan jaminan hutang yang dilunasi dengan penyerahan jasa, pendapatan yang ditanggguhkan, pelayanan gratis sesudah penjualan (after sales service) dan lainnya. Klasifikasi aktiva dan hutang ke dalam kelompok moneter dan non moneter sangat memudahkan untuk penyesuaian harga-harga dalam akuntansi tingkat harga umum.

Berikut ini adalah daftar aktiva dan hutang yang mengidentifikasi (√) dalam kelompok moneter dan non moneter.

Klasifikasi Pos-Pos Moneter dan Pos-Pos Non Moneter

Pos-Pos Neraca	Moneter	Non Moneter
Aktiva		
Kas dan Setara Kas	√	
Deposito Berjangka	√	
Surat Berharga	√	
Piutang Dagang	√	
Cadangan Kerugian Piutang	√	
Piutang Wesel	√	
Piutang Pegawai	√	
Persediaan Barang		√
Investasi dalam Saham Biasa		√
Investasi dalam Obligasi	√	

Piutang Jangka Panjang	√	
Aktiva Tetap		√
Akumulasi Depresiasi		√
Hak Paten, Hak Cipta, Lisensi		√
Goodwill		√
Hutang		
Hutang Dagang	√	
Hutang Wesel	√	
Hutang Biaya	√	
Hutang Deviden Kas	√	
Hutang dengan Jaminan		√
Hutang Kontrak Penjualan		√

4. HUTANG KONTIGENSI (CONTINGENCY LIABILITIES)

Kontinjensi adalah suatu kondisi atau situasi yang mengandung unsure ketidakpastian yang dapat menimbulkan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian, yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan.

FASB Statement No. 5 (Accounting for Contingencies), suatu kontinjensi diartikan sebagai: suatu kondisi, situasi atau seperangkat keadaan yang sedang berlangsung yang mengandung ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi suatu perusahaan yang pada akhirnya akan terselesaikan bila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Penyelesaian ketidakpastian ini akan menegaskan adanya suatu kewajiban.

Dengan definisi di atas FASB Statement No. 5 menyiratkan bahwa kontinjensi yang mengandung kerugian harus dilaporkan dalam neraca apabila:

1. Memenuhi definisi kewajiban.
2. Kemungkinan kewajiban tersebut harus dibayar di kemudian hari relatif tinggi.
3. Jumlah kontinjensi tersebut dapat ditaksir secara wajar.

Kontijensi yang mengandung unsur kerugian tidak boleh diakui dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan kaki jika profitabilitas terjadinya masa depan itu hanya mungkin (*possible*) dan tidak perlu diungkap jika dianggap profitabilitas terjadinya kecil (*remote*). Kewajiban dalam garansi merupakan contoh kewajiban kontijensi karena suatu peristiwa kegagalan suatu produk belum terjadi. Kewajiban garansi ini diakui karena profitabilitas terjadinya relatif tinggi walaupun jumlah totalnya harus ditaksir.

Dalam PSAK No. 8 tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah kontijensi adalah:

1. Kewajiban perusahaan asuransi jiwa yang timbul dari penerbitan polis.
2. Kewajiban menyangkut dana pensiun.
3. Komitmen yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha jangka panjang.
4. Pajak penghasilan.

Pada umumnya kontijensi yang mempunyai akibat terhadap timbulnya kewajiban tetapi diperkirakan jumlahnya kecil maka pelaporannya dalam bentuk pengungkapan tetapi kalau diperkirakan kewajibannya besar penyajiannya ada di neraca. Jadi disajikan atau diungkapkannya kewajiban kontijensi atau kewajiban bersyarat tersebut didasarkan pada informasi yang tersedia untuk memprediksi profitabilitas terjadinya (*expected value*). Misalnya suatu kewajiban dengan profitabilitas 95% terjadi dari jumlah Rp 100 juta dan 5% profitabilitas tidak terjadi. Bila profitabilitas terjadinya 95% maka *expected value*-nya sebesar Rp 95 juta merupakan jumlah yang besar untuk disajikan dalam neraca sebagai kewajiban. Sebaliknya apabila kewajiban ini mempunyai profitabilitas tidak terjadi 95% maka *expected value* kewajiban adalah hanya Rp 5 juta. Jumlah ini juga merupakan kewajiban kontijensi tetapi jumlahnya dianggap sebagai jumlah yang tidak besar (*immaterial*).

Dari contoh tersebut suatu kewajiban kontijensi dilihat dari profitabilitas terletak antara 0% sampai dengan jumlah besar yang bias mendekati 100%. Apabila profitabilitasnya mendekati 0% maka

kewajiban kontijensi tersebut harus diungkapkan, misalnya dalam catatan kaki.

Dalam kaitannya dengan ketidakpastian dalam masalah kontijensi, PSAK No. 8 menyatakan bahwa ketidakpastian mengenai peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang dapat dinyatakan dalam serangkaian hasil akhir. Rangkaian ini dapat disajikan dalam angka-angka profitabilitas yang pada umumnya menunjukkan tingkat kecermatan yang tidak didukung oleh informasi yang tidak tersedia.

5. KONSEP EKUITAS

Dalam akuntansi tradisonal (Godfrey, et. al, 1994) terdapat sudut pandang akuntansi (*accounting point of views*) yang menjadi pusat perhatian akuntansi. Sudut pandang merupakan subjek pelaporan yang berarti subjek yang harus melaporkan informasi keuangan mempertanggungjawabkan kegiatan. Sudut pandang ini dalam istilah Hendriksen (1982) disebut dengan *equity concept atau equity theory*. Oleh karena itu di bagian akan digunakan istilah teori dan konsep silih berganti dengan pengertian yang sama.

Sudut pandang akuntansi tradisional tersebut menurut Godrey et. al (1994) diidentifikasi dalam 6 macam theory: yaitu: 1) Proprietary theory; 2) Entity theory; 3) Fund theory/cash flow; 4) Commander theory; 5) Investor theory; dan 6) Enterprise theory.

Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomik sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entit (kesatuan) sering disebut pula dengan teori ekuitas (*equity theory*). Konsep dasar kesatuan usaha (*business entity*) dengan segala implikasinya sebenarnya hanya merupakan salah satu konsep dasar yang dapat di pilih dalam perikayasaan akuntansi. Konsep kesatuan mempunyai implikasi terhadap pengertian

pendapatan, biaya dan laba. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah:

1. Entitas usaha bersama (*enterprise theory*)
2. Entitas usaha atau bisnis (*business entity theory*)
3. Entitas investor (*investor theory*)
4. Entitas pemilik (*proprietary / stockholder theory*)
5. Entitas pemilk residual (*residual proprietary / stockholder theory*)
6. Entitas pengendali (*commander theory*)
7. Entitas dana (*fund theory*)

Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomik yaitu manajer, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, dan entitas lain yang terlibat. Mereka merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambahan yang timbul akibat kegiatan ekonomik. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan statemen laba-rugi (*income statement*).

Entitas Usaha Bersama (*enterprise theory*)

Dengan sudut pandang ini, kesatuan yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomik. Semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersaama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai pemegang pancang (*stakeholders*) yang terdiri atas manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat pengikat, pancang, atau pusat kegiatan.

Sebagai institusi sosial, perusahaan harus menunjukkan kontribusi ekonomik terhadap masyarakat luas. Semua partisipan merupakan kontributor dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) akibat kegiatan usaha bersama. Dengan sudut pandang ini laba didefenisikan sebagai seluruh jumlah rupiah nilai tambahan (kenaikan

kemakmuran) yang dihasilkan oleh kegiatan para partisipan secara bersama-sama dikurangi dengan biaya material dan mesin/peralatan (bahan baku, overhead non-tenaga kerja dan depresiasi). Laba merupakan hasil upaya bersama (*cooperative effort*) para pemegang pancang. Jumlah rupiah yang dibayarkan kepada para partisipan bukan merupakan biaya tetapi merupakan distribusi nilai tambahan (laba) atau pembagian laba.

Entitas Usaha atau Bisnis (*business entity theory*)

Perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya. Jadi, perusahaan dipersonifikasikan sehingga perusahaan seakan-akan melakukan transaksi dan kegiatan (tentu saja melalui manajemen dan karyawan). Dengan teori ini laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk (kenaikan aset) dan biaya sebagai aliran keluar aset (penurunan aset) akibat kegiatan operasi perusahaan. Pemilik, kreditor, pemerintah, serta pihak lainnya diperlakukan sebagai pihak luar. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang didistribusikan ke mereka diperlakukan sebagai biaya. Transaksi modal (transaksi dengan pemilik) tidak dibedakan dengan transaksi oprerasi. Karena teori kesatuan usaha memandang penyedia dana sebagai pihak luar, pemegang saham dan kreditor tidak dibedakan dan keduanya dipandang sebagai pemegang ekuitas (*equityholders*) sehingga persamaan akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{Ekuitas}$$

Entitas Investor (*investor theory*)

Investor disini adalah investor dalam arti luas yaitu kreditor (jangka panjang) dan pemegang saham (preferen dan biasa). Jadi, investor adalah penyedia dana utama perusahaan. Dengan teori ini,

pusat perhatian akuntansi adalah kedua kelompok tersebut dan keduanya dipandang sebagai mitra manajemen (*management associates*) bukan sebagai pihak luar sebagai mana sudut pandang kesatuan usaha. Dengan kata lain, perusahaan melalui manajemen bertindak atas nama investor. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus dilaksanakan untuk kepentingan kedua kelompok tersebut. Persamaan akuntansinya dapat dinyatakan sebagai berikut;

$$\text{Aset - utang jangka pendek} = \text{Ekuitas Investor}$$

Dengan sudut pandang ini, laba kemudian didefinisikan sebagai jumlah rupiah yang menjadi hak investor. Sebagai konsekuensi, bunga kepada kreditor jangka panjang dan dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya tetapi lebih merupakan distribusi laba.

Entitas Pemilik (*proprietary / stockholder theory*)

Teori entitas ini memandang pemegang saham (biasa dan istimewa) sebagai pemilik (*proprietor*) dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Kreditor dianggap sebagai pihak luar. Pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen. Aset menjadi milik pribadi pemegang saham sehingga utang merupakan keharusan pemegang saham. Artinya pemegang saham menanggung segala resiko yang berkaitan dengan utang. Dengan sudut pandang ini, aset bersih menjadi perhatian utama bagi pemegang saham. Teori ini dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi berikut ini:

$$\text{Aset - Kewajiban} = \text{Ekuitas}$$

Kreditor, pemerintah dan pihak atau entitas lain (bahkan manajemen) dianggap sebagai pihak luar sehingga semua biaya yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak tersebut (misalnya gaji, bunga, pajak) akan dianggap sebagai biaya bukan sebagai distribusi laba. Laba dalam teori entitas ini adalah selisih pendapatan dan biaya yang menjadi hak akhir pemilik. Dengan kata lain, laba merupakan kenaikan aset bersih.

Aset dipandang sebagai capital finansial bagi pemegang saham sebagai pemilik sehingga aset bersih menjadi pusat perhatiannya. Pemilik dianggap berkepentingan dengan nilai capital finansialnya sehingga nilai sekarang (*current value*) bukannya biaya histories sering dipakai sebagai basis penilaian untuk menentukan nilai aset bersih.

Entitas pemilik residual (*residual proprietary / stockholder theory*)

Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa (*residual equity*) sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik (*proprietary concept*) yang telah dijelaskan di atas. Hanya dalam pendekatan ini, pemilik adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya. Teori ini dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi berikut ini :

Aset - Ekuitas spesifik - Ekiutas residual

Dalam persamaan tersebut, ekuitas spesifik adalah utang dan ekuitas saham istimewa. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung resiko ketidakpastian masa datang tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Hak pemegang saham biasa sudah cukup pasti sehingga mereka tidak berkepentingan dengann laba akuntansi. Oleh karena itu, penyajian laba harus dipusatkan pada pemegang saham biasa (*residual stockholders*) untuk membantu mereka memprediksi aliran kas masa datang. Laba dan laba per saham untuk pemegang saham biasa menjadi informasi penting yang harus disajikan dalam statemen lana-rugi.

Entitas pengendali (*commander theory*)

Konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara

keseluruhan. Teori ini menitikberatkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan (*to control*) sumber ekonomik perusahaan tanpa memperhatikan pemilik (*ownership*) seperti konsep kesatuan yang lain. Pengendalian hanya dapat dilakukan oleh manusia dan karenanya siapa yang mengendalikan sumber ekonomik perusahaan harus diidentifikasi dan kemudian akuntansi memusatkan perhatiannya pada para pengendali tersenut.

Implikasi teori ini tidak berbeda dengan implikasi konsep kesatuan usaha karena kemampuan mengendalikan sumber ekonomik lebih penting daripada pemilikan. Karena manajemen mempunyai tingkatan (*hierarki*), pengendalian juga bertingkat dan tingkat manajemen tertentu mengendalikan tingkat manajemen di bawahnya. Dengan teori ini, sudut pandang akuntansi adalah manajemen puncak sebagai pengendali bukan pemilik sehingga neraca dipandang sebagai statemen tentang sumber dan penggunaan dana yang menunjukkan pertanggungjawaban (*accountability*) manajemen.

Statemen laba-rugi dianggap sebagai penjelasan atas kegiatan manajemen dari sudut pandang manajemen sehingga statemen laba-rugi harus menunjukkan hasil (laba) untuk tiap kegiatan yang dapat berupa proyek, produk, atau segmen bisnis lainnya. Meskipun demikian, manajemen juga menyiapkan statemen laba-rugi untuk menunjukkan kinerja kesatuan usaha secara keseluruhan.

Entitas dana (*fund theory*)

Dana (*fund*) mempunyai dua pengertian yang saling dirancukan. Dana dapat diartikan sebagai kas (uang), aset, likuid atau sumber keuangan (*financial resources*) yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Teori Ekuitas dana dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi berikut :

Aset = Pembatasan penggunaan Aset

Konsep ini berpaut dengan organisasi nonprofit khususnya organisasi pemerintahan. Untuk unit organisasi pemerintahan, interpretasi terhadap persamaan diatas bergantung apakah unit tersebut mengelola asset (keuangan negara) yang dipisahkan dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Dalam pembahasan akuntansi pemerintahan, dikenal dua kelompok kesatuan dana yaitu dana **nonbelanja** atau **usaha** (*nonexpendable* atau *business-type fund*) dan **dana belanja** (*expendable* atau *governmental-type fund*). Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan melalui anggaran Negara.

BAB 8

PENDAPATAN (*REVENUE*)

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Definisi, karakteristik, dan klasifikasi Pendapatan**
- 2) Pengukuran Pendapatan**
- 3) Pembentukan dan Realisasi Pendapatan**
- 4) Pengakuan Pendapatan**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian, karakteristik, dan penggolongan pendapatan**
 - Membedakan pendapatan dan untung**
 - Memahami metode pengukuran pendapatan**
 - Membedakan proses pembentukan dan realisasi pendapatan**
- Memahami metode-metode pengakuan pendapatan.**

I. PENGERTIAN PENDAPATAN

Pendapatan sering disebut sebagai *revenue*. Pendapatan dan keuntungan atau laba (*gains*) merupakan komponen dari penghasilan (*income*). Untuk perusahaan pada umumnya pendapatan berasal dari kegiatan utama yang tercermin pada penjualan *out put* (produk dan jasa) perusahaan, yang berarti dinyatakan dalam jumlah aliran masuk kotor (*gross inflows*). Sedang *gains* umumnya berasal bukan kegiatan utama (Godfrey, et al. 1994), misalnya *capital gain* dari penjualan investasi, atau laba dari penjualan aktiva tetap. Hal ini berarti bahwa *gain* dinyatakan dengan menggunakan jumlah aliran masuk kotor dikurangi harga perolehan atau nilai buku dari investasi atau aktiva tetap yang dijual.

Prinsip-prinsip pendapatan menetapkan hal-hal seperti: pemahaman dan komponen dari pendapatan, pengukuran pendapatan, dan mengenai saat pengakuan pendapatan, dan mengenai saat pengukuran pendapatan.

Ada kecenderungan bahwa pengertian pendapatan dikaitkan dengan masalah pengukuran dan pengakuan. Tanpa dikaitkan dengan pengukuran dan pengakuan konsep pendapatan akan mengalami kesulitan pada dataran implementasi. Namun ada juga pendapat kedua yang menyatakan bahwa pendapatan harus didefinisikan secara terpisah dari masalah pengukuran dan pengakuan. Bagi pendukung pendapat kedua ini sebaiknya pendapatan didefinisikan atas dasar konsep yang sempit. Sebab bila dikaitkan dengan pengukuran dan pengakuan konsep pendapatan dalam arti luas mungkin terhambat dalam teknis dan realitas praktis.

Terdapat tiga jenis penafsiran terhadap konsep pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan adalah arus masuk *net assets* yang diakibatkan oleh penjualan barang dan jasa-*inflow concept*,
- b. Pendapatan adalah arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada para pelanggan-*outflow concept*

c. Pendapatan adalah produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu- *product concept*

Sehubungan dengan ketiga konsep tersebut, Hendriksen (1977) mengemukakan pandangan sebagai berikut:

- *Product concept* lebih *superior* dibandingkan dengan *outflow concept*, sedangkan *outflow concept* lebih *superior* dibandingkan dengan *inflow concept*.
- *Product concept* lebih netral apabila dipandang dari sisi pengukuran saat pengakuan pendapatan. Sedangkan *inflow concept* dianggap lebih lemah karena tidak memberikan kejelasan bagi pengukuran dan saat pengakuan pendapatan.

Untuk lebih memahami konsep pendapatan, di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian pendapatan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PAI (1984) mendefinisikan pendapatan sebagai: "Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan keajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagang/jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta, investasi oleh pemilik, pinjaman ataupun koreksi rugi laba periode tahun lalu." (hal. 19)

Dengan demikian pada umumnya sumber utama pendapatan adalah: untuk perusahaan jasa berasal dari penyerahan jasa; sedang untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur berasal dari penjualan barang. Pendapatan timbul dengan ditandai oleh bertambahnya aktiva dan atau berkurangnya kewajiban. Pengertian pendapatan di sini terpisah atau berbeda dengan pengertian keuntungan atau laba (*gains*). Pengertian pendapatan seperti di atas sejalan dengan pengertian pendapatn menurut FASB dalam SFAC yang dikemukakan di bawah.

FASB (1985) mendefinisikan pendapatan adalah sebagai berikut:

"Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity pr settlements its liabilities (or a combinations of both) from delivering or

producing goods, rendering serves, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations."

Pendapatan adalah aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (atau kombinasi di antara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut. FASB lebih menekankan arti pendapatan sebagai aliran yang diterima perusahaan dari penjualan atau penyerahan jasa.

KDPPLK (1999) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan komponen dari penghasilan sebagaimana definisi ini: "Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pnanam modal."

Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga deviden, royalty dan sewa.

Dengan demikian menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pendapatan dapat berasal dari:

- a. Hasil penjualan barang hasil produksi oleh perusahaan manufaktur maupun penjualan barang dagangan oleh perusahaan dagang.
- b. Penjualan atau penyerahan jasa, baik atas dasar kontrak maupun tidak.
- c. Penggunaan aktiva baik aktiva berwujud maupun tak berwujud oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga , sewa, royalty dan deviden.

Dari ketiga penjelasan di atas tidak termasuk keuntungan atau laba (*gains*).

Lebih lanjut PSAK No. 23 mendefinisikan pendapatan sebagai “ arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus kas masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau tidak dapat diterima. Selanjutnya dalam PSAK 23, nilai wajar didefinisikan:

“Suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.”

Sesuai dengan definisi-definisi pendapatan menurut, Vernon Kam (1986) sependapat bahwa pendapatan ditunjukkan oleh kenaikan bruto nilai aktiva dan modal (ekuitas) dan kenaikan tersebut seringkali ditunjukkan oleh adanya aliran kas masuk. Aliran kas masuk dari kegiatan operasi utama perusahaan dihasilkan terutama dari produksi dan penjualan dari out put (barang dan jasa) perusahaan, tetapi dapat juga berupa bunga, sewa ataupun royalty dan lain-lain. Vernon Kam mengidentifikasi adanya aliran (flows) yang berhubungan dengan operasi utama perusahaan yaitu aliran fisik dan aliran moneter.

Menurut Vernon Kam, secara ideal yang merupakan elemen pendapatan adalah suatu peristiwa (kenaikan) moneter bukan objek kegiatan dan pendapatan berhubungan dengan nilai yakni nilai moneter. Pendapatan harus secara langsung dihubungkan dengan peristiwa moneter berupa kenaikan nilai dalam perusahaan karena kegiatan produksi atau penjualan out put (produk dan jasa). Vernon Kam menilai bahwa definisi menurut FASB di atas sesuai dengan maksud ideal, karena revenue merupakan peristiwa moneter dari kenaikan nilai aktiva dalam perusahaan akibat kegiatan fisik produksi barang atau jasa. Sementara Paton dan Littleton menyebutkan bahwa kegiatan produksi dan penjualan merupakan fokus atau aliran fisik walaupun pada akhirnya pendapatan ditunjukkan oleh aliran dana dari para pelanggan sebagai penkar produk perusahaan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan ditentukan oleh ukuran moneter dari aktiva yang diterima. Aktiva umumnya meningkat dan hutang akan berkurang saat dilakukan penjualan barang atau penyerahan jasa. Untuk sementara pengertian pendapatan seperti sesuai dengan praktik akuntansi tradisional, walaupun hal itu tidak sesuai dengan perspektif pengukuran dan pengakuan pendapatan dalam arti luas.

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa pengertian pendapatan dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang kesatuan usaha (*entity concept*) dan sudut pandang kesatuan pemilik (*proprietary concept*). Dari sudut pandang kesatuan usaha pendapatan merupakan aliran aktiva baru yang masuk ke perusahaan yang berasal dari pembeli/pelanggan sebagai pemakai produk perusahaan. Sedang dari sudut pandang kesatuan pemilik, pendapatan merupakan kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari perusahaan. Potensi jasa tersebut berupa biaya-biaya yang dapat dibebankan pada pendapatan.

Apabila pendapatan dihubungkan dengan artikulasi laporan keuangan maka pengertian pendapatan sebagai kenaikan aktiva kotor akan lebih bermakna daripada pengertian pendapatan berdasarkan konsep neto (aliran masuk dikurangi aliran keluar). Sehingga atas dasar artikulasi laporan keuangan pendapatan adalah kenaikan aktiva atau penurunan hutang bukan kenaikan kekayaan pemilik.

SFAC No. 6 ada istilah *comprehensive income* (penghasilan komprehensif) yang didefinisikan sebagai "perubahan modal perusahaan selama satu periode dari transaksi, peristiwa lain, dan keadaan dari sumber selain pemilik perusahaan. Penghasilan komprehensif mencakup semua perubahan modal dalam suatu periode kecuali yang timbul sebagai akibat investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik."

Penghasilan kompherensip terdiri dari dua komponen:

- a. Komponen pokok: pendapatan (*revenues*), biaya (*expenses*), laba atau keuntungan (*gains*) dan rugi (*loses*).
- b. Komponen antara: yaitu komponen sebagai akibat kombinasi berbagai komponen pokok seperti laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak. Komponen kedua ini disebut sebagai laba akunatansi (*accounting income*).

Pendapatan pada umumnya menyebabkan adanya kenaikan jumlah aktiva, walaupun tidak semua kenaikan jumlah aktiva merupakan pendapatan atau penghasilan. Ada berbagai transaksi yang dapat menyebabkan penambahan aktiva. Menurut Paton dan Littleton (1940) sumber lain dari kenaikan jumlah aktiva dapat berasal dari kenaikan jumlah aktiva berasal dari:

1. Transaksi pembelanjaan yang bersumber dari kreditur maupun pemegang saham (*investor*).
2. Laba (*gains*) dari penjualan aktiva yng bukan berupa barang degangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga atau penjalan anak perusahaan.
3. Hadiah, sumbangan atau penemuan.
4. Revaluasi aktiva.
5. Penyerahan produk perusahaan yaitu aliran hasil penjualan produk.

Dari kelima sumber kenaikan jumlah aktiva tersebut sumber pendapatan adalah hasil penjualan produk (termasuk hasil penyerahan jasa bagi perusahaan jasa) dan laba (*gain*) penjualan aktiva bukan berupa barang dagangan. Hasil penjualan produk dan penyerahan jasa merupakan sumber utama sedang laba dari penjualan aktiva selain produk merupakan sumber lain-lain, bukan sumber utama. Menurut SAK, laba dari penjualan aktiva selain produk ini merupakan keuntungan atau *gain* yang dalam laporan laba rugi diklasifikasikan tersendiri di bagian bawah dalam "pos-pos pendapatan laba (rugi) di luar usaha". Di samping itu masih ada lagi "pos-pos luar biasa" di bagian paling bawah sebelum pos laba sebelum pajak.

Pengertian pos luar biasa menurut PSAK No. 23 seperti berikut:

“Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak diharapkan untuk seringkali terjadi secara teratur.”

Apabila suatu kejadian atau transaksi secara jelas berbeda dengan aktivitas normal ditentukan oleh hakekat dari kejadian atau transaksi tersebut sehubungan dengan usaha yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berikut ini adalah contoh kerangka penyajian laporan laba rugi yang umumnya digunakan sesuai praktik akuntansi yang lazim:

Laporan Laba Rugi

PT. XYZ

Periode Yang Berakhir 31 Desember 200-

Pendapatan Dari Penjualan		Rp XXX
Beban Pokok Penjualan		<u>Rp XXX -</u>
Laba Kotor		Rp XXX
Beban usaha		
Beban Pemasaran	Rp XXX	
Beban Administrasi dan Umum	<u>Rp XXX +</u>	
Total Beban Usaha		<u>Rp XXX -</u>
Laba Usaha		Rp XXX
Pos Pendapatan dan Beban (rugi) di Luar Usaha		
Pendapatan (Laba) di Luar Usaha	Rp XXX	
Beban (rugi) di Luar Biasa	<u>Rp XXX</u>	<u>Rp XXX</u>
Laba sebelum Pos-Pos Luar Biasa		Rp XXX
Pos-Pos Luar Biasa		<u>Rp XXX</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp XXX
Pajak Penghasilan		<u>Rp XXX -</u>
Laba Sesudah Pajak		Rp XXX

2. PEMBENTUKAN DAN REALISASI PENDAPATAN

Pada dasarnya pendapatan terjadi/terbentuk atau terhimpun melalui "*Earnings Process*". Secara sederhana untuk memudahkan pemahaman, *earning process* diartikan sebagai proses terbentuknya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Sebagai contoh misalnya pada perusahaan manufaktur, umumnya *earning process* melalui tahapan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Pembelian jasa/produk masukan.
2. Proses produksi.
3. Penggudangan produk.
4. Penjualan kredit.
5. Pengumpulan/penagihan piutang.
6. Pemenuhan jasa setelah penjualan.

Tahapan tersebut mungkin berbeda antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya: ada yang enam tahap seperti di atas, ada yang kurang dari enam tahap tetapi ada juga yang lebih dari enam tahap. Yang penting adalah bahwa setiap tahapan tersebut bagi perusahaan memberikan kontribusi terhadap proses terbentuknya pendapatan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *earning process* tersebut terjadi pada setiap mata rantai kegiatan perusahaan (*activities chain*) bukan hanya pada saat realisasinya saja. Proses terbentuknya pendapatan (*earning process*) tersebut hendaknya dibedakan dengan realisasi pendapatan (*realization process*). Konsep terbentuknya pendapatan seperti ini didasari oleh konsep dasar upaya (*effort*) dan hasil (*accomplishment*) (Paton, 1940). Setiap upaya yang tercermin pada *costs* mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu setiap mata rantai kegiatan perusahaan sesungguhnya merupakan sebuah proses terbentuknya pendapatan.

Earning Process berbeda dengan realization process. Konsep realisasi merupakan teknik akuntansi yang menjadi dasar untuk pengakuan pendapatan. Dalam konsep ini realisasi ditansai dengan diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Menurut Paton dan Littleton (1940) proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian sebagai berikut:

1. Adanya kepastian perubahan produk menjadi produk aktiva lain (potensi jasa) melalui kegiatan penjualan jasa yang sah.
2. Diperolehnya aktiva lain, biasanya aktiva lancar, sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut.

Dua hal di atas (terbentuknya dan realisasi pendapatan) berkaitan erat dengan pengakuan pendapatan sehingga secara teknis berkaitan pula dengan kriteria pengakuan pendapatan.

3. PENGAKUAN PENDAPATAN

Revenues dan income secara umum dapat terjadi pada berbagai tahap siklus operasional, yaitu pada saat diterima pesanan, saat produksi, penjualan atau pada saat penerimaan. Berhadapan dengan kesulitan penetapan terjadinya pendapatan pada berbagai tahapan siklus operasional, akuntan bersandar pada prinsip realisasi sebagai *critical event* dalam penetapan saat pengakuan pendapatan. Terjadinya tahap kritis ditandai dengan adanya kepastian perubahan asset dan kewajiban dan perubahan tersebut dapat diukur.

Seharusnya pengakuan pendapatan didukung oleh bukti-bukti objektif. Yang menjadi masalah dalam pengakuan pendapatan adalah mencari satu dasar pengukuran yang objektif tentang kenaikan nilai dan didukung adanya bukti-bukti yang cukup, sehingga muncul pertanyaan pada titik mana selama proses terbentuknya pendapatan (*earning process*) tersebut dapat dicatat sebagai pendapatan. Permasalahan tersebut mendasari kebiasaan di dalam praktik atau standar akuntansi bahwa prosedur yang dianut untuk mencatat pendapatan semestinya didasarkan pada konsep atau dasar yang jelas.

Oleh karena itu kemudian pada dataran konsep muncul tentang kriteria-kriteria yang dimaksudkan dapat mempermudah proses pengambilan keputusan dalam mencari dasar yang paling wajar digunakan untuk pengakuan pendapatan. Dalam praktik pengakuan pendapatan ditandai dengan pencatatan pendapatan dalam proses akuntansi. Secara konvensional pencatatan tersebut ditandai dengan kegiatan yang disebut dengan jurnal.

Namun pada dataran konsep pengakuan pendapatan harus memenuhi kriteria tertentu. Tiga kriteria yang diajukan Vernon Kam (1986) untuk pengakuan pendapatan adalah:

1. Pengakuan nilai aktiva.
2. Adanya suatu transaksi.
3. Kelengkapan substansi dari proses terbentuknya pendapatan.

Sementara FASB (1985) mengemukakan dua kriteria pengakuan pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan baru dapat diakui apabila jumlah moneter pendapatan telah terealisasi (*realized*) atau cukup pasti akan segera terealisasi (*realizable*).
2. Pendapatan baru dapat diakui apabila pendapatan tersebut sudah terhimpun (*earned*).

Sedangkan KDPPLK memberikan kriteria umum dalam penerapan kriteria pengakuan misalnya bahwa penghasilan tepat diperoleh. Yang jelas bahwa dalam pengakuan pendapatan bukti objektif yang mendukung perubahan nilai aktiva atau nilai hutang yang akan dicatat sebagai pendapatan telah tersedia.

1. Pengukuran Nilai Aktiva

Kenaikan nilai aktiva menyebabkan kenaikan modal. Kriteria kenaikan nilai aktiva mengharuskan adanya **keterukuran (*measurability*)** artinya kenaikan aktiva tersebut harus bisa diukur secara andal dan ini artinya perlu didukung dengan bukti-bukti cukup. Namun demikian FASB menyatakan bahwa pendapatan dan laba umumnya tidak diakui sampai direalisasi. Kata direalisasi berarti bahwa

aktiva yang diterima adalah kas atas hak, dan karena itu pendapatan direalisasi berarti bahwa aktiva yang diterima adalah kas atau setidaknya jumlah yang dengan cepat dapat dikonversikan menjadi kas atau hak atas kas. Analisis semacam itu sejalan dengan suatu pertanyaan apakah dalam pencatatan pendapatan aktiva yang diterima harus aktiva likuid? Paton dan Littleton (1940) berpendapat “ya”, sebagaimana kutipan berikut ini: “ditinjau dari pandangan yang dominan pendapatan direalisasi bila terbukti ada penerimaan kas atau piutang atau aktiva lainnya yang likuid”.

Sedangkan APB opinion 29 menjawab lebih tegas bahwa aktiva yang diterima tidak harus likuid. Sehingga kebiasaan-kebiasaan praktik yang didasarkan pada alasan yang logis yang diterapkan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing masih tetap digunakan.

Kriteria berikutnya yang menyertai keterukuran aktiva yang diperoleh adalah **kolektivitas (*collectability*)** yaitu bahwa pengukuran nilai aktiva berhubungan dengan kolektabilitas. Kolektabilitas berhubungan dengan periode waktu pos-pos aktiva yang diterima untuk dapat dikonversikan menjadi kas. Lebih lama periode pengumpulan berarti lebih tinggi tingkat ketidakpastian semua kas akan terkumpul. Sehingga di dalam melakukan pencatatan untuk penjualan kredit perlu diperhatikan syarat-syarat penjualan.

2. Adanya Suatu Transaksi

Transaksi yang memberikan bukti yang objektif mengenai kenaikan nilai adalah transaksi dengan pihak ekstern yang independen. Pencatatan transaksi dengan pihak ekstern yang independen tersebut umumnya didasarkan pada nilai historis. Tetapi mungkin saja ada transaksi internal yang memberikan bukti objektif, terutama apabila dalam perusahaan yang bersangkutan mempunyai sistem pengendalian intern yang baik. Sehingga ada juga pendapatan/laba dicatat dengan tidak berdasarkan pada transaksi dengan pihak ekstern misalnya pencatatan dengan dasar market value untuk emas, perak, terigu dan sebagainya.

3. Kelengkapan Substansial “Earning Process”

Kriteria ini menekankan bahwa pendapatan tidak akan diperoleh sampai perusahaan mempunyai performance yang cukup (substansial). Oleh karena itu pendapatan dapat diakui kalau proses earning tersebut secara substansial telah selesai. Kata substansial adalah ukuran kualitatif, yang apabila dikuantifikasikan mungkin bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan, sehingga perlu pertimbangan akal sehat dalam menerapkan penggunaan kata ini. Mungkin proses earning sudah dirasa cukup pada saat produksi atau mungkin baru cukup pada saat selesai produksi atau pada saat penjualan dan sebagainya sehingga pengakuan pendapatan menjadi berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Hanya saja umumnya perusahaan proses earning secara substansial terjadi pada saat penjualan.

Saat-saat pengakuan pendapatan mungkin berbeda antara buku pustaka yang satu dengan yang lainnya. Beberapa literatur menyebutkan ada beberapa titik waktu sebagai saat kapan pendapatan diakui. Berikut ini diperbandingkan saat kapan pengakuan pendapatan yang diambil dari 3 literatur yang berbeda.

Kemungkinan Saat Pengakuan Pendapatan

Paton dan Littleton	PAI 1984	Vernon Kam
1. Saat penjualan	1. Saat realisasi	a. Saat penjualan
2. Tingkat penyelesaian produk	2. Saat selesai produksi	b. Selama produksi
3. Saat penerimaan kas	3. Secara proposional selama tahap produksi	c. Akhir produksi
	4. Saat pembayaran diterima	d. Pembayaran diterima sesudah penjualan

1. Saat Penjualan

Bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, saat penjualan merupakan saat penjualan merupakan saat paling umum

digunakan sebagai titik waktu pengakuan pendapatan. Dengan kalimat lain dikatakan bahwa saat penjualan merupakan saat pengakuan pendapatan yang utama. Hal ini disebabkan karena ke tiga kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi, yaitu *measurability*, adanya suatu transaksi dan kelengkapan dari proses earning. Dapat juga dikatakan bahwa pendapatan diakui pada saat realisasi karena realisasi ditandai dengan telah terjadinya transaksi penukaran produk atau jasa perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas (misalnya: piutang dagang). Jadi yang dimaksud saat realisasi dalam hal ini adalah saat penjualan.

Namun demikian kemudian muncul permasalahan dalam praktik kapan saat yang menandai terjadinya penjualan, apakah secara yuridis, yang ditandai dengan peralihan hak milik, ataukah tidak memperhatikan sisi yuridis formalistis dengan melihat kegiatan apa yang paling substansial di dalam penjualan itu. Permasalahan ini muncul karena kegiatan penjualan itu sendiri terdiri atas serangkaian kegiatan mulai dari order diterima dan disepakati, barang diproduksi dan siap dikirim, barang dikirim dan diserahkan ke perusahaan ekspedisi, faktur disiapkan, bukti penerimaan barang dari pembeli diterima, kas diterima setelah piutang berhasil ditagih. Berbagai kegiatan tersebut, pada umumnya waktunya mencatat, atau kapan pengakuan pendapatan itu dilakukan masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi dalam banyak hal dengan mempertimbangkan "*substance over form*" maka perusahaan pada umumnya mengakui pendapatan pada saat pembuatan faktur yang bersamaan dengan pengiriman barang sebagai saat yang paling tepat untuk pencatatan penjualan.

Masalah lain yang mungkin timbul dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan adalah apabila ada biaya yang timbul setelah penjualan (*after sales cost*) dan bila ada biaya yang dikembalikan. Contoh *after sales cost* adalah biaya garansi dan biaya penagihan piutang. Pencatatan yang umumnya dilakukan apabila biaya tersebut diperkirakan terjadi adalah mendebit jumlah taksiran biaya dan dalam jumlah yang sama mengkredit cadangan. *After sales cost* yang tercermin pada taksiran biaya di atas merupakan biaya yang nantinya disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang langsung

pendapatan dan cadangan merupakan rekening kontra piutang dalam neraca.

2. Saat Produksi Selesai

Pengakuan pendapatan pada saat selesai produksi dimungkinkan bila memenuhi syarat-syarat, misalnya seperti berikut:

1. Harga jual produk yang dihasilkan dapat ditentukan secara tepat.
2. Tidak diperlukan kegiatan dan biaya pemasaran yang berarti untuk menjual produk tersebut.
3. Harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan.
4. Satuan-satuan persediaan dapat saling ditukar.

Kalau keempat syarat tersebut dipenuhi maka tidak ada masalah untuk mengakui pendapatan pada saat produk selesai diproduksi, sebab pemenuhan atas keempat syarat tersebut pada dasarnya juga telah memenuhi ketiga kriteria yang dikemukakan Vernon Kam. Produk yang nilai pasar dan tingkat kepastian terjualnya terjamin (misalnya karena telah terikat kontrak) berarti kelengkapan proses earning secara substansial sudah terpenuhi, sehingga dapat mengakui pendapatan saat selesai produksi. Dengan perkataan lain proses setelah selesai produksi dianggap tidak lagi substansial dalam terbentuknya pendapatan. Sebagai contoh perusahaan yang mungkin dapat menggunakan pengakuan pendapatan pada saat selesai produksi adalah perusahaan logam mulia.

3. Secara Proporsional Dengan Penyelesaian Produksi

Pengakuan pendapatan semacam ini banyak digunakan pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang umumnya memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan pendapatan secara proporsional semacam ini terpaksa harus dilakukan kalau perusahaan ingin mempertahankan pengukuran laba dengan takaran periode. Dasar "*effort and accomplishment*" relevan untuk

menandingkan (*matching*) pendapatan dan biaya secara periodik, tidak usah menunggu sampai proyek selesai.

Dengan dasar *matching* tersebut, walaupun secara keseluruhan pada akhir periode akuntansi tertentu, proses perhimpunan belum cukup selesai tetapi untuk periode akuntansi tersebut proses penghimpunan dianggap selesai dan realisasi telah terjadi di akhir periode sehingga pendapatan bisa diakui. Proses pengakuan pendapatan secara proporsional dengan proses produksi mengharuskan adanya penaksiran prosentase.

Penaksiran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. **Pendekatan berdasarkan prosentase biaya.** Tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan biaya yang telah dibebankan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan proyek yang bersangkutan.
- b. **Pendekatan berdasarkan penyelesaian fisik.** Presentase penyelesaian fisik didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh ahlinya, sehingga bagian akuntansi atau manajemen dapat meminta bantuan insinyur atau arsitek dalam menaksir penyelesaian pekerjaan proyek.

Metode presentase penyelesaian proyek dianjurkan apabila taksiran mengenai tahap penyelesaian kontrak dapat dilakukan secara baik. Bila taksiran tersebut kurang dapat ditentukan atau meragukan maka digunakan cara lain yang lazim dikenal sebagai "metode kontrak selesai". Metode ini sesuai dengan konsep realisasi karena pendapatan baru diakui saat kontrak telah selesai. Namun apabila proyeknya berjangka panjang metode ini kurang sesuai dengan dasar "*effort and accomplishment.*"

4. Saat Penerimaan Kas

Pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam rantai kegiatan sebelumnya dianggap bahwa realisasi pendapatan belum sampai pada tahapan substansial. Misalnya saja masih terdapat ketidakpastian yang besar mengenai kolektibilitas

piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa. Oleh karena adanya ketidakpastian yang besar tersebut maka biasanya pengakuan pendapatan ditunda sampai saat diterimanya kas. Ketidakpastian tersebut biasanya berhubungan dengan belum berpindahkannya hak milik barang sampai dilunasinya pembayaran, sehingga terdapat kemungkinan pembatalan transaksi penjualan yang telah dilakukan. Cara tersebut dapat dijumpai dalam penjualan secara cicilan (penjualan angsuran), namun penerapannya sejauh mungkin dihindari, karena jarang sekali dijumpai situasi di mana tagihan atas penjualan cicilan benar-benar tidak dapat dipastikan secara layak.

Penggunaan dasar kas sebagai dasar untuk pengakuan pendapatan dalam penjualan angsuran mempunyai alasan sebagai berikut:

- a. Sebagian atau seluruh piutang yang timbul dari penjualan angsuran tersebut bukan merupakan aktiva yang berdaya beli kini.
- b. Semakin panjang jangka waktu angsuran semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut.
- c. After sales costs terutama biaya penagihan dan pengumpulan piutang umumnya berjumlah besar.

Pengakuan pendapatan pada saat diterimanya kas umumnya juga diterapkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa, karena pada perusahaan jasa tersebut saat penyerahan jasa umumnya bersamaan atau hampir bersamaan dengan penerimaan pembayaran jasa tersebut. Pada perusahaan jasa semacam ini penyerahan jasa dianggap sebagai penjualan. Tetapi untuk perusahaan jasa yang tidak mempunyai karakteristik semacam itu, pemilihan saat pengakuan pendapatan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional.

BAB 9

BIAYA (*COST*)

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Definisi, karakteristik, dan penggolongan biaya**
- 2) Pengukuran dan Pengakuan Biaya**
- 3) Konsep Penandingan**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Membedakan beban (expenses) dan rugi**
 - Membedakan biaya dan beban**
 - Memahami pengukuran dan pengakuan biaya**
- Memahami konsep penandingan**

I. PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI BIAYA

1. Pengertian Biaya

Dalam Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan expense disebut dengan istilah beban. Sementara itu Suwadjono (1989) menerjemahkan *expense* atau *experied cost* sebagai biaya. Dalam tulisan ini istilah beban dan biaya, sebagai terjemahan *expense* atau *experied cost*, digunakan secara bergantian dalam arti yang sama.

Pada umumnya telah disepakati bahwa biaya merupakan bagian dari *cost* yang telah dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Berikut ini dikemukakan beberapa defenisi biaya dari beberapa sumber bacaan.

FASB (1985) dalam SFAC No. 6 memberikan pengertian *expense* seperti berikut:

“Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) form delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operation”.

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa biaya adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva, atau terjadinya hutang (atau kombinasi di antara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan utama suatu perusahaan.

IAI melalui PAI (1984) memberikan pengertian beban “sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan berikutnya.”

Sementara itu KDPPLK-SAK (1994) mendefenisikan: “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

Berdasarkan pengertian KDPPLK-SAK tersebut biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva walaupun kadang-kadang harus terlebih dahulu melalui hutang.

Menurut Vernon Kam (1986): “Expenses are decreases in the value of assets or increases in the value of liabilities due to the using up of goods or services in the major or central operation of the entity.”

Dengan demikian menurut Vernon Kam, biaya adalah penurunan nilai aktiva atau kenaikan nilai hutang akibat penggunaan (using up) barang atau jasa dalam kegiatan utama perusahaan. Secara konseptual biaya lebih bersifat dan berakibat penurunan aktiva dari pada kenaikan hutang. Biaya terjadi apabila produk atau jasa tertentu diserahkan untuk menghasilkan pendapatan.

Dari keempat defenisi tersebut dapat dijelaskan bahwa umumnya secara normal biaya terjadi karena kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pengeluaran kas (atau pada akhirnya menyebabkan pengeluaran kas) yang berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan. Defenisi menurut KDPPLK sejalan dengan defenisi menurut Vernon Kam bahwa biaya didefenisikan dari sudut pandang peristiwa moneter berupa penurunan aktiva, kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas. Dengan perkataan lain biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva, meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu, atau kadang-kadang harus mengeluarkan sejumlah saham dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode berjalan.

Dari pengertian-pengertian tersebut FASB membedakan biaya dengan *loses*. *Loses* (rugi) merupakan pengurangan nilai aktiva bersih akibat transaksi-transaksi “*peripheral* atau *incidental*” dan dari kejadian-kejadian yang berada di luar kendali perusahaan. Pada umumnya pendapatan dan biaya terjadi akibat kegiatan utama (*major or central*

operations) perusahaan seperti produksi, penjualan, peminjaman, investasi dan pembelanjaan.

Sedangkan *gains* (laba) dan *losses* (rugi) bukan dari kegiatan utama, misalnya penjualan aktiva tetap. Perbedaan lainnya adalah bahwa secara sederhana rugi merupakan pengurangan nilai yang tidak menghasilkan pendapatan. Jadi penggunaan aktiva atau pengurangan cost aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Jadi penggunaan aktiva atau pengurangan cost aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan seharusnya dikelompokkan menjadi rugi, sehingga penyajian rugi (*losses* sebagai lawan *gains*) dalam laporan laba rugi sebaiknya disajikan secara terpisah dari biaya atau beban.

Selanjutnya KDPPLK-SAK menyatakan bahwa “defenisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.” Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, biaya gaji, biaya iklan dan penyusutan. Beban tersebut biasanya terbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap. Sedangkan kerugian mungkin timbul dari aktivitas tidak biasa. Jadi dalam KDPPLK-SAK kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah, sebab baik beban maupun kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi. Kerugian timbul dapat timbul, misalnya dari bencana alam, penjualan aktiva tetap, kemungkinan rugi selisih kurs dan lain-lain.

Akan tetapi hakekat beban dan kerugian sama namun penyajiannya dalam laporan laba rugi dipisahkan dalam pos atau kelompok tersendiri karena pengetahuan mengenai hal tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pada umumnya seperti halnya laba (*gains*) yang seringkali disajikan dalam jumlah bersih, kerugian seringkali disajikan dalam jumlah bersih pula yaitu selisih negatif penghasilan bruto setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

Kadang-kadang biaya diartikan sebagai “*experied cost*”, seperti yang dikemukakan oleh AAA tahun 1957 sebagai berikut: Biaya adalah “*experied cost*” yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan

satu periode tertentu, yaitu berupa aliran barang atau jasa ke pasar dan berhubungan dengan operasi. *Expieried cost* di sini lebih tepat diterjemahkan dengan biaya, karena berhubungan dengan barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.

Dengan demikian kalau *experied cost* adalah biaya dalam rangka memperoleh pendapatan maka "*unexpired or unamorturized cost*" merupakan bagian yang masih berupa aktiva. Dan oleh karena itu *unexpired cost* tetap disajikan dalam neraca. Sedangkan *losses* merupakan *experied cost* yang tidak memberikan manfaat terhadap usaha menghasilkan pendapatan. Sehingga *losses* termasuk dalam defenisi *expenses* dalam pengertian luas karena baik *expenses* maupun *losses* keduanya merupakan pengurang pendapatan dan oleh karena itu disajikan dalam laporan laba rugi.

Selain *expenses and losses* (biaya dan rugi) yang merupakan bentuk perubahan yang tidak menguntungkan, masih ada satu lagi pengurang pendapatan yaitu *revenue offsets*. Istilah *revenue offsets* merupakan istilah suatu rekening yang ditempatkan di bawah pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi. *Revenue offsets* disebut juga *contra revenue*, yang menjadi pengurang langsung dari pendapatan penjualan. Contoh *revenue offsets* adalah retur penjualan, potongan penjualan dan *after sales costs*. Angka *after costs* yang disajikan dalam laporan laba rugi masih merupakan jumlah taksiran.

2. Klasifikasi Biaya

Setiap biaya memiliki kedudukan yang sama sebagai pengurang pendapatan. Paton dan Littleton (1940) menyatakan bahwa kalau dua faktor atau lebih sama-sama diperlukan untuk mencapai tujuan maka tidaklah dibenarkan untuk menentukan prioritas yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pengeruh faktor tertentu. Jumlah rupiah atau bobot faktor tertentu dapat saja berbeda antara satu dengan lainnya akan tetapi sudah jelas adalah adanya kontribusi

masing-masing faktor secara proporsional terhadap produk tidak dapat disangkal.

Walau bersifat homogen namun dalam laporan laba rugi konvensional dilakukan klasifikasi biaya untuk tujuan analisis, yang pada umumnya klasifikasi biaya yang sering dilakukan adalah:

- a. Klasifikasi harga pokok barang yang terjual (*cost of good sold*), biaya administrasi dan umum; dan biaya pemasaran.

Klasifikasi semacam ini dilakukan atas dasar fungsi pokok perusahaan. Harga pokok penjualan sebagai biaya produksi dari barang yang laku dijual. Jadi harga pokok penjualan sebagai cerminan fungsi produksi, biaya pemasaran sebagai cerminan fungsi pemasaran dan biaya administrasi dan umum merupakan cerminan fungsi administrasi dan umum.

- b. Klasifikasi biaya tetap dan biaya variabel.

Dalam hal ini biaya diklasifikasikan atas dasar perilaku biaya dalam hubungannya dengan volume aktivitas. Biaya tetap merupakan biaya yang konstan tidak berubah walaupun ada perubahan volume aktivitas sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume aktivitas.

Klasifikasi yang pertama biasanya disajikan untuk kepentingan pihak luar sejalan dengan sejarah lahirnya akuntansi berpasangan bahwa laporan yang dibuat mempunyai tujuan pertanggungjawaban kepada pemilik sebagai pihak luar. Walaupun mungkin sebelum dilakukan analisis lebih lanjut atas klasifikasi berdasarkan fungsi pokok semacam ini tidak banyak bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tetapi harus diklasifikasikan demikian karena untuk memenuhi standar akuntansi yang lazim, yang menurut historisnya lebih ditekankan pada pemenuhan tujuan pertanggungjawaban. Standar akuntansi yang lazim mengharuskan penyajian laporan laba rugi dengan pendekatan full costing bukan variable costing. Dalam pendekatan full costing klasifikasi biaya dilakukan atas dasar fungsi pokok, yaitu produksi tercemin pada beban pokok penjualan, biaya pemasaran serta biaya administrasi umum.

Klasifikasi kedua yaitu klasifikasi ke dalam biaya variabel mungkin saja lebih bermanfaat dalam membuat prediksi maupun dalam menilai keberhasilan perusahaan sehingga klasifikasi demikian lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan klasifikasi biaya tetap dan biaya variabel, penyajian laporan laba rugi dibuat dengan pendekatan *variable costing*. Pendekatan *variable costing* ini belum diterima dalam standar akuntansi yang lazim. Namun untuk kepentingan pihak internal penyajian biaya dalam laporan laba rugi dengan menggolongkan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel banyak dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan manajemen sendiri.

2. PRINSIP BIAYA

Berdasarkan prinsip biaya, nilai perolehan atau nilai historis merupakan dasar penilaian untuk pengakuan atas perolehan barang, jasa, yang dinilai berdasarkan harga pertukaran yang terjadi pada saat terjadinya transaksi. AICPA melalui *accounting terminology bulletin* No. 4 mendefinisikan biaya sebagai:

“Biaya adalah suatu jumlah yang diukur dalam satuan mata uang, menyangkut pengeluaran kas atau bentuk kekayaan lainnya yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang dilakukan atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan barang dan jasa yang diterima”.

Biaya dapat diklasifikasikan sebagai *expired cost* dan *un-expired cost*. *Un-expired cost* yang masih berupa asset, merupakan biaya yang telah dikeluarkan, namun manfaatnya belum habis digunakan dan karenanya *un-expired cost* merupakan biaya yang manfaatnya masih bisa digunakan di masa yang akan datang. Sedangkan *expired cost* merupakan biaya yang manfaatnya telah digunakan dan berkaitan dengan revenues untuk periode yang bersangkutan.”

Prinsip biaya dapat dibenarkan baik dari segi objektivitasnya maupun relevansinya dengan *going concern*.

Pertama, objektivitas biaya dapat dicapai sebab biaya merupakan informasi yang dapat diperiksa melalui pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran biaya. **Kedua**, postulat *going concern* beranggapan bahwa entitas menjalankan aktivitas operasional untuk jangka waktu yang tidak terbatas, karenanya menghilangkan keharusan untuk menggunakan *current value* atau *liquidation value* dalam penilaian aset.

Ketidakpastian validitas satuan pengukur, yang berasumsi bahwa daya beli dollar dianggap stabil, mengakibatkan timbulnya kelemahan dalam penggunaan prinsip biaya. Jika perubahan nilai asset sepanjang waktu diabaikan, maka penilaian *historical cost* dapat memberikan gambaran yang salah.

3. PENGUKURAN DAN PENGAKUAN BIAYA

Sebagai mana elemen laporan keuangan yang lain pengukuran dan pengakuan biaya mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kewajaran dan kecermatan dalam pengukuran biaya akan berpengaruh terhadap kewajaran informasi keuangan yang dihasilkan. Sementara itu ketepatan saat pengakuan biaya juga akan berpengaruh dalam penentuan laba atau rugi perusahaan.

1. Pengukuran

Pengukuran dan penilaian sejalan dengan dasar pengukuran dan aktiva dan hutang. Dasar pengukuran tersebut antara lain biaya historis (*historical cost*), biaya masuk terkini (*current input cost*) dan setara kas (*cash equivalent*). Meskipun ada berbagai dasar pengukuran namun dalam praktik dasar yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah biaya historis.

- a. **Biaya historis** adalah jumlah rupiah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva pada saat perolehannya.
- b. **Biaya masuk terkini** adalah jumlah rupiah harga penukaran yang harus dikorbankan sekarang untuk memperoleh aktiva sejenis dalam kondisi yang sama.
- c. **Setara kas** adalah jumlah rupiah kas yang direalisasikan dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal.

2. Pengakuan Biaya

Sebagaimana dikemukakan di muka *cost* mempunyai dua kedudukan, yaitu: (1) sebagai beban pendapatan atau expired cost yang disajikan pada neraca dan (2) sebagai beban pendapatan atau expired cost yang disajikan dalam laporan laba rugi. Expired cost inilah yang merupakan padanan dari expense yang diterjemahkan sebagai biaya atau beban.

Atas dasar pemisahan cost sebagai aktiva dan cost sebagai beban maka apabila ada pengeluaran yang memenuhi kriteria aktiva disebut *capital expenditures* yang berarti bahwa pengeluaran tersebut dapat ditunda pembebanannya. Sedang yang tidak memenuhi kriteria aktiva disebut *revenue expenditure*.

Berdasarkan konsep penandingan pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Dalam KDPPLK-SAK (1994) dinyatakan bahwa: "Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenue*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama;..."

4. KONSEP PENANDINGAN BIAYA

Penentuan harga pokok (*cost*) yang telah *expired* (habis) dan diberlakukan sebagai biaya (*expired cost*) merupakan tugas utama para akuntan. Selanjutnya biaya tersebut diperbandingkan dengan pendapatan. Menurut Paton dan Littleton biaya merupakan ukuran usaha (*effort*) dan pendapatan merupakan ukuran hasil. Dalam prosedur akuntansi langkah pertama adalah menentukan pendapatan dan kemudian diikuti langkah kedua menandingkan pendapatan dengan biaya. Pada langkah yang kedua ada pertanyaan muncul yaitu bagaimana penandingan yang tepat antara biaya dan pendapatan. Masalahnya terletak pada menentukan dasar penandingan yang memuaskan yaitu suatu bentuk hubungan yang dapat digunakan untuk menyatukan pendapatan dan pengurang pendapatan. Paton dan Littleton menyatakan bahwa harus dicari hubungan yang menunjukkan hubungan kelayakan ekonomi bukan aliran fisik semata.

Sedangkan APB Statement No. 4 (1979) melakukan pembebanan biaya kepada pendapatan tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Berasosiasi atas dasar sebab akibat (*associating cause and effect*), misalnya komisi penjualan, harga pokok barang yang terjual atau harga pokok jasa yang diserahkan.
2. Alokasi secara sistematis dan rasional (*systematic and rational allocation*), misalnya depresiasi aktiva tetap, alokasi biaya sewa dan biaya asuransi.
3. Pengakuan segera (*immediate recognition*), artinya bahwa harga pokok (*cost*) dibebankan sebagai biaya (*expense*) karena:
 - a. Harga pokok tersebut tidak memberikan manfaat yang jelas di masa yang akan datang. Contohnya: biaya promosi atau iklan.
 - b. Harga pokok yang dicatat sebagai aktiva pada periode sebelumnya tidak lagi memberikan manfaat nyata di masa yang akan datang. Contohnya: pembebanan nilai buku aktiva tetap karena aktiva tetap tersebut sudah tidak bermanfaat.

- c. Apabila alokasi harga pokok dengan cara seperti no. 1 dan 2 dipandang tidak membantu tujuan yang bermanfaat.

Contoh pengakuan segera selain butir a dan b di atas adalah gaji pegawai kantor, sebagian besar biaya penjualan dan pengeluaran uang untuk menyelesaikan perkara hukum.

Pertama 'berasosiasi atas dasar sebab akibat' merupakan cara yang dianggap ideal walaupun sulit untuk membutikannya apakah barang atau jasa yang digunakan memberikan kontribusi untuk menciptakan pendapatan. Sedangkan cara **kedua** 'alokasi secara sistematis' dan cara **ketiga** 'pengakuan segera' merupakan alternatif bila cara pertama tidak dapat digunakan karena tidak semua biaya berasosiasi dalam hubungan sebab akibat dengan pendapatan. Pilihan tersebut berdasarkan pada keadaan yang ada. Dasar alokasi secara sistematis apabila diyakini bahwa periode tertentu akan menerima manfaat aktiva tertentu, oleh karena itu setiap periode tersebut harus menanggung beban biaya dari manfaat yang diperolehnya. Prinsip alokasi harga pokok (cost) suatu aktiva ke periode sekarang dan periode yang akan datang adalah sangat lazim dilakukan dalam akuntansi. Contoh yang paling gampang ditemukan dalam proses alokasi cost adalah depresiasi dan amortisasi.

Cara **ketiga** "pengakuan segera" merupakan aliran terakhir apabila dua pilihan pertama tidak bias diterapkan. Ada banyak jenis biaya dengan dasar pengakuan segera dapat diperbandingkan dengan pendapatan, tetapi di antaranya sekaligus diakui berdasarkan cara pertama, seperti misalnya upah. Contoh penerapan ketiga adalah pencatatan biaya iklan. Dampak dari pengeluaran untuk kegiatan iklan mungkin mempunyai manfaat tersebut sulit ditentukan. Sebagai contoh mungkin seorang pembeli melakukan pembelian produk perusahaan karena pengaruh oleh iklan ketika dia melihatnya dua tahun lalu tidak dapat ditentukan dengan cara yang baik (kredibel) maka pengeluaran untuk kegiatan iklan biasanya diakui segera sebagai biaya. Hal ini sejalan dengan KDPPLK-SAK (1994): "Beban segera diakui dalam laporan keuangan laba rugi kalau pengeluaran tidak

menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva”.

Selanjutnya juga dikemukakan:

“Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk”.

LOSSES

Istilah losses atau rugi sering dipakai sebagai kelebihan biaya di atas pendapatan. Dalam hal ini rugi sebagai lawan net income. Rugi timbul apabila biaya lebih besar daripada pendapatan. Sehingga istilah losses di sini penyajiannya dalam laporan laba rugi terletak di bagian paling bawah, yaitu setelah pos-pos biaya usaha.

Penggunaan istilah losses sebagaimana telah diuraikan di bagian depan bahwa losses sebagai lawan dari gains. Sebagai lawan gains maka losses berarti penurunan nilai yang tidak berhubungan dengan kegiatan normal perusahaan tetapi berasal dari kegiatan-kegiatan yang tidak berulang kembali dan tidak diantisipasi. Losses merupakan bagian atau termasuk dalam pengertian expense (biaya) dan loss (rugi) dalam penyajiannya pada laporan laba rugi akan sangat membantu memberikan pengungkapan bagi para pemakai laporan keuangan.

Suatu proses yang sudah jelas dan jumlahnya dapat diukur harus segera diakui pada periode berjalan dan tidak boleh ditunda ke periode yang akan datang. Konsep pengakuan segera seperti ini konsisten dengan all inclusive concept. Misalnya saja rugi yang timbul karena bencana alam, rugi selisih kurs dan sebagainya. Pada umumnya dalam laporan laba rugi pos-pos semacam ini apabila jumlahnya sangat material termasuk dalam kelompok pos-pos luar biasa, dan apabila jumlahnya tidak terlalu besar masuk dalam kelompok pos-pos di luar usaha.

DEPRESIASI DAN AMORTISASI

Depresiasi dan amortisasi merupakan biaya non kas, artinya biaya tersebut tidak lagi memerlukan pengeluaran kas sekarang ataupun di masa depan. Depresiasi berkaitan dengan alokasi harga perolehan aktiva tetap misalnya gedung, mesin dan peralatan sedang amortisasi berkaitan dengan alokasi harga perolehan aktiva tidak berwujud, misalnya, hak patetnt, hak cipta, merk dagang selama masa manfaatnya.

PSAK No. 17 mengemukakan defenisi penyusutan sebagai berikut:

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”.

Dalam PSAK No. 17 tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa aktiva tersebut adalah aktiva tetap atau aktiva tetap tidak berwujud sehingga dapat ditafsirkan bahwa penyusutan yang dimaksud disitu termasuk amortisasi. Jadi istilah penyusutan dalam PSAK No. 17 tersebut dapat berarti depresiasi atau amortisasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan selanjutnya bahwa akuntansi penyusutan ini diterapkan untuk seluruh aktiva yang dapat disusutkan, kecuali:

- a. Hutan dan sumber alam serupa yang dapat diperbaharui.
- b. Pengeluaran eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui.
- c. Pengeluaran riset dan pengembangan.
- d. Goodwill.

Namun demikian dalam praktik akuntansi yang lazim dibedakan antara istilah depresiasi dan amortisasi. Istilah depresiasi merupakan alokasi harga perolehan selama masa manfaat untuk aktiva tetap (*fixed asstes*) seperti misalnya gedung dan mesin, sedang amortisasi merupakan alokasi harga perolehan selama masa manfaat untuk aktiva tak berwujud (*intangible assets*) seperti misalnya paten, merk dagang dan lisensi. Di samping depresiasi dan amortisasi tersebut dalam praktik yang lazim juga dikenal istilah deplesi (*depletion*) yang merupakan

alokasi harga perolehan selama masa manfaat untuk sumber-sumber alam (*natural resources*).

Berbicara tentang alokasi harga perolehan, dalam perpajakan di Indonesia hanya dikenal dua istilah saja, yaitu depresiasi dan amortisasi. Dalam perpajakan tidak dikenal istilah deplesi. Depresiasi merupakan alokasi harga perolehan untuk aktiva tetap berwujud sedang amortisasi merupakan alokasi harga perolehan aktiva tidak berwujud dan sumber-sumber alam. Jadi istilah deplesi masuk ke dalam istilah amortisasi.

Mungkin saja jumlah biaya depresiasi atau amortisasi per tahun berbeda menurut akuntansi dan menurut pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan metode depresiasi/amortisasi yang dianut. Bisa saja perusahaan menyusut aktiva tetap dengan metode angka tahun karena metode ini diperbolehkan menurut standar akuntansi. Tetapi peraturan perpajakan tidak memperbolehkan metode tersebut sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak harus menggunakan metode depresiasi yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Tentu saja jumlah depresiasi per tahun dari dua metode yang berbeda tersebut juga berbeda.

Di samping perbedaan jumlah depresiasi akibat metode yang berbeda mungkin saja walaupun metode depresiasi yang digunakan sama tetapi menghasilkan jumlah biaya depresiasi per tahun berbeda antara menurut akuntansi dan menurut pajak. Perbedaan ini disebabkan karena peraturan atau asumsi yang berbeda. Misalnya akuntansi dapat memperkirakan jumlah nominal nilai residu aktiva tetap sesuai dengan kewajaran tetapi perpajakan menganggap nilai sisa aktiva tetap sama dengan nol.

BAB 10

KONSEP LABA

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Pengertian, Tujuan dan Karakteristik laba**
- 2) Keunggulan dan kelemahan laba akuntansi**
- 3) Pengukuran dan Pengakuan Laba**
 - a) Pendekatan Transaksi**
 - b) Pendekatan Kegiatan (Ekonomis)**
 - c) Pendekatan Mempertahankan Kemakmuran**
- 4) Elemen Laba**
 - a) Konsep Laba Periode (Earnings)**
 - b) Laba Komprehensif**
- 5) Elemen Laba Non-Operasional**
 - a) Pos Luar Biasa**
 - b) Penghentian Segmen Bisnis**
 - c) Perubahan Akuntansi**
 - d) Penyesuaian Periode Sebelumnya**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian, tujuan, dan karakteristik laba.**
- Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan laba akuntansi**

- **Memahami metode-metode pengukuran laba**
- **Membedakan laba periode dengan laba komprehensif**
- **Mengidentifikasi elemen-elemen laba non-operasional**

I. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN KARAKTERISTIK LABA

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam SFAC No. 6 menyatakan bahwa " *comprehensive income* adalah perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan bisnis selama suatu periode yang berasal dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lain atau kejadian lain yang bukan berasal dari sumber pemilik. Termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama periode tertentu kecuali yang diakibatkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik.

Sementara itu, Vernon Kam menyatakan bahwa *income is the change in the capital of an entity between two points in the time, excluding change due to investment by and distribution to owners, where capital is expressed in term of value and is based on a given scale.*

Jadi *Income* adalah perubahan dalam modal dari satu kesatuan usaha antara dua titik waktu yang berbeda, kecuali perubahan yang disebabkan karena investasi oleh dan distribusi kepada pemilik, dimana *capital* dinyatakan dalam nilai dan didasarkan pada skala tertentu.

Secara sintaksis kita mengenal istilah *accounting income* dan laba akuntansi yang merupakan hasil penandingan antara pendapatan dan beban, atau merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang berdasarkan pada prinsip realisasi dan aturan *matching* yang memadai.

Ditinjau dari ruang lingkungannya terdapat 3 konsep sebagaimana dikemukakan FASB dalam SFAC No. 5 yaitu: *earnings*, *net income* dan *comprehensive income*. *Earning* merupakan konsep yang paling sempit sedangkan *comprehensive income* merupakan konsep paling luas. Masalah perhitungan laba perusahaan baru timbul kalau perusahaan didirikan untuk jangka waktu panjang (*going concern*) dan pihak-pihak

yang berkepentingan tidak bisa menunggu pembubaran perusahaan yang diharapkan, kecuali kalau ada tanda-tanda yang nyata kearah pembubaran atau kebangkrutan.

Dalam situasi semacam ini, periode yang tidak terbatas tersebut dibagi-bagi dalam periode-periode akuntansi sehingga dapat dibuat ikhtisar hasil usaha selama suatu periode dan posisi keuangan perusahaan pada setiap akhir periode. Berhubung tidak semua siklus transaksi terselesaikan pada setiap akhir periode akuntansi, dan situasi masa depan yang tidak pasti maka timbul masalah pengukuran laba yang menimbulkan banyak perdebatan.

Pada dasarnya, masalah pengukuran tersebut merupakan inti masalah akuntansi. Dalam literatur akuntansi sebagian penulis mengutip pendapat tentang tujuan perhitungan laba dan pengertian laba sebagaimana dikemukakan oleh ekonom John Hicks (1946) seperti berikut:

"The purpose of income calculation in practical affairs is to give people an indication of the amount which they can consume without improverising themselves. Following out this idea, it would seem that we ought to define a man's income as the maximum value which he can consume during a week, and still expect to be as well off at the end of the week as he was at the beginning."

Dari kutipan tersebut dapat dikemukakan bahwa laba pribadi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi selama periode (misalnya satu minggu atau satu bulan) dengan harapan keadaanya pada akhir periode tetap sama (as well of) seperti keadaan awal periode. Pengertian laba menurut Hick tersebut kemudian menjadi acuan dalam memberikan pengertian laba pribadi menurut Hick (Hickisian Concept) tersebut umumnya para akuntan juga memberikan pengertian laba perusahaan seperti berikut:

"A firm's income is the maximum value which it can distribute during an accounting period and still be as well off at the end of the period as it was at the beginning." (Whittred and Zimmer, 1990, p. 70)

(Laba perusahaan adalah nilai maksimum yang dapat dibagi atau dikonsumsi selama satu periode akuntansi di mana keadaan pada akhir periode masih sama seperti pada awal periode).

Kemudian para akuntan mencoba menjelaskan tentang kondisi awal periode dan akhir periode tersebut dengan kekayaan neto awal periode dan akhir periode. Namun demikian konsepsi dan pengertian tentang kekayaan neto tersebut masih banyak perbedaan dan tentu saja dengan konsepsi yang berbeda akan menghasilkan angka berbeda dalam kekayaan neto. Oleh karena itu berhubung belum ada kesepakatan mengenai besarnya kekayaan neto maka penggunaan konsep nilai yang berbeda akan menghasilkan angka laba yang berbeda.

Setelah diuraikan tentang konsep laba menurut John Hick, berikut ini dikemukakan pengertian akuntansi konvensional maupun beberapa kutipan tentang pengertian laba dari literatur yang nampak sudah mengadaptasi pengertian laba dari John Hick.

1. Menurut pengertian akuntansi konvensional dinyatakan bahwa laba akuntansi adalah perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisasi yang dihasilkan dari transaksi dalam suatu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya.
2. FASB dalam SFAC No. 6 (1985) menyatakan bahwa Comprehensive Income atau laba komprehensif adalah perubahan modal (aktiva bersih) perusahaan selama satu periode, dari transaksi, peristiwa lain dan keadaan dari sumber selain pemilik (*non owner change*).
3. Vernon Kam mengemukakan bahwa Income atau laba merupakan perubahan modal suatu kesatuan usaha di antara dua titik waktu, tidak termasuk perubahan-perubahan akibat investasi oleh pemilik, di mana modal dinyatakan dengan ukuran nilai dan didasarkan pada skala tertentu.
4. Dalam KDPPLK-SAK (1994) income diterjemahkan menjadi penghasilan, yang didefinisikan sebagai berikut: Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva

atau peburunankewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan.

Sebagaimana dikatakan di depan bahwa dalam SFAC No. 5 selain comprehensive income juga ada istilah earning dan net income. Earning adalah kenaikan ekuitas atau aktiva neto suatu perusahaan yang disebabkan karena aktivitas operasi maupun aktivitas di luar usaha selama periode tertentu. Earnings mempunyai 4 komponen, yaitu: revenues, expenses, gains dan losses (Belkoui, 2000). Kemudian Belkoui mengemukakan pengertian earning yang berbeda dalam tiga pola hubungan seperti berikut:

1. Setiap komponen terpisah dan setiap komponen penting dalam mendefinisikan earning.
2. Revenues dan expenses terpisah dan merupakan komponen penting dari earning. Sedangkan gains dan losses tidak dipisah dan tidak penting bagi definisi earning.
3. Meskipun gains dan losses merupakan konsep yang terpisah, tetapi keduanya merupakan bagian dari revenue dan expenses.

Dalam sebuah persamaan ketiga hubungan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. $Earnings = revenues - expenses + gains - losses$
2. $Earnings = revenues - expenses$
3. $Earning = revenues \text{ (termasuk gains)} - expenses \text{ (termasuk losses)}$

Sementara itu FASB dalam SFAC No. 5 (1984) memberikan pengertian pengertian net income sama dengan earnings, sepanjang tidak ada pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi, dalam arti revenue dikurangi expense ditambah gains dan dikurangi losses. Sedangkan comprehensive income adalah net income ditambah atau dikurangi jumlah tertentu akibat perubahan yang tidak berasal dari atau kepada jumlah tertentu akibat perubahan yang tidak berasal dari atau

kepada pemilik (non owner change in equity). Dengan demikian earnings mempunyai komponen sama dengan net income mempunyai komponen yang lebih sempit dibanding comprehensive income. Jadi comprehensive income mempunyai pengertian yang paling luas di antara ketiga istilah tersebut.

Dalam sebuah tabel perbedaan antara earnings, net income dan comprehensive income adalah sebagai berikut:

Perbedaan earning, net income dan comprehensive income.

Pos-Pos	Comprehensive Income	Net Income	Earning
Pendapatan	900	900	900
Biaya-Biaya	(350)	(350)	(350)
Keuntungan dari sumber tidak normal	50	50	50
Laba dari operasi normal	600	600	600
Rugi penjualan aktiva tetap	(80)	(80)	(80)
Laba sebelum pos luar biasa dan pengaruh komulatif perubahan prinsip akuntansi	520	520	520
Pos luar biasa	(70)	(70)	(70)
Earning			450
Pengaruh komulatif perubahan prinsip akuntansi	(50)	(50)	
Net income		400	
Perubahan dalam ekuitas bukan dari pemilik	50		
Comprehensive Income	450		

Dari tabel tersebut terlihat bahwa earning merupakan laba selama satu periode akuntansi tanpa ada pengaruh komulatif perubahan prinsip

akuntansi. Dalam hal ini berbeda earning dengan net income karena dalam net income sudah diperhitungkan pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Sementara dalam laba comprehensive telah memasukkan perubahan dalam ekuitas bukan dari pemilik selain pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi tersebut. Sehingga apabila perubahan prinsip akuntansi tersebut. Sehingga apabila perusahaan menyusun laporan laba komprehensif (*statement of comprehensive income*) akan terlihat laporan laba periode (*statement of earnings*).

Beberapa perubahan prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan laba-rugi dengan pendekatan all inclusive, dapat dicontohkan seperti berikut:

1. Perubahan metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya dari LIFO ke FIFO untuk aliran cost persediaan
2. Perubahan taksiran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya perubahan taksiran umur ekonomis aktiva tetap.
3. Perubahan metode akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang.

2. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN LABA AKUNTANSI

Kalau dilihat secara lebih mendalam, laba akuntansi menurut konvensional, sebenarnya bukan defenisi yang sesungguhnya dari laba melainkan hanya merupakan penjelasan mengenai cara untuk menghitung laba. Kandungan informasi dalam laba akuntansi mempunyai keunggulan dan manfaat, seperti yang dikemukakan dalam SFAC No. 1 yaitu: "Informasi tentang earnings perusahaan dan komponen-komponen yang diukur dengan dasar *accrual accounting*, umumnya menyediakan indikasi yang terbaik tentang kinerja perusahaan daripada informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas sekarang (*current cash receipts and paymaents*).

Secara lebih spesifik, pelaporan laba akuntansi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen;
2. Untuk membedakan antara modal dan laba.

3. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi dividen;
4. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pembuatan keputusan oleh manajemen;
5. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak;
6. sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi kepada manajemen.

Beberapa keunggulan laba akuntansi adalah:

1. Terbukti teruji sepanjang sejarah bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan.
2. Laba akuntansi telah diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh bukti.
3. Berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan laba akuntansi memenuhi dasar konservatisme.
4. Laba akuntansi bermanfaat dengan tujuan pengendalian terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen.

Di samping kelebihan, laba akuntansi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul oleh karena pengertian tentang laba akuntansi hanya merupakan teknik untuk menghitung banyak kritik. Di bawah ini merupakan beberapa kelemahan dari laba akuntansi tersebut:

1. Konsepsi laba dianggap belum dirumuskan dengan jelas, belum ada landasan teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi tersebut.
2. *Generally accepted accounting principles* (GAAP), masih memungkinkan dan memperbolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik akuntansi yang tidak konsisten.
3. Laba akuntansi yang didasarkan pada konsep *historical cost* menjadi kurang bermakna apabila pengaruh perubahan harga diperhitungkan dalam penentuan angka laba tersebut.

4. Laba akuntansi hanya merupakan laba diatas kertas saja karena angka laba yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan likuiditas perusahaan atau menggambarkan kemampuan dalam memberikan *cash dividen*.

Hendriksen (1982) mengemukakan lima kelemahan laba akuntansi sebagai berikut:

- a. Konsep laba akuntansi belum diformulasikan dengan jelas. Laba tidak didefinisikan secara ekonomik dan pengukurannya ditentukan oleh dua elemen laporan keuangan lainnya.
- b. Tidak adanya landasan teoritis yang bersifat jangka panjang untuk menghitung dan menyajikan laba.
- c. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum memungkinkan adanya inkonsistensi.
- d. Perubahan tingkat harga mengubah makna dari uang historis.
- e. Terdapat informasi lain yang mungkin lebih berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Sementara Belkoui (1993) mengemukakan kelemahan laba akuntansi:

- a. Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan aktiva yang belum direalisasi dalam suatu periode karena dasar biaya historis dan prinsip realisasi.
- b. Laba akuntansi yang didasarkan pada biaya historis menyulitkan perbandingan laporan keuangan karena adanya perubahan nilai uang yang menyebabkan perubahan harga (cost) dan metode alokasi.

Dari kelemahan-kelemahan yang melekat dalam angka laba akuntansi tersebut, maka dilakukan upaya untuk mengatasi kelemahan dari konsepsi laba tersebut, antara lain:

1. Berusaha untuk memperbaiki laporan laba akuntansi dengan memberikan tekanan kepada data transaksi dan aktualisasi secara lebih mendalam.
2. Sebaiknya ada konsep laba yang tunggal dan operasional yang dapat digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
3. Membuat konsep tunggal mengenai laba yang lebih sesuai dengan apa yang disebut konsep laba secara ekonomi.
4. Seharusnya ada berbagai konsep laba untuk berbagai kepentingan (*different income for different purposes*).

Adanya kritikan atau kelemahan di atas maka perekayasaan laba dalam akuntansi kemudian difokuskan pada pemilihan konsep laba yang tunggal yang mendekati konsep laba ekonomik tetapi sekaligus secara objektif dapat dihitung sehingga struktur akuntansi dalam praktiknya dapat menyediakan informasi laba tersebut. Dengan adanya pemikiran tersebut misalnya pengertian laba ekonomik ke dalam laba akuntansi.

Pengertian laba menurut SFAC No. 6 dan menurut Vernon Kam pada dasarnya adalah sama karena pengertian laba menurut Vernon Kam berpijak dari berpijak dari defenisi menurut SFAC. Kedua defnisi tersebut pada dasarnya ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada defenisi laba akuntansi konvensional dengan mengadaptasi substansi dari laba ekonomi menurut John Hick. Sehingga dengan mengadaptasikan laba ekonomi ke dalam pengertian laba akuntansi maka pengertian laba akuntansi (*accounting income*) atau laba menurut akuntan secara konsepsi tidak berbeda substansinya dengan laba menurut ekonom atau laba ekonomik (*economic income*).

Dengan defenisi *comprehensive income* sebagaimana menurut SFAC No. 6 di atas maka tahap pertama dalam menghitung laba (dan nilai buku ekuitas) adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menerima manfaat hasil operasi perusahaan. Karena konsep laba tidak dapat dilepaskan dengan "kelebihan" ekuitas yang bisa

“didistribusikan” tanpa mengurangi ekuitas itu sendiri. Istilah akuntansi untuk *comprehensive income* mempunyai akibat terhadap akuntansi untuk nilai buku ekuitas yaitu perhatian terhadap angka paling bawah (*the bottom line*) dari neraca dan laporan laba rugi. Konsekuensi istilah *comprehensive* bukan hanya terhadap masalah penyajian di dalam format yang berbeda tetapi juga menyangkut masalah penyajian di dalam format yang berbeda tetapi juga menyangkut masalah pengakuan labanya, untuk siapa laba itu serta berhubungan dengan pengukurannya.

Dari sisi substansi pengertian laba ekonomik lebih relevan, namun tidak berarti bahwa pengukuran laba ekonomi tidak mempunyai masalah. Kedua definisi laba menurut SFAC No. 6 dan menurut Vernon Kam secara konsep lebih baik dan mudah dipahami, tetapi akan muncul persoalan dalam dataran pengukuran atau penilaian kekayaan neto pada awal dan akhir periode. Kekayaan neto adalah aktiva dikurangi hutang.

Masalah pengukuran timbul karena terdapat beberapa konsep mengenai nilai yang dinyatakan dengan harga. Ada berbagai macam harga: harga yang lewat, harga sekarang dan harga yang akan datang. Bila kekayaan neto dinyatakan sebagai aktiva bersih atau modal, maka kita harus mengukur nilai modal, karena modal adalah selisih aktiva dikurangi hutang maka kita harus menilai nilai aktiva dan juga menilai hutang. Karena laba merupakan kenaikan nilai modal maka penentuan laba tidak terlepas dari masalah nilai. Di dalam “*double entry system*” pendapatan, biaya, laba atau untung dan rugi merupakan sisi lain dari peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi nilai aktiva dan hutang.

Di samping perbedaan konsep nilai juga terdapat perbedaan pengertian mengenai modal yaitu **modal finansial** dan **modal fiskal**; modal nominal satuan uang dan daya beli satuan uang. Pembicaraan mengenai modal finansial menekankan pada nilai aktiva dikurangi dengan nilai hutang dan oleh karenanya menunjukkan kontribusi pemilik dalam pembelanjaan aktiva perusahaan. Modal dalam hal ini menunjukkan kas yang diinvestasikan oleh pemilik ditambah dengan reinvestasi dari laba ditahan dalam perusahaan. Sedang pembicaraan

mengenai modal fiskal difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, jadi menekankan kapasitas produktif.

Perbedaan utama antara modal finansial dari modal fiskal terletak pada pengaruhnya terhadap laba, yaitu perubahan nilai aktiva dan hutang mempengaruhi laba pada modal finansial tetapi tidak mempengaruhi modal fiskal.

Di dalam konteks modal finansial, perubahan nilai aktiva dan hutang menyebabkan timbulnya holding gains (atau holding losses) walaupun itu disebabkan oleh perubahan nilai satuan moneter yang digunakan. Sedangkan dalam konteks modal merupakan earning tetapi merupakan "Capital Maintenance Adjustment" yang berpengaruh langsung terhadap jumlah modal, bukan holding gains atau holding losses.

3. PENGUKURAN DAN PENGAKUAN LABA

APB Statement No. 4 (1970) mengemukakan 3 jenis prinsip yang membentuk suatu hierarki dalam pengukuran laba yaitu: (1) prinsip pervasive, (2) prinsip operasi yang luas yang diperoleh dari prinsip pervasive, (3) prinsip yang terperinci.

Prinsip (1) jumlahnya lebih sedikit dan fundamental, prinsip (2) jumlahnya lebih banyak tetapi lebih khusus dan prinsip (3) umumnya didasarkan pada prinsip no. (2) dan prinsip no. (1). Dalam prinsip pervasive, APB Statement No. 4 menyebutkan bahwa penandingan pendapatan dan biaya didasarkan atas accrual basis. Dasar pengakuan biaya yang ditandingkan dengan pendapatan adalah berdasarkan urutan sebagai berikut: hubungan sebab-akibat, alokasi secara sistematis dan rasional dan yang terakhir dengan pengakuan segera.

Penentuan laba menurut akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengakaitan pendapatan dengan biaya-biaya perusahaan untuk suatu periode akuntansi umumnya ditentukan secara bebas dengan menerapkan prinsip pengakuan biaya atas dasar hubungan antara biaya dengan pendapatan dan biaya juga

merupakan saat pengakuan penapatan dan biaya juga merupakan saat pengakuan perubahan aktiva bersih.

Dengan dasar seperti uraian di atas APB Statement No. 4 memberikan defenisi pendapatan dan biaya sebagai berikut: "Pendapatan merupakan kenaikan kotor aktiva penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan praktik-praktik akuntansi yang lazim yang diakibatkan oleh aktivitas yang menjurus ke arah perolehan laba perusahaan yang dapat merubah modal". "Biaya adalah penurunan kotor aktiva atau kenaikan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim diterima diakibatkan oleh jenis aktivitas yang menjurus ke arah peolehan laba suatu perusahaan bisnis merubah modal sendiri."

Menurut pendekatan sintaksis, laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban. Laba dianggap telah timbul apabila terjadi kenaikan nilai dari kekayaan bersih sebagai akibat adanya transaksi. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran laba antara lain: (1) Pendekatan transaksi dan (2) Pendekatan kegiatan

1. Pendekatan Transaksi

Menurut pendekatan transaksi, laba telah timbul pada saat terjadinya transaksi. Khususnya transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi dan melibatkan pihak luar. Laba dapat timbul pada saat terjadinya transaksi pertukaran/penjualan dan terjadinya pengakuan beban.

Pendekatan transaksi dalam pengukuran laba adalah pendekatan konvensional, di mana perubahan aktiva dan hutang hanya dicatat sebagai akibat adanya transaksi. Perubahan nilai yang terjadi karena perubahan harga pasar atau perubahan pengharapan tidaklah dicatat.

Prosedur umum dalam pendekatan transaksi adalah mencatat pendapatan dan biaya pada saat terjadinya berdasarkan transaksi-transaksi dengan pihak eksternal. Dalam pendekatan transaksi ini masalah yang berhubungan dengan laba adalah menyangkut: *timing, valuation dan matching*.

Berikut ini contoh pencatatan transaksi eksternal yang dapat menimbulkan laba:

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Sales</i>		<i>xxx</i>
 <i>Account receivable</i>	 <i>xxx</i>	
<i>Sales</i>		<i>xxx</i>
 <i>Cost of good sold</i>	 <i>xxx</i>	
<i>Merchandise Inventory</i>		<i>xxx</i>
 <i>Salaries expense</i>	 <i>xxx</i>	
<i>Cash</i>		<i>xxx</i>
 <i>Selling expense</i>	 <i>xxx</i>	
<i>Cash</i>		<i>xxx</i>

Ada beberapa manfaat dari penggunaan pendekatan transaksi dalam pengukuran laba, yaitu:

- Laba dapat dilaporkan menurut berbagai macam kelompok, misalnya menurut produk atau pelanggan.
- Sebagai dasar untuk menentukan jenis dan banyaknya aset yang ada pada akhir periode.

2. Pendekatan Kegiatan

Dalam pendekatan aktivitas, tidak dilihat adatidaknya transaksi, melainkan apakah kegiatan telah berlangsung. Dengan perkataan lain, laba akan timbul bersamaan dengan berlangsungnya aktivitas. Misalnya, mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, dan penjualan, maka laba dianggap telah terbentuk/ terhimpun.

Pendekatan kegiatan memusatkan perhatian pada deskripsi kegiatan perusahaan bukan pada pelaporan transaksi. Hal ini berarti

bahwa laba dianggap timbul pada saat terjadinya kegiatan atau peristiwa tertentu bukan saat terjadinya transaksi.

Manfaat dari penggunaan pendekatan aktivitas ini, yaitu informasi laba dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya, untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas tiap-tiap kegiatan.

Di samping pengukuran laba berdasarkan kedua pendekatan di atas dapat pula dilakukan pengukuran laba dengan melakukan perbandingan keadaan perusahaan pada awal dan akhir periode. Pendekatan dengan cara dikenal sebagai pengukuran laba pada tingkat semantik. Pendekatan ini dipengaruhi oleh konsep laba setelah mengadaptasikan pengertian laba ekonomi.

3. Pendekatan Mempertahankan Kemakmuran

Laba dari segi semantik diartikan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran (*wealth*) atau diartikan sebagai perubahan kemakmuran, atau perubahan kapital, atau modal. Seseorang dikatakan makmur apabila seseorang dapat mengkonsumsi suatu aliran jasa atau kemakmuran selama periode waktu tertentu dan sama sejahteranya pada akhir periode sama seperti awal periode.

Menurut konsep kemakmuran, laba timbul jika ada aliran lebih yang masuk setelah aliran pada awal periode dapat dipertahankan sampai pada akhir periode. Apabila aliran jasa pada awal periode sama dengan akhir periode, maka dapat dikategorikan makmur. Dengan adanya pemikiran tersebut, maka timbul konsep dengan apa yang disebut dengan konsep mempertahankan kemakmuran atau konsep mempertahankan modal (*capital*).

Pengukuran modal (*capital*) pada awal dan akhir periode dapat dilakukan dengan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1 Capitalization of Expected Cash Flow (Kapitalisasi Aliran Kas Harapan).
- 2 Market Valuation of the Firm (Penilaian Harga Pasar Perusahaan).
- 3 Current Cash Equivalent (Jumlah Setara Kas Sekarang).

- 4 Historical Cost (Biaya Historis).
- 5 Historical Input Price (Harga Masukan Sekarang).
- 6 Current Input Price (Haga Masukan Sekarang).
- 7 Constant Purchasing Power (Rupiah Daya Beli Konstan).

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai beberapa metode pengukuran di atas, terlebih dahulu disinggung pengertian capital (modal). Pengertian capital menurut Irving Fisher sebagaimana dikutip Suwrdjono (1989): *"a stock of wealth at an instant time"*. Artinya bahwa capital adalah persediaan kemakmuran pada saat tertentu. Atas dasar pengertian pengertian capital tersebut, Hendriksen (1982) memberikan pengertian laba dan capital seperti berikut: *"Income is a flow of services thorough time. Capital is the embodiment of future services and income is the enjoyment of these services over a specific period of time."* (hal. 142)

Laba merupakan aliran kemakmuran selama periode waktu tertentu dan modal merupakan perwujudan tingkat kemakmuran setiap saat selama periode tersebut. Oleh karena itu laba dapat dikatakan sebagai konsumsi atas kemakmuran tersebut. Dalam hubungannya dengan operasi perusahaan muncul persoalan seberapa besar aliran kemakmuran yang dapat dinikmati oleh pemegang ekuitas selama periode tertentu yang tidak mempengaruhi tingkat kemakmuran sebelumnya. Di sinilah kemudian muncul konsep laba atas dasar konsep mempertahankan capital (*capital maintenance*). Dalam akuntansi keuangan karena umumnya investor dianggap fokus yang disetujui oleh pelaporan maka pengertian capital dalam konsep laba adalah capital neto (net worth) atau aktiva bersih bukan total aktiva.

- **Laba sebagai alat prediksi**, angka laba dapat memberikan informasi sebagai alat untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk pembagian dividen, dan sebagai alat untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menaksir earning power dan nilai perusahaan dimasa yang akan datang.

- **Laba sebagai alat pengendalian manajemen**, laba dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajemen atau divisi dari suatu perusahaan

Proses pengukuran laba periodik bersangkutan dengan pembagian cost (biaya perolehan, yang juga sering diterjemahkan harga perolehan) yang telah terjadi ke dalam periode berjalan dan periode yang akan datang. Dalam pengukuran laba masalah sangat penting adalah mempertemukan pendapatan dan biaya-biaya yang layak dibebankan pada pendapatan tersebut (*proper matching cost with revenues*). Sebagai pengurang pendapatan semua biaya (termasuk rugi) mempunyai kedudukan yang sama (*homogens deduction*) terhadap pendapatan tersebut. Biaya tersebut ditandingkan dengan pendapatan atas dasar skala prioritas. Memang benar bahwa ada cara atau klasifikasi tertentu dalam penyajian biaya sebagai pengurang pendapatan dalam laporan laba rugi tetapi klasifikasi tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ukuran prioritas.

Dalam hal penandingan biaya terhadap pendapatan perlu dicari dasar penandingan yang tepat atau memuaskan dengan memperhatikan kondisi yang ada. Kriteria penetapan sebagai dasar urutan pertama penandingan adalah atas dasar hubungan ekonomik yang rasional (*economic reasonableness*) antara pendapatan dan biaya sebelum menggunakan dasar yang lainnya misalnya saja dasar alokasi atas berlalunya waktu. Apabila terdapat cost yang tidak lagi mempunyai potensi jasa di masa yang akan datang, cost tersebut harus segera ditandingkan dengan pendapatan dalam periode itu juga. Pendapatan merupakan cerminan dari hasil (*accomplishment*) sedang beban mencerminkan upaya.

4. ELEMEN LABA

Terdapat dua konsep cakupan laba dalam menentukan besarnya laba yaitu; all inclusive concept (clean surplus) dan current operating performance (dirty surplus). Kedua konsep ini menunjukkan elemen yang mempengaruhi jumlah laba.

1. Konsep all inclusive

Konsep all inclusive memasukkan semua akibat dari transaksi, peristiwa dan keadaan terhadap modal pada suatu terhadap modal pada semua akibat dari transaksi, peristiwa dan keadaan modal pada suatu periode yang bukan dari setoran dan dianut distribusi kepada pemilik ke dalam laporan laba rugi. Konsep seperti ini dianut SFAC No. 6, yaitu dengan memperkenalkan konsep "laba komprehensif" (comprehensive income).

Dalam konsep ini, cakupan laba meliputi semua perubahan dan kenaikan *net asset* selama periode tertentu, kecuali yang diakibatkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Dalam konsep ini, item-item yang sifatnya dan berasal dari aktivitas baik reguler dan non-reguler masuk dalam cakupan laba.

Terdapat lima kategori *irreguler items* dalam konsep *all inclusive* tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Item-item yang berasal dari operasi yang dihentikan
- Extra ordinary item
- Unusual gains dan losses
- Perubahan dalam prinsip akuntansi, dan
- Perubahan dalam estimasi

Kesalahan dalam pengukuran laba periode sebelumnya (*error in prior years income measurement*) harus dilaporkan sebagai penyesuaian *retained earnings*. Menurut FASB konsep laba *all inclusive* ini adalah konsep laba dengan apa yang dikenal dengan istilah laba komprehensif

2. Konsep current operating

Konsep current operating dalam penyusunan laporan laba rugi hanya memasukkan hal-hal yang operasional dan sering terjadi saja. Pos-pos yang tidak operasional dan jarang terjadi disebut pos luar biasa

dikelompokkan ke dalam laporan laba ditahan (*retained earning statement*) dan tidak masuk dalam laporan laba rugi.

Konsep ini relevan dengan kepentingan manajemen sebagai pengukur efisiensi, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan semua input dan sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan laba

Dalam praktik konsep all inclusive lebih banyak diterapkan. Hal ini karena dianggap konsep all inclusive lebih baik dari pada konsep all inclusive lebih baik dari pada konsep current operating. Menurut Hendriksen dan Van Breda (1992) keunggulan all inclusive concept dibanding current operating concept adalah:

- a. Kenaikan pengorbanan aktiva akibat pos luar biasa atau koreksi tahun sebelumnya akan menurunkan laba. Bila hal ini tidak dimasukkan laporan maka laba bersih selama setahun tersebut akan dinyatakan terlalu besar (*overstated*).
- b. Peniadaan beberapa pos yang menurunkan nilai aktiva dalam laporan laba rugi cenderung meningkatkan praktik pemerataan laba (*income smoothing*).
- c. Laporan laba rugi yang disusun dengan memasukkan semua elemen akan lebih mudah disusun dan dipahami pembacanya sehingga dapat mengurangi penggunaan judgement dalam penyusunan laporan keuangan.
- d. Pengungkapan menyeluruh atas sifat perubahan laba selama setahun akan memudahkan pembaca membuat klasifikasi yang tepat untuk mendapatkan gambaran laba.
- e. Konsep *current operating* menghendaki penggolongan pos laba rugi atas dasar kegiatan pokok dan transaksi luar biasa (*extra ordinary*). Pembedaan pos pokok dan luar biasa sering-seringkali sulit dilakukan. Sulitnya pembedaan ini menyebabkan kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar perusahaan.

5. KONSEP LABA

Konsep laba apabila dilihat dari sisi kelompok penerimanya dapat dibedakan menjadi 5 konsep laba antara lain:

1. *Value added concept of income*
2. *Enterprise's net income*
3. *Net income to investor*
4. *Net income to shareholder (pemegang saham)*
5. *Net income to residual equity holder's*

Konsep Laba	Cakupan Laba	Kelompok Penerima
<i>Value added</i>	Harga jual produk dikurangi harga pokok barang dan jasa yang diperoleh dengan transfer, semua laba terdistribusi habis	- Karyawan - Kreditur - Pemerintah
<i>Enterprise's net income</i>	Kelebihan revenue dari expenses, semua gains dan losses. Expenses tidak termasuk bunga dan pajak penghasilan.	- Pemegang saham - Pemegang obligasi - Pemerintah
<i>Net income to investor</i>	Sama dengan konsep net income enterprise, hanya dalam expenses telah tercakup pajak atau telah dikurangi pajak	- Pemegang saham - Pemegang obligasi
<i>Net income to shareholder</i>	Sama dengan konsep net income to investor, hanya dalam expenses telah tercakup beban bunga	- Pemegang saham biasa - Pemegang saham istimewa
<i>Net income to residual interest</i>	Sama dengan net income to shareholders tetapi setelah dikurangi dividen saham preferen	- Pemegang saham biasa

BAB I I

TEORI AKUNTANSI POSITIF

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Pengertian teori akuntansi positif**
- 2) Perkembangan teori akuntansi positif**
- 3) Perspektif efisiensi dan opportunistik**
- 4) Kontrak Pemilik/Manajer**
- 5) Kontrak Utang**
- 6) Biaya Politik**
- 7) Kritik terhadap teori akuntansi positif.**

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Memahami perbedaan teori akuntansi positif dan normatif.**
- Memahami teori akuntansi positif original.**
- Memahami peran akuntansi dalam meminimumkan biaya transaksi organisasi.**
- Memahami bagaimana akuntansi dapat digunakan mengurangi/mereduksi biaya yang berhubungan dengan berbagai proses politik.**
- Memahami bagaimana akuntansi tertentu yang didasarkan atas persetujuan dengan pihak tertentu seperti debtholders dan manajer dapat memberikan insentif untuk memanipulasi angka laba.**
- Memahami beberapa kritik terhadap teori akuntansi positif.**

I. PENGERTIAN

Sumbangan besar dalam perkembangan teori akuntansi positif terjadi dengan diterbitkannya buku *Positive Accounting Theory* (PAT) karangan Watts dan Zimmerman (1986). Berbagai tulisan mengenai teori akuntansi positif juga ditulis oleh Demski (1988) yang mengevaluasi PAT, Boland dan Gordon (1992), yang mengkritik PAT, serta penulis-penulis lain yang menguji hipotesis oportunistik dalam PAT.

Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif. Apabila teori normatif menunjukkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu berdasarkan premis, norma, dan standar, teori positif berusaha untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empirik (Godfrey et al 1997:217). Pejelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi keadaan sesungguhnya. Teori akuntansi positif berusaha menjawab antara lain pertanyaan berikut dari sudut pandang ekonomi.

- Apakah biaya dan mafaat metode akuntansi alternatif?
- Apakah baiya dan manfaat regulasi dan proses penentuan standar akuntansi?
- Apakah dampak laporan keuangan yang dipublikasi pada harga saham?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas dikembangkan teori akuntansi positif yang dapat dikelompokkan menjadi dua tahap yaitu:

1. Peneliti akuntansi dan perilaku pasar modal. Dalam tahap ini tidak dijelaskan tentang praktik akuntansi, tetapi dilakukan penelitian

terhadap hubungan pengumuman laba dengan reaksi harga saham. Untuk melakukan penelitian dalam tahap ini digunakan Hipotesis Pasar Efisien dan *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*.

2. Penelitian dalam tahap kedua dilakukn untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada alasan opportunistik dalam hal perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, atau pada alasan efisiensi yaitu metode akuntansi dipilih untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Alasan pertama yaitu perspektif oportunistik disebut *ex-post* yaitu pemilihan metode akuntansi dilakukan setelah diketahui faktanya. Alasan kedua yaitu perspektif efisiensi disebut *ex-ante* karena pemilihan metode akuntansi dilakukan sebelum faktanya diketahui. Penelitian dibidang ini menggunakan *agency theory* yang membahas tentang paradigma kontrol.

Beberapa pemikir akuntansi dari Rochester University dan Chicago University yang mengembangkan apa yang disebut dengan Positive Accounting Theory yang menjelaskan why accounting is, what it is, Why accountants do, what they do dan apa pengaruh dari fenomena ini terhadap manusia (Jansen, 1976).

Selama tahun 1970-an akuntansi bergerak kembali ke arah metodologi empirik dan positif. Pendekatan yang demikian disebut dengan pendekatan teori positif, yang berusaha menjelaskan (deskriptif) apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi. Pendekatan positif tidak memberikan anjuran mengenai bagaimana praktik akuntansi yang seharusnya tetapi berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi yang seharusnya tetapi berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi mencapai bentuk seperti keadaan sekarang.

Tujuan *positive accounting theory (PAT)* adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) praktik akuntansi. Penjelasan dan prediksi dalam PAT didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan (*contracting process or agency relationship*) antara manajer dan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor,

pengelola pasar modal dan lembaga pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1986). Penjelasan berarti memberikan alasan terhadap praktik yang diamati. Misalnya dalam PAT dijelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan biaya historis (*historical cost*) dan mengapa perusahaan tertentu mengubah teknik akuntansinya. Sedangkan prediksi terhadap praktik akuntansi berarti teori berusaha memprediksi fenomena yang belum diamati.

Dari uraian di atas dapat ditemukan bahwa pendekatan positif menekankan pentingnya penelitian empirik untuk menguji apakah teori akuntansi yang dikemukakan dalam literatur akuntansi dapat menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang dijalankan dan diramalkan sebab dari fenomena yang sedang terjadi dan akibatnya atau pengaruhnya di masa yang akan datang.

Dalam proses penyusunan standar akuntansi pendekatan teori positif tidak bertujuan untuk menyimpulkan seperti pada tujuan teori normative, teknik akuntansi mana yang baik atau buruk diacu dari kerangka konseptual. Teori akuntansi positif hanya berusaha menjawab mengapa para pelaku bisnis mengadopsi standar tertentu dan terus berusaha membuat prediksi tentang konsekuensi dari standar tersebut.

Dewasa ini perkembangan teori akuntansi positif utamanya menekankan perhatian pada penjelasan terhadap alasan-alasan praktik yang sedang berlangsung dan pada prediksi peran akuntansi dan informasi terkait dalam pengambilan keputusan individu, perusahaan dan pihak-pihak lainnya yang memberikan kontribusi terhadap beroperasinya pasar dan ekonomi. Teori akuntansi positif dapat digunakan untuk menunjukkan pengertian yang luas dan mencakup baik hal-hal yang formal maupun non formal. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) teori positif (*positive theories*) dalam artian formal mempunyai dua elemen utama yaitu asumsi dan hipotesis. Termasuk dalam asumsi adalah definisi hubungan antar variabel yang digunakan untuk memperoleh pemahaman masalah yang diteorikan sedangkan yang termasuk hipotesis adalah prediksinya. Selanjutnya dalam artian

non formal teori akuntansi positif dinyatakan dalam berbagai konsep seperti realisasi, model seperti metode penilaian dan pendekatan pendapatan dan beban. Pada dekade 1990-an teori positif merupakan aliran utama (*main stream*) akuntansi.

Asumsi yang mendasari penelitian empiris pada *positive accounting* adalah kesepakatan mengenai adanya pasar modal yang efisien (*efficient capital markets*). Asumsi lain adalah bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomik dan komoditi politik, dan setiap individu bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri secara rasional.

Seperangkat hipotesis disusun melalui pemikiran yang logis dan metodologi ilmiah secara deduktif maupun induktif dan diuji melalui penelitian ilmiah dan empiris. Apabila penelitian empiris dapat membuktikan validitas suatu teori maka dikatakan bahwa teori tersebut telah diversifikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori yang terdiri dari seperangkat hipotesis yang bersifat deskriptif sebagai hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah tertentu disebut teori positif.

2. PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI POSITIF

Ada dua tahapan pengembangan teori akuntansi positif antara lain:

1. Tahap awal serta kronologis yang di dalamnya termasuk riset-riset dalam akuntansi dan perilaku pasar modal.
2. Tahap kedua yang menekankan pada literatur yang menjelaskan dan memprediksi prakti-praktik lintas perusahaan yang berisi dua focus perspektif.

Tahap awal, Literatur mengenai tahap ini tidak menjelaskan praktik akuntansi tetapi menyelidiki atau meneliti hubungan antara pengumuman penghasilan akuntansi dan reaksi harga saham.

Penelitian-penelitian di sini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan metode biaya historis menyediakan informasi yang digunakan pasar modal dalam penilaian saham, tetapi pada waktu yang sama akuntansi tidak memonopoli seperangkat informasi yang digunakan untuk menilai saham tersebut.

Teori tentang ilmu ekonomi keuangan hipotesis pasar yang efisien atau *efficient markets hypothesis* (EHM) dan *capital asset pricing model* (CPAM) dijelaskan dalam literatur pada tahapan ini.

Konsep efisiensi pasar pertama kali dikemukakan oleh Fama (1965) yang mendeskripsikan bahwa pasar yang efisien terdiri atas: "Sejumlah pelaku pasar yang rasional yang selalu aktif mengejar laba maksimal, bersaing satu sama lain dalam memprediksi nilai pasar dari surat-surat berharga di masa mendatang, dan di mana informasi saat ini yang penting tersedia hampir secara bebas berguna bagi semua pelaku pasar."

Kemudian menurut Fama (1970) pasar dikatakan efisien bila harga pasar betul-betul mencerminkan semua informasi yang relevan.

Efficient market hypothesis pada prinsipnya membagi pasar modal menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Efisiensi bentuk lemah atau *weak form efficiency*.
- b. Efisiensi bentuk agak kuat atau *semi-strong form efficiency*.
- c. Efisiensi bentuk kuat atau *strong form efficiency*.

Pertama, *weak form efficiency*, mendasarkan pada asumsi bahwa harga saham saat ini adalah mencerminkan perubahan harga saham tahun lalu atau telah memasukkan informasi perdagangan dan harga saham pada waktu yang lalu. Hal ini juga bahwa harga spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi kurs spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi kurs spot di masa yang akan datang.

Kedua, *semi strong efficiency*, mendasar pada asumsi bahwa harga saham saat ini mencerminkan perubahan harga saham masa lalu dan informasi yang lain dipublikasikan yang tersedia secara umum. Dengan kata lain harga saham spot saat ini bukan hanya dipengaruhi

sejarah harga saham tetapi juga telah memasukkan semua informasi yang tersedia bagi umum.

Ketiga, strong form efficiency, mendasarkan pada asumsi bahwa harga saham mencerminkan semua informasi baik yang dipublikasikan maupun tidak. Hal ini berarti bahwa harga saham spot hari ini telah mencerminkan semua informasi yang kemungkinan dapat diketahui.

Tahap kedua, Perspektif pertama mencoba menjelaskan apakah terdapat asumsi bahwa suatu perusahaan dalam menggunakan pilihan-pilihan akuntansi tertentu (*particular accounting choices*) mempunyai alasan oportunistik, misalnya transfer kesejahteraan bagi manajer dari pihak lainnya (*claim holders*). Asumsi ini merupakan "*opportunistic perspective*" yang diberi tabel "*ex post*" karena mengangaap bahwa para manajer memilih kebijakan akuntansi tertentu setelah mengetahui kenyataan bahwa hal tersebut memaksimalkan manfaatnya bagi mereka.

Perspektif kedua adalah asumsi bahwa perusahaan menggunakan pilihan-pilihan akuntansi tertentu atau praktik tertentu karena alasan efisiensi. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan akuntansi diletakkan dalam table "*ex ante*" untuk mengurangi biaya kontraktual antara perusahaan dengan pihak lainnya (*claim holders*).

Teori pada tahap kedua ini berhubungan erat dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Karena manajer (*agent*) diangkat oleh pemegang saham (*principal*) dan bertindak atas delegasi wewenang dari principal maka idealnya mereka akan bertindak untuk yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham, tetapi dalam praktik sering konflik antara pemegang saham dan manajer. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seringkali manajer memiliki tujuan lain yang mungkin tidak sama atau bahkan bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Konflik kepentingan antara dua pihak (atau antar principal dan agen) tersebut sering disebut agency problem. Hubungan antara agen terjadi pada saat satu pihak yang disebut agen (*agent*) yang bertindak atas nama pemberi wewenang dan memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. *Agency problem* biasanya

terjadi antara manajer dan pemegang saham atau antara debit holders (kreditur) dan *stockholders* (pemegang saham). *Agency problem* ini memunculkan teori tersendiri dalam disiplin manajemen keuangan maupun akuntansi manajemen yang disebut dengan teori agen (*agency theory*).

Hingga saat ini pendekatan normative dan positif masih banyak digunakan walaupun pendekatan positif yang lebih mendominasi penelitian-penelitian di bidang akuntansi. Sehingga pendekatan positif juga disebut sebagai pendekatan mainstream. Pendekatan positif dalam penelitian akuntansi mempunyai ciri khas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis.

Perkembangan berikutnya ada pendekatan lain di luar pendekatan mainstream, yang disebut pendekatan alternative. Pendekatan ini mencoba meminjam berbagai metodologi ilmu pengetahuan sosial yang lain.

3. Teori Keagenan

Teori keagenan dapat dipandang sebagai satu versi dari *Game Theory* yang membuat model proses kontrak antara dua orang atau lebih. Scott (1997:233) menyatakan bahwa perusahaan memiliki banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kedua jenis kontrak ini sering kali dibuat berdasarkan angka laba bersih. Oleh karena itu, teori keagenan dapat mempunyai implikasi terhadap akuntansi.

Usaha agen (sebagai salah satu pihak dalam kontrak) tidak dapat diketahui oleh principalnya, tetapi hasilnya yang dapat diketahui bersama oleh dua pihak. Agar hasil itu dapat digunakan sebagai dasar kontrak, maka harus dipahami oleh kedua belah pihak. Implikasinya dalam akuntansi adalah apakah angka laba bersih diketahui oleh kedua

pihak itu. Apabila tidak, maka hasilnya (seperti harga saham) akan digunakan sebagai dasar kontrak.

Manajer mempunyai wewenang untuk mengatur sistem dan standar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan laba, sehingga manajer lebih memahami angka laba bersih perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, mungkin sekali pemilik perusahaan sebagai *principal* tidak bersedia menggunakan angka laba bersih sebagai dasar kontrak bonus dengan manajer. Oleh karena itu diperlukan kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan pemilik terhadap informasi laba bersih. Dalam akuntansi, auditing oleh auditor independen diandalkan mampu meningkatkan pengetahuan pemilik atas laba akuntansi. Dengan demikian kegiatan auditing tidak dapat ditiadakan.

Pengukuran akuntansi juga mempengaruhi diterimanya angka laba bersih sebagai dasar kontrak. Prinsipal akan lebih suka dengan metode pengukuran yang terkait dengan usaha manajer. Bila digunakan dasar harga perolehan maka angka laba bersih menunjukkan hasil usaha manajemen. Penggunaan harga pasar dalam pengukuran akuntansi, sebaiknya tidak terkait dengan usaha manajemen karena perubahan harga pasar terjadi diluar kemampuan manajemen. Dengan demikian, dasar kurs historis menurut teori keagenan akan lebih disukai dibandingkan dengan harga pasar untuk digunakan sebagai dasar kontrak.

Selain dasar pengukuran, penggunaan informasi lain diluar laba bersih dapat juga dikaitkan dengan usaha manajer, misalnya harga saham. Kombinasi antara angka laba bersih dan harga saham dapat meningkatkan keterkaitannya dengan usaha manajer, sehingga akan lebih diterima sebagai dasar kontrak. Bila digunakan kombinasi informasi seperti ini maka tampak bahwa informasi akuntansi bersaing dengan informasi lainnya dalam memotivasi manajer.

Teori entitas (*entity theory*) memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemilik dan krediturnya. Berdasarkan pandangan teori tersebut, manajemen terpisah dari pemilik perusahaan. Manajemen memperoleh kepercayaan dari pemilik untuk mengelola perusahaan, dan atas jasa yang diberikan, para manajer menerima kompensasi. Hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan merupakan paradigma hubungan prinsipal-agen, di mana pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan (secara formal dalam bentuk kontrak hubungan kerja) kepada manajemen (agen) yang memberikan jasa manajerialnya. Kompensasi merupakan nilai jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen.

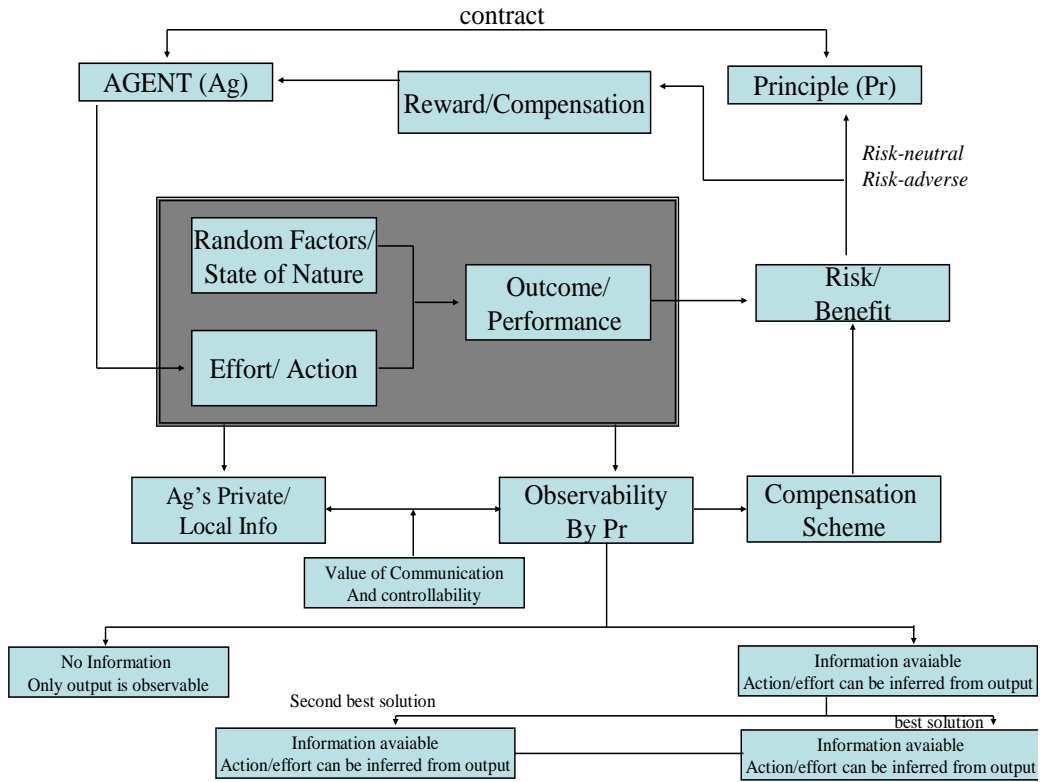
Teori hubungan keagenan menghendaki adanya delegasi wewenang (secara keseluruhan atau sebahagian) dari prinsipal kepada agen. Prinsipal melakukan monitoring terhadap kinerja agen melalui mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*). Program kompensasi manajemen umumnya diterapkan pada entitas yang menerapkan teori hubungan keagenan. Program kompensasi manajemen, oleh karena itu, dirancang dengan maksud untuk mendorong manajemen agar berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Program kompensasi secara formal mengikat para manajer untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja perusahaan umumnya diukur dengan angka laba atau harga saham perusahaan. Tujuan program kompensasi manajemen pada dasarnya adalah agar usaha memaksimalkan nilai perusahaan tidak dipandang oleh manajemen sebagai upaya untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan, melainkan juga untuk memenuhi kepentingan manajemen. Adanya program kompensasi manajemen diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agennya.

Teori tentang terpisahnya kepemilikan dengan pengendalian pengambilan keputusan akan memunculkan konflik keagenan antara

pemegang saham dengan manajer. Konflik ini tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazzard*) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Permasalahan keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer menimbulkan biaya ekuitas (*equity agency cost*). Terdapat tiga macam biaya keagenan yaitu:

1. Biaya *Monitoring*, biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk membatasi aktivitas agen yang berbeda kepentingan dengan prinsipal. Contoh: biaya audit, biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi.
2. Biaya *Bonding*, biaya ini dikeluarkan oleh agen untuk memberikan kepastian kepada prinsipal bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan investor. Pemegang saham hanya mengizinkan *bonding cost* terjadi jika biaya tersebut dapat mengurangi *monitoring cost*. Contoh: biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menyediakan laporan keuangan kepada principal.
3. *Residual Loss*, adalah kemakmuran dalam nilai mata uang yang turun sebagai akibat perbedaan kepentingan ini. Penurunan kemakmuran ini terjadi karena perbedaan antara keputusan agen dan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kemakmuran prinsipal



BAB 12

REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN (EFISIENSI PASAR)

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Tinjauan Riset Pasar Modal**
- 2) Kandungan Informasi laba**
- 3) Efisiensi Pasar**
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan hubungan informasi akuntansi dengan harga saham**
- Menjelaskan kandungan informasi akuntansi**
- Mengidentifikasi efisiensi pasar.**

I. TINJAUAN RISET PASAR MODAL

Ide dari pengujian pasar yang efisien dituangkan dalam suatu hipotesis yang disebut dengan hipotesis pasar efisien (HPE) atau *efficient market hypothesis* EMH. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis ini maka perlu dilakukan secara empiris untuk masing-masing bentuk efisiensi pasar.

Fama (1970) membagi pengujian efisiensi pasar menjadi tiga kategori yang dihubungkan dengan bentuk0bentuk efisiensi pasarnya sebagai berikut ini.

1. Pengujian-pengujian bentuk lemah (*weak-form test*), yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan.
2. Pengujian-pengujian bentuk setengah kuat (*semi-strong-form test*), yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan.
3. Pengujian-pengujian bentuk kuat (*strong-form test*), yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksi di harga sekuritas.

Diartikel selanjutnya Fama (1991) mengusulkan untuk merubah nama ketiga macam kategori pengujian bentuk efisiensi pasar tersebut. Nama-nama pengujian yang diusulkan adalah sebagai berikut ini.

1. Pengujian-pengujian efisiensi pasar bentuk lemah diganti menjadi pengujian-pengujian terhadap pendugaan return (*test for return predictability*).
2. Pengujian-pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat dirubah menjadi studi-studi peristiwa (*event studys*).

Pengujian-pengujian efisiensi pasar bentuk kuat diusulkan menjadi pengujian-pengujian terhadap informasi privat (*test for privat information*).

Sebelum tahun 1970 pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika HPE (Hipotesis Pasar Efisien) benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Oleh karena itu, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah melibatkan pertanyaan apakah informasi yang terkandung di harga-harga sekuritas masa lalu yang berurutan sudah secara penuh mencerminkan harga sekarang. Hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak (*random walk hypothesis*). Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak (*random walk*), maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah *random* atau acak yang independen. Ini berarti bahwa perubahan harga hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga kemarin atau hari-hari sebelumnya.

Setelah tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah tidak hanya difokuskan pada variabel return atau harga masa lalu untuk memprediksi return atau harga sekarang atau masa depan, tetapi juga melibatkan variabel-variabel lainnya. Variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi return atau harga sekuritas diantaranya adalah *dividen yield*, rasio P/E, suku bunga dan lain sebagainya.

Pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat dilakukan dengan cara pengujian statistik atau dengan cara pengujian dengan menggunakan aturan-aturan perdagangan teknis (*technical trading rules*).

Pertama, Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas. Jika hasil menunjukkan independensi harga-harga, maka implikasinya adalah investor tidak dapat menggunakan nilai-nilai masa laludari variabel-variabel penduga (seperti misalnya harga, return, dividen yield, rasio, P/E atau suku bunga) untuk memprediksi harga atau return sekarang. Untuk pasar yang efisien secara bentuk lemah, perubahan-perubahan harga sekuritas adalah independent terhadap nilai masa lalu variabel-variabel penduga.

Pengujian statistik yang banyak dilakukan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau regresi linear dan pengujian run (*run test*).

Pengujian runtun telah dilakukan oleh Fama (1965) dan juga Ball dan Watts (1972). Fama menguji runtun perubahan harga saham, sedang Ball dan Watts menguji runtun perubahan laba akuntansi.

Pola lain yang mungkin dapat terjadi jika pasar tidak efisien bentuk lemah adalah pola siklikal (*Cyclical*). Misalnya French (1980) menunjukkan bahwa return pada hari senin lebih rendah dibandingkan dengan return-return di hari lainnya dalam satu minggu. Hasil dari French menunjukkan bahwa return sekuritas mempunyai siklikal return terendah dihari senin.

Gibbons dan Hess (1981) juga menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh French, yaitu return hari senin lebih rendah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Return yang mereka gunakan adalah *raw return*, bukan *abnormal return*. Gibbon dan Hess selanjutnya menggunakan *abnormal return* yang dihitung menggunakan *risk-adjusted return* dan mereka menemukan bahwa efek hari senin tidak signifikan.

Efek lain yang diteliti adalah efek Januari. Rozeff dan Kinney (1976) menunjukkan bahwa return sekuritas pada bulan Januari secara signifikan lebih besar dari return-return bulan-bulan yang lainnya. Return yang mereka gunakan ini adalah *raw return*. Ketika mereka menggunakan abnormal return yang didasarkan pada model *market-based pricing*, efek Januari menjadi hilang.

Kedua, Pengujian Secara Aturan Perdagangan Teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Pola yang terjadi dapat berupa bentuk linier atau bentuk *cyclical*. Jika memang pola seperti ini dapat terjadi, maka investor dapat menggunakannya sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Salah satu strategi perdagangan yang

memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan (*filter rule*).

Strategi aturan saringan ini merupakan strategi waktu (*timing strategy*), yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan menjual sekuritas jika harga sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harganya turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Harga sekuritas yang berada diantara dua batas ini dianggap masih merupakan harga sekuritas yang wajar (*fair price*) yang sekuritasnya belum perlu dibeli atau dijual.

2. KANDUNGAN INFORMASI LABA

Studi peristiwa (*event study*) merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau *event* yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. *Event study* dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (*information content*) dari suatu pengumuman. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan.

Reaksi dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan *abnormal return*. Jika digunakan *abnormal return*, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan *abnormal return* kepada pasar.

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi (*informationally efficient market*) bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat (*quickly*) untuk menyerap *abnormal return* untuk menunjuk harga keseimbangan yang baru.

3. EFISIENSI PASAR

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar efisien. Dengan demikian ada hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan ekuilibrium dengan konsep pasar efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar memperoleh informasi untuk menuju ke posisi ekuilibrium yang baru. Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (*informationally efficient market*) yaitu bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi yang tersedia.

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (*informationally efficient market*). Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan (*decisionally efficient market*).

3.1 Efisiensi Pasar Secara Informasi

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut.

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (*weak form*).
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh (*fully reflect*) informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.
2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (*semistrong form*).
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang dipublikasikan (*all publicly available information*) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama.
3. Efisiensi pasar bentuk kuat (*strong form*).
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal (*abnormal return*) karena mempunyai informasi privat.

Hubungan diantara ketiganya mengimplikasikan bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat.

3.2 Efisiensi Pasar Secara Keputusan

Efisiensi pasar secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah, jika efisiensi pasar secara informasi (*informationlly efficient market*) hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan (*decisionally efficient market*) mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan lebih banyak factor dalam menentukan pasar yang efisien, suatu pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. Dengan demikian efisiensi pasar secara keputusan dapat ditambahkan dipembagian efisiensi pasar.

Untuk informasi yang masih perlu diolah lebih lanjut, ketersediaan informasi saja tidak menjamin pasar akan efisien. Sebagai misalnya adalah informasi tentang pengumuman merger oleh suatu perusahaan emiten. Pada waktu informasi ini diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, belum tentu harga dari sekuritas perusahaan bersangkutan akan mencerminkan informasi tersebut dengan penuh. Alasannya adalah pelaku pasar harus menginterpretasikan dan menganalisis informasi merger tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. Tidak selamanya suatu pengumuman merger merupakan kabar baik atau kabar buruk. Lain halnya dengan pengumuman laba perusahaan yang dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai kabar baik atau kabar buruk. Jika laba

meningkat dari laba periode sebelumnya, maka dapat diartikan sebagai kabar baik, dan sebaliknya jika laba menurun dapat diartikan sebagai kabar buruk. Interpretasi pengumuman merger sebagai kabar baik atau kabar buruk membutuhkan analisis yang mendalam untuk memperkirakan besarnya dampak dari informasi tersebut ke harga sekuritas bersangkutan. Untuk mengolah informasi semacam ini dengan benar pelaku pasar harus canggih (*sophisticated*). Jika hanya sebegaiian saja pelaku pasar yang canggih, maka kelompok ini dapat menikmati keuntungan yang tidak normal disebabkan mereka dapat menginterpretasikan informasi dengan lebih benar dibandingkan dengan kelompok pelaku pasar yang kurang atau tidak canggih (*naïve*). Walaupun informasi sudah tersedia untuk semua pelaku pasar, tetapi pasar yang tidak efisien dapat saja terjadi, disebabkan karena ada sekelompok pelaku pasar yang dapat yang dapat memperoleh keuntungan yang tidak normal karena kecanggihannya. Dengan demikian pembagian efisiensi pasar berdasarkan ketersediaan informasi saja tidaklah cukup. Efisiensi pasar juga perlu dilihat berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk pengambilan keputusan. Penulis menyebut informasi pasar jika semua informasi tersedia dan semua pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan canggih sebagai efisiensi pasar secara keputusan (*decisionally efficient market*).

Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Sebagai contoh misalnya adalah pengumuman pembayaran dividen yang naik dai nilai dividen periode sebelumnya dan informasi tersedia untuk semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Umumnya perusahaan yang emiten menggunakan pembayaran dividen sebagai sinyal pelaku pasar. Dengan meningkatkan nilai dividen yang dibayar, perusahaan emiten mencoba memberi sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan, sehingga mampu meningkatkan pembayaran dividen. Sebaliknya jika perusahaan memotong nilai dividen akan dianggap sebagai sinyal buruk karena akan dianggap sebagai kekurangan likuiditas. Pelaku pasar yang kurang canggih akan menerima informasi peningkatan dividen ini begitu saja sebagai sinyal yang baik tanpa menganalisisnya

lebih lanjut dan harga sekuritas akan mencerminkan informasi kabar baik ini secara penuh. Secara definisi, ini pasar sudah efisien bentuk setengah kuat secara informasi.

Sebaliknya pelaku pasar yang canggih tidak mudah dibodohi (*fooled*) oleh emiten. Pelaku pasar yang canggih akan menganalisis informasi ini lebih lanjut untuk menentukan apakah benar ini merupakan sinyal yang valid dan dapat dipercaya. Jika ternyata sinyal ini merupakan sinyal yang tidak valid (ternyata perusahaan tidak mempunyai prospek yang baik) dan karena investor tidak canggih, reaksi mereka yang positif terhadap informasi pembayaran dividen yang meningkat tersebut merupakan reaksi yang tidak benar, sehingga dapat dikatakan pasar belum efisien secara keputusan, karena mereka mengambil keputusan yang salah. Jika pasar efisien secara keputusan, maka pelaku pasar akan dapat mengetahui bahwa sinyal tersebut adalah sinyal yang tidak benar. Akibatnya mereka akan menganggap informasi tersebut bukan sebagai kabar baik, tetapi mungkin sebaliknya sebagai kabar buruk, karena peningkatan pembayaran dividen untuk perusahaan yang tidak mempunyai prospek yang baik akan menyebabkan kesulitan likuiditas. Oleh karena itu jika pelaku pasar canggih dan mereka mengerti bahwa sinyal yang diberikan merupakan sinyal yang salah, mereka akan bereaksi sebaliknya yang tercermin di dalam harga sekuritas emiten secara negatif terhadap informasi tersebut. Dengan demikian untuk mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan tidaklah cukup hanya melihat efisien secara informasi, tetapi juga harus mengetahui apakah keputusan yang dilakukan oleh pelaku pasar sudah benar dan mereka tidak dibodohi oleh pasar.

4. ALASAN PASAR YANG EFISIEN DAN YANG TIDAK EFISIEN

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar yang menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut ini.

1. Investor adalah penerima harga (*price takers*) yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan *demand* dan *supply*. Hal seperti ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar institusi-institusi dan individual-individual rasional yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang baik untuk digunakan menganalisis, menilai dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian sekuritas bersangkutan.
2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Umumnya pelaku pasar menerima informasi lewat radio, Koran atau media massa lainnya, sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. Untuk pasar yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relatif murah untuk diperoleh publik. Umumnya pelaku pasar dapat memperoleh informasi tersebut melalui surat kabar atau majalah bisnis dengan hanya membeli surat kabar atau majalah tersebut. Bahkan informasi tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh pelaku pasar dengan mendengarkan lewat radio atau menjadi pemirsa televisi.
3. informasi dihasilkan secara acak (*random*) dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya *random* satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara *random* mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru.
4. investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih (*sophisticated*) yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik.

Sebaliknya jika kondisi-kondisi di atas tidak dipenuhi, kemungkinan pasar tidak efisien dapat terjadi. Dengan demikian, pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini terjadi.

1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas.
2. harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat pada waktunya, sebagian menerima informasi dengan terlambat dan sisanya mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Kemungkinan lain dari kondisi ini adalah pemilik informasi memang tidak berniat untuk menyebarkan informasinya untuk kepentingan mereka sendiri. Kondisi seperti ini yaitu sebagai pelaku pasar mempunyai informasi dan sebagian tidak mempunyainya disebut dengan informasi yang tidak simetris (*information asymmetric*). Mereka yang mempunyai akses privat terhadap informasi dan menggunakannya untuk bertransaksi disebut dengan *insider trader*. Perdagangan sekuritas yang menggunakan informasi privat ini disebut dengan *insider trading* yang merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena merugikan pasar lainnya yang tidak mendapatkan informasi bersangkutan. *Insider Trader* biasanya orang-orang yang mempunyai akses privat ke sistem informasi. Seperti misalnya manajer-manajer di dalam perusahaan emiten yang lebih tahu persis tentang informasi perusahaannya dibandingkan dengan orang lain yang di luar perusahaan.
3. informasi yang disebarakan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar.

BAB 13

MANAJEMEN LABA (*EARNINGS MANAGEMENT*)

Dalam bab ini akan dibahas:

- 1) Pengertian manajemen laba**
- 2) Motif manajemen melakukan manajemen laba**
- 3) Cara melakukan manajemen laba**
- 4) Reaksi pasar saham terhadap manajemen laba**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian manajemen laba**
- Memahami motif manajer melakukan manajemen laba**
- Memahami cara melakukan manajemen laba (*earning management*)**
- Memahami reaksi pasar saham terhadap manajemen laba**

I. PENGERTIAN MANAJEMEN LABA

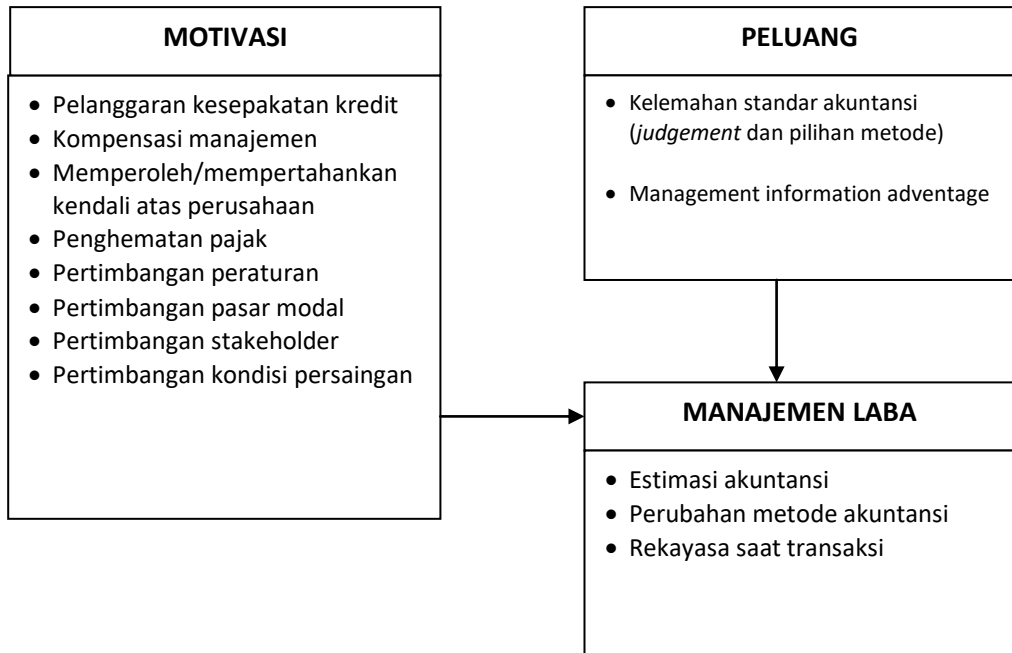
Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Manajemen laba merupakan salah satu indikator yang dapat mengurangi kredibilitas pelaporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Informasi akuntansi berguna kepada para investor dan kreditor (juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan) untuk menilai suatu perusahaan dan untuk mengambil keputusan investasi. Informasi akuntansi yang tidak valid dapat mengakibatkan investor salah membuat keputusan dan salah menanamkan dana.

Di Amerika, masalah manajemen laba telah lama menarik perhatian regulator maupun para peneliti. Para peneliti sibuk memikirkan apa yang mempengaruhi para manajer untuk melakukan manajemen laba dan bagaimana sikap investor terhadap manajemen laba. Sedangkan regulator sibuk berfikir bagaimana mereka harus menangani masalah tersebut (Ketz, 1999).

2. PELUANG DAN TEKNIK MANAJEMEN LABA



Kesempatan bagi manajemen untuk mendistorsi laba timbul karena:

1. Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Worthy (1984), fleksibilitas dalam menghitung angka laba disebabkan oleh:
 - a. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, dan
 - b. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan suatu obyektivitas dalam menyusun estimasi.
2. Asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar (Helaly dan Palepu, 1993, 2; Eisenhardt, 1989, 58) Manajer relatif memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak luar

(termasuk investor). Mustahil bagi pihak luar untuk dapat mengawasi semua perilaku dan semua keputusan manajer secara detail.

Teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan.

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain, estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu penyusutan (depresiasi) aktiva tetap atau amortisasi aktiva tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2. Mengubah Metode Akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode angka tahun ke metode garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai menipu sebagai keputusan operasional (Fisher dan Rozenzweig, 1995). Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/ menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat/ menunda pengeluaran promosi sampai ke periode berikutnya, kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/ menunda pengiriman tagihan sampai ke periode akuntansi berikutnya, mempercepat/ menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi, dan lain-lain. Perusahaan yang mencatat persediaan dengan menggunakan LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan (Frankel dan Treservant, 1994).

3. PEMICU MANAJEMEN LABA

Informasi akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Watts dan Zimmerman (1990) menyebut pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut sebagai *contracting parties*. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut mencakup manajer, pemilik (pemegang saham), investor, pesaing, pemerintah, dan pemasok. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak tersebut dan kelemahan inheren akuntansi yang melibatkan judgement. Faktor-faktor pemicu manajemen laba dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemakaian informasi akuntansi:

- Dalam kontrak antara manajer dan pemilik (melalui kompensasi)
- Sebagai sumber informasi bagi investor di pasar modal
- Dalam kontrak utang
- Dalam penetapan pajak oleh pemerintah, penentuan proteksi terhadap produk, penentuan denda dalam suatu kasus, dan lain sebagainya.
- Oleh pesaing, seperti untuk penentuan keputusan ambil alih ataupun untuk penetapan strategi persaingan.
- Oleh karyawan untuk meminta kenaikan upah, dan lain sebagainya.

Pertama, Kompensasi manajemen dikaitkan dengan laba akuntansi. Helay (1985) membuktikan bahwa kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi manajer untuk memilih prosedur serta metode akuntansi yang dapat memaksimalkan besarnya bonus yang akan diperoleh. Laba suatu periode akuntansi yang lebih rendah dibandingkan dengan target laba merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam periode

tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya. Jika bonus yang dapat diterima manajer memiliki batas atas, maka laba suatu periode yang lebih tinggi dari batas atas target laba untuk mendapatkan bonus akan merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang harus dilaporkan dalam periode berikutnya. *Bonus plan hypothesis* ini melahirkan istilah *big bath*-rekayasa laba untuk memperbesar kerugian dalam suatu periode untuk menjamin terciptanya laba dalam periode berikutnya.

Kedua, Pertimbangan Pasar Modal. Sebahagian perusahaan yang *go public* mencoba menyusun laporan keuangan dengan agresif untuk mempengaruhi penerimaan kas dari penawara perdana. Manajer memang dapat menggunakan angka akuntansi untuk mempengaruhi persepsi para investor.

Hipotesis perataan laba (*income smoothing*) juga lahir karena pertimbangan pasar modal. Perataan laba didasari oleh keyakinan bahwa angka laba yang stabil dari periode ke periode akan mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan (Wolk dan Tearney, 1997, 320). Hipotesis perataan laba menyatakan bahwa perusahaan dengan laba yang sangat tinggi akan menurunkan laba.

Ketiga, Kesepakatan Kontrak Utang. Salah satu persyaratan pemeberian kredit sering mencakup kesediaan debitur untuk mempertahankan tingkat rasio modal kerja minimal, rasio debt to equity minimal, maksimum pemberian dividen kepada pemegang saham, atau batasan-batasan lain yang umumnya dikaitkan dengan data akuntansi perusahaan. Pelanggaran terhadap batasan-batasan yang termuat dalam kontrak kredit ini merupakan hal yang menakutkan bagi

manajemen. Oleh karena itu, kondisi keuangan yang menyebabkan perusahaan yang berada pada posisi nyaris melanggar perjanjian kredit dapat menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka meminimalkan probabilitas pelanggaran perjanjian kredit.

Keempat, Pertimbangan Pajak. Pada bulan september 1986, TRA diplikasikan dan efektif berlaku 1 juli 1987 yang mengakibatkan pajak perusahaan berkurang dari 46% menjadi 34%. Penundaan laporan laba sebesar \$1 dari satu periode sebelum TRA efektif ke satu periode setelah TRA efektif dapat menghemat pajak sebesar \$0.12. Penghematan ini dapat diartikan sebagai tambahan laba sebesar 22% $[0.12/(1-0.46)]$ yang diperoleh hanya dengan menunda pelaporan laba satu periode fiskal.

Frankel dan Trezervant (1994) membuktikan bahwa reduksi tingkat pajak tersebut merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi. Manajer perusahaan yang menerapkan asumsi penilaian persediaan dengan metode LIFO melakukan pembelian persediaan ekstra satu tahun sebelum berlakunya TRA. Dengan metode LIFO, pembelian pada akhir tahun akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan pada tahun berjalan. Dalam kondisi normal (cenderung terjadi kenaikan harga), pembelian persediaan ekstra pada akhir tahun akan memperbesar nilai harga pokok penjualan dan menurunkan laba. Semakin rendah laba, semakin rendah pajak yang harus dibayar.

Penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer untuk mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan. Di Amerika, perusahaan yang mengalami net operating loss diijinkan untuk mengkompensasi rugi operasi tersebut dengan laba 3 tahun

sebelumnya. Dampak dari kompensasi rugi terhadap laba adalah restitusi pajak.

Kelima, Pertimbangan Peraturan yang Berlaku. Perusahaan yang menjadi target investigasi praktek monopoli atau pelanggaran undang-undang *antitrust* berusaha menurunkan laba dengan melakukan manipulasi akrual selama masa investigasi berlangsung. Laba operasi dengan sengaja diturunkan dengan menaikkan akrual dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi denda akibat tuduhan pelanggaran undang-undang *antitrust*.

Dalam industri perbankan, kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*) terbukti mempengaruhi kebijakan bank dalam menentukan *loan loss provision* terutama sebelum tahun 1990. Namun sejak 1990, barangkali karena pertimbangan manajemen laba tersebut, *loan loss provision* yang dapat diperhitungkan sebagai modal dibatasi. Jadi sejak tahun 1990, rekayasa *loan loss provision* tidak dapat dipergunakan lagi untuk menaikkan rasio *capital adequacy*.

Keenam, Memperoleh atau mempertahankan kendali atas perusahaan. Manajer yang bersifat oportunistik akan memilih akuntansi yang agresif (yang dapat memperbesar tingkat laba) jika penilaian keberhasilan seorang manajer dalam memimpin suatu perusahaan didasarkan atas informasi akuntansi sebagai proksi kinerja perusahaan. Perusahaan yang menjadi target dalam suatu *take over* cenderung memilih metode penyusutan, dan metode pencatatan penilaian persediaan yang dapat meningkatkan laba akuntansi. Sikap oportunis manajemen dalam kasus ambil alih perusahaan, sekalipun alasan utama

pemilihan metode akuntansi didasarkan atas pertimbangan efisiensi atau pertimbangan memaksimalkan nilai perusahaan.

Ketujuh, Pertimbangan perusahaan pesaing. Persaingan dalam suatu industri juga dapat mempengaruhi pilihan metode akuntansi. Sudut pandang bahwa pelaporan kondisi usaha per segmen usaha merupakan informasi yang dapat menguntungkan pesaing akan mempengaruhi kebijakan pengungkapan oleh suatu perusahaan. Contoh lain, dalam rangka mengurangi daya tarik suatu industri atau untuk mencegah masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri, perusahaan dalam industri yang bersangkutan bisa jadi memilih metode akuntansi untuk mengurangi tingkat laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Kedelapan, Pertimbangan Karyawan. Di dalam beberapa negara, seperti Jerman, laba perusahaan yang tinggi dapat dijadikan dasar bagi persatuan karyawan untuk menuntut kenaikan gaji atau upah.

4. DAMPAK MANAJEMEN LABA TERHADAP ALOKASI SUMBER DAYA

Manajemen laba sulit dideteksi. Apabila pihak eksternal tidak dapat menyadari adanya manajemen laba, maka laba hasil rekayasa tersebut akan dapat mengakibatkan distorsi dalam pembuatan keputusan. Misalnya, manajer yang seharusnya hanya menerima bonus sejumlah x rupiah, akhirnya menerima bonus sebesar $x + e$ rupiah, karena laba yang dijadikan sebagai dasar pemberian bonus memberikan informasi yang tidak benar. Berikutnya, rekayasa laba dalam IPO, dapat

menyebabkan investor salah menanamkan dana. Manajemen laba dapat mengganggu efisiensi arus dana antara pihak-pihak dalam perekonomian.

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi memberikan dampak yang permanen terhadap laba. Contoh, ketika IBM mengubah metode penyusutannya dari metode akselerasi menjadi metode garis lurus, laba IBM mengalami peningkatan sebesar \$375 juta atau 0.37\$ per lembar saham. Sekalipun metode akuntansi mempengaruhi laba secara permanen, namun perubahan metode akuntansi juga mudah dikenali oleh investor, karena perubahan metode akuntansi harus diungkapkan kepada investor melalui suplemen laporan keuangan.

Peluang bagi manajemen untuk menentukan periode depresiasi secara subjektif memungkinkan aktiva yang sama didepresiasi dalam kurun waktu yang berbeda. Padahal, perbedaan estimasi umur ekonomis suatu aktiva akan menentukan nilai laba dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh, di Amerika, Delta Air Lines mengestimasi umur ekonomis pesawatnya selama 15 tahun dengan nilai residu 10%, sedangkan pesawat Pan Am - yang serupa dengan pesawat Delta Air Lines - diestimasi selama 25 tahun dengan nilai residu 15%. Estimasi umur ekonomis yang lebih panjang dapat dibenarkan jika pesawat tersebut dirawat dengan baik. Dari sudut peneliti, perbedaan estimasi umur ekonomis tidak berdampak kepada *cash flow* perusahaan., yang berarti perbedaan estimasi umur ekonomis tidak dapat mengelabui investor sekalipun perbedaan estimasi tersebut mempengaruhi angka laba.

Berkaitan dengan efek negatif manajemen laba, bahwa manajemen laba tidak hanya merugikan investor, namun dapat juga berbalik merugikan manajemen. Apabila investor sampai mengetahui

bahwa informasi yang disajikan oleh manajemen itu tidak benar, maka harga saham yang *overvalued* bisa menjadi *undervalued*. Harga saham yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya merugikan manajemen, karena mempertinggi biaya manajemen untuk memperoleh tambahan dana dari pasar modal.

5. TANGGUNG JAWAB MANAJER, AUDITOR, DAN REGULATOR TERHADAP MANAJEMEN LABA

Sebahagian orang menganggap bahwa rekayasa untuk meningkatkan laba merupakan kesalahan, namun rekayasa untuk mengurangi laba bukanlah kesalahan. Potensi rekayasa laba untuk mendistorsi aliran dana merupakan alasan yang cukup bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan – manajer, auditor, akademisi dan regulator – untuk peduli pada manajemen laba. Manajer dan internal auditor merupakan pihak pertama yang paling sadar apakah suatu pilihan kebijakan akuntansi dalam suatu keputusan bisnis merupakan bagian dari rekayasa laba atau tidak. Mereka perlu mempertimbangkan dampak manajemen laba kepada semua stakeholder agar keputusan yang akan mereka buat adalah keputusan yang terbaik bagi semua pihak.

Sebenarnya seorang manajer – tidak harus manajer tersebut memiliki standar etika yang tinggi – yang sadar bahwa investor itu cukup rasional, tidak akan berminat untuk melakukan rekayasa laba.

Akuntan publik – sebagai auditor eksternal, yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal – sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Namun, harus kita sadari adanya keterbatasan auditor dalam meminimalkan rekayasa laba yang mendistorsi informasi dalam laporan keuangan. Auditor relatif memiliki *information disadvantage*

dibandingkan dengan manajemen. Selain itu, tidak ada cara yang pasti yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu estimasi, misalnya estimasi masa manfaat suatu aktiva, - yang merupakan salah satu peluang untuk manajemen laba - benar ataukah salah, karena yang disebut estimasi itu pasti melibatkan *judgement*. Kebenaran estimasi hanya akan diketahui dimasa yang akan datang. Padahal standar akuntansi yang berlaku menuntut estimasi itu disusun pada saat ini. Auditor dan manajemen tidak memiliki kesepakatan mengenai estimasi yang paling tepat. Bahkan antar auditor sendiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai ketepatan suatu estimasi. Jadi, sulit bagi auditor untuk meminimalkan rekayasa laba dalam bentuk pemanfaatan peluang untuk melakukan estimasi atau dalam bentuk pemanfaatan peluang mengubah metode akuntansi.

Keperdulian akademisi terhadap praktek manajemen laba dapat diwujudkan dengan mengevaluasi lebih dalam praktik yang terjadi dalam dunia usaha melalui penelitian. Di Indonesia, praktik manajemen laba belum banyak dievaluasi. Hal yang menjadi tanggungjawab akademisi berkaitan dengan praktik manajemen laba adalah sejauh ini, para peneliti masih mengalami kesulitan untuk menentukan bagian laba yang merupakan hasil rekayasa.

Peranan regulator dalam menghadapi praktik manajemen laba dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif adalah tindakan regulator untuk meminimalkan kemungkinan manajer melakukan praktik manajemen laba, misalnya dengan cara meningkatkan kewajiban pengungkapan informasi (*disclosure*) yang berkaitan dengan akrual perusahaan. Di Amerika, investor terbukti melihat manajemen laba yang dilakukan oleh Bank dan perusahaan asuransi.

Tindakan kuratif dapat diwujudkan dengan cara pemberian sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan praktik manajemen laba. Revisi peraturan akuntansi yang saat ini ada tidak akan dapat menyelesaikan masalah manajemen laba. Yang perlu dilakukan oleh SEC adalah memaksa perusahaan publik untuk menaati peraturan yang ada. Sanksi terhadap pelaku manajemen laba dan publikasi tindakan negatif mereka akan lebih berdampak dibandingkan dengan diskusi untuk menyempurnakan peraturan yang berlaku.

6. CARA MELAKUKAN MANAJEMEN LABA

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manajer dalam mempraktekkan manajemen laba yaitu:

1. Income Smoothing (Perataan Laba)

Perataan laba sebagai suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas aliran angka laba yang dilaporkan relatif terhadap aliran yang merupakan target manajemen dengan memanipulasi variabel artifisial (akuntansi) atau variabel riil (transaksional). Perataan laba juga sebagai tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi dalam pelaporan laba bersih perusahaan.

Manajemen termotivasi untuk melakukan perataan laba dengan berbagai alasan antara lain: untuk tujuan pajak, kompensasi atau bonus, dan meningkatkan persepsi pihak eksternal mengenai kinerja manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Brayshaw dan Eldin (1999) mengatakan ada dua alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba;

1. Skema kompensasi manajemen biasanya dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang digambarkan melalui laba yang dilaporkan. Oleh sebab itu variabilitas dalam laba ini akan mempengaruhi manajemen secara langsung melalui kompensasinya.
2. Ancaman pemindahan atau mutasi manajemen, variasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk memindahkan manajemen, seperti penggabungan manajemen, perputaran manajemen, atau perpindahan manajemen secara langsung.

Jenis Perataan Laba

Perataan laba dapat dibagi atas dua jenis yaitu: (1) *naturally smooth* dan (2) *intentionally smooth*. Sedangkan *intentionally smooth* terbagi atas *artificial smooth* dan *real smooth*. *Naturally Smooth* (perataan laba yang alami) secara sederhana menyatakan bahwa sifat dari proses menghasilkan laba itu sendiri yang menimbulkan aliran laba yang rata.

Real Smoothing merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengendalikan kejadian ekonomi tertentu. *Real Smoothing* menggambarkan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pengaruh perataannya terhadap laba. *Artificial smoothing* berarti prosedur akuntansi yang diimplementasikan untuk memindahkan biaya atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lain.

2. Taking a bath

Perilaku *taking a bath* terjadi selama *organizational stress* atau reorganisasi termasuk penempatan seorang CEO baru. Apabila

suatu perusahaan harus melaporkan suatu kerugian, maka manajemen merasa lebih baik atau sekaligus melaporkan kerugian yang besar.

3. Income minimization,

Merupakan pola manajemen laba yang hampir sama dengan *taking a bath* tetapi kurang ekstrim. Pola ini dipilih untuk menghindari pengawasan perusahaan secara politik ketika perusahaan dalam periode profitabilitas yang tinggi.

4. Income maximization.

Manajemen akan menggunakan metode ini apabila manajemen ingin mendapatkan bonus, sehingga cenderung melakukan maksimalisasi laba.